

KASIYARNO

**BUDAYA HEGEMONI AMERIKA
SERIKAT**
Pasca Perang Dingin

Antara Mitos dan Ilusi

Ahmad Dahlan University Press
YOGYAKARTA

2015

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KASIYARNO

**BUDAYA HEGEMONI AMERIKA
SERIKAT**
Pasca Perang Dingin

Antara Mitos dan Ilusi

Ahmad Dahlan University Press

2015

BUDAYA HEGEMONI AMERIKA SERIKAT
Pasca Perang Dingin
Antara Mitos dan Ilusi

Oleh: Kasiyarno
Penerbit Ahmad Dahlan University Press
Jalan Kapas no 9 Semaki Umbulharjo Yogyakarta 55166
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Ahmad Dahlan University Press

Hak cipta berada di tangan penulis

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

KASIYARNO,

Budaya Hegemoni Amerika Serikat Pasca Perang Dingin: Antara Mitos dan Ilusi / oleh Kasiyarno ;
–Yogyakarta: Ahmad Dahlan University Press, 2015

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Singkatan

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Arti Penting Topik

Kerangka Teori dan Pendekatan

1. Pendekatan Interdisipliner

2. Pendekatan Kajian Budaya hegemonik

3. Perlawanan (resistensi) terhadap Budaya Hegemonik Amerika

4. Pendekatan Studi Kawasan

5. Teori hegemoni dalam American Studies

6. Teori Hegemoni menurut Antonio Gramsci

Keterkaitan antar Teori

Metode Pengumpulan Data

Metode Analisis Data

II. Budaya Hegemonik Amerika Serikat: Mimpi dan Mitos

Pengertian Hegemoni

American Dream

Mimpi dan Jiwa Bangsa Amerika

Ilusi di Miami

Ilusi *Superhero*

Mitos Amerika

Akar Budaya Hegemonik Amerika Serikat

III. Power

Pengertian Power

Cara Kerja Power

Dimensi-dimensi Power

Sumber-sumber Power

Bentuk-bentuk Power

Power dalam Tatanan Global

Strategi Menghadapi Great Power

IV. Persaingan Global dalam Studi Kawasan Pasca Perang Dingin

Pemicu Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin

Persaingan Multi Kawasan antara AS-Eropa

Persaingan Kawasan di Asia Tenggara

V. Karakter Agresif dalam Budaya Hegemonik AS

Eksepsionalisme Amerika

Semangat AS untuk berperang

Manajemen Kecemasan Global

VI. Kredo Amerika Serikat

Brand America: Semangat Kebebasan

Neo Konservatisme

Hak Asasi Manusia

VII. Globalisasi dan Budaya Hegemonik Amerika Serikat

1. Globalisasi Budaya

Hollywood: *The Hamburger Western*

- Hegemoni Bahasa
 - 2. Globalisasi Ekonomi
 - Konsensus Washington
 - Greenback*: Dolarisasi sebagai Alat Hegemoni
 - McDonaldization
 - Skenario Penyelamatan Krisis Asia tahun 1997
 - Penambahan Jumlah Anggota WTO
 - Kebijakan Ekonomi Clinton
 - Pengambilalihan APEC
 - 3. Globalisasi Politik
 - Tata Dunia Baru
 - Penolakan terhadap Myanmar ke dalam ASEAN
 - 4. Globalisasi Pendidikan
 - VIII. Imperialisme Budaya Amerika Serikat
 - Imperialisme Budaya
 - Amerikanisasi sebagai Strategi dan Tujuan Hegemoni Amerika Serikat
 - IX. Pengendalian Informasi Global
 - Strategi Penyebaran Informasi pasca Perang Dingin
 - Penyebaran Ide *Good Governance*
 - Bantuan Demokrasi
 - Penyebaran Ide "Rogue States"
 - Penyebaran Ide Negara Gagal: "Kartu Pos dari Neraka"
 - X. Karakter Budaya Hegemoni Amerika Serikat
 - XI. Perlawanan terhadap Budaya Hegemonik Amerika
 - Sentimen Anti-Amerika
 - Resistensi terhadap Modernisasi
 - Resistensi terhadap Neo Liberal
 - Resistensi terhadap Globalisasi
 - Resistensi terhadap Imperialisme Budaya
 - XII. EPILOG:
 - Kontinuitas Sifat dan Karakter Budaya Hegemonik AS Pasca Perang Dingin
- BIBLIOGRAFI

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah swt akhirnya buku ini berhasil diselesaikan dan sampai ke tangan pembaca sekalian. Sesungguhnya telah lama niat membuat buku ada di benak penulis, akan tetapi mengingat kesibukan selaku pimpinan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekaligus Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Yogyakarta, buku ini sempat tersendat-sendat pengerjaannya.

Bahan utama buku ini adalah disertasi penulis saat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di FIB (Fak. Ilmu Budaya) Jurusan Ilmu Pengkajian Amerika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ternyata tidak mudah merubah format penulisan disertasi menjadi sebuah buku yang enak dan layak dibaca. Ada beberapa pengurangan dan penambahan dari format awal (disertasi) tersebut, dan **penulis** yakin harus ada perbaikan kembali pada edisi-edisi selanjutnya.

Buku ini **diharapkan** dapat dijadikan salah satu rujukan penting dalam memahami Budaya Hegemonik Amerika Serikat. Topik ini sesungguhnya **secara khusus belum** begitu luas dikaji dalam Ilmu Pengkajian Amerika Serikat, sehingga buku ini dimaksudkan untuk mendorong kajian-kajian lanjutan di Jurusan Ilmu Pengkajian Amerika tersebut serta bidang ilmu terkait lainnya sehingga **hasil kajiannya bisa** lebih mendalam dan komprehensif dalam mengulas persoalan budaya hegemonik Amerika Serikat di pentas global.

Penulis ingin menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya pada seluruh jajaran sivitas akademika FIB UGM, khususnya kepada almarhumah Prof. Djuhartati Imam Muhni, M.A., Ph.D. sebagai promotor, dan juga Prof. Dr. Yahya Muhaimin, M.A. sebagai ko-promotor. Sedikit rasa menyesal di hati penulis yang tidak sempat mempersembahkan karya ini sebelum beliau dipanggil berpulang kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang dengan penuh bangga karya ini penulis persembahkan. **Ucapan** terima kasih **ini juga** tak lupa **penulis** sampaikan kepada Prof. James T. Collins, Ph.D. yang telah membuka kesempatan luas bagi penulis untuk menempuh program *Sandwitch* di Northern Illinois University (NIU), juga kepada Ms Nancy Schuneman dan Ibu Srie Ramly, Ph.D. yang banyak membantu mendapatkan data-data penting yang diperlukan penulis selama menjalani program *Sandwitch* di NIU Amerika Serikat.

Akhirnya penulis haturkan rasa syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada almarhumah Ibunda tercinta serta isteri dan anak-anak tersayang yang telah menjadi pendorong penulis untuk terus bekerja dan berkarya. Harapan penulis buku ini memberi kemanfaatan yang luas. Insya Allah.

Yogyakarta, 3 Desember 2015

Daftar Singkatan

ACTU	Australian Council of Trade Unions
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation
APPG	All-Party Parliamentary Group
AS	Amerika Serikat
BITAC	Bilateral Training and Consultation
CDA	Critical Discourse Analysis
EDC	European Defense Community
ESA	Event Structure Analysis
ESDP	European Security and Defence Policy
EU	European Union
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
ILO	International Labour Organisation
IMF	International Monetary Fund
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NEC	National Economic Policy
NSS	National Security Strategy
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights
PAFTAD	Pacific Trade and Development
PBB	Perserikatan bangsa Bangsa
PBEC	Pacific Basin Economic Council
PECC	Pacific Economic Cooperation Council
PSA	Political Speech Analysis, disingkat
SM	Sebelum Masehi
tt	tanpa tahun
th	tanpa halaman
USAID	United States Agency for International Development
USIA	United States Information Agency
VOA	Voice of America
WMD	Weapon Massive Destruction
WTO	World Trade Organization

I

Pendahuluan

Sebagian besar isi buku ini berasal dari disertasi doctoral **penulis** berjudul: “Budaya Hegemonik Amerika Serikat di Malaysia Pasca Perang Dingin 1990-2000”, yang berhasil dipertahankan dalam ujian terbuka Program Pasca Sarjana Pengkajian Amerika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Ketertarikan **penulis** pada tema ini sebenarnya berangkat dari dua hal: pertama, pada kajian mengenai budaya hegemonik, dan kedua, pada kharisma dan keberanian Dr. Mahathir Mohammad untuk melakukan perlawanan terhadap budaya hegemonik tersebut. Untuk kepentingan teknis penulisan buku, dua sub tema tersebut **dipisahkan** dalam kajian tersendiri. Pada buku yang ada di tangan pembaca ini, sub tema yang **diangkat** adalah kajian mengenai budaya hegemonik Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Beberapa bagian dari buku ini telah dipublikasikan di jurnal ilmiah, antara lain Jurnal Humaniora FIB UGM.

Sebagai orang Asia, khususnya berdarah Nusantara, tentu saja dalam diri penulis melekat kebanggaan pada sejarah masa lalu nenek moyang kita yang pernah menguasai berbagai belahan dunia dan menjadi mercu suar peradaban global. Dalam sejarahnya, kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, Cina, Mongolia, Jepang, India, Irak sempat disegani bangsa-bangsa Eropa. Kini kepemimpinan global tersebut berpindah tangan ke bangsa Barat, terutama Amerika Serikat, yang kekuasaannya sempat menjadi tak tertandingi segera Perang Dingin berakhir.

Para ahli meneliti gejala hegemoni Amerika Serikat tersebut dalam dua aspek: kekuasaan (*power*) dan budaya (*culture*). Biasanya aspek yang pertama menjadi bahasan para ahli di bidang Ilmu Hubungan Internasional, sedangkan aspek kedua menjadi wilayah kajian Ilmu Pengkajian Amerika. Dalam persepsi penulis yang berlatarbelakang Ilmu Pengkajian Amerika, gejala hegemoni Amerika Serikat tersebut dapat lebih mudah dijelaskan melalui pendekatan budaya. Melalui pendekatan budaya (hegemonik) tersebut, kita akan dapat menarik pelajaran berharga.

Mengingat buku ini menekankan pada kajian tentang bagaimana pengalaman AS tumbuh dan berkembang di luar negeri dan reaksi dunia atau masyarakat dunia terhadap kebijakan AS dalam menyebarluaskan nilai-nilai budayanya di luar negeri, maka buku ini diharapkan dapat memperkaya Pengkajian Amerika bukan saja dalam lingkup-jangkauan wilayahnya tetapi juga pada arah kajiannya, yakni tidak hanya didasarkan pada hasil *inward-looking* tetapi juga dari *outward-looking*, bukan hanya kajian yang pro tetapi juga dilengkapi dengan yang kontra, sehingga kajian ini bisa dipandang sebagai perspektif baru dalam *American Studies*, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengubah atau setidaknya dapat mengoreksi sikap atau cara pandang bangsa Barat, terutama AS, yang menganggap dirinya sebagai bangsa yang paling tahu tentang alam, watak dan makna keberadaan

bangsa lain, sehingga pendapat yang berbeda yang datang dari bangsa lain dianggap tidak ada atau salah.

Arti Penting Topik

Gejala meluasnya budaya Amerika Serikat melalui mesin globalisasi sangat penting untuk dikaji. Selama ini, globalisasi dan gejala budaya hegemonik dalam penelitian berlatar belakang *American Studies* tidak banyak yang menyentuh pada satu pemahaman utuh mengenai budaya hegemonik Amerika. Dalam “*Index of American Studies Theses & Dissertations*” yang dikeluarkan oleh William & Mary University di Virginia, sub-sub kajian Ilmu Pengkajian Amerika meliputi kajian pada topik mengenai *African American*, *American Literature*, *art history*, *Asian America*, *childhood-education*, *consumer culture*, *decorative arts-material culture*, *foodways*, *gender studies*, *geography (natural resources, development)*, *immigration*, *journalism*, *labor history*, *Latin America*, *media (film, television, cyberspace)*, *military history*, *mortuary & memorial culture*, *museums-public history*, *music*, *Native America*, *politics-nationhood*, *popular culture*, *race-ethnicity*, *religion*, *social service*, dan *Southern Culture*.¹ Demikian pula dengan Ilmu Pengkajian Amerika di Universitas Harvard yang merupakan “*the oldest American Studies program in the country*”², topik penelitian meliputi *Early America*, *African-American studies*, *Latino/a studies*, *gender studies*, *visual and material culture*, *food studies*, *environmental history*, *literary history*, *music history*, *religious studies*, dan *the history of capitalism*. Bila kita periksa daftar penelitian semua topik tersebut, masih sangat jarang yang menyentuh aspek globalisasi budaya hegemonik Amerika.

Topik dalam buku ini masuk dalam ruang lingkup *American Studies*, karena pokok kajian disiplin ini mencakup masalah budaya atau pengalaman bangsa Amerika secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri AS. Apalagi setelah Perang Dunia II, posisi Amerika Serikat di pentas internasional semakin kuat dan pengaruhnya terhadap negara dan bangsa lain semakin besar dan luas, sehingga studi tentang Amerika sebagai salah satu negara adidaya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah domestik, tetapi juga mencakup kiprahnya di pentas dunia, termasuk pandangan dunia yang tidak sepeham dengan sikap politiknya (McDowell, 1948: 82)³. Dalam konteks kekuasaan AS secara global, keseluruhan wilayah dunia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kepentingan Amerika, karena “*it has global power, responsibilities and interest*” (Grondin, 2006: 3)⁴. Oleh

¹ William & Mary University. 2015. *Index of American Studies Theses & Dissertations*. <http://www.wm.edu/as/americanstudies/graduate/research/theses/>

² Harvard University's American Studies Program. 2013. *Program*. <http://americanstudies.fas.harvard.edu>

³ McDowell, Tremaine. 1948. *American Studies*. Minneapolis: University of Minnesota Press

⁴ Grondin, D. 2006. Introduction Coming to Terms with America's Liberal Hegemony/Empire. Dalam: David, CP. dan Grondin, D. (eds.). *Hegemony or Empire: The Redefinition of US Power under George W. Bush*. Hampshire: Ashgate.

karena itu, pengkajian budaya hegemonik AS seharusnya dilakukan tidak hanya dari konteks nasional bangsa Amerika, melainkan juga dari konteks luar negerinya.

Dari perspektif *New American Studies*, gagasan mengenai 'Amerika' tidak lagi dipahami hanya sebagai sebuah negara yang menjalankan politik isolasi, melainkan 'sebuah jaringan pengaruh budaya yang diperluas melampaui kawasan hemisfer-nya sejak periode kolonialisasi hingga saat ini' (Levander, 2009: 28)⁵. Akan tetapi, menurut Tremaine Mc Dowell (1948: 82)⁶, American Studies sejak awal sesungguhnya tidak sekedar merekonsiliasikan waktu (*the reconciliation of the tenses*) dan disiplin akademik (*the reconciliation of the academic disciplines*), melainkan juga ruang geografis (*the reconciliation of region, nation and world*). Nilai penting American Studies dalam setting luar negeri adalah dalam konteks yang tegas bahwa ilmu ini memberikan perbandingan, penelitian budaya silang (kajian antar budaya) terhadap masalah yang dihadapi banyak masyarakat modern dan di mencari kebenaran atas berbagai asumsi yang dirasakan tentang struktur kekuasaan, apakah pemerintah atau kurikulum, apakah berkaitan dengan jenis kelamin atau ras atau kelas atau agama (Rorex, 2002: 50)⁷. Gagasan ini menunjukkan bahwa 'Amerika' adalah sebuah wilayah budaya yang amat besar pengaruhnya secara global ke seluruh bangsa dan negara di dunia. Kebesaran pengaruh budaya tersebut berlangsung dalam sebuah proses yang aktif melalui diplomasi yang melahirkan konsensus atau melalui jalan pemaksaan secara agresif kepada bangsa atau negara lain agar bersedia menerima nilai-nilai dan kebijakan Amerika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Disinilah muncul gejala dominasi kekuasaan yang bersifat hegemonik.

Maksud dan Tujuan

Sebagaimana dijelaskan di paragraf ke empat pada bab pendahuluan, buku ini mencoba memberi jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana pengalaman AS tumbuh dan berkembang di luar negeri dan reaksi dunia atau masyarakat dunia terhadap kebijakan AS dalam menyebarkan nilai-nilai budayanya di luar negeri pasca Perang Dingin. Secara lebih khusus, buku ini mencoba menjelaskan bagaimana budaya hegemonik AS telah berkembang di masa kepemimpinan George Herbert Walker Bush (*the George H.W. Bush Administration*) sejak tahun 1990 hingga akhir jabatannya tanggal 20 Januari 1993, dan periode kepemimpinan William Jefferson "Bill" Clinton (*the William J. Clinton Administration*) sejak pelantikannya tanggal 20 Januari 1993 hingga menjelang berakhirnya masa jabatannya di tahun 2000. Penulis juga mencoba menjawab pertanyaan

⁵ Levander, C. 2009. The Changing Landscape of American Studies in a Global Era. *Working Together or Apart: Promoting the Next Generation of Digital Scholarship*. Washington DC: Council on Library and Information Resources, 27-34.

⁶ McDowell, Tremaine. *Ibid*.

⁷ Rorex, P. D. 2002. Perspectives on American Studies. *Studies in Languages and Language Teaching*. Faculty of Art, Mahidol University, Thailand.

sejauhmana globalisasi telah dijalankan secara efektif sebagai mesin untuk menyebarkan gagasan dan produk budaya AS ke seluruh dunia, serta bagaimana bentuk perlawanan (*resistensi*) terhadap penyebaran tersebut.

Kerangka Teori dan Pendekatan

Buku ini mengacu pada empat pendekatan kajian sebagai pilar atau kerangka konseptual penelitian, yaitu: (a) pendekatan interdisipliner, (b) pendekatan kajian budaya hegemonik, dan (c) pendekatan kajian perlawanan terhadap budaya hegemonik, dan (d) pendekatan Studi Kawasan; keseluruhan pendekatan tersebut beranjak dari ruang lingkup *American Studies*. Untuk lebih menjelaskan sejauhmana ketiganya digunakan dalam penelitian ini, berikut diuraikan masing-masing pendekatan dalam bentuk kajian yang berkembang dalam wacana keilmuan American Studies.

1. Pendekatan Interdisipliner

Secara tradisional, suatu disiplin keilmuan pada kesemestaan ilmu pengetahuan (universitas) merupakan cabang atau bagian tertentu (partikular) dari batang tubuh keilmuan, yang mempunyai unsur-unsur khas—seperti gejala-gejala, asumsi, epistemologi, konsepsi-konsepsi, teori dan metode—yang membedakannya dengan cabang pengetahuan lainnya dan bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala alamiah (*natural phenomena*) dari dalam wilayah kajian itu sendiri. Setiap disiplin tersebut masing-masing mempunyai sejarah intelektual, kesepakatan dan perdebatan atau perselisihan tersendiri menyangkut pokok permasalahan (*subject matter*) dan metode, serta mempunyai ‘masyarakat atau komunitas keserjanaan yang tertarik dalam pengembangan disiplin tersebut’ (Huber dan Morreale, 2002: 2)⁸.

Namun, dalam era pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bertambah kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia saat ini, hampir tak bisa dielakkan terjadi persinggungan bahkan pengintegrasian (atau proses sintesis) suatu cabang ilmu (disiplin) melalui pendekatan yang dinamakan Pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*), yaitu suatu pendekatan untuk meneliti secara kritis suatu isu atau tema bahasan dengan berpijak pada dua atau lebih disiplin ilmu yang mengarah pada penyatuan (integrasi) kesemua pandangan yang diberikan setiap disiplin ilmu tersebut (Newell dan Green, 1982)⁹. Pendekatan interdisipliner merupakan suatu proses untuk menjawab suatu persoalan, memecahkan suatu masalah, atau mengajukan suatu topik yang

⁸ Huber, M.T. and Morreale, S.P., eds. 2002. *Disciplinary Styles in the Scholarship of Teaching and Learning: Exploring Common Ground*. Washington, DC: AAHE and the Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning.

⁹ Newell, W.H dan Green, W. J. 1982. Defining and Teaching Interdisciplinary Studies. *Improving College and University Teaching*. Vol. 30:1.

terlalu luas atau kompleks bila hanya di lihat oleh satu disiplin ilmu saja, dan mengintegrasikan semua pandangan ke dalam suatu konstruksi atau perspektif yang lebih bersifat komprehensif (Klein dan Newell, 1997: 393–394)¹⁰.

Kajian mengenai pengalaman Amerika Serikat saat ini telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu berdiri sendiri dan dianggap paling berhasil di wilayah kajian interdisipliner (Klein, 2005: 153)¹¹, terutama karena telah melakukan dua sintesis, yaitu sintesis dari berbagai disiplin ilmu —sejarah, kesusasteraan, filsafat, sosiologi, sosial psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, geografi, dan sebagainya; dan sintesis masa silam dengan masa kekinian. Lebih dari itu, disiplin ini juga diyakini mampu mendorong manusia untuk berhubungan dengan masa kekinian dan memberikan ilmu sosial makna atas sejarahnya sendiri (Shryock, dkk. 1950: 287)¹².

Munculnya *American Studies* ini dapat pula dipandang sebagai kelanjutan dari “penemuan” dan “terobosan-terobosan baru” dalam budaya populer Amerika selama masa *New Deal* (1930an) dan Perang Dunia Kedua. Proyek-proyek budaya di masa *New Deal* memusatkan perhatian pada kesusasteraan dan seni yang mengeksplorasi sejarah-sejarah lokal, *folkways* dan kehidupan masyarakat Amerika pada umumnya. Dikemudian hari, studi etnografi dan folklore menjadi minat berikutnya dalam studi mengenai budaya Amerika, begitu pula gagasan mengenai ‘*exceptionalism*’ (Klein, 2005: 154)¹³. Lohof (1978: 3-5)¹⁴ mencatat tiga prinsip penting dalam *American Studies*, yaitu pertama, ilmu ini bersifat holistik dalam pendekatannya kepada budaya Amerika Serikat, karena mempersatukan semua keanekaragaman budayanya; kedua, ilmu ini juga bersifat intersipliner dalam pendekatannya kepada budaya bangsa Amerika tersebut; dan ketiga, ilmu ini mengintegrasikan perspektif mengenai Amerika Serikat baik di masa lalu, masa kini dan masa akan datang.

Berhubung buku ini mengkaji hegemoni AS dalam perspektif *American Studies*, maka kerangka teori buku ini berangkat dari pendekatan yang bersifat lintas disiplin (*the interdisciplinary approach*), yakni hegemoni AS dalam perspektif budaya (*cultural hegemony*), sejarah dan ilmu politik (hubungan internasional), ekonomi, militer dan kawasan (regionalisme). Namun, sebagai pijakannya, dalam penelitian ini bentuk-bentuk hegemoni tersebut merupakan produk atau keluaran dari budaya hegemonik (*hegemonic*

¹⁰ Klein, J. T., dan Newell, W. H. 1997. Advancing interdisciplinary studies. Dalam: J. Gaff & J. Ratcliff (Eds.), *Handbook of the undergraduate curriculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

¹¹ Klein, J. T. 2005. Humanities, Culture, and Interdisciplinarity: The Changing American Academy. New York: State University of New York Press, 131-142.

¹² Shryock, R. H. dkk. 1950. A Statement by the Committee on American Civilization of the American Council of Learned Societies. *American Quarterly*. Vol. 2.

¹³ Klein, J. T. *Ibid*

¹⁴ Lohof, Bruce A. 1978. *Through the Eyes of the World: International Essays in American Studies*. Delhi: The Macmillan Company of India

culture) untuk menggambarkan peranan khusus Amerika Serikat di pentas dunia (Pease, 2007: 108)¹⁵.

Itulah letak perbedaan utama pembahasan mengenai hegemoni dalam Pengkajian Amerika dengan pembahasan hegemoni dalam Ilmu Hubungan Internasional yang lebih menekankan pada masalah negara-negara sentral sebagai aktor utama dalam kehidupan internasional yang akan memperluas pengaruhnya di negara-negara periferal untuk menciptakan lingkungan global yang kondusif bagi kepentingannya. Kajian-kajian hegemoni dalam Ilmu Hubungan Internasional sebatas melihat praktek dan ideologi politik hegemoni tersebut tanpa meninjau lebih dalam kepada budaya hegemoninya.

2. Pendekatan Kajian Budaya Hegemonik

Istilah 'budaya hegemonik' (*hegemonic culture*) digunakan dalam beberapa karya ahli *American Studies*, antara lain oleh Cornel West (1982)¹⁶, Richard Jacquemond (1992)¹⁷, Eva Cherniavsky (1996)¹⁸, Mark D. Wood (2001)¹⁹, Patrick D. Murphy (2003)²⁰, Bronner dan Kellner (1983)²¹ dan Carlos Antonio Aguirre Rojas (2005)²². Budaya Hegemonik yang melekat dalam jati diri, nilai-nilai, gagasan dan perilaku bangsa dan negara Amerika Serikat adalah salah satu tema kajian yang cukup penting dan menarik dalam penelitian *American Studies*, terutama setelah Amerika muncul sebagai kekuatan adidaya pasca Perang Dingin. Budaya ini dapat dipandang sebagai sebuah warisan dari Kerajaan Inggris Raya, tempat asal 'kaum kulit putih' Amerika yang berhasil membangun sebuah kekuasaan imperium tandingan bahkan akhirnya muncul melebihi kekuasaan hegemonik Inggris Raya itu sendiri.

Budaya hegemonik tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang luas, mulai dari aspek pendidikan, seni, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, informasi, kesehatan dan sebagainya, yang lahir dari nilai-nilai ideal bangsa Amerika (*American ideals*) mengenai 'apa dan siapa bangsa Amerika itu sebenarnya', sebagai dalih untuk membangun budaya

¹⁵ Pease, D. 2007. Exceptionalism. Dalam: Burgett, B. dan Glenn Hendler, G. (eds.). *Keywords for American Cultural Studies*. New York: New York University Press, 108-112.

¹⁶ West, C. R. 1982. *Prophecy Deliverance!* Philadelphia: Westminster Press.

¹⁷ Jacquemond, R. 1992. Translation and Cultural Hegemony: The Case of French/Arabic Translation. Dalam: Lawrence Venuti (ed.), *Rethinking Translation*, Routledge, London: 139-158.

¹⁸ Cherniavsky, E. 1996. Subaltern Studies in a U. S. Frame. *Boundary 2*, Vol. 23, No. 2: 85-110. North Carolina: Duke University Press.

¹⁹ Wood, M. D. 2001. Religions Studies as Critical Organic Intellectual Practice. *Journal of the American Academy of Religion*. Vol 69, No. 1: 129-162. Atlanta: The American Academy of Religion.

²⁰ Murphy, P. D. 2003. Without Ideology? Rethinking Hegemony in the Age of Transnational Media. Dalam: Artz, L. dan Kamalipour, Y. R. (eds.) *The Globalization of Corporate Media Hegemony*. Albany: State University of New York Press.

²¹ Bronner, S. dan Kellner, D. 1983. *Passion and Rebellion: The Expressionist Heritage*. London: Universe Books and Bergin Publishers (USA), New York dan Croom Helm (Inggris).

²² Rojas, C. A. A. 2005. Hegemonic Cultures and Subaltern Cultures: Between Dialogue and Conflict. *Review*, Vol. 28, No. 2: 187-210.

dunia menurut cara pandang dan keyakinan orang-orang Amerika (McDowell, 1948:93)²³. Luasnya wilayah produk budaya hegemonik ini tidaklah mengherankan, karena kajian mengenai budaya itu sendiri merupakan kajian lintas disiplin (Miller, 2005: 1)²⁴.

- Budaya hegemonik meliputi berbagai aspek kehidupan yang luas, yang lahir dari nilai-nilai ideal bangsa Amerika (*American ideals*) mengenai 'apa dan siapa bangsa Amerika itu sebenarnya', sebagai dalih untuk membangun budaya dunia menurut cara pandang dan keyakinan orang-orang Amerika (McDowell, 1948:93)

Budaya hegemonik dalam buku ini mengandung pengertian sebagaimana yang diistilahkan oleh West (1982: 119)²⁵: "Sebuah budaya yang hegemonik mendorong orang secara cerdas dan efektif mengidentifikasi dirinya sendiri dengan perilaku, perasaan emosional dan pandangan dunia yang mendukung kelanggengan status quo serta kepentingan kelas yang dominan." Pengertian secara 'cerdas dan efektif' dalam budaya hegemonik ini selaras dengan penekanan kata "rasional" dan "fungsional" sebagaimana yang dijelaskan oleh Gramsci.

Persinggungan antara proses globalisasi dengan meluasnya ekspansi budaya Amerika menjadi titik penting yang dilihat oleh para ahli *American Studies* sebagai media efektif bagi hegemoni Amerika Serikat di pentas dunia (Oldenziel, 2007: 86)²⁶. Selain itu, penggambaran globalisasi sebagai sebuah kelanjutan dari kolonialisme dan imperialisme memungkinkan kajian-kajian perbandingan etnis dan ras Amerika dalam hubungan yang bersifat trans-nasional menjadi semakin berkembang (Gikandi, 2001: 635)²⁷. Dalam prakteknya, budaya politik baik domestik maupun internasional, manifestasi politik masing-masing aktor jarang diperlihatkan seperti apa adanya, yaitu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, terutama bagi yang menerapkan politik imperialisme, apa yang sebenarnya diperjuangkan disembunyikan di balik tabir penyamaran-penyamaran atau jastifikasi-jastifikasi ideologis dan rasionalisasi-rasionalisasi (Morgenthau, 1973: 71)²⁸. Dengan menggunakan pembenaran-pembenaran dan rasionalisasi secara moral, membuat hukum atau aturan main, dan dalih-dalih bantuan kemanusiaan yang memikat, maka berbagai kebijakan politik suatu negara menjadi nampak rasional dan kedengarannya

²³ McDowell, T. 1948. *American Studies*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.

²⁴ Miller, T. 2005. Anti-Americanism and Popular Culture. *Anti-Americanism Working Papers*. Budapest, Hungary: Central European University.

²⁵ West, C. R. 1982. *Prophecy Deliverance!* Philadelphia: Westminster Press.

²⁶ Oldenziel, R. 2007. Is Globalization a Code Word For Americanization? *Contemplating McDonalds, Coca-Cola, and Military Bases. Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis* 4 Nr. 3: 84-106.

²⁷ Gikandi, Simon (2001) 'Globalization and the Claims of Postcoloniality', *South Atlantic Quarterly*. 100(3): 627-58.

²⁸ Morgenthau, H. J. 1973. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Fourth Edition. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

mulia, sehingga sulit bagi bangsa lain mencari alasan untuk tidak menyetujui atau mendukungnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa elemen-elemen kekuasaan yang diinginkan dari politik neo-imperialisme biasanya dijelaskan dan dibenarkan dengan menggunakan dalih-dalih atau ukuran-ukuran etika, hukum, dan biologis (Morgenthau, 1973: 86)²⁹. Memang dalam manifestasinya tindakan politik yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang menekankan penggunaan kekuatan ideologis (ideologi, kebudayaan, bahasa) dan kekuatan ekonomi, tetapi bukan kekuatan militer, untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain, termasuk tindakan politik yang hegemonik (Windhu, 1992: 31)³⁰.

3. Perlawananan (resistensi) terhadap Budaya Hegemonik Amerika

Kajian perlawanan terhadap budaya hegemonik Amerika ini beranjak dari asumsi bahwa negara yang dihegemoni mempunyai rasa tidak nyaman atau kehilangan kepercayaan kepada negara yang menghegemoni akibat dari ketidaksesuaian atau ketidakmampuan negara yang menghegemoni untuk memenuhi tuntutan peran yang diberikan oleh negara yang dihegemoni. Dalam perspektif American Studies, kerangka teori yang dipilih untuk menjelaskan sikap-sikap 'perlawanan' terhadap hegemoni AS adalah berkembangnya sentimen Anti Amerika (*anti-americanism*), resistensi terhadap globalisasi dan resistensi terhadap imperialisme Amerika. Ketiga hal ini sebenarnya saling terkait satu sama lainnya, dan mengarah kepada satu tujuan, yakni perlawanan terhadap hegemoni AS dalam konteks yang bersyarat.

Sebagaimana pendekatan budaya hegemonik dalam Pengkajian Amerika yang bersifat interdisipliner, pendekatan terhadap Sentimen Anti Amerika (*anti-americanism*) dalam penelitian ini juga meliputi aspek-aspek budaya, politik, ekonomi dan militer (Miller, 2005 :6)³¹. Segala sesuatu yang bersifat "anti-isme" selalu mengandung lima unsur, yaitu (a) tuduhan atau prasangka jelek (*stereotypization*), yaitu seperangkat pernyataan umum yang meletakkan hal-hal yang berbau negatif kepada kelompok yang dituduhkan, (b) penghujatan (*denigration*), yakni anggapan bahwa hal yang buruk berasal dari kerendahan moral kelompok yang dituduhkan, (c) pemberian identitas buruk (*demonization*), yaitu langkah setelah menuduh jelek terhadap 'siapa', berlanjut kepada 'apa-apa' kelakuan atau tindakan buruk yang dilekatkan kepada kelompok yang dituduhkan, (d) obsesi (*obsession*), yakni berkembangnya keyakinan tersebut secara kompulsif (dipaksakan) tanpa ada ruang untuk penjelasan terhadap apa yang dituduhkan, dan (e) upaya dan tindakan untuk

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Windhu, I.W. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

³¹ Miller, T. *Ibid.*

meniadakan kelompok yang dituduhkan (*elimination*), bisa dalam bentuk pelarangan, pengusiran, penyadaran kembali, penghancuran total (Josef Joffe, 2004: 2)³².

Sikap yang diberikan oleh negara yang dihegemoni terhadap dominasi budaya hegemonik Amerika secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk, yaitu: (1) Dukungan secara terang-terangan (*unambiguous support*), (2) Penentangan atau perlawanan secara penuh (*full resistance*), (3) Dukungan taktis (*tactical support*) dan *hidden defection*, (4) Konsensus secara bersyarat (*partial consensus – partial difference*). Dalam opsi keempat (konsensus secara bersyarat), negara yang dihegemoni bersedia melakukan kerjasama “*with respect to commonly shared values and principles*”, namun “*insistence on differences that must be maintained*” (Matzner, 2002: 22³³ dan 2003: 5). Dalam bentuk hegemoni bersyarat ini, negara yang dihegemoni memberikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang menghegemoni. Persyaratan tersebut secara esensinya merupakan tuntutan harapan peran (*role expectations*) dari negara yang dihegemoni kepada negara yang menghegemoni. Teori ini dapat dicari pengertiannya dalam konsepsi Joseph S. Nye Jr (2002a)³⁴ mengenai “*The Paradox of American Power*”. *America's paradox*, menurut Nye, menunjukkan suatu keadaan dimana pada satu sisi kekuasaan Amerika Serikat terlalu besar untuk ditandingi, namun pada sisi lain Amerika Serikat tidak mampu mencapai semua tujuan dan kepentingannya secara sendirian. Situasi ini melahirkan “*limits of American power*” (batas kekuatan Amerika) yang membuat Amerika tidak mampu sepenuhnya menjadi sebuah negara hegemon. Nye (2002b: 557)³⁵, menyebutkan bahwa jika hegemoni berarti mampu mendikte, atau setidaknya mendominasi, aturan dan penataan dimana hubungan internasional dilakukan maka Amerika Serikat sulit untuk disebut sebagai negara hegemon hari ini.

Dalam keterbatasan kekuasaan sedemikian, negara-negara yang berada dalam cengkraman kekuasaan hegemonik Amerika Serikat melakukan strategi “*balance of power*” (keseimbangan kekuatan) dalam rangka tawar-menawar dengan Washington. Amerika sebaliknya harus mengintensifkan “*soft power*”-nya agar negara-negara tersebut bersedia dan sukarela menerima kekuasaan hegemoniknya. Dengan demikian, konsensus yang diberikan oleh negara-negara tersebut kepada Amerika Serikat adalah sebuah “konsensus yang bersyarat”, sedangkan kekuasaan hegemoni Amerika Serikat diarahkan untuk memperoleh legitimasi dari negara-negara tersebut. Nye (2002a: 10)³⁶ menyatakan bahwa jika suatu negara dapat membuat kekuatannya yang sah di mata orang lain maka negara itu akan menerima berkurangnya penolakan terhadap kemauan negara tersebut. *Power* dan

³² Joffe, J. 2004. *Nations We Love to Hate: Israel, America and the New Antisemitism*. Artikel perkuliahan untuk Pusat Studi Jerman (*the Center for German Studies*) di Ben Gurion University. Dayton: Sicsa

³³ Matzner, E. 2002. *Globalisation in a Monopolar World*. http://www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2002/files2002/Matzner_Globalisation.pdf

³⁴ Nye, Jr. J. S. 2002a. *The Paradox of American Power: Why the World's only Superpower can't Go it Alone*. New York: Oxford University Press.

³⁵ Nye, Jr. J. S. 2002b. *Limits of American Power*. *Political Science Quarterly*. Vol. 117, No. 4: 545-559.

³⁶ Nye, Jr. J. S. 2002a. *Ibid*.

resistensi (perlawanan terhadap kekuasaan tersebut) merupakan dua hal yang terpisah, meskipun saling bergantung.

Bentuk resistensi tersebut dapat dikualifikasikan dari skala yang paling kecil (dukungan taktis), menengah (konsensus bersyarat) hingga tinggi (perlawanan penuh). Adapun resistensi dalam konteks counter-hegemony, menurut Yaseen Noorani (2007: 76)³⁷, merupakan sebuah bentuk disposisi yang alamiah yaitu tidak hanya diakui oleh wacana yang hegemonik, tetapi diperlukan oleh mereka untuk memproyeksikan efek lanjutan dari hubungan hegemonik tersebut. Sebagai suatu bentuk yang alamiah, resistensi tersebut dapat pula dianggap sebagai satu bentuk dialog budaya dari negara yang dihegemoni terhadap negara yang menghegemoni.

4. Pendekatan Studi Kawasan

Pengertian “kawasan” dapat ditinjau dari dua sudut pandang kawasan sebagai sebuah entitas yang bersifat fisik (*physical regions*) dan yang bersifat fungsional (*functional regions*). Pengertian yang pertama merujuk pada keadaan geografis dimana masyarakat dan segala sumber daya di area tersebut dikuasai oleh satu pemerintahan atau negara yang berdaulat; yang kedua merujuk pada faktor-faktor yang bersifat non teritorial seperti budaya dan pasar yang dikendalikan oleh aktor-aktor non negara. Dalam perspektif hubungan internasional, kawasan secara fisik adalah sebuah konstruksi sosial yang terbentuk secara alamiah maupun dibentuk secara sengaja oleh (kekuatan, rekayasa) politik. Kekuatan tersebut kerap dijalankan oleh negara untuk mengatur persaingan anarkhis antar kelompok-kelompok sosial politik di sebuah daerah. Sedangkan yang bersifat fungsional, negara justru seringkali kalah dengan agen-agen atau aktor-aktor ekonomi dan budaya yang mengendalikan jaringan produksi (ekonomi) dan nilai serta gaya hidup (budaya) di sebuah teritori (Raimo Vayrynen, 2003: 25-27)³⁸.

Dengan mencermati pengertian kawasan di atas, kita jadi akan lebih mengerti bahwa di balik setiap kerjasama kawasan yang dijalankan oleh pemerintahan antar negara selalu ada jalinan, persaingan bahkan mungkin pertarungan antar aktor-aktor atau agen-agen non pemerintahan. Aktor-aktor dan agen tersebut berlandung di belakang jas-jas resmi pejabat kenegaraan yang mengadakan jamuan makan malam atau penandatanganan kerjasama. Desakan para pemimpin dunia yang bermazhab neo liberal untuk meminta setiap pemimpin negara membuka pintu rumahnya seluas-luas bagi para aktor dan agen ekonomi dan budaya jelas merupakan bukti lebih berkuasanya aktor non negara dalam pertarungan dan perebutan kekuasaan tersebut. Ironisnya, banyak pemimpin negara dengan sukarela menyerahkan kunci-kunci rumahnya kepada mereka. Demikian pula

³⁷ Noorani, Y. 2007. Redefining Resistance: Counterhegemony, the Repressive Hypothesis and the Case of Arabic Modernism. Dalam: Chalcraft, J. dan Noorani, Y. (eds.) *Counterhegemony in the Colony and Postcolony*. New York: Palgrave Macmillan™, 75-99.

³⁸ Vayrynen, Raimo. 2003. *International Studies Review*. vol. 5, no. 1: 25-51,

sebaliknya, para pejabat pemerintahan tak jarang memanfaatkan aktor dan agen ekonomi tersebut untuk memperoleh keuntungan secara politik maupun ekonomis.

Kedekatan hubungan antara aktor negara dan non negara membuat situasi di sebuah kawasan menjadi ajang tarik menarik antar pihak untuk menjadi yang paling dominan kekuatan politik, ekonomi dan militernya. Secara teoritis, kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam tiga dimensi: *pertama*, kekuatan yang muncul secara terbuka dan terang-terangan (*open power*), *kedua*, kekuatan yang memainkan peran penting di balik layar (*covert power*), dan *ketiga*, kekuatan yang berdiri secara terstruktur (*structural power*) (Gill & Law, 1988: 73-74)³⁹. Ketiga dimensi kekuatan tersebut saling berkelindan dan membangun hubungan saling menguntungkan. Ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain, maka setidaknya ada beberapa pilihan: bekerjasama, berkompetisi, atau saling menguasai.

Dalam sebuah pertarungan, adalah lumrah jika pihak yang bertanding berusaha sekuatnya untuk mengalahkan pihak lawan. Mereka yang berhasrat besar untuk selalu unggul dalam setiap pertarungan dianggap memiliki semangat untuk menjadi juara sejati (*the real champion*) yang digdaya tanpa ada yang mampu menandingi (*the lonely power*). Kondisi ini dibidik para ahli budaya dan politik dalam bingkai teori mengenai "hegemoni". Watak superioritas Amerika Serikat tersebut tak bisa dilepaskan pula dari ego untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi bangsa terpilih (*exceptional*) yang hidup dalam kemewahan (*glamour*) dan kemudahan (*instant*). Sebagai konsekuensinya, sumber daya alam dan kapital lainnya harus dikuasai dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan ambisi tersebut. Mimpi hidup dalam kemewahan dan kemudahan tersebut kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui mesin mesin globalisasi terutama teknologi informatika dan media, budaya populer dan teknologi yang mengubah cara hidup masyarakat non Amerika. Produk perfilman Hollywood menggambarkan kehidupan mewah tersebut dalam kehidupan para selebritis baik di dunia film maupun dunia nyata. Kemewahan semakin dinampakkan pada saat malam penghargaan para bintang selebriti yang kemudian mengilhami gaya hidup banyak anak muda di seluruh dunia, melalui gaya busana, gaya rambut dan sebagainya.

- Watak superioritas Amerika Serikat tersebut tak bisa dilepaskan pula dari ego untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi bangsa terpilih (*exceptional*) yang hidup dalam kemewahan (*glamour*) dan kemudahan (*instant*). Sebagai konsekuensinya, sumber daya alam dan kapital lainnya harus dikuasai dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan ambisi tersebut.

Dalam kenyataannya, hegemoni Amerika tersebut mendapat kontestasi (persaingan) dari bangsa lain seperti China, Korea Selatan, Jepang dan India. Empat bangsa ini juga

³⁹ Gill, Stephen & Law, David. *Ibid.*

membangun semangat hegemonik di kawasan Asia Tenggara terutama melalui jalur budaya dan ekonomi. Namun secara umum, dapat kita lihat bahwa nilai yang mereka sebarkan tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh mimpi Amerika (*American dream*), yaitu gaya hidup mewah dan mudah. Perbedaannya dengan Amerika, ke empat bangsa Asia ini senang mengeksplor kisah-kisah legenda mereka dalam bentuk program serial televisi, yang lagi-lagi secara diam-diam menawarkan kemewahan gaya hidup istana kepada para pemirsa.

5. Teori Hegemoni dalam *American Studies*

Penelitian mengenai hegemoni Amerika Serikat dalam *American Studies* tidak sesesama yang dilakukan para ahli ilmu politik di dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan analisis-analisis di dalam *American Studies* tidak mengenal konsepsi mengenai monopoli kekuasaan. Berbagai analisis di dalam disiplin ilmu ini selalu ditandai dengan absennya kajian mengenai monopoli kekuasaan. Karena Amerika tidak pernah punya pengalaman menjadi monarkhi, maka AS selalu menegakkan prinsip demokrasi yang menentang pemusatan kekuatan, namun yang lebih penting adalah menentang bentuk tradisi pewarisan atau pelestarian kekuasaan sepanjang masa (Fisher, 1991: xxii)⁴⁰. Tema-tema kepemimpinan global AS yang hegemonik lebih banyak ditemukan dalam berbagai penelitian dan ulasan di dalam Ilmu Hubungan internasional. Pembahasan tentang peran kepemimpinan AS dalam pergaulan internasional dan juga sifat hegemoninya telah ditulis oleh Nye, Jr (1992, 2002), Ferguson (2004), Garrison (2004), Musa (2003), Prestowitz (2003), dan Soderberg (2005).

Salah satu tema sentral dalam kajian sejarah Amerika selama ini adalah bahwa Imperium Amerika saat ini tidak ada. Sebagian besar ahli sejarah, seandainya mereka dipaksa untuk mengatakannya akan mengakui bahwa Amerika Serikat memang dahulu pernah menjadi sebuah imperium. Namun hal itu akan segera ditambahkan dengan keterangan bahwa imperium tersebut sudah lenyap. Sekalipun demikian, mereka juga akan terus berkisah mengenai Amerika sebagai sebuah Kekuatan Dunia (Williams, 1955)⁴¹. Akan tetapi, Amerika Serikat sesungguhnya adalah sebuah negara imperium militer lebih dari apa yang kita sadari (Kaplan, 2003: 15)⁴².

Kajian hegemoni dalam Ilmu Hubungan Internasional sebatas melihat praktek dan ideologi politik hegemoni tersebut tanpa meninjau lebih dalam kepada budaya hegemoninya. Amerika berasumsi bahwa kedamaian dan keselamatan kehidupan antar negara bukan diciptakan melalui keseimbangan kekuatan, melainkan melalui upaya

⁴⁰ Fisher, P. 1991. *The New American Studies: Essays from Representation*. California: University of California Press.

⁴¹ Williams, W. A. 1955. *The Frontier Thesis and American Foreign Policy*. *Pacific Historical Review*. Vol. 24, No. 4: 379-395.

⁴² Kaplan, R. D. 2003. *America and the Tragic Limits of Imperialism*. [The Hedgehog Review](#): 56-76. Virginia: [Institute for Advanced Studies in Culture, University of Virginia](#).

menciptakan kondisi ketidakseimbangan kekuatan demi kepentingan negara-negara yang bersangkutan, yaitu dengan mewujudkan hegemoni (Layne, 1998: 9-10)⁴³. Hegemoni, menurut Layne, selain sebagai tujuan juga sebagai strategi yang disebut dengan istilah *The Strategy of Preponderance*, yaitu suatu strategi realistik yang digunakan untuk melestarikan dominasi geopolitik AS dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan agar tidak muncul kekuatan-kekuatan tandingan dari negara lain. Pengaruh budaya hegemonik Amerika tersebut ke dalam tata nilai dan perilaku berjalan secara terencana dan disengaja hingga merasuk ke dalam alam bawah sadar bangsa atau negara yang dihegemoni, bahkan ke dalam alam bawah sadar mereka yang menentang pengaruh tersebut. "*The Americans have colonized our subconscious*," demikian kutipan terkenal dari Wim Wenders (Wenders, 1991: 98)⁴⁴.

- Hegemoni selain sebagai tujuan juga sebagai strategi yang disebut dengan istilah *The Strategy of Preponderance*, yaitu suatu strategi realistik yang digunakan untuk melestarikan dominasi geopolitik AS dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan agar tidak muncul kekuatan-kekuatan tandingan dari negara lain.

Dalam buku ini, istilah 'hegemoni' digunakan untuk menggambarkan 'hubungan timbal balik yang kompleks antara paksaan dan konsensus *the complex interplay between coercion and consensus*' yang dilakukan oleh Amerika Serikat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya ke dalam Kawasan Asia Tenggara. Penafsiran ini digunakan oleh Howson dan Smith (2008: ix)⁴⁵ ketika mengkaji konsepsi Gramsci mengenai hegemoni di kawasan Asia Pasifik. Dalam penafsiran ini, hegemoni dipandang sebagai sebuah proses yang terjadi sebelum '*power*' terlembagakan atau diwujudkan, sekaligus sebagai sebuah hasil dari proses pelebagaan '*power*' tersebut. Dengan demikian, berbagai hubungan logis antar peristiwa serta wacana politik yang disampaikan oleh pemimpin dari negara hegemon dijelaskan baik dalam konteks sebelum terjadinya pelebagaan hegemoni maupun sebagai satu bentuk hegemoni itu sendiri. Salah satu nilai dalam budaya kontemporer yang relevan dengan teori dan konsepsi Antonio Gramsci adalah pada aspek hegemoni, bahkan konsepsi Gramsci mengenai hegemoni ini telah membuka wacana akademik dan praktis di wilayah yang lebih luas (Matsuda dan Ohara, 2008: 53)⁴⁶.

⁴³ Layne. 1998. Rethinking American Grand Strategy: Hegemony or Balance of Power in the Twenty First Century? *World Policy Journal*. Vol. 15: no.2: 8-28. California: SAGE Publication, Inc.

⁴⁴ Wenders, W., 1991. *The Logic of Images: Essays and Conversations*, terj. Michael Hofmann. London: Faber and Faber Limited.

⁴⁵ Howson, R. dan Smith, K. 2008. Hegemony and the Operation of Consensus and Coercion. Dalam: Howson, R. dan Smith, K. (eds.). *Hegemony Studies in Consensus and Coercion*. New York: Routledge, 1-15.

⁴⁶ Matsuda, M. dan Ohara, K. 2008. Hegemony and the Elaboration of the Process of Subalternity. Dalam: Howson, R. dan Smith, K. (eds.). *Hegemony Studies in Consensus and Coercion*. New York: Routledge, 51-62

Curtis dan Pettigrew (2009: 13-14)⁴⁷ menyebutkan sejumlah fitur penting dalam budaya kontemporer Amerika, yakni: (a) Individualisme: sejak dekade 80an, nilai-nilai dan praktek budaya Barat semakin terpusat pada kepentingan individu; (b) Konsumerisme: saat ini, orang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kesenangan atau keinginan. Dalam konsumerisme, nilai direduksi sebatas pada nilai ekonomis; (c) Globalisasi: berbagai kerjasama antar negara semakin digiatkan baik di ranah ekonomi (Bank Dunia, perusahaan multi nasional, perdagangan internasional), ranah politik (pembentukan Masyarakat Uni Eropa, PBB dan Kelompok G-8), maupun di ranah budaya (seperti gaya busana, musik, film, tv, makanan dan hiburan). (d) Migrasi antar negara mendorong lahirnya banyak negara yang mempunyai 'multi-kultural'. Di saat bersamaan, dominasi AS sebagai negara pengeksport budaya meneguhkan keyakinan banyak orang bahwa AS telah melakukan 'imperialisme budaya': McDonalds, Coca Cola, Nike dan serial televisi Friends, adalah contoh dari merk-merk dagang yang dengan mudah menembus pasar global; (e) Teknofilia (*Technophilia*): pengaruh dari dan ketergantungan pada teknologi juga semakin menyebar luas ke hampir seluruh pusat-pusat budaya, bahkan dapat dikatakan bahwa email, mobile phone, laptop dan komputer, SatNav, iPod hingga internet kini telah menjadi gaya hidup sebagian besar penduduk kota di dunia, (f) Hegemoni Internet (*Internet hegemony*): besarnya peranan yang diberikan oleh berbagai jejaring sosial dan mesin pencari di internet: situs jejaring (the web) mulai beroperasi di tahun 1993, Google tahun 1996, Wikipedia tahun 2001, My Space tahun 2003, Facebook di tahun 2004, dan YouTube tahun 2005; kesemuanya seakan telah menjadi budaya yang hegemonik dalam segala aktifitas manusia modern saat ini.

6. Teori Hegemoni menurut Antonio Gramsci

Teori hegemoni tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Gramsci, seorang aktifis komunis Italia yang sempat dipenjarakan Mussolini, terutama dalam catatannya selama dipenjara tersebut yang dibukukan dalam judul *The Prison Notebooks* di tahun 1971. Hegemoni bagi Gramsci (1971: 145)⁴⁸ merupakan pilihan bagi masyarakat sipil (*civil society*) untuk menyerahkan diri secara sukarela pada pihak yang menguasai (hegemon) berdasarkan konsensus, berbeda dengan masyarakat politik (*political society*) yang memberikan kepercayaan karena dipaksa. Karena selama ini Amerika Serikat sering menang dalam beberapa kali perang dunia, maka teori hegemoni sering dikaitkan dengan negara super power ini. Antonio Gramsci (1971: 169)⁴⁹, sendiri mendefinisikan hegemoni sebagai kemampuan sebuah kelompok sosial untuk mengarahkan masyarakat secara politis maupun moral. Menurut Gramsci, kelompok hegemon memperoleh kewenangan melalui

⁴⁷ Curtis, W. dan Pettigrew, A. 2009. *Learning in Contemporary Culture*. Exeter: Learning Matters.

⁴⁸ Gramsci, A. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. Dalam Q. Hoare and G. Nowell Smith (ed. dan penj.). London: Lawrence & Wishart

⁴⁹ Gramsci, A. 1971. *Ibid*.

persuasi intelektual, moral dan budaya, atau disetujui oleh masyarakat yang diperintah tanpa menerapkan cara-cara paksaan baik secara kekerasan, politik atau ekonomi. Paksaan (*coercion*) selalu merupakan hal paling akhir digunakan untuk mendukung hegemoni. Untuk menjadi hegemon, sebuah kelompok harus menyatukan fitur paksaan dan persetujuan melalui bingkai 'dwi perspektif', yaitu pada tingkatan kekuatan pemaksa (*force*) dan tingkatan persetujuan (*consent*): kewenangan dan hegemoni, kekerasan dan peradaban, momen individu dan momen universal. Oleh karena itu, paksaan atau dominasi dan persetujuan atau kepemimpinan intelektual-moral menjadi aspek-aspek konsensual dari 'strategi dialektis' sebuah kelompok sosial untuk memegang kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat.

- Untuk menjadi hegemon, sebuah kelompok harus menyatukan fitur paksaan dan persetujuan melalui bingkai 'dwi perspektif', yaitu pada tingkatan kekuatan pemaksa (*force*) dan tingkatan persetujuan (*consent*)

Gramsci sendiri sebenarnya bukanlah tokoh orisinal teori hegemoni, bahkan ia menyebut Ilich Lenin sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas 'konsepsi dan praktek' hegemoni (Gramsci, 1971: 381)⁵⁰, bahkan istilah itupun diambilnya dari pamflet Lenin *What is to be Done?* (1902), dengan istilah aslinya '*gegemoniya*' (Boothman, 2008: 35)⁵¹. Sekalipun demikian, Gramsci berbeda pandangan dengan tokoh komunis tersebut. Bila Lenin memandang ekonomilah yang menentukan budaya dan politik, Gramsci meyakini bahwa budaya dan ekonomi diorganisir dalam suatu bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Proses inilah yang disebut dengan istilah '*hegemoni*' (Jones, 2006: 5)⁵².

Dalam teori Gramsci, hegemoni adalah sebuah konsepsi yang dapat menjelaskan setidak-tidaknya dua hal: *pertama*, tentang bagaimana para aparatur negara atau suatu masyarakat politik—dengan memberi dan memperoleh dukungan dari kelompok ekonomi tertentu—dapat memaksa berbagai strata dalam masyarakat untuk menerima status quo, melalui lembaga-lembaga hukum, kepolisian, tentara dan tahanan; dan *kedua*, ini yang lebih penting, hegemoni adalah suatu konsepsi yang menjelaskan tidak saja tentang bagaimana satu kelompok ekonomi memanfaatkan secara paksa aparatur negara demi kelanggengan status quo tetapi juga bagaimana dan dimanakah masyarakat politik, sekaligus masyarakat sipil, bersama-sama dengan semua lembaga-lembaga yang mereka miliki, mulai dari lembaga kependidikan, keagamaan, dan keluarga hingga ke satuan terkecil kehidupan sosial—memproduksi makna dan nilai yang pada giliran berikutnya dapat menghasilkan, mengarahkan dan meneguhkan bentuk-bentuk kesepakatan secara

⁵⁰ Gramsci, A. 1971. *Ibid.*

⁵¹ Boothman, D. 2008. Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci's Concept of Hegemony. Dalam: Howson, R. dan Smith, K. (eds.). *Hegemony Studies in Consensus and Coercion*. New York: Routledge, 33-50

⁵² Jones, S. 2006. *Antonio Gramsci*. New York: Routledge.

'spontan' dari berbagai strata dalam masyarakat tersebut dengan pihak status quo (Holub, 1992: 5)⁵³.

Dalam persoalan praktek-praktek budaya (*cultural practices*), Gramsci tidak hanya menyorot aspek konsumsi atau penerimaan budaya semata, akan tetapi juga mengupas pentingnya aspek produksi atau bagaimana budaya tersebut dihasilkan. Analisis Gramsci tentang produksi budaya hegemonik menjelaskan bahwa organisasi material dari struktur hegemonik menyediakan sekaligus menjamin ruang yang besar bagi perkembangan budaya populer. Oleh karena itu, keseluruhan proses produksi budaya yang disebarkan oleh hegemoni tidak hanya perlu dijelaskan melalui analisis fungsi terhadap lembaga-lembaga budaya utama, melainkan juga melalui analisis terhadap praktek sosial dan budaya yang dijalankan oleh seluruh strata masyarakat budaya tersebut (Holub, 1992: 101-103)⁵⁴.

Dalam refleksinya mengenai praktek-praktek budaya sebagai *counter-hegemoni* terhadap ideologi dan budaya kaum borjuis, Gramsci menerapkan sejumlah level analisis. Pada satu level, Gramsci memandang realitas sebagai suatu tatanan atau pola yang bersifat rasional dan fungsional (*a rational and functional order*); pada level lain, ia memberikan rasionalitas dari hegemoni kaum borjuis. Karena proses hegemoni merupakan sesuatu yang bersifat kompleks, maka Gramsci menyarankan dalam analisisnya tentang budaya populer agar dilakukan validasi terhadap ekspresi budaya tersebut. Oleh karena itu, menurut Gramsci, kemunculan dan kekuatan sebuah counter-hegemony akan tergantung pada dan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual. Kegiatan-kegiatan itulah yang akan memproduksi, mereproduksi dan mendiseminasi nilai dan makna yang melekat ke dalam konsepsi mengenai dunia yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip demokratis dan penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan (Holub, 1992: 108)⁵⁵. Secara umum, kita dapat menyatakan bahwa teori-teori atau konsepsi yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci amat relevan dengan kajian budaya kontemporer (Jones, 2006: 1)⁵⁶.

Keterkaitan antar Teori

Dalam berbagai kajian mengenai hegemoni, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat lima dimensi penting, yaitu: (a) dimensi '*power*', yaitu aspek kekuasaan yang dikembangkan oleh hegemon, terdiri dari '*hard hegemony*' dan '*soft hegemony*', (b) dimensi '*strength*', yaitu aspek kekuatan atau kemampuan dari hegemon, yang mengandung unsur struktural dan keterkaitan (*relationship*), (c) dimensi '*culture*', yaitu aspek budaya yang menjadi watak, keyakinan dan nilai-nilai dari hegemon, terdiri dari watak menyebarkan nilai-nilai ke luar dirinya (dalam hal ini globalisasi), watak homogenisasi

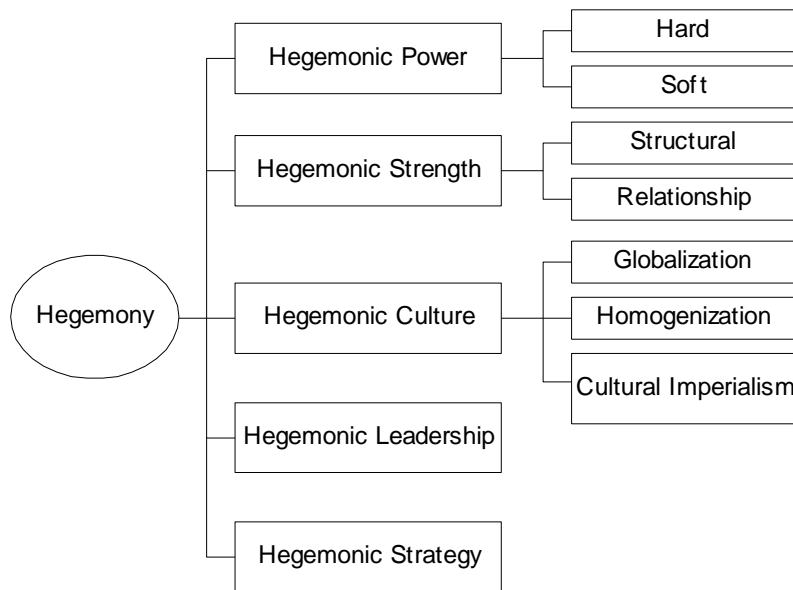
⁵³ Holub, R. 1992. *Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism*. London dan New York: Routledge.

⁵⁴ Holub, R. 1992. *Ibid.*

⁵⁵ Holub, R. 1992. *Ibid.*

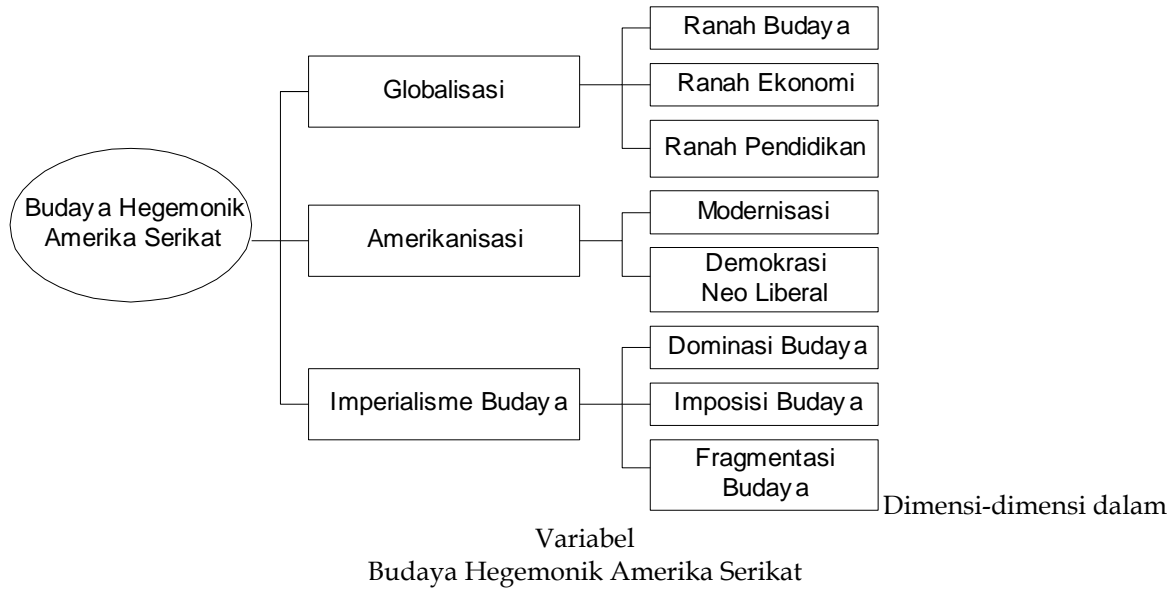
⁵⁶ Jones, S. 2006. *Antonio Gramsci*. New York: Routledge.

(dalam hal ini menjadi Amerikanisasi), dan watak mengeksploitasi sumber daya yang dihegemoni (dalam hal ini imperialisme budaya), (d) dimensi 'leadership', yaitu aspek kepemimpinan dari hegemon, yang biasanya bersifat sentralistik atau terpusat di dalam dirinya, ekspansionistik atau kecenderungan untuk meluaskan wilayah kepemimpinannya, dan intervensi atau kecenderungan untuk selalu ikut campur tangan urusan di luar dirinya, dan (e) dimensi 'strategi', yaitu berbagai perhitungan atau upaya yang dilakukan oleh hegemon untuk mempertahankan hegemoninya. Dari kelima dimensi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek budaya- *hegemonic culture*- terutama karena beranjak dari wilayah American Studies yang lebih menitik beratkan pada aspek budaya Amerika.

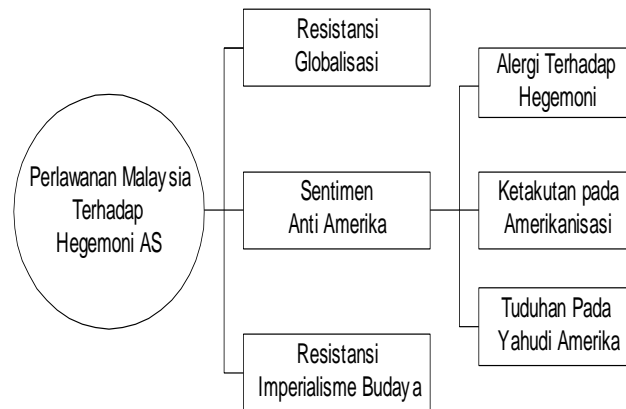


Dimensi Kajian Hegemoni

Penelitian ini mengkaji hubungan saling mempengaruhi (*causal relationship*) antara Budaya Hegemonik AS sebagai variabel yang mempengaruhi dan Perlawanan terhadap budaya hegemonik sebagai variabel yang dipengaruhi. Untuk mengembangkan kerangka teori bagi Budaya Hegemonik Amerika Serikat, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam budaya tersebut, yaitu Globalisasi, Amerikanisasi dan Imperialisme Budaya. Masing- masing dimensi ini mempunyai beberapa unsur: (a) Globalisasi diuraikan dalam ranah budaya, ranah ekonomi dan ranah pendidikan, (b) Amerikanisasi ditelaah dalam bentuk modernisasi dan demokrasi neo-liberal, dan (c) Imperialisme Budaya dipotret dalam aspek dominasi, imposisi dan fragmentasi.



Sebagai 'counter-hegemony', ada tiga dimensi juga yang menjadi bentuk perlawanan atas budaya hegemonik Amerika, yaitu: (a) resistensi terhadap globalisasi, (b) resistensi terhadap Amerikanisasi dalam wujud Sentimen Anti-Amerika, dan (c) resistensi terhadap imperialisme budaya.



Dimensi Perlawanan terhadap Budaya Hegemonik AS

Metode Pengumpulan Data

Melalui pendekatan sejarah, data peristiwa dikumpulkan dan dianalisis melalui metode proses pelacakan kronologi peristiwa (*process tracing*) dalam rentang waktu sepuluh tahun (1990-2000). Andrew Bennet and Alexander George (2001: 144)⁵⁷

⁵⁷ Bennett, A. dan George, A. 2001. Case Studies and Process Tracing in History and Political Science: Similar Strokes for Different Foci. Dalam: Elman, C. dan Elman, M. F. (eds). *Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations*. Cambridge: MIT Press, MA: 137-166.

menggambarkan metode proses pelacakan kronologi peristiwa sebagai ‘upaya untuk melacak secara empiris berbagai sekuens peristiwa kausalitas yang mungkin dan bersifat temporal di dalam sebuah kasus yang muncul di antara variabel-variabel independen dan keluaran-keluaran yang diamati’. George dan Bennett (2005: 206)⁵⁸ menjelaskan bahwa metode proses pelacakan kronologi peristiwa dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk mengidentifikasi proses sebab-akibat yang mengintervensi —lingkaran sebab akibat dan mekanismenya— antara variabel bebas (atau variabel-variabel) dan keluaran dari variabel terikat. Metode ini pernah digunakan oleh David T. Armitage, Jr., (2005: 14-15)⁵⁹ dalam penelitian disertasinya berjudul *Enduring Dilemmas: Sources of American Ambivalence toward European Defense Autonomy, the EDC and ESDP in Comparative Perspective*, yang memusatkan kajiannya pada dua periode utama dalam hubungan pertahanan trans-Atlantik, yaitu dalam kurun 1945 hingga 1950 —sejak dibentuknya NATO hingga pertahanan Masyarakat Pertahanan Eropa (*the European Defense Community*—EDC), dan dalam kurun 1998 hingga 2003 (sejak Deklarasi Santa Malo hingga misi militer pertama Uni Eropa).

Dalam buku ini, untuk kronologi peristiwa yang terjadi di AS, peneliti membagi dalam dua periode, yakni periode kepemimpinan George Herbert Walker Bush (*the George H.W. Bush Administration*) sejak tahun 1990 hingga akhir jabatannya tanggal 20 Januari 1993, dan periode kepemimpinan William Jefferson “Bill” Clinton (*the William J. Clinton Administration*) sejak pelantikannya tanggal 20 Januari 1993 hingga menjelang berakhirnya masa jabatannya di tahun 2000. Pembagian periode ini beranjak dari sebuah asumsi bahwa latar belakang partai politik dari kedua aktor (yang pertama berasal dari Partai Republik, dan yang kedua diusung dari Partai Demokrat) akan menentukan kebijakan luar negeri AS khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan hubungan antar negara baik yang bersifat bilateral maupun multi lateral. Namun lebih dari itu, data-data penelitian yang terjadi dalam kedua kurun tersebut berguna untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam setiap kurun lengkap dengan segala kemungkinan faktor-faktor penyebab (variabel sebab) dan keluarannya (variabel keluaran). Pembagian periode ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah perbandingan melalui proses pelacakan kronologi peristiwa (*process tracing*) dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara yang diteliti. Metode perbandingan di sini diletakkan sebagai sebuah metode untuk menemukan hubungan-hubungan empiris antar variabel (Lijphart, 1971: 683)⁶⁰.

Dalam pengkajian mengenai pandangan aktor politik, data dikumpulkan melalui sumber primer, yaitu naskah-naskah pidato politik yang disampaikan dalam berbagai

⁵⁸ Bennett, A. dan George, A. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press.

⁵⁹ Armitage, D. T. Jr. 2005. *Enduring Dilemmas: Sources of American Ambivalence toward European Defense Autonomy, the EDC and ESDP in Comparative Perspective*. University of Maryland.

⁶⁰ Lijphart, A. 1971. *Comparative Politics and the Comparative Method*. *The American Political Science Review*, Vol. 65, No. 3: 682-693.

forum publik, baik pada acara resmi kenegaraan, forum ilmiah, rapat atau pertemuan masyarakat bisnis maupun pada saat memberikan pidato sambutan di acara-acara publik. Sumber primer tersebut diperoleh dalam bentuk kumpulan pidato yang dibukukan atau disajikan secara on-line pada situs resmi (*official web site*). Penggunaan sumber primer ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan distorsi yang dilakukan oleh sumber sekunder.

Metode Analisis Data

Ada dua wilayah kajian yang ditelaah dalam penelitian ini, yaitu: (a) peristiwa (*events*) dan (b) wacana politik (*political discourse*). Peristiwa disini dikaji sebagai sebuah obyek penelitian yang mempunyai 'hubungan-hubungan partonomik' (*partonomic relationships*), yaitu bagaimana hubungan-hubungan setiap kegiatan atau aktifitas dalam suatu peristiwa dapat dilacak dari kapan atau waktu kejadiannya (Miller dan Johnson-Laird, 1976⁶¹; Tversky, 1990⁶²; Tversky & Hemenway, 1984⁶³). Rangkaian kegiatan yang dihubungkan berdasarkan kapan atau waktu kejadian tersebut menghasilkan 'episode perilaku' (*behavior episode*) (Barker dan Wright, 1954: 274-302)⁶⁴.

Untuk meneliti hubungan-hubungan partonomik dalam berbagai peristiwa yang diamati dalam penelitian ini maka disertasi ini menggunakan *Event Structure Analysis* (ESA) sebagai tehnik analisis data. ESA memandang proses sosial sebagai serangkaian peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai nilai signifikansi terhadap proses sejarah. Tehnik ini berkembang dari metode penyajian data secara naratif dalam metode kualitatif oleh David R. Heise (1989: 140)⁶⁵ untuk memahami hubungan struktur logika antara berbagai sekuel peristiwa. Heise menjelaskan bahwa suatu tindakan (*action*) dijalankan berdasarkan aturan sebab akibat (*if-then rules*): jika suatu konfigurasi kondisi tertentu muncul, maka suatu akibat atau hasil tertentu akan hadir (*if a certain configuration of conditions arises, then a certain production occurs*). Secara garis besar, tehnik analisis struktural ini melalui tiga tahap sebagai berikut: 1) melihat berbagai kejadian atau peristiwa dan menentukan hubungan-hubungan logisnya, 2) mengkaji rangkaian peristiwa tersebut untuk menunjukkan konsistensinya terhadap struktur implikasi dan asumsi-asumsi modelling lainnya, dan 3) mengkaji

⁶¹ Miller, G., dan Johnson-Laird, P. N. 1976. *Language and Perception*. Cambridge, MA: Belknap Press.

⁶² Tversky, B. 1990. Where Partonomies And Taxonomies Meet. Dalam: S. L. Tsohatzidis (Ed.), *Meanings And Prototypes: Studies In Linguistic Categorization*. London: Routledge: 334-344

⁶³ Tversky, B., dan Hemenway, K. 1984. Objects, Parts, and Categories. *Journal of Experimental Psychology: General*, No. 113: 169-193.

⁶⁴ Barker, Roger G. Wright, Herbert F. 1954. *Midwest and its Children: The Psychological Ecology of an American Town*. New York: Row, Peterson and Company

⁶⁵ Heise, David R. 1989. Modeling Event Structures. *The Journal of Mathematical Sociology*. Vol.14, Issue 2-3: 139-169

kembali untuk menguji prioritas-prioritas peristiwa (Heise, 1989: 146-150)⁶⁶. Keseluruhan analisis data ini digunakan untuk menggambarkan simulasi model penelitian.

Sedangkan untuk menganalisis wacana politik (*political discourse analysis*), penelitian ini memusatkan telaah kritis terhadap pidato-pidato politik (*Political Speech Analysis*, disingkat PSA) yang disampaikan oleh aktor-aktor politik penting (*significant political actors*) dalam kajian ini. Untuk menentukan apakah kandungan naskah suatu pidato termasuk ke dalam wacana politik atau political text, kita dapat mengujinya dari aspek tematik dan fungsional (*functional and thematic criteria*) (Schaffner, C. 1997a: 1)⁶⁷. Secara tematik, naskah pidato tersebut berhubungan dengan dunia politik, seperti kegiatan-kegiatan politik (*political activities*), gagasan politik (*political ideas*), hubungan-hubungan politik (*political relations*) dan sebagainya; sedangkan secara fungsi, sebuah naskah pidato politik dirancang untuk kepentingan, audience dan kesempatan tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan politik, seperti untuk membuat atau mempengaruhi keputusan-keputusan politik— yaitu keputusan-keputusan yang menguatkan kerjasama politik, distribusi sumber daya sosial, pemantapan atau perubahan aturan dan norma tertentu, dan sebagainya (van Dijk, 1997: 14)⁶⁸.

Metode PSA merupakan bagian dari tehnik analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang mengkhususkan diri pada naskah (teks). Teun A. Van Dijk (2006: 359-361)⁶⁹ menjelaskan bahwa Analisis Wacana Kritis (CDA) adalah jenis penelitian analitis wacana yang terutama mempelajari bagaimana ketidaksetaraan, dominasi, dan penyalahgunaan kekuatan sosial diterapkan, direproduksi, dan ditentang oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik.

Dalam kajian linguistik mengenai wacana politik, pidato politik (*political speech*) dapat dijelaskan secara detail dari perilaku bahasa ke dalam perilaku politik secara makro dan mikro, sehingga aspek kajiannya dapat meliputi aspek-aspek pragmatis (interaksi antara pembicara dengan pendengar), semantis (makna dan struktur leksikon), sintaksis (pola kalimat) dan fonologi fonetis (intonasi, pola tekanan dan jeda) (Schäffner, 1997b: 2-3)⁷⁰. Dalam kepentingan kajian ini, PSA digunakan untuk mengetahui dimana posisi seorang aktor politik dalam suatu wacana ideologi-politik, bukti-bukti tekstual atas sikap dan pandangan politiknya serta untuk menunjukkan hubungan antara wacana ideologi-politik tersebut dalam konteks perdebatan mengenai berbagai isu yang terdapat dalam penelitian ini.

⁶⁶ Heise, David R. *Ibid.*

⁶⁷ Schaffner, Christina. 1997. Strategies of Translating Political Texts. Dalam: Trosborg, Anna (ed). *Text Typology and Translation*. Amsterdam: John Benjamins: 119-144.

⁶⁸ Van Dijk, A.T. 1997. *Discourse as Structure and Process of Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Volume I. London: SAGE Publications

⁶⁹ Van Dijk, T. A. 2006. Discourse and Manipulation. *Discourse & Society*. 17(2): 359-383

⁷⁰ Schäffner, C. (ed.). 1997. *Analyzing Political Speeches*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Dalam tradisi AS, Presiden adalah subyek terpenting dalam budaya politik Amerika, dan oleh karena itu, “*he has the greatest ability to influence the discourse surrounding any particular issue*” (Edwards dan Valenzano III, 2007: 303)⁷¹. Kemampuan untuk mempengaruhi budaya tersebut dilakukan dalam strategi wacana untuk mengkomunikasikan preferensi kebijakan dan pandangan politik, sehingga dapat dikatakan pula pidato-pidato Presiden tersebut adalah titik sentral dalam strategi memerintah yang menjadi pusat perhatian sastra politik Amerika (Eshbaugh-Soha, 2010: 1)⁷².

Pentingnya Metode Analisis Pidato Politik dari Pejabat Pemerintahan khususnya Presiden dalam kajian budaya hegemonik pasca Perang Dingin ini juga dilatar belakangi oleh fakta yang disampaikan oleh Siobhán McEvoy-Levy (2001: 1)⁷³ bahwa diskusi dan analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-Perang Dingin telah banyak mengabaikan sekumpulan data dan bukti dokumenter yang penting dari tanggapan resmi Amerika Serikat hingga akhir Perang Dingin seperti yang ditemukan dalam pidato, pernyataan dan wawancara dari anggota kunci dari pemerintahan Bush dan kemudian dari kampanye dan surat-menyurat resmi Clinton. Oleh karena itu, untuk memperkuat analisis penelitian, penulis menggunakan data-data primer, khususnya pidato dan pernyataan-pernyataan politik di masa pemerintahan Presiden yang sedang berkuasa.

⁷¹ Edwards, J. A. dan Valenzano III, J. M. 2007. Bill Clinton’s “New Partnership” Anecdote toward a Post-Cold War Foreign Policy Rhetoric. *Journal of Language and Politics*. Vol. 6. No. 3 : 303–325.

⁷² Eshbaugh-Soha, M. 2010. The Politics of Presidential Speeches, *Congress & the Presidency*, Vol. 37, No.1: 1-21.

⁷³ McEvoy-Levy, S. 2001. American Exceptionalism and US Foreign Policy: Public Diplomacy at the end of the Cold War. New York: PALGRAVE.

II

Budaya Hegemonik Amerika Serikat: Mimpi dan Mitos

Pengertian Hegemoni

Menurut etimologinya, kata "hegemoni" berasal dari bahasa Yunani *hegemonia*, yang artinya adalah kepemimpinan, khususnya kepemimpinan militer, misalnya pada saat sekelompok tentara Sparta mengalahkan tentara Persia pada abad 5 SM. Secara tradisional, hegemoni didefinisikan sebagai sebuah bentuk interaksi internasional dan hubungan kepemimpinan yang terjadi dan tetap bertahan melalui penggunaan sumber-sumber daya kekuasaan (*power resources*), kehendak dan kemampuan strategis dari negara yang menerapkan hegemoni, serta penyerahan secara sukarela dari negara-negara yang dihegemoni (Robel, 2001:21).⁷⁴

Dalam konteks kekuatan global, Doran (1971: 70)⁷⁵, Keohane (1984: 32)⁷⁶ dan Calleo, D. P., (1987)⁷⁷ menggunakan istilah "hegemoni", yang sering dipertukarkan dengan istilah "imperium" atau *empire*. Bahkan, Geir Lundestad (1990)⁷⁸ secara tegas meyakini bahwa hegemoni dan imperium secara esensial adalah entitas yang sama. Akan tetapi, menurut Agnew istilah hegemoni dan *empire* mempunyai asal usul kata dan makna yang berbeda. Bahkan, adalah sangat mungkin bagi sebuah *empire* untuk membangun kekuasaannya tanpa hegemoni (Agnew, 2005: 13)⁷⁹.

Di banyak studi tentang kebijakan politik luar negeri pasca Perang Dingin, hegemoni biasanya digunakan dalam pengertian yang sinonim dengan dominasi (*domination*) atau kedaulatan tertinggi (*omnipotence*), dan terkadang pula dimaknakan dengan kekuasaan imperium (*empire*). Dengan kata lain, hegemoni internasional, dalam definisi yang diberikan dalam berbagai kepustakaan, telah dihubungkan dengan dominasi dan kepemimpinan dari sebuah negara yang berkuasa penuh di dalam sistem hubungan internasional, yang memperoleh kekuasaan atas negara-negara lainnya (Gill, 2003: 41-

⁷⁴ Robel, Stefan. 2001. *Hegemonie in den Internationalen Beziehungen: Lehren aus dem Scheitern der 'Theorie Hegemonialer Stabilität'*, Dresdner Arbeitspapiere Internationale Beziehungen, DAP- 2, Dresden

⁷⁵ Doran, C. F., 1971. *The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

⁷⁶ Keohane, R. O., 1984, *After Hegemony*. Princeton: Princeton University Press, N.J.

⁷⁷ Calleo, D.P., 1987. *Beyond American Hegemony: The Future of the Western Alliance*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.

⁷⁸ Lundestad, Geir. 1990. *The American "Empire" and Other Studies of US Foreign Policy in a Comparative Perspective*. Oxford University Press, Oxford.

⁷⁹ Agnew, J. 2005. *Hegemony: The New Shape of Global Power*. Philadelphia: Temple University Press

41).⁸⁰ Sebagai contoh, dapat dilihat dari pengertian hegemoni yang diberikan oleh Schroeder (2003: th)⁸¹ berikut ini, "Hegemoni berarti kepemimpinan yang tegas dan diakui, serta pengaruh dominan oleh satu unit di dalam sebuah komunitas yang tidak berada di bawah satu otoritas." Oleh karena itu dalam sistem yang hegemonik, suatu negara yang adidaya (*paramount state*) mempertahankan tatanan yang sepadan dengan dirinya (*semblance order*) dan menggunakan kekuasaan dan persuasi untuk memaksa aturan-aturan dalam sistem internasional (O'Brien, 2002: 3-4).⁸²

William I. Robinson (2005: 1-2)⁸³ menyebutkan bahwa perspektif para ahli mengenai hegemoni dalam kajian-kajian tatanan internasional (*international order*) dan sistem kapitalis dunia (*the world capitalis system*) terbagi ke dalam empat sudut pandang sebagai berikut:

- 1) Hegemoni sebagai bentuk dominasi internasional yang disebut oleh paradigma kaum strukturalisme sebagai teori stabilitas hegemoni sebagaimana yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979) dan Robert O. Keohane (1984);
- 2) Hegemoni sebagai bentuk hegemoni negara, sebagaimana yang tergambar dalam esai Wallerstein, 'The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy' (1984), dan studi Arrighi (1994) berjudul *The Long Twentieth Century*;
- 3) Hegemoni sebagai sebuah bentuk dominasi konsensual atau hegemoni ideologis, yang ditunjukkan dalam karya-karya Gramsci, Habermas dan Bourdieu;
- 4) Hegemoni sebagai bentuk latihan kepemimpinan di dalam blok-blok sejarah pada tatanan dunia tertentu yang diperlihatkan oleh Robert Cox dan perspektif neo-Gramscian, dan diilustrasikan dengan baik oleh studi Rupert berjudul *Producing Hegemony* (1995).

Dalam perspektif Immanuel Wallerstein (2002: 357)⁸⁴, hegemoni adalah sebuah situasi di mana satu negara mampu memaksakan aturan-aturan miliknya ke dalam sistem antar negara, dan mampu menciptakan tatanan politik baru, dimana negara tersebut menikmati keuntungan ekstra atas berbagai perusahaan yang berada di dalam Negara yang dikuasai atau diproteksinya, keuntungan-keuntungan yang sebenarnya tidak dicapai

⁸⁰ Gill, Stephen. 2003. *Power and Resistance in the New World Order*. London and New York. Macmillan-Palgrave.

⁸¹ Schroeder, Paul. 2003. *Is the US an Empire? History News Network*. George Mason University. Dapat diunduh di:

<http://historynewsnetwork.org/article/1237>

⁸² O'Brien, P. K. 2002 'The Pax Britannica and American Hegemony: Precedent, Antecedent or Just another History?', in O'Brien & Clesse (eds.) *Two hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941- 2001*. Aldershot & Burlington: 3-64

⁸³ Robinson, W. I. 2005. Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. Vol. 8, No. 4, 1-16.

⁸⁴ Wallerstein, I. 2002. 'Three hegemonies', dalam O'Brien, P. K. & Clesse, A. (eds.). *Two hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941-2001*. Aldershot & Burlington: Asgate.

melalui 'pasar' melainkan melalui tekanan politik. Robert Cox (1993: 42)⁸⁵ memberikan definisi yang inklusif dari hegemoni, "Hegemoni adalah sebuah struktur nilai dan pengertian mengenai sifat alamiah dari tatanan yang mengisi keseluruhan sistem entitas negara dan non negara." Menurut Cox, dalam tatanan hegemonik, struktur nilai dan pengertian mengenai karakteristik tatanan tersebut cenderung bersifat stabil dan diterima begitu saja melalui proses struktur kekuatan dari sebuah negara yang dominan yang mencengkram strata sosial negara lainnya.

J. Josep (2002: 128)⁸⁶ membagi hegemoni dalam dua bentuk, yakni: (1) bentuk hegemoni yang bersifat struktural, yang menekankan pada kondisi-kondisi yang telah berurat akar secara mendalam (*deep-rooted*) di dalam masyarakat dan kesatuan formasi sosial; dan (2) bentuk hegemoni yang bersifat strategis dengan menekankan praktek nyata dari hegemoni. Para ahli strukturalis membagi hegemoni dalam tiga bentuk: (1) Hegemoni Satu Poros (*Unipolarity*), yaitu hegemoni yang dipegang secara dominan oleh satu Negara seperti Amerika Serikat pasca Perang Dingin, (2) Hegemoni Dwi Poros (*Bipolarity*) atau kekuasaan dwi-hegemonik, yaitu dua negara secara bersama-sama memegang kekuasaan dominasi seperti Atena dan Sparta pada paruh abad 5 atau Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, dan (3) Hegemoni Multi Poros (*Multipolarity*) atau kekuasaan kolektif-hegemonik, dimana tiga atau lebih negara secara bersama-sama memegang kekuasaan dominasi seperti lima kerajaan (Britania Raya, Perancis, Rusia, Austria dan Prussia) di Eropa sesudah tahun 1815. Kenneth N. Waltz (1979: 131)⁸⁷ menjelaskan, untuk dapat mempunyai kekuasaan poros (*polar powers*) tersebut, negara harus mempunyai nilai tertinggi dalam semua komponen 'power', seperti populasi dan kewilayahan (*population and territory*); hak-hak legal sumber daya yang dimiliki (*resource endowment*); ketangguhan di bidang ekonomi (*economic capabilities*) dan militer (*military strength*); dan nilai-nilai keunggulan spesifik lainnya (*competency*).

Hegemoni juga dapat dilihat dalam dua wajah: hegemoni yang keras (*hard hegemony*) dan hegemoni yang lembut (*soft hegemony*). Hegemoni dalam wajah yang pertama menampilkan sebuah sistem dominasi yang ditegakkan melalui jalan paksaan, namun tetap berupaya mencari dukungan dari negara-negara yang disub-ordinasi, sebagaimana jalan pikiran Ikenberry dan Kupchan (1990: 56)⁸⁸ dalam 'model pemaksaan' (*coercion model*) yang mereka ajukan, serta Pedersen (2002: 682)⁸⁹ dalam model 'hegemoni unilateral' nya; sedangkan dalam wajahnya yang lain, hegemoni lebih berupaya untuk memodifikasi dan

⁸⁵ Cox, R. W. 1993. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*, Stephen Gill (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

⁸⁶ J. Joseph, 2002. *Hegemony: A Realist Analysis*. London and New York: Routledge

⁸⁷ Waltz, K. N. 1979. *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing.

⁸⁸ Ikenberry, John G. and Kupchan, Charles A. 1990. The Legitimation of Hegemonic Power, in: Rapkin, David P. (ed.): *World Leadership and Hegemony*. Boulder, Col./London: Lynne Rienner: 49-69.

⁸⁹ Pedersen, Thomas. 2002. Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. *Review of International Studies* 28: 677-696

mempertajam kembali norma-norma dan nilai dari negara yang disub-ordinasi sebagaimana dijelaskan dalam 'model persuasi' yang dikemukakan Ikenberry dan Kupchan (1990: 57)⁹⁰.

- ❑ Hegemoni juga dapat dilihat dalam dua wajah: hegemoni yang keras (*hard hegemony*) dan hegemoni yang lembut (*soft hegemony*).

Mearsheimer (2001: 40)⁹¹ mendefinisikan sebuah negara yang hegemonik (hegemon) sebagai "sebuah negara yang demikian berdaya sehingga mampu menguasai seluruh negara lain ke dalam sistem kekuasaannya." Untuk menjadi sebuah negara hegemon saat ini, Uzgel (2003: 31)⁹² menyebutkan beberapa persyaratan, antara lain: (a) mata uang yang berdaya di dalam sistem moneter dunia, (b) postur kekuatan militer yang besar dengan negara-negara sekutunya dengan pangkalan militer di beberapa belahan dunia, (c) mempunyai kepemimpinan yang disegani di saat terjadinya krisis atau konflik dalam kawasannya, (d) menggenggam kekuatan nuklir dunia, (e) mampu mempengaruhi bahkan menentukan kebijakan-kebijakan strategis negara lain, (f) mempunyai legitimasi status melalui penyebaran nilai-nilai dan standar kehidupan secara budaya ke seluruh antero dunia; sedangkan Brzezinski (2004: 87) meringkasnya ke dalam tiga serangkai (*the troika of a hegemon*): (a) uang, (b) kapasitas produksi, dan (c) kekuatan militer. Nye, Jr. J. S. (2003: 30) menjelaskan bahwa sumber kekuatan hegemonik sebuah negara berasal dari: (a) kepemimpinan di bidang teknologi (*technological leadership*), (b) keunggulan di bidang militer dan ekonomi (*supremacy in military and economy*), (c) Soft power, dan (d) kemampuan mengendalikan jalur komunikasi internasional.

Gambaran pasang surut kekuasaan negara-negara hegemon dalam sejarah dilukiskan oleh George Modelski (1987: 6)⁹³ dalam bentuk grafik dimana kekuasaan hegemonik Amerika Serikat Pasca Perang Dunia Kedua, terlebih lagi Pasca Perang Dingin, adalah yang paling besar dalam sejarah peradaban modern. Secara ekonomi, Modelski dan Thompson (1996: 69, 171, 191)⁹⁴ melihat bahwa setiap negara hegemon mempunyai satu atau beberapa sektor yang menjadi andalan (*leading sector*) bagi kekuatan hegemoninya.

Sebuah sistem hegemonik ada ketika salah satu negara-bangsa telah mencapai dominan militer dan kekuatan ekonomi dan juga telah meyakinkan negara-negara bawahan bahwa itu adalah dalam kepentingan terbaik mereka untuk menerima kepemimpinan kekuatan dominan, karena ideologi hegemon yang kemungkinan besar

⁹⁰ Ikenberry, John G. and Kupchan, Charles A. *Ibid*.

⁹¹ Mearsheimer, J. J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.

⁹² Uzgel, I. 2003, Hegemonic Power Box (Hegemon Güç Kutusu), (Ed. Baskın Oran), Türk Dış Politikası, Cilt I, İletişim Yayınları, İstanbul., dikutip dari Yilmaz, S. 2010. State, Power, and Hegemony. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 3: 192-205.

⁹³ Modelski, G. 1987. The Study of Long Cycles. Dalam : Ders. (Ed.), *Exploring Long Cycles*. Lynne Rienner. Boulder: 1-15.

⁹⁴ Modelski, G. dan Thompson, W.R. 1996. *Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Politics and Economies*. Columbia: University of South Carolina Press.

akan mempromosikan nasional dan kepentingan kolektif dari negara-negara bawahan (Sanchez, 2007: 8).⁹⁵ Sanchez menekankan kekuatan ekonomi dan militer yang dapat meyakinkan negara subordinasi untuk menerima kepemimpinannya sebagai prasyarat bagi tegaknya sebuah hegemoni. Kedua kekuatan tersebut (ekonomi dan militer) mempunyai nilai penting sebagai faktor penentu bagi sebuah negara untuk dapat menjadi hegemon atas negara lainnya.

Giovanni Arrighi (1994: 4-6)⁹⁶ menggunakan pendekatan Braudelian untuk analisis apa yang ia sebut "siklus sistemik akumulasi" (*systemic cycle of accumulation*). Arrighi melihat hegemoni sebagai kolaborasi sukses antara kapitalis keuangan dan pemegang sebenarnya (*wielders*) kekuasaan negara. Kajiannya mengenai hegemoni dimulai dengan meneliti hubungan antara kaum pemodal Genoa yang bersekutu dengan negarawan Spanyol dan Portugis untuk melakukan peran hegemon di abad kelima belas. Dalam pendekatan Arrighi ini peran hegemon itu sendiri berkembang, menjadi lebih dalam terjalin dengan bidang kelembagaan organisasi dan ekonomi yang memungkinkan untuk akumulasi kapitalis sukses. Inilah yang disebutnya sebagai siklus sistemik akumulasi. Masing-masing periode dinamakan dengan nama negara pemegang hegemoni: siklus Genoa - Iberia, yang membentang dari lima belas melalui awal abad ketujuh; siklus Belanda, yang membentang dari keenam belas akhir melalui akhir abad kedelapan belas; siklus Inggris, membentang dari pertengahan kedelapan belas melalui awal abad kedua puluh; dan siklus AS, yang membentang dari akhir abad kesembilan belas melalui fase saat ekspansi keuangan (Arrighi dan Silver, 1999: 38-39).⁹⁷

American Dream

Apa hubungan antara "mimpi" dan "budaya"? Bagi banyak orang Amerika, mimpi merupakan bagian integral dari identitas mereka sendiri dan fungsi vital dalam budaya Amerika (Kasiyarno, 2014: 14)⁹⁸. Semangat *American Dream* telah ditetapkan di dalam pikiran Amerika sejak sangat awal dari Amerika sebagai negara baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samuel, L. R. (2012: 2)⁹⁹: "*Tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami Amerika daripada dengan memahami sejarah budaya dari American Dream.*" Memang, tidak ada ide yang lebih dapat melukiskan secara lengkap idealisme budaya Amerika secara simbolis selain daripada mimpi Amerika, yang dari waktu ke waktu telah

⁹⁵ Sánchez, P. M. 2007. *Panama Lost? US Hegemony, Democracy, and the Canal*. Gainesville, Florida: University Press of Florida.

⁹⁶ Arrighi, G. 1994. *The Long Twentieth Century; Money, Power, and the Origins of Our Times*. London: Verso

⁹⁷ Arrighi, Giovanni dan Silver, Beverly J. 1999 *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis: University of Minnesota Press

⁹⁸ Kasiyarno. 2014. American Dream: The American Hegemonic Culture and its Implications to the World. *Humaniora*. Vol. 26: 13-21

⁹⁹ Samuel, Lawrence R. 2012. *The American Dream: A Cultural History*. Syracuse, NY: Syracuse University Press

mengungkapkan struktur paradigmatik bagi pencapaian secara nasional dan individual di Amerika Serikat.

- ❑ Bagi banyak orang Amerika, mimpi merupakan bagian integral dari identitas mereka sendiri dan fungsi vital dalam budaya Amerika (Kasiyarno, 2014: 14)

Dalam konteks hegemoni AS, budaya hegemonik dipandang sebagai kebutuhan seluruh dunia itu sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan semua bangsa menurut cara Amerika (Garrison, 2004: 35)¹⁰⁰. Budaya tersebut muncul dari nilai, keyakinan dan praktek tradisi yang berkembang luas di Amerika yang disebut dengan istilah *American ideal*, yaitu gagasan bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia yang dijanjikan selalu memperoleh kemenangan dan kedamaian (McDougall, 2004: 7)¹⁰¹.

- ❑ *American ideal* adalah gagasan bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia yang dijanjikan selalu memperoleh kemenangan dan kedamaian (McDougall, 2004: 7)

American ideal tersebut adalah penjelmaan dari sebuah cita-cita atau mimpi yang disebut *American Dream*, yang berangkat dari aspek mistis dari Visi tentang "Amerika" (*the Vision of "America"*), yaitu bahwa jauh sebelum "Amerika" menjadi sebuah bangsa, ia masih berupa benua, dan jauh sebelum ia menjadi benua, ia sudah ada dalam bentuk visi dan mimpi (Freese, 1990: 8)¹⁰².

- ❑ Visi tentang "Amerika" (*the Vision of "America"*) bahwa jauh sebelum "Amerika" menjadi sebuah bangsa, ia masih berupa benua, dan jauh sebelum ia menjadi benua, ia sudah ada dalam bentuk visi dan mimpi (Freese, 1990: 8)

Istilah *American Dream* ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1931 oleh James Truslow Adams, dalam bukunya *The Epic of America*¹⁰³, yang menggambarkan *American*

¹⁰⁰ Garrison, J. 2004. *America as Empire: Global Leader or Rogue Power?*. First Edition. San Francisco: Berrett Koehler Publishers, Inc.

¹⁰¹ McDougall, W. A. 2004. *The Constitutional History of U.S. Foreign Policy: 222 Years of Tension in the Twilight Zone*. Philadelphia: Center for the Study of America and the West at the Foreign Policy Research Institute

¹⁰² Freese, P. 1990. 'America'. Dream or Nightmare? Reflections on a Composite Image. Die Blaue Eule, Essen (dikutip dari: Müller, P. 2003. *Star Trek: The American Dream Continued? The Crisis of the American Dream in the 1960s and its Reflection in a Contemporary TV Series.*).

¹⁰³ *The Epic of America* melukiskan gambaran sangat rinci (*a sweeping picture*) masa lalu yang beragam yang telah menciptakan cerita nasional (kisah kebangsaan) Amerika. Dalam narasi penting ini, James Truslow Adams mengulas bagaimana Amerika berkembang secara matang dari waktu ke waktu dalam aspek cara pikir, karakter, dan opini. Adams tertarik pada seluruh sejarah Amerika, bagaimana sejarahnya dimulai, dan apa yang diwakili di paruh pertama abad kedua puluh. Dia menelusuri asal-usul historis dari konsep Amerika "lebih besar dan lebih baik," sikap terhadap bisnis, *American Dream*, dan karakteristik lain umumnya yang biasanya dianggap "khas Amerika." Sejak Amerika menjadi bangsa yang merdeka, setiap generasi telah

Dream sebagai mimpi Amerika untuk kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih bahagia bagi seluruh warga negaranya pada semua jenjang sebagai sumbangan terbesar Amerika pada pemikiran dan kesejahteraan dunia (Muller, 2003:11)¹⁰⁴. Kurang lebih tujuh puluh delapan tahun kemudian, senada dengan Adams, Goodman dan Goodman (2009: 1)¹⁰⁵ melukiskan *American Dream* dengan ungkapan bahwa:

Amerika adalah sebuah bangsa yang besar dan mengagumkan, namun saatnya kita membangun sebuah pencerahan baru bagi Mimpi Amerika kita. Ini adalah saat dimana seluruh individu, keluarga, kelompok pengusaha, komunitas dan bangsa kita seluruhnya menciptakan mimpi yang selaras dengan zaman

Jadi, *American Dream* tersebut dimulai dari kehidupan pribadi-pribadi warga negara Amerika yang masuk dalam dunia usaha, lalu berkembang di dalam berbagai komunitas-komunitas, dan membentuk sebuah Amerika baru yang mampu membangun dunia. 'Mimpi Amerika' untuk membangun dunia tersebut mendorong tumbuhnya proses penyebaran nilai-nilai Amerika (*American ideals*) melalui isu globalisasi, yang pada akhirnya menjadi sebuah "mimpi bersama secara global" (Delbanco, 1999: 117)¹⁰⁶.

Keberadaan *American dream* dan *American ideals* yang telah hadir bersamaan dengan lahirnya negara Amerika Serikat menjadi bukti sekaligus fondasi kuat bagi keberadaan budaya hegemonik di negara adi daya ini. Bangsa dan negara yang dihegemoni secara tidak sadar masuk ke dalam pusaran mimpi-mimpi bangsa Amerika, sehingga 'menjadi Amerika' adalah sesuatu yang harus diraih bila ingin menjadi bangsa yang unggul.

- ❑ Keberadaan *American dream* dan *American ideals* yang telah hadir bersamaan dengan lahirnya negara Amerika Serikat menjadi bukti sekaligus fondasi kuat bagi keberadaan budaya hegemonik di negara adi daya ini.

Penyebaran mimpi tersebut dioperasikan oleh mesin-mesin Amerikanisasi yang bekerja dalam hampir semua bidang dengan berbagai bentuknya. Pilihan dan keyakinan untuk menjadi bangsa yang besar adalah sebuah pilihan dan keyakinan yang dihidupkan secara terus menerus di dalam benak sanubari bangsa Amerika.

Mimpi dan Jiwa Bangsa Amerika

menyaksikan pemberontakan warganya untuk menyelamatkan *American Dream* dari kekuatan-kekuatan yang berusaha menguasai dan menghilangkan itu. Lihat: <http://www.worldcat.org/title/epic-of-america/oclc/779523>

¹⁰⁴ Müller, P. 2003. *Ibid*

¹⁰⁵ Goodman, D. dan Goodman, E. 2009. *Creating The New American Dream*. California: Goodman Experiences, LLC.

¹⁰⁶ Delbanco, A. 1999. *The Real American Dream: A Meditation on Hope*. Cambridge: Harvard University Press.

Amerika adalah "... tanah impian di mana kehidupan harus lebih baik dan lebih kaya dan lebih lengkap untuk semua orang (Adams, 1931: 404)¹⁰⁷. Semangat mimpi telah ditetapkan di dalam pikiran Amerika sejak sangat awal dari kelahiran Amerika sebagai negara baru. Pada Maret 1630, pemimpin Puritan John Winthrop menyatakan Amerika sebagai bangsa model untuk dunia. Dia menamakannya sebagai "Kota di atas bukit" (*a City upon the hill*), dan meminta rekan-rekannya untuk "*membiarkan terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga*". Pada kunjungannya ke Amerika pada tahun 1831, Seorang penulis Perancis Alexis de Tocqueville menegaskan bahwa itu adalah bangsa yang luar biasa dengan peran khusus untuk bermain dalam sejarah (Bossy, 2011)¹⁰⁸.

- Semangat mimpi telah ditetapkan di dalam pikiran Amerika sejak sangat awal dari kelahiran Amerika sebagai negara baru.

Pada tanggal 7 Juni 1776, Richard Henry Lee mengusulkan Kongres Kontinental mengeluarkan resolusi untuk kebebasan dari tiga belas koloni Amerika. Kongres mengangkat John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston, dan Roger Sherman untuk menyusun Deklarasi Kemerdekaan¹⁰⁹. Kunci untuk Deklarasi Kemerdekaan adalah klausul pembukaan paragraf kedua, yang menggambarkan gagasan tentang *American dream* di benak para pendiri negara AS tersebut yang berbunyi: "*Kami memegang teguh Kebenaran yang tak terbantahkan ini, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak azasi tertentu, antara lain meliputi hak untuk hidup (Life), hak untuk merdeka (Liberty), dan hak untuk memperoleh kebahagiaan (Pursuit of Happiness).*"

James Truslow Adams, orang yang pertama memperkenalkan istilah *American dream* di tahun 1931 ini, menulis (Adams, 1931: 415)¹¹⁰: Mimpi atau harapan tersebut telah hadir dari awal. Bahkan sejak kita menjadi bangsa yang merdeka, setiap generasi telah menyaksikan perjuangan dari warga biasa Amerika untuk menyimpan mimpi dari kekuatan-kekuatan yang tampak luar biasa itu." Latar belakang untuk teks singkat Adams pada *The Epic of America* adalah pembicaraan yang disampaikan oleh Presiden Herbert Hoover yang terinspirasi sebuah historiografi dadakan terkait dengan akar budaya populer Amerika (Olsson dan Bolton, 2010: 21-22)¹¹¹.

¹⁰⁷ Adams, J. T. 1931. *The Epic of America*. Boston: Little, Brown, and Company.

¹⁰⁸ Bossy, D. 2011. A City upon a Hill. *The Daily Caller*.

¹⁰⁹ Lihat Library of Congress. 2015. *Primary Documents in American History: Lee Resolution (1776)*. Virtual Service DigitalReference Section.

¹¹⁰ Adams, J. T. *Ibid*.

¹¹¹ Olsson, J, and Bolton, K. 2010. Mediated America: Americana as Hollywoodiana. In: Olsson, J, and Bolton, K. *Media, Popular Culture, and the American Century*. Stockholm: National Library of Sweden.

Harapan keberhasilan adalah titik kunci dari istilah Adams. Hal ini juga didukung oleh Hochschild (1995: 35)¹¹² dengan mengatakan bahwa impian Amerika telah memberikan "janji bahwa semua orang Amerika memiliki kesempatan yang wajar untuk mencapai keberhasilan karena mereka mendefinisikannya-bahan atau sebaliknya-melalui usaha mereka sendiri, dan untuk mencapai kebajikan dan pemenuhan melalui keberhasilan."Keberhasilannya dapat diukur dalam tiga tingkatan: absolut, di mana harapan sukses mencapai beberapa ambang kesejahteraan, relatif, ketika terdiri dalam menjadi lebih baik daripada beberapa titik perbandingan, dan kompetitif, pada titik di mana orang mencapai kemenangan atas orang lain (Hochschild, 1995: 17-18)¹¹³.

Semua pengukuran sebenarnya menunjukkan bahwa impian Amerika mirip dengan harapan keberhasilan dan kemenangan. Keduanya juga dapat dilihat sebagai alasan utama lahirnya Amerika Serikat. Fitur-fitur ini datang ke pola pikir Amerika dan mengembangkan budaya spesifik Amerika Utara, yang kemudian disebut sebagai budaya hegemonik. Impian Amerika adalah titik awal dan analisis utama di atas kertas ini. Hal ini secara tradisional dipahami sebagai mitos Amerika untuk sukses, ketenaran dan kekayaan melalui kerja keras dan hemat.

Ilusi di Miami

Selain kesuksesan, ketenaran dan kekayaan tersebut, mimpi yang sering ditawarkan Amerika melalui berbagai produk budaya populernya adalah kemegahan, kemewahan, kegagahan atau kepahlawanan (Kasiyarno, 2014: 18).¹¹⁴ Barangkali Miami adalah contoh paling bagus untuk bercerita tentang mimpi hidup dalam glamour atau kemewahan tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi kecil seperti diceritakan oleh Friedman, AT (2010)¹¹⁵:

Dalam sebuah wawancara baru-baru di rumahnya di Miami Beach, Lapidus menekankan kepada saya saat itu ia sering membuat dalam tulisan-tulisan itu: (saya) telah belajar banyak dari film tentang apa yang mewah dan glamor mungkin dapat terlihat dan bagaimana mereka mungkin dapat dipentaskan. Mansions penuh dengan barang-barang antik, patung-patung yang terbuat dari kayu eboni dan emas, kalung-kalung mutiara dan terik chandelier- semua barang ini adalah bagian dari mimpi Hollywood.

Dalam hal ini, konsep glamor seperti yang digambarkan di film-film Hollywood telah dikembangkan sebagai rujukan profesional bagi desainer Amerika. "Miami" telah menjadi komoditas bagi para pembuat film Hollywood untuk menjual citra tentang kemewahan. Sebuah film yang dibuat oleh Ian Fleming berjudul *Goldfinger* (dirilis pada 1964)

¹¹² Hochschild, J. L. 1995. *Facing up to the American Dream: Race, Class, and the Soul of the Nation*. New Jersey: Princeton University Press

¹¹³ Hochschild, Jennifer L. *Ibid.*

¹¹⁴ Kasiyarno. 2014. American Dream: The American Hegemonic Culture and its Implications to the World. *Humaniora*. Vol. 26: 13-21

¹¹⁵ Friedman, Alice T. (2010). The Luxury of Lapidus: Glamour, Class, and Architecture in Miami Beach. *Design Magazine*, no. 11: 39-47

mengambil Hotel Floridiana di Miami sebagai "pengaturan yang sempurna untuk pertemuan jutawan Amerika dan rahasia agen, penjudi, gangster, pembunuh bayaran dan pelacur" (Fleming, Ian 2002.: 26 - 27)¹¹⁶.

Greater Miami Convention & Visitors Bureau (2013)¹¹⁷ menyatakan bahwa "*jumlah pengunjung semalam untuk Greater Miami and the Beaches meningkat + 3,5% memecahkan rekor sebanyak 13,9 juta pengunjung semalam pada 2012 yang diisi oleh peningkatan sebesar + 5,2% adalah untuk rekor 6,8 juta pengunjung internasional dan peningkatan adalah + 1,8% ke rekor 7,1 juta pengunjung domestik.*" Ini jumlah yang besar dari pengunjung internasional ke Miami yang harus dikaitkan dengan citra Miami sebagai *Alpha World City* setelah digolongkan sebagai "Kota Terbersih Amerika" pada tahun 2008 oleh majalah Forbes¹¹⁸. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan pengunjung sebenarnya tidak hanya untuk liburan, tapi juga kunjungan budaya, yaitu untuk melihat gaya mewah dari Amerika. Para pembuat film telah mengambil begitu banyak keuntungan dari kenyataan ini.

Ilusi Superhero

Selain menawarkan kemewahan, mimpi Amerika juga mengungkapkan kebanggaan untuk menjadi pahlawan yang tak mampu dikalahkan siapapun juga. Winckler (2003: 6)¹¹⁹ mendefinisikan pahlawan (*hero*) dalam jiwa orang Amerika sebagai salah satu manifestasi dari mimpi Amerika bahwa Amerika adalah Bangsa Terpilih "*yang menghadapi musuh yang luar biasa yang membutuhkan manusia super untuk menyelamatkan hidupnya atau hidup oranglain atau untuk mempertahankan nilai-nilai universal.*" Superhero adalah sosok yang mewarisi tugas kepemimpinan menyelamatkan dunia.

Dalam masa keemasan (Golden Age) komik, -dari 1938 ketika *Superman* pertama kali diperkenalkan ke 1961 ketika *Fantastic Four* itu diciptakan- pencipta komik Amerika mengeskpresikan nilai-nilai dan sosok pahlawan dalam ide-ide kemerdekaan, otonomi, kepastian, supremasi, dan hegemoni budaya (Mills, A. 2013: 23)¹²⁰. Pahlawan ini kemudian muncul di industri Hollywood dan mencapai rekor *box office* di dunia.

Sebuah fantasi menjadi makhluk tak terkalahkan jelas merupakan impian Amerika yang menjebak ke dalam banyak benak warga dunia. Di Jepang, fantasi Amerika telah mempengaruhi *manga* (komik Jepang) dan *anime* (film animasi Jepang). Salah satu

¹¹⁶ Fleming, Ian, 2002, *Goldfinger*. London: Penguin

¹¹⁷ Greater Miami Convention & Visitors Bureau. (2013). *Greater Miami and the Beaches Achieve Records on Records for Travel and Tourism in 2012*. Press release.

¹¹⁸ Lihat: Riper, T.V. 2008. America's Cleanest Cities. *Forbes*

¹¹⁹ Winckler, M. 2003. *Super Héros*, Paris: E.P.A.

¹²⁰ Mills, A. 2013. *American Theology, Superhero Comics, and Cinema: The Marvel of Stan Lee and the Revolution of a Genre*. London: Routledge.

mangaka (penulis manga) terkenal adalah Masakazu Katsura¹²¹, yang dipengaruhi oleh Superhero Amerika terkenal, Batman. Di Indonesia, Penerbit Bumi Langit menerbitkan komik Harya Suryaminata¹²² di tahun 1970-an. Suramita memperkenalkan *Gundala Putra Petir, Godam, Maza, Pangeran Mlaar, Kalong* dan *Labah-labah Merah* sebagai pahlawan Indonesia yang sebenarnya mengadaptasi tokoh-tokoh serupa dari komik Amerika.

Pahlawan Amerika adalah simbol kemenangan bagi bangsa Amerika. Superhero adalah salah satu produk mimpi yang dimiliki oleh negara adidaya tersebut. Sebagai konsekuensi dari pihak yang menang dalam perang dingin, Amerika menjadi "satu-satunya Adidaya Dunia", seolah-olah dengan posisi tersebut AS memiliki hak untuk untuk membangun budayanya sendiri kepada dunia. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai "pikiran Amerika" (*American mind*), sebuah deklarasi atas ketinggian budaya dan bangsa Amerika. Dengan menerima pikiran Amerika, kebudayaan dunia akan merangkul dominasi budaya Amerika tanpa paksaan (*no reserve*).

Mitos Amerika

Mitos dan impian bangsa Amerika (*American myth and dreams*) sebagai bangsa terpilih untuk memimpin dan menyelamatkan dunia adalah salah satu wacana yang cukup sentral dalam berbagai penelitian mengenai sejarah dan budaya Amerika.¹²³ Keduanya merupakan konsekuensi dari kesadaran peradaban (*civilization consciousness*), yang mengekspresikan identitas Amerika yang 'tidak duanya di dunia' baik sebagai sebuah bangsa maupun sebuah kebudayaan, yang kemudian sering disebut dengan istilah '*American exceptionalism*' atau '*Americanism*' (Crockatt, 2007: 16)¹²⁴. Hal ini menggambarkan hasrat bangsa Amerika yang melihat sejarah dirinya sendiri sebagai Sejarah Dunia Baru yang berada di atas segala bangsa atas titah suci Tuhan (Madsen, 2010: 371)¹²⁵.

¹²¹ Masakazu Katsura, lahir 10 Desember 1962, adalah seorang seniman manga Jepang, yang dikenal untuk beberapa karya dari manga, termasuk *Shadow Lady, DNA², Video Girl Ai, I's*, dan *Zetman*. Dia juga bekerja sebagai desainer karakter untuk *Iria : Zeiram Animasi* dan *Tiger & Bunny*. (Sumber: Wikipedia)

¹²² Harya Suryaminata yang dikenal dengan Hasmi (lahir di Yogyakarta 25 Desember 1946 adalah salah satu komikus dan penulis skenario terkenal di Indonesia. Karyanya yang dikenal adalah *Gundala Putra Petir*, seorang tokoh dalam komik Indonesia. Sebanyak 23 judul buku seri *Gundala* terbit antara 1969-1982. Tokoh *Gundala* ia ciptakan setelah *Maza*, yang telah lebih dulu muncul pada 1968. Petualangan *Gundala* berakhir pada 1982 dengan buku terakhir berjudul "Surat dari Akherat". Sempat muncul kembali sebagai *komik strip* di *Jawa Pos* pada 1988, namun tidak bertahan lama. (Sumber: Wikipedia)

¹²³ Fluck, W. (2007: 61) menjelaskan bahwa, "Dalam perkembangan awal American Studies, terutama di Eropa, mungkin ditandai sebagai proyek re-edukasi, karena tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat, kekuatan dunia baru dan pemimpin dunia Barat, memiliki budaya sendiri yang berharga dan dapat dianggap cukup matang dan beradab untuk peran barunya. Lihat: Fluck, W. 2007. *Theories of American Culture (and the Transnational Turn in American Studies)*. REAL - Yearbook of Research in English and American Literature 23. Tübingen: Narr Verlag

¹²⁴ Crockatt, R. 2007. *After 9/11: Cultural Dimensions of American Global Power*. New York: Routledge.

¹²⁵ Madsen, D. L. 2010. *The West and Manifest Destiny*. Dalam: Rowe, J. C. (ed.). *A Concise Companion to American Studies*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.

Idealisme Amerika untuk menjadi pemimpin dunia ini sebenarnya telah diikrarkan sejak tahun 1620 oleh John Winthrop, pemimpin kaum Puritan, dengan ungkapan *America as a City upon a Hill* sebagai salah satu *creedo* bangsa Amerika yang memberikan inspirasi bangsa Amerika dalam membangun hubungan internasional (Minderop, 2006)¹²⁶. Ungkapan “sebuah kota di atas bukit” menunjukkan sebuah gambaran tentang suatu peradaban yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lain yang berada di bawah kota tersebut. Ini berarti bahwa Amerika Serikat terletak di derajat yang lebih tinggi yang dapat dilihat oleh seluruh bangsa di dunia untuk ditiru cara hidupnya yang lebih maju. Oleh karena itu, dalam konteks American Studies, tema Amerikanisme tersebut dapat diteliti dalam konsepsi mengenai aspek budayanya, cara hidup bangsa Amerika yang dapat disebut sebagai budaya yang hegemonik (*hegemonic culture*) bagi bangsa lain di seluruh dunia.

- ❑ Mitos Amerika menggambarkan hasrat bangsa Amerika yang melihat sejarah dirinya sendiri sebagai Sejarah Dunia Baru yang berada di atas segala bangsa atas Titah Suci Tuhan (Madsen, 2010: 371)

Dalam prakteknya, ide-ide atau gagasan dan tindakan yang hegemonik tersebut telah mendorong Amerika berkembang sebagai sebuah negara yang menjalankan praktek kekuasaan imperium. Secara garis besar, kekuasaan imperium Amerika dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu: (a) fase kekuasaan imperium di tingkat kontinental, dari tahun 1783 hingga 1883 (*continental empire*); (b) fase kekuasaan imperium di tingkat hemisfer, sejak tahun 1898 sampai 1941 (*hemispheric empire*); dan (c) fase kekuasaan imperium di tingkat global (*global empire*), sejak tahun 1945 hingga dekade 2000an (Mann, 2008)¹²⁷.

Sejarah mencatat bahwa budaya hegemonik yang mempunyai watak untuk selalu menang dan menguasai tersebut telah berlangsung sejak pendudukan benua Amerika itu sendiri. Dalam fase pertama, penguasaan wilayah kontinental tersebut bahkan menelan korban hampir 97% dari 4-9 juta penduduk asli yang telah terlebih dahulu menempati wilayah benua ini serta 360.000 jiwa serdadu melayang. Fase ini dapat disebut sebagai era paling jelas dalam praktek kolonialisme Amerika (*the most colonial phase of American imperialism*), bahkan dapat disebut sebagai era permulaan “*the rise of capitalism*” (Goldin dan Lewis, 1975: 320)¹²⁸. Selama Perang Saudara Amerika Serikat atau juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian (*civil war*) antara tahun 1861 hingga 1865, sebagian besar publik Amerika Serikat masih belum begitu peduli dengan kebijakan luar negeri; perhatian mereka lebih banyak pada persoalan-persoalan domestik dan industrialisasi.

¹²⁶ Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme, Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

¹²⁷ Mann, M. 2008. American Empires: Past And Present. *Canadian Review of Sociology and Anthropology*. The.FindArticles.com.

¹²⁸ Goldin, C. D. dan. Lewis, F.D. 1975. The Economic Cost of the American Civil War: Estimates and Implications. *The Journal of Economic History*, Vol. 35, No. 2: 299-326

- ❑ Sejarah mencatat bahwa budaya hegemonik yang mempunyai watak untuk selalu menang dan menguasai tersebut telah berlangsung sejak pendudukan benua Amerika itu sendiri.

Melalui Doktrin Monroe¹²⁹ tahun 1823, praktek ini diwujudkan dalam fase kedua melalui Perang Amerika-Spanyol antara 25 April sampai 12 Agustus 1898 yang menegaskan hasrat Amerika Serikat untuk menjadi sebuah '*formal colonial empire*' dengan meluaskan wilayah kekuasaan ke wilayah hemisfer Amerika, meliputi Amerika Tengah hingga Kepulauan Karibia dan sejumlah pulau di kawasan Pasifik, bahkan sampai ke negeri Filipina. Masa ini juga ditandai dengan kebangkitan kapitalisme berbentuk korporasi (*corporate capitalism*) dimana bisnis di bidang pertanian dan pinjaman bank memonopoli berbagai konsesi dalam jumlah besar di luar negeri. Fase ketiga ditandai dengan peristiwa Perang Dunia yang memakan cukup banyak korban. Kemenangan pihak sekutu dalam kedua perang ini menempatkan Amerika Serikat sebagai negara pemegang peranan penting di kawasan Barat.

Di tahun 1970an, Amerika menerapkan imperialisme gaya baru yang memanfaatkan keuntungan dari penguasaan global atas berbagai regulasi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua melalui *Bretton Woods System*, akan tetapi imperialisme ekonomi tersebut mendapat perlawanan atau tantangan dari Eropa dan Jepang. Sebagai akibatnya, Amerika mengubah strategi perluasan kekuasaannya dari bentuk kolonialisme virtual (*virtual colonialism*) ke dalam bentuk hegemoni (Mann, 2008: 2-12)¹³⁰.

Pada era 90an, kejatuhan Uni Soviet telah meneguhkan posisi Amerika sebagai bangsa yang 'unggul' (*the best nation in the world*), dan kiranya sulit untuk diingkari bahwa sejarah kemanusiaan saat ini adalah abad kegemilangan bangsa Amerika. Belum pernah ada negara di dalam sejarah dunia yang mendominasi panggung internasional dalam cakupan seluas Amerika Serikat saat ini (Cameron, 2006: xvi)¹³¹. Kemenangan AS pada berbagai Perang Dunia dan Perang Dingin telah mengubah posisi AS dari hanya sebagai pemimpin negara-negara sekutu Barat menjadi satu-satunya negara adi kuasa sekaligus pemimpin dunia yang tidak memiliki lawan yang sebanding (*the lonely super power*) (Huntington, 1999: th)¹³².

¹²⁹ Doktrin Monroe muncul dalam menanggapi urgensi politik Eropa pada akhir Perang Napoleon. Presiden AS saat itu, James Monroe, mengumumkan doktrin ini yang diterapkan pada 2 Desember 1823. Doktrin ini digunakan oleh beberapa presiden AS, seperti Theodore Roosevelt, John F. Kennedy dan Ronald Reagan. Untuk kajian lebih lanjut, silahkan lihat: Murphy, Gretchen. 2005. *Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire*. Durham, SC: Duke University Press; dan Gilderhus, Mark T. 2006. The Monroe Doctrine: Meanings and Implications. *Presidential Studies Quarterly* 36 (1)

¹³⁰ Mann. *Ibid.*

¹³¹ Cameron, F. 2006. *US Foreign Policy after the Cold War*. New York: Routledge.

¹³² Huntington, 1999. *The Lonely Superpower*. *Foreign Affairs*. New York: The Council on Foreign Relations

- ❑ Kemenangan AS pada berbagai Perang Dunia dan Perang Dingin telah mengubah posisi AS dari hanya sebagai pemimpin negara-negara sekutu Barat menjadi satu-satunya negara adi kuasa sekaligus pemimpin dunia yang tidak memiliki lawan yang sebanding (*the lonely super power*) (Huntington, 1999)

Dalam teorinya mengenai Kurva Kekuatan Amerika Serikat (*The Curve of American Power*), Wallerstein (2006)¹³³ membagi fase empirium global tersebut dalam tiga periodisasi: pertama, periode 1945-1970, yaitu periode hegemoni Amerika Serikat dijalankan dengan cengkraman yang cukup kuat terutama di kawasan Eropa dan Asia yang sempat diperebutkan oleh Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua; masa ini dapat disebut sebagai masa keemasan hegemoni AS; kedua, periode 1970-2001, hegemoni Amerika Serikat yang awalnya gemilang mulai mengendur terutama pada saat Perang Dingin berakhir di tahun 1990 justru ketika Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara superpower.

Dekade 90an, kata Wallerstein (2006: 12)¹³⁴ merupakan momen pelembagaan jangka panjang bagi tatanan global neo liberal yang memperparah kondisi ekonomi di banyak negara hingga terjadinya Krisis Asia di tahun 1997. Penguatan lembaga-lembaga internasional yang melemahkan kekuatan ekonomi global tersebut memiliki dua sisi: *pertama*, memperlihatkan keberhasilan strategi Amerika Serikat untuk mendominasi tatanan global; *kedua*, kegagalan Amerika Serikat untuk menunjukkan kemampuannya menyelesaikan berbagai krisis global. Konsekuensi yang kedua bila dibiarkan secara berlarut-larut justru berujung pada berkembangnya sentimen anti-Amerika Serikat yang pada gilirannya memperkeras gerakan *counter-hegemony* terutama di negara-negara Asia dan Amerika Latin. Pada periode ketiga sejak 2001 hingga 2005, hegemoni Amerika Serikat dibangun melalui kebijakan yang lebih bersifat unilateral dengan ideologi neo-konservatisme yang hasilnya melemahkan hegemoni Amerika Serikat. Teori Wallerstein mengenai melemahnya kekuatan hegemoni Amerika Serikat yang dimulai pada dekade 90an menjadi hal menarik untuk diteliti lebih jauh. Dengan dukungan kekuatan ekonomi, politik dan militer seharusnya hegemoni tersebut menjadi semakin bertambah besar.

Akar Budaya Hegemonik Amerika Serikat

Dari manakah budaya hegemonik AS saat ini berasal? Pertanyaan ini kiranya amat penting diketengahkan untuk memahami budaya hegemonik itu sendiri, bahkan pencarian jawaban atas pertanyaan ini cukup mendominasi berbagai wacana dan tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang *American Studies*. Setidaknya ada dua jawaban senada yang dapat diungkapkan atas pertanyaan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul *'America's British*

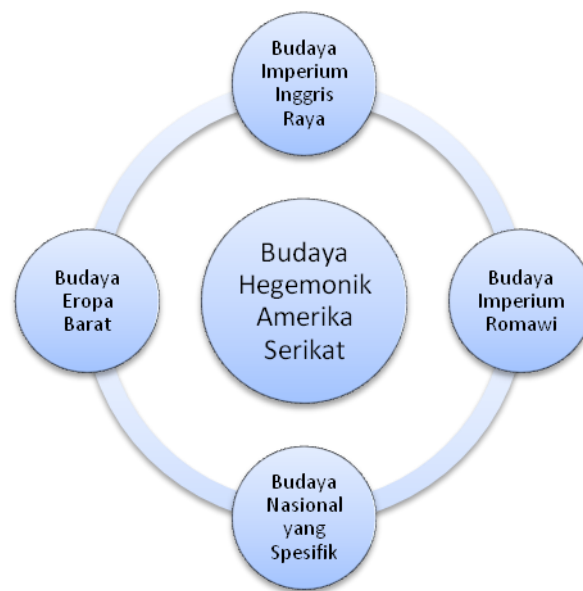
¹³³ Wallerstein. 2006. 'The Curve of American Power. *New Left Review*, 40, July-August: 77-94

¹³⁴ Wallerstein. *Ibid*.

Culture, Russel Kirk (1993)¹³⁵ menyebutkan bahwa akar budaya hegemonik AS tersebut berasal dari warisan budaya imperium Kerajaan Inggris Raya, negeri yang dianggap sebagai tanah leluhur bangsa Amerika modern, sehingga bila unsur-unsur budaya Inggris dibersihkan dari semua pola budaya di Amerika Serikat, maka bisa dipastikan bangsa Amerika akan kehilangan nilai budayanya sendiri. Pandangan berikutnya mengungkapkan bahwa 'bangsa Amerika selamanya adalah bangsa Barat-nya Eropa' (*the Western European*). Hal ini didasarkan pada sejarah penaklukan benua Amerika oleh bangsa Amerika-Inggris (*British Americans*).

Dua pendapat tersebut kemudian oleh Fallon (1995: 150)¹³⁶ disimpulkan ke dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa "Bangsa Amerika memiliki kebudayaan nasional yang spesifik, walaupun secara esensial sebenarnya adalah kebudayaan bangsa Inggris melalui modifikasi oleh watak liar mereka". Budaya Amerika dikatakan bersifat spesifik karena merupakan "sebuah konfigurasi cara dan sarana yang dipergunakan oleh bangsa Amerika untuk mengungkapkan perasaan kolektif dirinya sendiri", dan budaya ini tetap menegaskan kehadiran watak imperialistik bangsa yang disamakan dengan watak kekuasaan imperium Romawi (Kroes, 1999: 465)¹³⁷ lihat pula: Garrison, 2004: 4¹³⁸).

Akar Budaya Hegemonik AS
(*The Roots of American Hegemonic Culture*)



Sumber: Olahan data

¹³⁵ Kirk, Russell. 1993. *America's British Culture*. New Brunswick, Nj: Transaction Publishers,

¹³⁶ Fallon, J. 1995. The Roots of American Order. *The Social Contract*, Winter: 150-151.

¹³⁷ Kroes, R. 1999. American Empire and Cultural Imperialism: A View from the Receiving End. *Diplomatic History*, Vol. 23 No. 3: 463-477. Blackwell Publisher, Oxford.

¹³⁸ Garrison, *Ibid.*

Kekuasaan imperium tersebut diwarisi AS dari Kerajaan Inggris Raya yang menerapkan hegemoni global ke berbagai penjuru dunia serta menjadi dasar dalam penetapan kebijakan luar negerinya (Mead, W. R., 2002: 125¹³⁹; Garrison, 2004: 76¹⁴⁰).

- Budaya Amerika dikatakan bersifat spesifik karena merupakan “sebuah konfigurasi cara dan sarana yang dipergunakan oleh bangsa Amerika untuk mengungkapkan perasaan kolektif dirinya sendiri” (Kroes, 1999: 465)

Keunikan budaya Amerika juga terlihat dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya, terutama setelah negara tersebut mewarisi ‘jubah hegemoni global’ (*the mantle of global hegemony*), yang sebenarnya diperebutkan oleh berbagai negara melalui Perang Dunia II. Bradley (dalam Bradley dan Mochtar Lubis, 1991: xvi-xix)¹⁴¹ mengatakan bahwa AS menerapkan politik dwi-cabang dengan sejumlah ciri khas yang saling bertentangan.

Amerika Serikat menggabungkan politik yang realistik-praktis dengan yang idealistik-utopis. Di satu sisi, politik luar negeri diarahkan agar bermanfaat untuk melindungi dan memperluas kepentingan komersial AS di seluruh dunia, di sisi lain, negara ini memiliki idealisme untuk menjadi negara adikuasa yang mampu membangun sistem internasional, dan sedapat mungkin dengan cara dan menurut kemauannya serta interpretasinya sendiri, sehingga terwujud *a flat, globalized world* (Kroenig dan Ratner, 2007)¹⁴², di bawah kepemimpinan negara superpower tunggal AS yang disertai dengan melakukan ekspansi ideologi. Hal ini diilustrasikan oleh Garrison (2004 : 80)¹⁴³ sebagai berikut:

Alasan penting bagi keberhasilan kebijakan luar negeri Amerika adalah bahwa, setelah Inggris, Amerika Serikat telah termotivasi fundamental oleh sumber daya dan perdagangan , tidak wilayah Uang, bukan tanah, selalu berada di inti dari desain kekaisaran Amerika. Integral strategi kekaisaran telah misi menyebarkan demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia

Dari apa yang dinyatakan Garrison di atas dapat dipahami juga bahwa dalam membangun hegemoninya AS tidak seperti negara-negara Eropa yang menggunakan politik kekuasaan melalui pendudukan wilayah. Amerika Serikat yang banyak dikenal memiliki sentimen anti-imperialisme itu, dalam kenyataannya juga menerapkan metode imperialisme. Amerika Serikat memang tidak terlibat dalam *direct imperialism* atau penjajahan wilayah, bahkan memiliki sentimen anti-imperialisme seperti yang telah ditunjukkannya sejak era Perang Dingin dengan politik dekolonisasinya. Akan tetapi dalam prakteknya, sebagai negara yang menganut ideologi kapitalisme AS tidak bisa samasekali

¹³⁹ Mead, W. R. 2002. *Special Providence: The American Foreign Policy Tradition*. New York: Routledge.

¹⁴⁰ Garrison, *Ibid*.

¹⁴¹ Bradley, W. L. dan Lubis. M. 1991. *Dokumen-Dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

¹⁴² Kroenig, M. dan Ratner, A. 2007. How Globalization Went Bad. *Foreign Policy*. Vol. 158: 48-54.

¹⁴³ Garrison, *Ibid*.

terlepas dari upaya pengembangan *imperial strategy* (Garrison, 2004)¹⁴⁴. Veriyawan (2007)¹⁴⁵ juga mengatakan bahwa ideologi kapitalisme yang dianut AS ini tidak hanya menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi (kapitalisme atau neo-liberalisme), tetapi juga dipakai dasar membangun politik luar negerinya. Metodenya adalah dengan menggunakan penjajahan atau imperialisme meskipun tidak secara langsung. Dengan menggunakan politik luar negeri yang unik dan agresif selama lebih dari dua abad inilah yang mengakibatkan AS berhasil membangun hegemoni globalnya saat ini (Garrison, 2004: 57)¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Garrison, *Ibid.*

¹⁴⁵ Veriyawan, W. 2007. *Politik Luar Negeri Amerika di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁴⁶ ¹⁴⁶ Garrison, *Ibid.*

III

Power

Untuk masuk ke persoalan budaya hegemonik, mau tidak mau kita terlebih dahulu harus mengkaji persoalan ‘power’. Kata ‘hegemoni’ sendiri sesungguhnya mengandung unsur “power”, yakni kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan hegemoni. Comaroff dan Comaroff (1991: 20)¹⁴⁷ menyarankan agar hegemoni dikaji secara bersamaan antara “culture” dengan “power”. Studi mengenai hegemoni Amerika Serikat dapat dikatakan selama ini sebagai kajian Ilmu Hubungan Internasional. Tidak mengherankan bila kajian-kajian tentang hegemoni Amerika lebih menekankan aspek ‘power’ dan ‘order’. Hal tersebut juga didukung oleh Chalcraft dan Noorani (2007: 5)¹⁴⁸ yang menyatakan bahwa teori-teori Hubungan Internasional telah ditarik pada teori hegemoni dan kontra hegemoni untuk bergerak melampaui fokus tanpa henti pada politik kekuasaan tradisional negara, dan terlibat dengan materialisme historis, ekonomi politik, kelas dan ideologi.

Dalam konteks hegemoni, dikenal istilah ‘hegemonic power’, antara lain dalam definisi yang diberikan oleh Ken Aldred dan Martin A. Smith (1999: 4)¹⁴⁹ sebagai berikut: “kapabilitas dan kemauan dari negara dalam jumlah terbatas untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh yang signifikan di luar batas-batas bangsa dan negaranya selama kurun waktu yang cukup lama”. Kekuatan hegemonik mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tindakan orang atau bangsa lain dalam cakupan yang lebih luas daripada yang mampu dilakukan oleh orang atau bangsa lain terhadapnya.

Pengertian Power

Pemikiran para ahli modern mengenai ‘power’ dimulai oleh Nicollo Machiavelli di awal abad 16 dengan bukunya *The Prince* dan Thomas Hobbes pada pertengahan abad 17 dalam tulisannya berjudul *Leviathan*. Kedua tokoh ini dianggap sebagai pemikir klasik dalam ilmu politik modern; perbedaan diantara keduanya mengenai konsep ‘power’ telah membentuk dua jalur pemikiran utama para ahli politik hingga saat ini. Machiavelli mewakili mazhab pemikiran yang melihat ‘power’ dan organisasi secara strategis dan desentralistik, sementara Hobbes mewakili pandangan yang melihat ‘power’ sebagai bentuk hegemoni yang terpusat (sentralistik) dan sebagai bentuk kedaulatan (*sovereignty*).¹⁵⁰

¹⁴⁷ Comaroff, J. L. dan Comaroff, J. 1991. *Of Revelation and Revolution. Volume 1: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁴⁸ Chalcraft, J. dan Noorani, Y. (eds.). 2007. *Counterhegemony in the Colony and Postcolony*. Palgrave Macmillan™, New York.

¹⁴⁹ Aldred, K. dan Smith, M. A. 1999. *Superpowers in the Post-Cold War Era*. London: Macmillan Press Ltd.

¹⁵⁰ Lihat: Clegg, S. 1989. *Frameworks of Power*. London: Sage Publications.

Pertengahan abad kedua puluh menunjukkan perkembangan ilmu-ilmu sosial yang mengutamakan logika dan kepastian, sehingga 'power' mulai diteliti dengan observasi dan pengukuran secara kuantitatif. Pada saat itu, 'power' diletakkan dalam posisi kehendak (*will*) sebagai faktor yang paling menentukan. Kajian-kajian mengenai 'power' antara lain dilakukan oleh Karl Marx yang mewarnai konseptualisasi 'power' dalam semua ilmu-ilmu sosial, diikuti oleh Alfred Adler yang membuka dikusi tentang 'power' dalam psikologi, sedangkan pemikiran 'power' dalam filsafat banyak diwarnai oleh Friedrich Nietzsche¹⁵¹.

Sesudah Perang Dunia Kedua, ilmu-ilmu sosial mulai memberi minat yang besar pada 'power'. Karya-karya Max Weber menjadi titik pijak penting karena meneruskan garis rasional Hobbesian dan membangun pemikiran kelembagaan (organisasional). Pendekatan Weber atas 'power' berhubungan dengan ketertarikannya pada birokrasi dan dikaitkan dengan konsep kewenangan (*authority*) dan kekuasaan (*rule*). Dalam pemikirannya, Weber (1978: 53)¹⁵² mendefinisikan 'power' sebagai: *Peluang kemungkinan seorang aktor dalam hubungan sosial berada dalam sebuah posisi untuk mencapai apa yang dikehendaknya tanpa memperdulikan penentangan terhadap kehendak tersebut.*"

Cara Kerja Power

Dari sudut pemikiran seperti ini, bekerjanya 'power' tergantung pada kehendak seseorang, meskipun berada pada posisi berlawanan dengan kehendak oranglain. Di sini, Weber melihat 'power' sebagai sebuah faktor dari dominasi berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan (otoritarian). Penelitian-penelitiannya mengarah pada sumber-sumber formal kekuasaan yang memiliki legitimasi (*legitimate authority*) untuk memegang dan menjalankan 'power', yang bersumber pada tiga hal: (a) kharismatik, yaitu legitimasi berdasarkan aturan atau tata nilai baku yang sudah mapan sebelumnya dengan sanksi dan pelembagaan melalui keyakinan agama dan upacara ritual; (b) tradisional, yaitu legitimasi berdasarkan kualitas pribadi seorang pemimpin yang menjamin kesetiaan secara personal dan keterlibatan emosi dengan para pengikutnya; (c) rasional-legal, yaitu legitimasi berdasarkan sistem rasionalitas secara instrumental dari hukum yang berlaku, dijalankan oleh sebuah birokrasi¹⁵³.

Pendekatan Weber ini dilanjutkan oleh Robert Dahl, baik dalam definisi maupun aspek atributif 'power' pada faktor konkrit manusiawi. Dahl mendiskusikan 'power' dalam lingkaran komunitas aktual. Meskipun demikian, sumbangan terbesar Dahl adalah pada pengembangan pengertian mengenai elit kekuasaan (*ruling elites*) terutama pasca Perang

¹⁵¹ Lihat: Dowding, Keith. 2011. *Encyclopedia of Power*. London : SAGE Publications

¹⁵² Weber, M. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. 2 Vols. Berkeley, CA: University of California Press.

¹⁵³ Weber, M. (1958). The Three Types of legitimate Rule. *Berkeley Publications in Society and Institutions*, 4 (1): 1-11

Dunia Kedua. “Power” dalam definisi Dahl (1957: 202-203)¹⁵⁴ adalah Kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam teorinya (*theory of community power*), ‘power’ digunakan dan diuji dalam sebuah komunitas oleh sejumlah individu secara konkrit, sedangkan individu-individu lainnya dilemahkan atau dicegah untuk melakukan apa yang lebih mereka sukai. Teori Dahl ini mendapat kritik dari Peter Bachrach dan Morton Baratz (1962) yang mengembangkan model dua wajah dari ‘power’—*the two faces of power*. Dalam teori ini, mereka melihat hubungan antara bagaimana sebuah keputusan diambil (satu wajah dari ‘power’) dengan kemampuan yang mana yang mampu mempertahankan keputusan tersebut (wajah ‘power’ yang lainnya lagi)¹⁵⁵.

Dimensi-dimensi Power

Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Steven Lukes (1974: 25-28) yang menghubungkan ‘pengambilan keputusan terbuka’ Dahl dengan aspek non keputusan Bachrach dan Baratz melalui ‘dimensi ketiga’, yaitu dimensi laten. ‘Power’ menurut Lukes, mempunyai tiga dimensi, yakni: *pertama*, dimensi terbuka (*overt dimension*), yang menyatakan preferensi politik dalam permainan politik secara terbuka, *kedua*, dimensi tertutup (*covert dimension*), yang menyatakan preferensi politik melalui bentuk complain atas isu-isu non politik, dan *ketiga*, dimensi laten (*latent dimension*), yang berkaitan dengan hubungan antara preferensi politik dengan kepentingan yang sebenarnya (*real interest*). Seberapa jauh ‘power’ tersebut mempunyai kekuatan dapat diukur melalui kemampuannya dalam memasukkan gagasannya pada benak seseorang meskipun sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dimensi ketiga ini merupakan hal terberat bagi semua identitas politik, terutama untuk menyadari eksistensi dirinya pada saat mereka sedang dipengaruhi oleh dimensi ketiga ini.¹⁵⁶

Dalam proposisi Teori Kritik dari Mazhab Frankfurt (Gill dan Law, 1988: 73-74)¹⁵⁷, dimensi-dimensi ‘power’ tersebut adalah: (a) Kekuatan yang bersifat Terbuka (*open power*), atau Kekuatan yang Aktif (*active power*), yakni kekuatan yang dinyatakan secara terbuka untuk memberikan pengaruh yang dikehendaki kepada negara lain; (b) Kekuatan yang bersifat Tersembunyi (*covert power*), atau Kekuatan yang lebih bersifat Pasif namun Terorganisir (*more passive but organized*), dengan membatasi wilayah politik dan menghindari beberapa isu dari agenda-agenda politik tertentu; dan (c) Kekuatan secara Struktural (*structural power*), yakni kekuatan yang mempertegas hubungan-hubungan dari

¹⁵⁴ Dahl, Robert A. 1957. The Concept of Power, *Behavioral Science*, Vol. 2. No. 3: 201-215

¹⁵⁵ Bachrach, Peter dan Baratz, Morton S. 1962. Two Faces of Power. *The American Political Science Review*, Volume 56, Issue 4: 947-952.

¹⁵⁶ Lukes, S. (1974). *Power: A Radical View*. London: Macmillian

¹⁵⁷ Gill, Stephen & Law, David. (1988), *Global Political Economy, Perspectives, Problems and Policies*, Harvester-Whesatsheaf,-Hertfordshire.

berbagai pihak dengan sistem pembatasan (*limitation*) dan penarikan minat (*attraction*) yang jelas dalam aspek-aspek fisik dan normatif.

Tabel 1 Dimensi-dimensi Power

Penggagas	Dimensi	Pengertian
Steven Lukes	Dimensi Terbuka (<i>overt dimension</i>)	Menyatakan preferensi politik dalam permainan politik secara terbuka
	Dimensi Tertutup (<i>covert dimension</i>),	Menyatakan preferensi politik melalui bentuk complain atas isu-isu non politik
	Dimensi Laten (<i>latent dimension</i>),	Hubungan antara preferensi politik dengan kepentingan yang sebenarnya
Mazhab Frankfurt	Kekuatan Terbuka (Aktif)	Kekuatan yang dinyatakan secara terbuka untuk memberikan pengaruh yang dikehendaki kepada negara lain
	Kekuatan Tersembunyi (Pasif)	Membatasi wilayah politik dan menghindari beberapa isu dari agenda-agenda politik tertentu
	Kekuatan Struktural	Mempertegas hubungan-hubungan dari berbagai pihak dengan sistem pembatasan (<i>limitation</i>) dan penarikan minat (<i>attraction</i>) yang jelas dalam aspek-aspek fisik dan normatif

Sumber: Olahan data

Sumber-sumber Power

Tulisan-tulisan Michel Foucault (1979, 1980, 1996) ¹⁵⁸ meluaskan diskusi mengenai 'power' dari wilayah sosiologis ke semua lapangan dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Melalui pengaruh Foucault, kegiatan empiris untuk mengidentifikasi siapa yang memegang 'power' dan dimana 'power' tersebut diletakkan menjadi kurang penting. Dalam kacamata Foucault, tidak ada sumber darimana arus kegiatan politik, kecuali sejumlah praktek-praktek politik yang tidak pernah berhenti. Desentralisasi pada posisi 'power' dianggap sebagai penemuan baru dari pemikiran Foucault.

¹⁵⁸ Untuk mempelajari karya-karya Foucault secara lebih lengkap, silahkan akses di [http://monoskop.org/Michel Foucault](http://monoskop.org/Michel_Foucault)

Sebagai kritik atas pemikiran Foucault tersebut, Anthony Giddens (1982, 1984) mengembangkan sebuah pendekatan berdasarkan konstruksi teori sosial inklusif yang dinamakannya Strukturalisme (*structuralism*) atau Dualitas Struktur (*duality of structure*). Menurut Giddens, 'power' merupakan komponen penting dalam struktur sosial. 'Power' dijalankan oleh agen-agen kemanusiaan (*human agents*) dan juga diciptakan, dipengaruhi dan dibatasi oleh agen-agen itu sendiri. Dengan kata lain, 'power' bukanlah sebuah kualitas atau sumber dari masyarakat banyak, atau sebuah posisi di tengah-tengah struktur sosial, melainkan sebuah faktor sosial yang mempengaruhi semua komponen tersebut di dalam masyarakat yang juga dilahirkan dan diciptakan oleh mereka sendiri. Inilah yang dimaksudkan sebagai dualitas oleh Giddens. Dalam periode Pasca Perang Dingin, konsepsi mengenai 'power' merupakan konsepsi sentral dalam ilmu-ilmu politik. Karya Lukes dan Giddens menyumbangkan banyak hal bagi nilai penting dalam upaya pengembangan konsepsi ini.

Bentuk-bentuk Power

Stewart Clegg (1989:16-18)¹⁵⁹ melihat *power* sebagai proses melingkar yang mengalir di tiga saluran yang disebutnya sirkuit kekuasaan (*circuits of power*). Masing-masing dari ketiga sirkuit kekuasaan memiliki bentuk dinamis sendiri:

1. Rangkaian kekuasaan secara terang-terangan (*the overt circuit of power*) - sirkuit ini dapat diamati secara langsung atau konkret. Sebagai contoh, seseorang dapat menganalisis apa yang terjadi di arena pengambilan keputusan. Ini adalah sirkuit yang relatif sederhana, di mana agen mengembangkan kekuasaannya menurut penjelasan tradisional: A mengaktifkan sumber daya dan sarana, dan mempengaruhi B dengan cara di mana B tidak akan bertindak kalau bukan demi kepentingan hubungannya dengan A.
2. Rangkaian sirkuit kekuasaan sosial (*the social circuit of power*)-ini adalah sirkuit yang abstrak, yang disebut sirkuit integrasi sosial, dimana aturan yang mengatur hubungan makna, keanggotaan dan milik diciptakan.
3. Rangkaian sistemik-ekonomi dari kekuatan (*the systemic-economic circuit of power*)- ini juga merupakan sirkuit abstrak, di mana kedua bahan dan non-materi sumber diciptakan. Hal ini disebut sirkuit sistem integrasi.

Power dalam Tatanan Global

Dalam khasanah ilmu hubungan internasional, dikenal beberapa penggolongan 'power' yang dimiliki oleh suatu negara. Wight (1978: 63)¹⁶⁰ —dalam teks klasiknya *Power Politics*

¹⁵⁹ Clegg, S.R. 1989. *Frameworks of Power*. London: Sage

¹⁶⁰ Wight, M. 1978. *Power Politics*. London: Leicester UP

(diterbitkan pertama kali tahun 1946) – misalnya, membedakan antara ‘kekuatan-kekuatan dominan’ (*dominant powers*), ‘kekuatan-kekuatan besar’ (*great powers*) dan ‘kekuatan-kekuatan kecil’ (*minor powers*), terpisah dari dua kategori negara lainnya: *regional great powers* dan *middle powers*. Buzan dan Waever (2003: 34)¹⁶¹ membuat diferensiasi antara negara adidaya (*superpowers*) dengan negara *great powers*, dimana kekuatan kedua kategori negara ini berskala global, sedangkan *regional power* hanya berskala kawasan.

Menurut Jack Levy (1983: 11-19)¹⁶², negara-negara yang tergolong ‘kekuatan-kekuatan besar’ (*great or big powers*) mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 1) kemampuan militer yang tinggi yang membuat mereka mampu secara relatif untuk mengamankan diri sendiri bahkan mampu memproyeksikan kekuatan tersebut di luar negaranya; 2) konsepsi jaminan keamanan (*security*) yang luas meliputi ‘keseimbangan kekuatan’ (*power balance*) dalam kawasan regional dan global; dan 3) kesanggupan yang lebih besar untuk merumuskan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Perbedaan *great power* dengan *minor power* terletak pada skala kepentingan lebih luas (global) pada *great power*, sedangkan *minor power* lebih terbatas dan lokal (Wight, 1978: 65)¹⁶³. Menurut Vital (1971: 17)¹⁶⁴, pengertian negara kecil (*minor power*) adalah negara yang dalam jangka waktu lama bergantung pada sumber daya politik dan militer negara induknya.

Strategi Menghadapi Great Power

Bagi negara-negara ‘kekuatan-kekuatan kecil’ (*minor or smaller powers*), strategi dan kebijakan menghadapi negara-negara yang tergolong ‘kekuatan-kekuatan besar’ (*great or big powers*) tersebut dalam situasi ketidakseimbangan kekuatan (*power asymmetry*) dapat ditempuh dalam tujuh pilihan: (1) *Bandwagoning*, (2) *Limited-Bandwagoning*, (3) *Binding-Engagement*, (4) *Economic-Pragmatism*, (5) *Dominance Denial*, (6) *Indirect Balancing*, dan (7) *Balancing*.

¹⁶¹ Buzan, B., dan Waever, O. 2003. *Regions and Powers. The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁶² Levy, Jack. 1983. *War and the Modern Great Power System, 1495-1975* Lexington: University Press of Kentucky,

¹⁶³ Wight, M. *Ibid.*

¹⁶⁴ Vital, David. 1971, *The Survival of Small States: Studies in Small Power/Great Power Conflict*. London/New York: Oxford University Press

Tabel 2 Strategi/ Kebijakan Negara-negara Small Power terhadap Negara-negara Great Power (dalam Ketidakseimbangan Kekuatan)

Strategi/ Kebijakan	Tujuan	Modus Operandi/ Indikator
BANDWAGONING (Model Murni) "Profit First"	Untuk meraup keuntungan dari negara <i>big power</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat latihan-latihan militer dengan negara <i>big power</i> • Mengkordinasikan kebijakan pokok luar negeri dan pertahanan keamanannya dengan negara <i>big power</i>
LIMITED BANDWAGONING "Grasp the opportunity for profit, but cautiously"	Untuk meraup keuntungan dari negara <i>big power</i> , tetapi tetap waspada menjaga kemandirian negaranya dan hubungannya dengan negara dominan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun hubungan politik • Mengkordinasikan kebijakan eksternal dalam wilayah terbatas • Menjaga jarak dengan semua negara dominan berdasarkan prinsip sukarela
BINDING-ENGAGEMENT "Socialisation matters"	Untuk memperkokoh ikatan dengan satu negara <i>big power</i> dalam rangka meningkatkan kesempatan menyampaikan pendapat dan menyebarluaskan nilai-nilai	Menciptakan dan memelihara tautan kelembagaan reguler dengan sebuah <i>big power</i> melalui kerangka diplomatik bilateral dan multilateral
ECONOMIC PRAGMATISM "Business first"	Untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari perdagangan langsung dan penanaman modal dengan jalinan yang dimiliki <i>big power</i> , lepas dari	Memantapkan dan melestarikan perdagangan langsung dan penanaman modal dengan <i>big power</i> , dan ikut bergabung dalam kerjasama ekonomi regional dan bilateral dengan jalinan yang dimiliki <i>big power</i>

	berbagai perbedaan politik	
DOMINANCE DENIAL "Ascendancy is okay, but not dominance"	Untuk menolak dan mencegah munculnya dominasi kekuatan yang dapat saja melakukan hegemoni kepada negara lebih kecil	Memanfaatkan kekuatan penyeimbang dari negara lainnya agar tetap berada di luar lingkaran kekuasaan big power melalui pelibatan negara lain dalam kerjasama regional dan dukungan politis bagi aliansi dan kekuatan militer negara lain tersebut
INDIRECT BALANCING "Just in case"	Untuk melakukan persiapan bilamana terjadi situasi penyebaran kekuatan secara tidak menentu	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara ikatan aliansi secara militer dengan negara lain • Memodernisasi teknologi militernya sendiri, tanpa secara langsung atau terbuka menyatakan target khusus dalam kebijakan militer tersebut
BALANCING (Model Murni) "Security first"	Untuk menguji dan mengimbangi pertumbuhan kapabilitas dari satu power tertentu	Bergabung ke dalam sebuah aliansi militer dengan negara ketiga dan meningkatkan persenjataan militernya sendiri untuk menghadapi ancaman tertentu

IV

Persaingan Global dalam Studi Kawasan Pasca Perang Dingin

Pemicu Perang Dingin

Istilah 'Perang Dingin' (*the Cold War*) pertama kali digunakan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch, seorang Penasehat Senior Presiden AS ke 33, Harry Truman, yang menggambarkan krisis dan persaingan hegemoni antara AS dengan Uni Soviet¹⁶⁵. Disebut 'Perang Dingin', karena kedua belah pihak mencoba untuk saling mengalahkan namun tidak berani atau menghindari pertempuran fisik secara langsung karena kedua-duanya sama-sama mempunyai kekuatan nuklir yang dapat saling menghancurkan. Perang tersebut berlangsung selama lebih dari 40 tahun (1945-1989). Pada kurun waktu itu dunia internasional terbagi dalam dua kutub kekuasaan (*bipolar*) antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang ada di bawah komando Uni Soviet.

Para ahli sejarah telah berbeda pendapat tentang mengapa Perang Dingin ini terjadi. Amerika Serikat dan Uni Sovyet sesungguhnya adalah dua sahabat sekutu dalam menghadapi Jerman pada Perang Dunia kedua. Sejarawan Amerika beraliran ortodoks menuduh Joseph Stalin sebagai orang yang pertama kali menyebarkan ideologi kebencian terhadap Amerika yang menjadi pemicu ketegangan dalam hubungan kedua negara (Hughes dan Dockrill, 2006: 6)¹⁶⁶.

Thomas A. Bailey (1950) misalnya, dalam tulisan berjudul *America Faces Russia* memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana Stalin mempunyai ambisi dan kepentingan untuk meluaskan wilayah kekuasaannya serta melihat Inggris sebagai ancaman serius yang dapat menambah kekuatan Amerika Serikat untuk mengalahkan Rusia¹⁶⁷. Demikian pula keyakinan para sejarawan ortodoks lainnya, seperti Herbert Feis¹⁶⁸ dan Arthur Schlesinger Jr.¹⁶⁹ Ketika menempatkan Mikhail Gorbachev sebagai salah seorang 100 Tokoh Paling berpengaruh di Dunia, Michael Hart (1986: 486)¹⁷⁰ menulis:

Perang Dingin disebabkan oleh ekspansi militer Stalin dan para penggantinya. Respon Amerika pada dasarnya merupakan reaksi defensif (bertahan semata). Selama pemimpin Soviet menempel impian mereka untuk memaksakan komunisme di dunia, Barat tidak punya

¹⁶⁵ Lihat: MacQueen, Benjamin. 2013. *An Introduction to Middle East Politics*. London: Sage

¹⁶⁶ Hughes, G & Dockrill, SK 2006, 'Introduction: The Cold War as History'. in S Dockrill & G Hughes (eds). *Palgrave Advances in Cold War History*. Palgrave Macmillan

¹⁶⁷ Bailey, Thomas A. 1950. *America Faces Russia*. Ithaca: Cornell University Press

¹⁶⁸ Herbert Feis dalam tulisan berjudul *Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought* (New York, 1957); *From Trust to Terror: The Onset of the Cold War* (New York, 1970);

¹⁶⁹ Arthur Schlesinger Jr. 1967. Origins of the Cold War. *Foreign Affairs*, 46: 22-52

¹⁷⁰ Hart. Michael H. 1986. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. New York: Carol Publishing Group

cara (selain terpaksa) mengakhiri konflik. Ketika seorang pemimpin Soviet muncul yang bersedia untuk meninggalkan tujuan itu, Perang Dingin yang tampaknya tidak berkesudahan akan segera mencair.

Pandangan seperti ini juga dianut oleh beberapa tokoh penting militer AS. Paul Wolfowitz, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS, di depan Pertemuan Komite Yahudi Amerika ke 95 tahun 2001, mengatakan, “*Perang dingin disebabkan oleh rezim jahat (evil regime) di Uni Soviet, bukan oleh kegagalan diplomasi.*”¹⁷¹

Pada tanggal 29 Agustus 1949 pukul 07.00 pagi waktu setempat, tiga fisikawan nuklir Rusia bernama Igor Vasilyevich Khurcatov, Georgy Flyorof dan Andrei Sakharov berhasil membuat dan meledakkan bom atom plutonium pertama di Uni Soviet dengan kode “*First Lightning*” dan diberi nama РДС-1 (RDS-1 atau Reaktivnyi Dvigatel Stalina).¹⁷² Peristiwa ini telah memicu ketegangan dalam hubungan bilateral Uni Soviet dengan Amerika. Pada tanggal 10 Maret 1952, Stalin mengajukan usulan ke pemerintah AS, Inggris dan Perancis untuk menyatukan Jerman Timur (yang masuk dalam kekuasaan Uni Soviet) dan Jerman Barat (yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat) sebagai kawasan yang netral. Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Washington. Bagi AS, usulan tersebut hanyalah akal bulus Soviet untuk menjauhkan Jerman Barat dari Pakta Pertahanan Amerika Utara (NATO).¹⁷³

Sejumlah sejarawan kritis lain justru melihat Barat yang memulai Perang Dingin. Pidato Sir Winston Churchill di Westminster College tanggal 5 Maret 1946 dianggap sebagai awal terpecahnya hubungan Barat dengan Uni Soviet. PM Inggris ini menggunakan istilah “Tirai Besi” (*iron curtain*) untuk menyindir sistem politik di Uni Soviet. Bagi Churchill, sistem tersebut berlawanan dengan sistem demokrasi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Tak pelak lagi, pidato ini disambut hangat oleh Presiden AS Harry S. Truman, sementara pemimpin Rusia Stalin menyebutnya sebagai “hasutan untuk mengajak perang” (*war mongering*).¹⁷⁴

Sejarawan dari aliran Kiri Baru (*new left*) dengan lantang menyebut Amerika Serikat sebagai pemicu awal Perang Dingin. Menurut kaum revisionis ini, AS telah membangun hegemoni di Eropa Barat dan berencana melakukan hal serupa di wilayah Eropa Timur. Dalam bukunya berjudul *The Tragedy of American Diplomacy*, William Appleman William

¹⁷¹ Lihat: Link http://www.johndclare.net/cold_war1_answer.htm. Juga: Redondo, Claudia. 2015. *Who was to blame for the Cold War?* Prezi Inc. Diakses pada: <https://prezi.com/aiwyvp9r7dru/who-was-to-blame-for-the-cold-war/>.

¹⁷² Hawkins, Houston T. 2013. *History of the Russian Nuclear Weapon Program*. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos National Laboratory. Lihat pula: The Soviet Nuclear Weapons Program. Dapat diakses pada: <http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html>

¹⁷³ Ruggenthaler, Peter. 2011. The 1952 Stalin Note on German Unification: The Ongoing Debate. *Journal of Cold War Studies*. Vol. 13, No. 4: 172-212. Lihat pula: Wettig, Gerhard. 1994. Stalin and German Reunification: Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in Spring 1952. *The Historical Journal*. Vol. 37, No. 2: 411-419.

¹⁷⁴ Lénárt Levente. 2003. Sir Winston Spencer Churchill and the Movement of the Unification of Europe. *European Integration Studies, Miskolc*, Vol. 2, No. 2: 17-28

(1959)¹⁷⁵ menyalahkan Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya perang Dingin. Menurut William, AS berhasrat meluaskan ekspansi dagangnya ke seluruh dunia untuk mengeksport ideologi kapitalismenya, termasuk ke wilayah yang dikuasai oleh Uni Sovyet.

Berakhirnya Perang Dingin

Pada tanggal 8 Desember 1987, Reagan dan Mikhail Gorbachev menandatangani Perjanjian di Washington yang secara resmi diberi judul *The Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles*. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa AS dan Uni Sovyet bersepakat untuk mengeliminasi nuklir dan balistik konvensional dengan rentang jarak antara 500 – 5.500 km. perjanjian ini bagaimanapun adalah buah dari melunaknya pemimpin Sovyet saat itu, Gorbachev, yang sangat pro pada gagasan keterbukaan, kebebasan (*glasnost*) baik di bidang politik dan ekonomi yang diberinya nama “*perestroika*”. Tanggal 9 November 1989, terjadi peristiwa monumental yang terkenal yaitu runtuhnya temboknya berlin yang menandai berakhirnya Perang Dingin yang telah berlangsung sejak berakhirnya PD II.¹⁷⁶

Bagaimanapun, Perang Dingin telah meninggalkan jejak besar dalam sejarah Amerika Serikat bahkan bagi dunia secara global. Berakhirnya Perang Dingin telah mengubah dunia dan cara kita melihat perubahan tersebut. Perubahan itu telah membuka ruang bagi terjadinya transformasi yang mendalam dari sistem internasional, dan menjadi salah satu titik kritis bagi generasi saat itu serta menjadi batu ujian atas teori tentang resolusi konflik dan hubungan internasional pada umumnya (Richard Ned Lebow dan Janice Gross Stein, 2004: 189).¹⁷⁷ Bagi Amerika, Perang Dingin telah memberikan pupuk yang subur bagi berkembangnya gagasan homogenitas dalam Pandangan Hidup Bangsa Amerika (*The American Way of Life*), yaitu kecenderungan untuk mengatur dunia secara tunggal (*unipolar*). Perang Dingin ini juga telah memberikan nuansa politik yang kental dalam budaya orang Amerika. Nilai-nilai dan persepsi, bentuk-bentuk ekspresi, pola-pola simbolik, keyakinan dan berbagai mitos yang menjadi energi bagi gerak budaya telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik (Whitfield, 2006: 257-

¹⁷⁵ William, Appleman William. 1959. *The Tragedy of American Diplomacy*. Cleveland and New York: The World Publishing Company

¹⁷⁶ Lihat: Hertle, Hans-Hermann. 2001. The Fall of the Wall: The Unintended Self-Dissolution of East Germany's Ruling Regime. *Cold War International History Project Bulletin*, Issue 12 /13: 131-140

¹⁷⁷ Lebow, R.N. dan Stein, J. G. 2004. Understanding the End of the Cold War as a Non-Linear Confluence. Dalam: Herrmann, R.K. dan Lebow, R.N. (eds.). *Ending the Cold War: Interpretations, Causation, and the Study of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan, 189-217.

259)¹⁷⁸, sehingga istilah 'keamanan nasional' pun dimaknai sebagai 'kebutuhan untuk membangun komitmen yang bersifat terbuka dan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan politik dan militer di manapun di belahan dunia (Hoff, J., 2008: 113)¹⁷⁹.

Berakhirnya perang Dingin telah membawa babak baru dalam kajian mengenai Amerika. Hingga awal dekade 90an, para ahli Ilmu Pengkajian Amerika menghadapi tantangan baru dalam isu wacana peranan Amerika di panggung dunia melalui globalisasi atau internasionalisasi. Isu ini akhirnya mendapat momentum ketika Amerika Serikat akhirnya muncul sebagai pemenang pada saat Uni Sovyet membubarkan diri. Sejak itu pula, Ilmu Pengkajian Amerika mendapat perspektif dan parameter baru yang lebih luas dalam mengeksplorasi budaya dan peranan Amerika dalam tatanan dunia baru yang sedang berubah.

Persaingan Multi Kawasan antara AS-Eropa

Sangat menarik untuk membaca pernyataan yang dibuat oleh Christopher J. Makins (2003 1)¹⁸⁰: "*hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, seperti kebanyakan hubungan, entah secara pribadi atau internasional, sulit untuk direkam jejaknya secara tertulis*". Asumsi ini mungkin benar. Memang, menggambar hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat perlu banyak warna di atas kanvas yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan yang menantang dan hampir mustahil untuk dilakukan. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal pentingnya hal ini di bidang akademik.

Baru-baru ini, studi tentang kekuatan Eropa dalam tatanan global tidak pernah lepas dari posisinya sebagai 'aktor pasca-Westphalia' setelah berakhirnya Perang Dingin. Posisi ini telah melampaui norma Westphalia, tidak hanya di negara-negara barat, tetapi juga orang-orang Timur, dengan dasar pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan. Pada konteks ini, Eropa telah dikaitkan sangat erat dengan peran Amerika Serikat sebagai patron negara adidaya bagi negara-negara Eropa. Dengan diperkenalkannya *Brussels Treaty* pada tahun 1948, transformasi sistem Westphalia memulai evolusinya di Eropa. Jika ada yang mendefinisikan nasionalisme sebagai kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mengontrol, mengurangi, atau menghilangkan berbagai pengaruh asing dan proses transnasional di masyarakat, maka Perjanjian Brussels telah gagal menjadi pembela

¹⁷⁸ Whitfield, S.J. 2006. *The Culture of the Cold War*. Dalam: Bigsby, C. (Ed). 2006. *The Cambridge Companion to Modern American Culture*. Cambridge, New York: Cambridge University Press 256-274.

¹⁷⁹ Hoff, J. 2008. *Dreams of Perfectibility: A Faustian Foreign Policy from Woodrow Wilson to George W. Bush*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁸⁰ Makins, Christopher J. 2003 *'Power and Weakness' or Challenge and Response? Reflections on the Kagan Thesis*. Atlantic Council of the United States

negara-negara Eropa dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang oleh hegemoni AS (Ronald Leslie Kellar, 2001: 8).¹⁸¹

Menurut Henri Goverde (2004: 4)¹⁸², perdebatan mengenai perkembangan hubungan AS-Eropa di puncak hegemoni Amerika secara tidak langsung telah memperdalam dan melegitimasi Pembagian Eropa Baru dalam proses yang sejalan dengan perluasan Uni Eropa dan proses pengambilan keputusan secara konstitusi di Uni Eropa. Jeremy Shapiro dan Nick Witney (2009: 61)¹⁸³ menggambarkan sikap Eropa ke Amerika Serikat pada dasarnya bersifat kekanakan dan *fetisistik*. Sikap ini datang karena manfaat keamanan yang mereka dapatkan dari kekuatan Amerika terutama karena Amerika Serikat telah memenangkan Perang Dingin. Shapiro dan Witney (2009: 7)¹⁸⁴ menegaskan bahwa, "*Selama Perang Dingin, pemerintah Eropa menawarkan dukungan solidaritas bagi negara adidaya yang menjadi pelindung mereka sebagai ganti atas keamanan dan peranan kecil yang mereka dapatkan dalam kemitraan yang mengatur dunia.*"

Dengan mengatakan bahwa pemerintah Eropa mendapat manfaat tertentu dari dukungan mereka untuk pelindung negara adidaya, kita juga dapat mengatakan bahwa negara-negara Eropa telah memberikan legitimasi ke Amerika Serikat untuk terangnya terangan menjadi pelindung hegemonik mereka, atau sebagai payung pengaman (*pacifier*) di wilayah tersebut. Teori Amerika sebagai payung pengaman merupakan turunan dari teori stabilitas hegemonik. Menurut Mark Sheetz (2004)¹⁸⁵, kekuatan Amerika tetap penting dalam pandangan ini, sehingga era pasca Perang Dingin tidak harus mengurangi peran AS dalam stabilitas Eropa.

Hipotesis utama dari teori stabilitas hegemonik dapat diringkas sebagai berikut: (a) kerjasama harus bervariasi dalam proporsi langsung dengan hegemoni Amerika; (b) negara-negara Eropa Barat tidak perlu lagi khawatir tentang pergeseran keberpihakan (*shifting alignments*), takut masuk jebakan (*fear of entrapment*) atau berusaha untuk mencari kekuatan penyeimbang satu sama lain (*seek to balance each other*); (c) negara-negara Eropa Barat tidak perlu takut mencari keuntungan militer dan ekonomi; (d) kita harus melihat pembagian kerja untuk menciptakan efisiensi berdasarkan keunggulan komparatif; dan (e) negara-negara harus menerima ketergantungan pada hegemon (Sheetz, 2004)¹⁸⁶. Asumsi ini memaksa Eropa untuk menerima hegemoni Amerika. Apa yang membuat Eropa terlihat kekanak-kanakan di sini adalah karena "... *bagi banyak orang Eropa, Abad Amerika adalah satu masa di mana Amerika Serikat menjadi kenyataan dan*

¹⁸¹ Kellar, Ronald Leslie. 2001. *European Union: US Hegemonic Competitor*. (Tesis master). Naval Postgraduate School Monterey California

¹⁸² Goverde, Henri, Philip G. Cerny, Mark Haugaard and Howard Lentner (eds). 2000. *Power in Contemporary Politics. Theories, Practices, Globalizations*, Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi

¹⁸³ Shapiro, Jeremy and Witney, Nick. 2009. *Towards a Post-American Europe: A Power Audit of EU-US Relations*. The European Council on Foreign Relations, London

¹⁸⁴ Shapiro, Jeremy and Witney, Nick. *Ibid.*

¹⁸⁵ Sheetz, Mark. 2004. *Is America Vital to European Peace?* Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University

¹⁸⁶ Sheetz, Mark. *Ibid.*

salah satu yang mereka harapkan tidak mencerminkan kemajuan Eropa lagi," (Gienow-Hecht, 2006: 1090)¹⁸⁷.

Eropa memandang hegemoni dengan satu matanya terbuka untuk melihat realitas kekuatan Amerika sementara satu mata lainnya masih dalam impian mendominasi semua wilayah di seluruh dunia. Andrew J. Bacevich (2010)¹⁸⁸ mempertanyakan: "... Mengapa tidak dibiarkan saja orang-orang Eropa menyibukkan diri dengan proyek unifikasi yang tidak pernah berakhir?" Pertanyaan ini mencerminkan proyek berkelanjutan untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi dominasi Amerika.

Esther Brimmer (2007: 5)¹⁸⁹ menulis bahwa, "Setelah dua perang dunia menarik Amerika Serikat ke dalam tindakan militer untuk membela demokrasi liberal di Eropa, para pemimpin Amerika mengerti bahwa keamanan Eropa adalah demi kepentingan Amerika." Namun, pada pidatonya yang diberikan pada tanggal 25 Februari 2009, di *House of Commons* di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Semua Kelompok Parlemen Transatlantic dan Keamanan Internasional (*All-Party Parliamentary Group on Transatlantic and International Security*), Joschka Fischer (2009: 85)¹⁹⁰, seorang Menteri Luar Negeri Jerman 1998-2005, memperingatkan pemerintah Eropa bahwa:

Amerika berpaling wajahnya dari Eropa. Eropa masih penting, dan ekonomi Eropa masih faktor kunci, tentu saja. Tetapi ketika mereka melihat ke masa depan, mereka mencari ke tepi Utara Timur Pasifik, China, Jepang, Korea Selatan, dan lebih jauh ke selatan sedikit, ke India, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Mengapa demikian? Karena ada pengalihan kekuasaan dari Barat ke Timur.

Fischer terang-terangan meragukan posisi strategis Eropa untuk Amerika Serikat karena telah kemampuan daya sangat terbatas. Dia mengatakan, "Jika Amerika Serikat datang kepada kami dan meminta kemitraan, jika kita akan jujur kita akan mengatakan 'Ya, itulah yang kami butuhkan, tapi sayangnya kita tidak siap.' Tapi situasi akan sangat berbeda jika Eropa dapat berhasil dalam proyek integrasi mereka. Pada laporannya Juli 2000, Komisi Nasional Kepentingan Amerika disimpulkan bahwa pada proses integrasi, Amerika memiliki dua kepentingan nasional: pertama, untuk menjaga proyek keamanan dan pertahanan Uni Eropa selaras dengan kerangka Alliance, dan yang kedua, Uni Eropa (*European Union-EU*) proyek harus menginspirasi Eropa untuk lebih serius tentang modernisasi pertahanan dan restrukturisasi.

¹⁸⁷ Gienow-Hecht, Jessica C. E. 2006. Always Blame the Americans: Anti-Americanism in Europe in the Twentieth Century. *The American Historical Review*, Vol. 111, No. 4: 1067-1091

¹⁸⁸ Bacevich, Andrew J. 2010. Let Europe be Europe: Why the United States must Withdraw from NATO. *Foreign Policy*. Washington, D.C.

¹⁸⁹ Brimmer, Esther. 2007. Seeing blue: American Visions of the European Union. *Chaillot Paper*. No. 105, The European Union Institute for Security Studies, Paris

¹⁹⁰ Fischer, Joschka. 2009. Europe and America after Bush. *Demokratiya*. Vol. 16: 84-90. Bisa diakses pada: <https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files/mf/1389826531d16Fischer.pdf>

Henri Goverde (2004: 3)¹⁹¹ telah menganalisis dinamika kekuasaan dengan cara tiga lapis yang meliputi: listrik sebagai kapasitas (tdk sengaja: 'kekuasaan atas'); kekuasaan sebagai fenomena relasional (disposisional atau intransitif: 'kekuatan untuk'), dan kekuasaan sebagai struktural/ sistemik. Mark Haugaard dan Howard H. Lentner (2006)¹⁹² berpendapat bahwa hegemoni AS tidak bisa dipaksakan dari atas (paksa) tapi harus mengalir dari bawah, dan cara yang mungkin untuk mendapatkan dukungan bottom-up ini adalah melalui dominasi AS budaya. Sementara itu, Michael Lind (2007)¹⁹³ menegaskan bahwa "*hegemoni militer Amerika di Eropa, Asia dan Timur Tengah bergantung pada kemampuan militer AS untuk mengancam dan, jika perlu, untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengalahkan setiap daerah tantangan-tetapi pada biaya yang relatif rendah.*" Dominasi budaya seperti yang direkomendasikan oleh Hauggard dan Lentner disebut sebagai *soft power*, sedangkan penggunaan militer untuk hegemoni disebut sebagai *hard power*. Kedua kekuatan hegemonik memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol mendasar pada negara bawahan yang sesuai dengan harapan peran. Namun, Robert Kagan menyajikan Amerika Serikat dan Eropa sebagai korban kemampuan kekuasaan mereka. "*Amerika adalah koboi ... Eropa lebih seperti kapster, tukang potong rambut di salon,*" kata Kagan¹⁹⁴.

Secara khusus, kepentingan nasional Amerika di Rusia pasca perang dingin dapat diringkas dalam tujuh poin berikut: (a) Senjata Nuklir: Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki 95% dari senjata nuklir di dunia dan sebagian besar bahan-bahan peledak dunia dan keduanya merupakan pemasok utama dari teknologi nuklir sipil di seluruh dunia; (b) Non-Proliferasi: Rusia memainkan peran kunci dalam pimpinan AS upaya internasional untuk menghambat penyebaran senjata nuklir, senjata yang dapat digunakan bahan dan teknologi, yang dicari tidak hanya oleh negara-bangsa, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara ; (c) Geopolitik : Menyelaraskan Moskow lebih dekat dengan tujuan Amerika akan membawa keseimbangan signifikan dari keuntungan daya ke Amerika Serikat-termasuk dalam mengelola munculnya Cina sebagai kekuatan global; (d) Afghanistan: Rusia telah disediakan Amerika Serikat dengan akses ke wilayah udara dan wilayah sebagai rute pasokan alternatif penting bagi pasukan AS di Afghanistan, sesuatu yang telah tumbuh di penting sebagai hubungan Amerika dengan Pakistan telah memburuk; (e) Energi: Rusia memiliki peran penting dalam menjaga dan memperluas pasokan energi yang menjaga ekonomi global yang stabil dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia; (f) Keuangan: keanggotaan Rusia dalam G8 dan G20 memberikan kursi di meja untuk pertemuan keuangan dan

¹⁹¹ Goverde, Henri, 2004. US Hegemony and the New European Divide: The Power Of Complex Territorial Governance. *Working Paper Series 2004/ 11*. Wageningen University and Research Centre

¹⁹² Haugaard, Mark and Lentner. Howard H. (eds.). 2006. *Hegemony and Power: Consensus and Coercion in Contemporary Politics*. The Rowman & Littlefield Publishing Group Inc., Maryland

¹⁹³ Lind, Michael. 2007. Beyond American Hegemony. *The National Interest*. New America Foundation, Washington and New York

¹⁹⁴ Kagan, Robert. 2002. Power and Weakness. *Policy Review*. No. 113.

ekonomi yang paling penting dan musyawarah; (g) Geografi Strategis: Rusia adalah negara terbesar di Bumi dengan luas lahan dan terbesar di Eropa dengan populasi.

Tapi, kekuatan hegemonik juga dapat dilihat sebagai fenomena relasional baik dalam arti bahwa orang mengerahkan kekuasaan atas orang lain dan dalam bahwa kekuatan (atau kapasitas) dari satu orang untuk melakukan sesuatu merupakan hubungan sosial vis-à-vis kekuatan yang sebanding atau kapasitas orang lain (Patrick Bernhagen, 2003)¹⁹⁵. Eropa dan Amerika Serikat telah menghasilkan hegemoni dalam sejarah hubungan internasional. Pada abad XIX, Eropa adalah kekuatan hegemonik. Di tengah XX, kepemimpinan Power Dunia ditaklukkan oleh Amerika Serikat, dan saat ini Amerika Serikat memiliki hegemoni dipertanyakan dalam hubungan internasional (Roberto Dominguez-Rivera (2003: 1).¹⁹⁶

□ Kekuatan hegemonik juga dapat dilihat sebagai fenomena relasional baik dalam arti bahwa orang mengerahkan kekuasaan atas orang lain dan dalam bahwa kekuatan (atau kapasitas) dari satu orang untuk melakukan sesuatu merupakan hubungan sosial vis-à-vis kekuatan yang sebanding atau kapasitas orang lain (Patrick Bernhagen, 2003)

Pada kekuatan yang sebanding, Eropa telah berkembang menjadi sistem supranasional terlibat dalam saling ketergantungan yang kompleks dan memilih untuk tawar-menawar kedaulatan nasional dari masing-masing negara dalam pertukaran untuk keamanan politik dan ekonomi kolektif dan kemakmuran (Malvina Tema, 2011: 240)¹⁹⁷.

Persaingan Kawasan di Asia Tenggara

Pada tahun 1993, Bush menyusun agenda peneguhan hegemoni Amerika di Asia dalam lima garis besar kebijakan strategis: *pertama*, Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan posisinya sebagai kekuatan penentu di kawasan Pasifik yang mampu menjangkau hingga ke Asia dengan bantuan Jepang; *kedua*, Amerika Serikat harus melanjutkan program perluasan pasar melalui berbagai bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral; *ketiga*, Amerika Serikat harus terus mewaspadaai kemunculan Cina di pentas dunia dengan melakukan apa yang dianggap perlu seperti memberikan dukungan, menarik dukungan atau berbagi kekuatan dengan negara tersebut untuk melindungi kepentingan nasional Amerika; *keempat*, Amerika Serikat harus terus memainkan peranan pentingnya dalam proses unifikasi di Semenanjung Korea; dan *kelima*,

¹⁹⁵ Bernhagen, P. 2003. Power: Making Sense of an Elusive Concept', *Journal of Postgraduate Research*, 2: 62-82.

¹⁹⁶ Dominguez-Rivera, Roberto. 2003. "Dealing with the U.S. hegemony: Soft and hard power in the external relations of the European Union". Dalam: UNSPECIFIED, Nashville, TN.

¹⁹⁷ Tema, Malvina. 2011. A Critical Approach to a Possible EU Hegemony: Re-Conceptualizing the 'Power' of the Union in the Light of the Current Crisis. *Journal for European Issues*. Issue 15: 237-247

Amerika Serikat harus mendorong normalisasi IndoCina serta ekspansi dan pengembangan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).

Di kawasan Asia Tenggara, kekuatan yang berdiri secara terstruktur yang saling bekerjasama, berkompetisi, atau saling menguasai tersebut, menurut Yilmaz (2010: 198) dibagi menjadi: (1) Kekuatan Global (*global power*), yaitu Amerika Serikat, (2) Kekuatan Kontinental (*continental power*), yakni Cina dan Federasi Rusia, (3) Kekuatan Regional (*regional power*), meliputi India, Brazil, Iran dan Jepang), (4) Kekuatan Terpadu (*unified power*), yaitu NATO dan Organisasi Kerjasama Shanghai, (5) Kekuatan Terbatas (*limited power*), seperti Meksiko, Turki, Israel dan Korea Selatan¹⁹⁸.

Politik luar negeri AS di Asia Tenggara dan negara dunia ketiga lainnya, apa pun dalihnya, sebenarnya juga tidak bisa terlepas dari kepentingan kapitalis AS yang ingin melicinkan jalan bagi kejayaan rezim neo-imperialismenya dan memperkokoh kedudukannya sebagai pemegang hegemoni dunia yang akan mengambil tanggungjawab sebagai pemimpin dunia. Inti dari konsep tanggungjawab AS dalam kepemimpinan itu adalah upaya untuk terus memantapkan posisi hegemoninya di pentas dunia (Jiemin, 2005)¹⁹⁹, yaitu kekuasaan yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Budiman, 1997: 72-73)²⁰⁰, karena kekuasaan yang syah mempunyai kemungkinan lebih baik untuk mempengaruhi kehendak obyeknya daripada kekuasaan yang tidak syah (Morgenthau, 1973: 46)²⁰¹. Sehingga Lendman dan Asongu (2007)²⁰² meyakini bahwa kebijakan luar negeri AS pada dasarnya bersifat imperialistik di mana motif keterlibatan militer mereka dalam penyelesaian kasus-kasus di luar negeri sebenarnya berlatar belakang kepentingan dominasi secara ekonomi. Logika-logika tersebut di atas cenderung melegitimasi para pemimpin atau pengambil keputusan di Amerika Serikat untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi di negara-negara lain atas nama 'kepentingan nasional AS'. Inilah yang kemudian membuat AS dengan berani masuk ke berbagai kawasan di dunia, termasuk Asia Tenggara pada masa Perang Dingin.

□ Kebijakan luar negeri AS pada dasarnya bersifat imperialistik di mana motif keterlibatan militer mereka dalam penyelesaian kasus-kasus di luar negeri sebenarnya berlatar belakang kepentingan dominasi secara ekonomi (Lendman dan Asongu, 2007)

¹⁹⁸ Yilmaz, S. 2010. State, Power, and Hegemony. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 3. Vol. 1 No. 3: 192-205.

¹⁹⁹ Jiemin, G. 2005, *Cultural Power and Cultural Conflict*, <http://www.crvp.org/book/Series03/III-20>, download 04-Jul-05.

²⁰⁰ Budiman, A. 1997. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

²⁰¹ Morgenthau, H. J. 1973. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Fourth Edition. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

²⁰² Lendman, S., dan Asongu, J.J. 2007. *The Iraq Quagmire: The Price of Imperial Arrogance*. Lawrenceville, GA: Greenview Publishing Company.

Sekalipun AS mempunyai kekuatan militer melalui teknologi yang super canggih dan anggaran belanja yang besar serta pemegang kunci dalam kebijakan ekonomi dunia, namun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa AS pasca Perang Dingin mempunyai kekuasaan hegemonik sepenuhnya atas dunia (Goodin, Güth dan Snidal, 2005: 5)²⁰³. Di Afrika dan Asia Pasifik, khususnya ASEAN, hegemoni Amerika Serikat selalu di bawah bayang-bayang ancaman Cina melalui jalur budaya, diplomasi, bantuan luar negeri, perdagangan dan penanaman modal asing (untuk Afrika, lih. Carmody dan Owusu, 2007²⁰⁴; sedangkan untuk Asia, lih. Lum, Morrison, dan Vaughn, 2008²⁰⁵). Pesatnya kemajuan ekonomi Cina telah menjadikan Negara tersebut sebagai Negara pesaing hegemoni AS paling potensial, yang terkenal dengan istilah ‘ancaman Cina’ (*the China threat*), seperti dikatakan oleh Xin Benjian (2001)²⁰⁶:

Since China is viewed as a rising “revisionist” power in the Asia-Pacific, the “China Threat” is very popular in Japan and Southeast Asian countries. The territorial disputes between China and Japan, India, Vietnam, the Philippines, Brunei, and Malaysia—plus tensions across the Taiwan Strait—have provided the US with certain opportunities to alienate China from its neighbors by playing up the security dilemma. In Strategic Appraisal 1996, the RAND Corporation recommended that the US government reinforce alliances with Japan and ROK, improve cooperation with ASEAN, and support the defense of Taiwan and ASEAN in order to contain China.

Di antara semua negara dan koalisi yang secara teoritis dapat menduduki posisi global superpower, atau yang memiliki peluang paling besar dalam jangka waktu dekat atau menengah untuk tampil sebagai negara adidaya baru yang menandingi AS adalah Cina (Wyne, 2006: 77-79)²⁰⁷. Bahkan dilaporkan oleh Komisi Intelijen Nasional AS bahwa jika Cina menjadi semakin kuat, negara ini akan berusaha mengatur ulang kekuatan yang menguntungkan di Asia Pasifik dan mungkin terlibat dalam berbagai konflik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan-kekuatan di luar lainnya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit, Cina akan terus memperluas pengaruhnya tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan AS.

- Jika Cina menjadi semakin kuat, negara ini akan berusaha mengatur ulang kekuatan yang menguntungkan di Asia Pasifik dan mungkin terlibat dalam

²⁰³ Goodin, R.E., Güth, W. dan Snidal, D. 2005. *Strategic Aspects of Hegemony*. Jena: Max-Planck-Institut für Ökonomik

²⁰⁴ Carmody, Pádraig R. dan Owusu, Francis Y. 2007. Competing hegemonies? Chinese versus American Geoeconomic Strategies in Africa. *Political Geography* 26, no. 5

²⁰⁵ Lum, T., Morrison, W. M. dan Vaughn, B. 2008. China's "Soft Power" in Southeast Asia. *CRS Report for Congress*. Congressional Research Service.

²⁰⁶ Benjian, X. 2001. Security Dilemma, Balance of Power vs. US Policy Towards China in the Post-Cold War Era (terj.). *Xiandai Guoji Guanxi (Contemporary International Relations)*.

²⁰⁷ Wyne, A. 2006. Questioning the Theory of Hegemonic Continuum. Dalam: Cox, M. (ed.) *Critique: A Worldwide Journal of Politics*. Illinois: Illinois State University.

berbagai konflik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan-kekuatan di luar lainnya (Komisi Intelijen Nasional AS)

Dari perspektif sejarah, kebijakan luar negeri AS untuk kawasan Asia Tenggara ini dibagi dalam tiga fase, yaitu: (a) fase ekspansi selama kurun 1776-1946, yang memuncak pada kolonisasi atas Filipina, (b) fase anti komunisme dalam kurun 1946-1989, dan (c) fase dimana hegemoni AS diuji oleh gerakan teror kaum fundamentalis Muslim pada kurun 1989-2009 (Chew, 2009: 7)²⁰⁸.

ASEAN adalah bekas koloni Negara-negara Barat: Birma, Malaysia, Singapura dan Brunei adalah bekas anak jajahan Inggris; Indonesia sempat lama dikuasai Belanda; Kamboja, Laos dan Vietnam adalah daerah koloni Perancis dan Filipina pernah dijajah dua bangsa Barat yaitu Spanyol dan Amerika. Namun, ras mereka banyak yang berasal dari Cina dan India (Mahbubani, 2008: 83)²⁰⁹, sedangkan budayanya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Masuknya Kristen melalui kolonisasi bangsa Barat ke kawasan ini dengan membawa nilai-nilai modernisasi sempat memunculkan berbagai ketegangan antara 'nilai Asia' dengan 'nilai Barat', sehingga persepsi masyarakat ASEAN kepada Amerika Serikat saat ini dapat digambarkan sebagai *'love-hate relationship'* (Chew, 2009: 8, 12).²¹⁰

Pada dekade pertama pasca Perang Dingin, kebijakan pokok luar negeri AS adalah untuk melindungi kawasan ini dari dominasi hegemonik Negara kuat lainnya, menjamin kelancaran pelayaran niaga dan membuka pasar bebas serta penyebarluasan gagasan hak asasi manusia dan demokrasi (Capie dan Acharya, 2002: 2). Adapun cara atau tindakan yang dilakukan oleh AS untuk meneguhkan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara ini dapat disimpulkan dalam tiga kategori: (1) intervensi militer secara langsung, (2) dukungan latihan militer untuk menjaga perdamaian atau untuk tujuan kemanusiaan, dan (3) keterlibatan AS dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan diplomasi (Bert 2003:44)²¹¹.

Pada masa Perang Dingin, Indonesia, Vietnam dan Filipina bukan hanya menjadi negara di ASEAN yang tunduk pada tekanan militer, ekonomi dan politik AS, tetapi bahkan merelakan para diplomat, personil intelijen dan penasihat militer AS duduk bercokol mengawasi jalannya kebijakan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Perang Dingin, kehadiran AS di kawasan ini terjadi karena adanya konsensus bersama antara negara hegemon (Amerika Serikat) dengan negara yang di hegemoni (negara-

²⁰⁸ Chew, E. 2009. *US Foreign Policy & Southeast Asia - From Manifest Destiny to Shared Destiny*. RSIS Working Paper 185

²⁰⁹ Mahbubani, K. 2008. *The New Asian Hemisphere*. New York: Public Affairs.

²¹⁰ Chew, E. *Ibid.*

²¹¹ Bert, W. 2003. *The United States, China and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard?* New York: Palgrave Macmillan.

negara ASEAN). Bentuk konsensus tersebut dapat digambarkan oleh Farish A. Noor (2005: 225)²¹² sebagai berikut:

Di Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, dan Brunei, keberadaan dan hegemoni Amerika telah diperkenalkan dan dilanggengkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan elit lokal yang meminta bantuan Amerika untuk menangani perbedaan pendapat internal dan oposisi yang datang dari berbagai kelompok-kelompok pro-demokrasi, golongan kiri, kaum komunis, dan kelompok-kelompok oposisi Islam. Di Thailand, Amerika Serikat membantu untuk menjaga cengkraman kuat tentara pada politik nasional melalui jaringan patronase yang kompleks dan dukungan yang diberikan kepada tentara dan polisi pasukan Thailand yang berperan dalam menghilangkan intelektual kiri dan pemimpin komunis, untuk memastikan bahwa Thailand tidak jatuh ke tangan blok Soviet selama Perang Dingin. Di Singapura dan Malaysia, orang-orang Amerika prioritas pertama sebagai personel intelijen mereka untuk membantu pemerintah negara masing-masing memantau, menindak, dan menghilangkan operasi komunis dan partai buruh di sana.

Pada tahun 1984, Malaysia dan Amerika Serikat membuat perjanjian kerjasama untuk mendirikan *Bilateral Training and Consultation* (BITAC), sebuah lembaga yang terdiri dari kelompok-kelompok kerja untuk berbagai latihan, kerjasama intelejen, dukungan logistik dan isu-isu keamanan umum lainnya. BITAC berfungsi sebagai basis bagi pengembangan kerjasama militer kedua negara. Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS secara aktif membuat berbagai latihan perang di laut dan di udara; Angkatan Darat AS memperoleh akses untuk mebuat sekolah pendidikan militer di Pulada, Johor. Dengan bantuan Malaysia, Angkatan Laut AS membangun fasilitas perawatan kapal-kapal perangnya di Lumut, Pantai Barat, sedangkan Angkatan Udara AS mendirikan fasilitas perawatan bagi pesawat pengangkut C-130 Herculesnya. Dengan demikian, hegemoni AS pada periode Perang Dingin ini dapat dikatakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para elit di negara-negara ASEAN (Saravanamuttu, 2010: 197).²¹³

²¹² Noor. F. A. 2005. Uncle Sam to the Rescue? The Political Impact of American Involvement in ASEAN Security and Political Issues in the Wake of 9/11. Dalam: Judt, Tony dan Lacorne, Denis.(eds). *With Us or Against Us*. New York: Palgrave Macmillan

²¹³ Saravanamuttu, J. 2010. *Malaysia's Foreign Policy: the first Fifty Years : Alignment, Neutralism, Islamism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

V

Karakter Agresif dalam Budaya Hegemonik AS

*America is an exceptional nation, with an exceptional people and an exceptional role to play in the world
(Calabresi, 2006: 1337)*

Hampir semua bangsa di dunia ini merasa bangga dengan dirinya sendiri, bahkan merasa lebih hebat dari bangsa lainnya. Perasaan tersebut sering berujung pada berbagai bentuk pertikaian dan persaingan, baik secara politik, ekonomi, budaya hingga militer. Akan tetapi, setelah Perang Dunia I, II hingga Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat seakan-akan mendapat angin segar untuk merasa paling berhak disebut sebagai negara paling hebat dan kuat di atas seluruh bangsa lainnya. Perasaan inilah yang didefinisikan sebagai “Eksepsionalisme Amerika (*American exceptionalism*)”. Eksepsionalisme Amerika akan sering muncul dalam situasi di mana norma internasional secara signifikan bersinggungan dengan persepsi Amerika Serikat khususnya dalam hal keamanan internasional (Sabrina Safrin, 2008: 1316).²¹⁴ Dari sinilah kajian mengenai eksepsionalisme bagi negara Amerika Serikat menjadi sangat penting.

Eksepsionalisme Amerika

Gagasan mengenai eksepsionalisme Amerika ini diawali ketika seorang berkebangsaan Perancis bernama Alexis de Tocqueville (1805–59) pada tahun 1835 menulis istilah ‘*American exceptionalism*’. Tocqueville memandang negara Amerika Serikat sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dari kebanyakan masyarakat tradisional di era Dunia Lama. Menurutnya, negara ini ‘sangat khas dalam menerapkan prinsip-prinsip dan pelebagaan agama dan politik dari masyarakat Barat lainnya, karena lebih mencerminkan egalitarianisme sosial dan mobilitas sosial yang tinggi, mempunyai antusiasme kepada agama, cinta tanah air, serta keberagaman dalam hal etnik dan ras (Watts, 2010: 10)²¹⁵.

²¹⁴ Safrin, S. 2008. The Un-Exceptionalism of U.S. Exceptionalism, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vol.41: 1307-1354

²¹⁵ Watts, D. 2010. *Dictionary of American Government and Politics*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.



Alexis de Tocqueville oleh Théodore Chassériau (1850) *Manuscript of Democracy in America*

Gagasan tersebut menjadi semakin menguat pasca Perang Dingin sejak keberhasilan spektakuler AS pasca Perang Dingin, yang digunakan untuk menggambarkan AS sebagai sebuah negara yang luar biasa (*an extraordinary nation*) dengan peranan khusus dalam sejarah kemanusiaan; sebuah bangsa yang tidak hanya unik tetapi superior (Bacevich, 2002:43²¹⁶; McCrisken, 2002: 63, 72-73²¹⁷). Dalam gagasan ini, Amerika Serikat diyakini sebagai wilayah paling istimewa di dunia karena letaknya sebagai benua yang tidak mudah dimasuki musuh, mempunyai sumber kekayaan alam berlimpah, kemampuan melindungi diri sendiri, dan memiliki sistem politik yang stabil (Hoff, J. 2008: 8)²¹⁸.

- ❑ Amerika Serikat diyakini sebagai wilayah paling istimewa di dunia karena letaknya sebagai benua yang tidak mudah dimasuki musuh, mempunyai sumber kekayaan alam berlimpah, kemampuan melindungi diri sendiri, dan memiliki sistem politik yang stabil (Hoff, J. 2008: 8)

Secara keseluruhan, eksepsionalisme Amerika adalah gagasan yang hidup di kalangan para pendiri negara Amerika Serikat dan terus disebarluaskan di dalam negeri hingga ke seluruh dunia bahwa Amerika Serikat adalah bangsa dan negara yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dan memimpin dunia menurut cara dan pandangan hidup bangsa Amerika. Gagasan ini terus berkembang sejak awal berdirinya negara Amerika Serikat hingga saat ini, yang dapat menjadi salah satu kunci penting memahami segala sepak terjang Amerika Serikat di sepanjang sejarah peradaban dunia.

- ❑ Eksepsionalisme Amerika adalah gagasan yang hidup di kalangan para pendiri negara Amerika Serikat dan terus disebarluaskan di dalam negeri

²¹⁶ Bacevich, A. J. 2002. *American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy*. Cambridge: Harvard University Press

²¹⁷ McCrisken, T.B. 2002. Exceptionalism. Dalam: DeConde, A., Burns, R. D. dan Logevall, F. (eds.) *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movements and Ideas*. New York: Charles Scribner's Sons.

²¹⁸ Hoff, J. 2008. *Dreams of Perfectibility: A Faustian Foreign Policy from Woodrow Wilson to George W. Bush*. Cambridge: Cambridge University Press.

hingga ke seluruh dunia bahwa Amerika Serikat adalah bangsa dan negara yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dan memimpin dunia menurut cara dan pandangan hidup bangsa Amerika.

Edward C. Luck (2003: 27)²¹⁹ menyebutkan empat karakteristik suatu negara yang bersifat eksepsional: (1) kehendak untuk berjalan sendiri dalam berbagai bidang kehidupan dengan mengenyampingkan berbagai kritikan dan tekanan dari pihak lain, (2) keyakinan bahwa praktek dan nilai-nilai dalam dirinya memiliki kebenaran secara universal serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh mempunyai legitimasi moral, (3) kecenderungan kuat untuk selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri bahkan tak jarang memaksa agar aturan hukum dalam negerinya diterima pihak lain sekalipun bertentangan dengan perjanjian internasional; (4) sikap para pengambil kebijakan dan penyusun legislasi nasional yang dengan mudah mengenyampingkan kepentingan bersama dalam lembaga-lembaga multilateral. Berdasarkan kriteria di atas, Luck menyebutkan Amerika Serikat sebagai negara yang paling memenuhi syarat sebagai negara yang eksepsional.

Eksepsionalisme Amerika dapat merujuk pada gagasan bahwa ada (a) sesuatu yang berbeda tentang Amerika atau (b) sesuatu yang istimewa atau khusus tentang Amerika. "Berbeda" adalah makna yang umumnya dianut oleh ilmu sosial deskriptif. Ini merupakan hasil penyelidikan atas berbagai fitur masyarakat di negara-negara maju untuk mengetahui apakah Amerika secara keseluruhan menampilkan perbedaan besar dengan bangsa-bangsa lain. "Istimewa" atau "khusus" berarti berbeda dengan cara tertentu. Pengertian tentang hal ini berada di luar jangkauan penyelidikan empiris yang lebih bersifat normatif, biasanya untuk apa layak atau lebih baik tapi kadang-kadang hanya sebaliknya. Namun keistimewaan itu sendiri dapat lagi dibagi menjadi dua ide yang berbeda : (a) memiliki sebuah kualitas tertentu atau (b) gabungan dari tugas atau misi. Dalam arti pertama, yang telah masuk ke dalam politik wacana, pembela eksepsionalisme akan merujuk misalnya, pada gagasan mengenai kebebasan atau upaya-upaya yang memperjuangkan kebebasan tersebut. Dalam arti kedua, keistimewaan tersebut mengacu pada sesuatu yang dianggap atau diyakini oleh orang-orang Amerika atas apa yang negara minta untuk mereka lakukan. Sebuah misi dilakukan tidak untuk kesenangan atau keuntungan, tetapi sebagai tanggung jawab dalam memenuhi tujuan yang lebih besar (Ceaser, 2012: 6-7).²²⁰

Frederick Schauer (2005: 30-31) menggolongkan kajian Eksepsionalisme Amerika tersebut ke dalam dua bentuk: (a) eksepsionalisme substantif (*substantive exceptionalism*), yaitu kajian exceptionalism dari segi keluaran aktual (*actual outcomes*) dan doktrin aktual (*actual doctrines*); dan (b) eksepsionalisme metodologis (*methodological exceptionalism*),

²¹⁹ Luck, E. C. 2003. American Exceptionalism and International Organization: Lessons from the 1990s. Dalam: Foot, R. (eds.). *US Hegemony and International Organizations*. New York: Oxford University Press: 25-48.

²²⁰ Ceaser, James W. 2012. The Origins and Character of American Exceptionalism. *American Political Thought: A Journal of Ideas, Institutions, and Culture*, vol. 1: 1-25

yaitu kajian eksepsionalisme dari segi metode dan pendekatan. Pada bentuk yang pertama, Schauer menjelaskan bahwa kebebasan berbicara merupakan tradisi demokrasi yang khas Amerika²²¹.

Kebebasan tersebut tertuang dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS yang berbunyi:

Kongres tidak akan membuat undang-undang mengenai pembentukan atau pelestarian agama, atau yang melarang dijalankannya agama secara bebas; atau menghambat kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk menyampaikan petisi kepada Pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan mereka.

Konsekuensi dari kebebasan berbicara ini adalah ketiadaan larangan untuk menyebarkan ungkapan yang bernada kebencian, atau dengan kata lain kebebasan untuk tidak senang atau benci (*freedom to hate*). Buku yang mengupas topik ini secara khusus antara lain adalah karangan Samuel Walker (1994) berjudul "*Hate Speech: The History of an American Controversy*". Dalam buku ini, Walker menguraikan secara lengkap sejarah kontroversial "hate speech" di Amerika Serikat, sejak dari pertikaian kelompok rahasia Ku Klux Klan di tahun 1920 an hingga kelompok pro Nazi di tahun 30 an, episode Skokie 1977-78 hingga peperangan budaya di kampus-kampus di tahun 90 an. Menurut Walker, gerakan hak-hak sipil memegang peranan yang cukup penting dalam penyebaran tradisi kebebasan berbicara²²².

Jurnal online "The Keystone" (2013) menggambarkan *Freedom to Hate* sebagai tradisi khas Amerika sebagai berikut²²³: Amerika Serikat adalah negara eksepsional yang mengizinkan semua bentuk kebebasan berpendapat. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai gagasan baru ke tengah-tengah masyarakat yang sudah mapan. Tanpa kebebasan berpendapat, suatu bangsa tidak akan mampu meraih masa depan yang gemilang—nilai pentingnya tak perlu diragukan lagi.

²²¹ Schauer, F. 2005. *The Exceptional First Amendment*. Dalam: Ignatieff, M. 2005. *American Exceptionalism and Human Rights*. Princeton, New Jersey: 29-56.

²²² Walker, Samuel. 1994. *Hate Speech: The History of an American Controversy*, Lincoln, Nebraska and London: University of Nebraska Press

²²³ The Keystone Journal. 2013. *The Freedom to Hate: American Exceptionalism*. Dapat diakses di: <https://thekeystonejournal.wordpress.com/2013/03/26/the-freedom-to-hate-american-exceptionalism/>



American Exceptionalism
oleh Adam Zyglis, *Buffalo News*

Ironisnya, penerapan *freedom to hate* ini tidak berlaku bagi “sentimen anti Yahudi” (anti Semit). Di depan musium kamp konsentrasi Auschwitz, Polandia tanggal 31 Mei 2003 Presiden Bush berpidato: Situs ini adalah bangunan yang secara serius selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita menjumpai Anti Semitisme, entah di Eropa atau di mana saja, maka kita harus bersatu dan saling bahu membahu untuk melawan gerakan jahat tersebut.

Dorothy Ross (1991), seorang sejarawan Amerika, menguraikan bahwa kajian eksepsionalisme Amerika dapat dijelaskan ke dalam tiga bentuk: (1) Penjelasan yang bersifat supranatural, (2) Penjelasan yang bersifat genetis, dan (3) Penjelasan yang bersifat lingkungan. Penjelasan pertama bermakna bahwa kaum Protestan di Amerika percaya negara ini akan memimpin Zaman Keemasan Kristen (*Christian Millineum*). Penjelasan kedua menunjukkan keterkaitan akar ideologi Amerika dengan tradisi imperium Anglo-Saxon dan Romawi. Penjelasan ketiga mengungkapkan ekspresi para pendiri republik ini yang menaruh harapan pada Amerika sebagai “tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.”²²⁴

- ❑ Dorothy Ross (1991), seorang sejarawan Amerika, menguraikan bahwa kajian eksepsionalisme Amerika dapat dijelaskan ke dalam tiga bentuk: (1) Penjelasan yang bersifat supranatural, (2) Penjelasan yang bersifat genetis, dan (3) Penjelasan yang bersifat lingkungan.

Dalam aktualisasinya, Michael Ignatieff (2005: 3-8) membagi Eksepsionalisme Amerika ini ke dalam tiga wajah berbeda, yaitu: (1) *American exemptionalism* (kesewenangan Amerika untuk tidak mematuhi aturan hukum dan perjanjian internasional secara sepihak); 2) *double standard* (menggunakan standard peniaian berbeda antara

²²⁴ Ross, D. 1991. *The Origins of American Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press

dirinya dengan negara lain; antara negara sahabat dengan negara yang tidak disukainya); 3) *legal isolationism* (penafsiran hukum dan rasa keadilan secara sepihak oleh Amerika).²²⁵

Dengan melihat pembagian Michael Ignatieff, maka sebenarnya pengertian eksepsionalisme tersebut tidak relevan bila dikaitkan dengan label Amerika sebagai sebuah negara yang memperjuangkan demokrasi, pada kenyataannya Amerika menggunakan standar ganda dalam merumuskan dan mempraktekkan demokrasi, melainkan lebih sebagai sebuah 'keberuntungan' dalam sejarah akibat kemampuannya menjadi bangsa yang kaya dengan sumber daya manusia dan alam, serta keberhasilannya menjadi pemenang dalam dua Perang Dunia dan Perang Dingin, sebagaimana yang ditulis oleh Godfrey Hodgson (2009: 157-158)²²⁶:

Pada abad kedua puluh, Amerika menjadi eksepsional bukan karena komitmen untuk cita-cita demokrasi tetapi untuk dua alasan lainnya. Pertama, Amerika Serikat secara eksepsional adalah negara yang sangat kaya, sebagian karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya; kedua, tidak seperti saingannya yaitu Eropa, negara Amerika tidak hancur dan miskin tetapi justru diperkaya oleh dua perang dunia.

Kemenangan-kemenangan yang telah diraih Amerika dalam berbagai pertempuran dalam skala global baik secara fisik maupun ideologi, —Amerika meruntuhkan penyebaran ideologi Fasisme Jerman dan Jepang Perang Dunia Kedua, dan ideologi komunisme dalam Perang Dingin—, mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan diri yang begitu besar sehingga bangsa dan negara Amerika benar-benar meyakini sebagai suatu bangsa yang unggul dan istimewa. Dengan mendasarkan diri pada pandangan merasa istimewa tersebut maka tidak mengherankan bila AS kemudian mempersepsikan dunia ini dalam kacamata Amerika sendiri, sehingga mendorong terjadinya proses budaya yang disebut dengan Amerikanisasi, sebagaimana yang ditulis oleh He Jiantao (2007: 39)²²⁷:

After the World War I, especially after World War II, with the unprecedented development of American economy, the abundant supply of material goods prompted the rise of the popular culture based on the consumption and entertainment, and since then Americanization has been used to describe the process of American popular culture influencing, reshaping other countries' culture and the latter's converging to the former.

Eksepsionalisme Amerika juga dimanfaatkan untuk politik isolasi, yakni kebijakan untuk mengasingkan, mengucilkan, dan mengawasi segala gerak gerik pemimpin atau bangsa lain yang dianggap melanggar demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai standar sepihak Amerika. Politik ini merupakan hasil kebijakan dari penempatan peran yang dijalankan Amerika sebagai 'polisi dunia'. Karena merasa sebagai polisi dunia (*the World Police*), kata Guo Jiemin (2005)²²⁸, AS tidak pernah mau mendengarkan suara-suara atau

²²⁵ Ignatieff, M. 2005. *American Exceptionalism and Human Rights*. Princeton: Princeton University Press

²²⁶ Hodgson, G. 2009. *The Myth of American Exceptionalism*. New Haven dan London: Yale University Press.

²²⁷ Jiantao, H. 2007. Hurricanes from the South: On the Situations and Reasons of Canadian Americanization since World War2, *Korean Review of Canadian Studies*, South Korea, Volume 13: 39-67.

²²⁸ Jiemin, G. 2005, *Cultural Power and Cultural Conflict*. Dapat diakses di: <http://www.crvp.org/book/Series03/III-20>

kritikan-kritikan dari negara lain atau kelompok lain yang tidak sepaham dengan praktek politik luar negeri AS.

- ❑ Eksepsionalisme Amerika juga dimanfaatkan untuk politik isolasi, yakni kebijakan untuk mengasingkan, mengucilkan, dan mengawasi segala gerak gerik pemimpin atau bangsa lain yang dianggap melanggar demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai standar sepihak Amerika.

Dengan kata lain semua negara di dunia harus mau menerima dan mengikuti kemauannya, dan siapa pun yang melawan kepentingan, budaya, atau pandangan dunia AS dipandang sebagai ancaman bagi kehidupan umat manusia dan dijadikan musuh bersama (Sardar dan Davies, 2004: 64-65²²⁹, dan Soderberg, 2005²³⁰). Dari sinilah berkembang budaya Amerika Serikat yang bersifat hegemonik (*hegemonic culture*), yaitu suatu nilai, keyakinan, gagasan dan praktek-praktek budaya yang selalu berkehendak untuk mendominasi, mengalahkan dan mengatur budaya-budaya lain yang berada di dalam lingkaran kekuasaan budayanya.

- ❑ Budaya Amerika Serikat bersifat hegemonik (*hegemonic culture*), yaitu suatu nilai, keyakinan, gagasan dan praktek-praktek budaya yang selalu berkehendak untuk mendominasi, mengalahkan dan mengatur budaya-budaya lain yang berada di dalam lingkaran kekuasaan budayanya.

Semangat AS untuk berperang

Berakhirnya Perang Dingin tidak hanya membuat AS kehilangan pesaing terberatnya dalam perebutan supremasi dunia, tetapi juga mempengaruhi prinsip-prinsip pokok kebijakan luar negerinya yang selama empat dekade terakhir sudah dipraktekkan. Namun demikian masih terlihat beberapa titik kesamaan dalam kebijakan luar negeri AS pada masa selama dan sesudah Perang Dingin, yaitu pada karakteristik kebijakan luar negeri dan keamanannya. Sejak tahun 70an, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, perhatian para ahli Hubungan Internasional semakin banyak diberikan pada kekuatan global yang dijalankan oleh Amerika Serikat (Destradi, 2008: 7)²³¹.

Tahun-tahun 1990, 1991 dan 1992 dapat disebut sebagai tahun-tahun ambisi AS untuk menegakkan tatanan dunia baru di atas dasar hegemoni dirinya terhadap seluruh bangsa dan negara lain di dunia. Namun demikian, dalam prakteknya penggunaan *hard power* dalam penyelesaian masalah-masalah internasional masih menjadi pilihan sekalipun hanya ditujukan bagi sejumlah negara yang memang dianggap layak untuk 'dihukum

²²⁹ Sardar, Z. dan Davies, M. W., 2004. *Why Do People Hate America?* Cambridge: Icon Books Ltd.

²³⁰ Soderberg, N. 2005. *The Superpower Myth: the Use and Misuse of American Might*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.

²³¹ Destradi, S. 2008. Empire, Hegemony, and Leadership: Developing a Research Framework for the Study of Regional Powers. *Giga Working Papers*. No. 79.

dengan jalan kekerasan', seperti Panama (1989), Iraq (1991) dan Somalia (1992). Sedangkan bagi negara-negara lain yang dianggap 'nakal' (bersikap kritis) namun tidak sampai mengancam atau membahayakan posisi dan ambisi hegemoniknya, AS tetap cenderung menggunakan 'soft power', yang dalam hal ini salah satunya adalah melalui pemanfaatan isu globalisasi. Berbagai aksi Washington kerap dicatat para ahli tersebut sebagai sebuah bentuk hegemoni atau eksploitasi (Snidal, 1985: 614)²³², atau kepemimpinan yang bersifat mau menang sendiri, sehingga memunculkan perdebatan apakah kedigdayaan AS tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk imperium atau bukan, atautkah sebagai sebuah aktor utama dan tunggal dalam tatanan imperium global baru atas nama globalisasi (Hardt dan Antonio Negri, 2000)²³³.

Era George HW Bush menggambarkan kesungguhan Amerika Serikat untuk mengembangkan budaya hegemoniknya pasca Perang Dingin melalui berbagai kebijakan dan praktek yang oleh Pentagon disebut sebagai 'full of spectrum dominance'. Dalam bentuk hegemoni seperti ini banyak kebijakan dan prakteknya yang bersifat 'hard power', yaitu penggunaan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional dan kebijakan yang bersifat *unipolar* di tingkat global. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk kebijakan dan praktek budaya hegemonik AS, dalam konteks seperti ini, bertujuan untuk 'victory at war'. Semangat untuk berperang kembali tersebut dibangun melalui manajemen kecemasan yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan di Pentagon. Pada tanggal 7 Pebruari 1991, Laksamana David E. Jeremiah, seorang deputi pada *The State Department Secretary* yang dipimpin Colin L Powell, mengidentifikasi sejumlah ancaman besar bagi keamanan nasional AS, yaitu: kemunculan rezim baru pemerintahan Rusia yang agresif untuk membangun Pakta Warsawa kembali, invasi Rusia ke kawasan Baltik, serangan Kuba atas Terusan Panama, sejumlah serangan atas beberapa warga negara AS di Filipina dan di beberapa negara Asia Timur Jauh lainnya, dan khususnya, penguasaan senjata pemusnah massal oleh Irak dan Korea Utara.

Pada saat menerima pencalonan kembali dirinya sebagai Presiden dari Partai Republik tanggal 20 Agustus 1992, pidato George HW Bush sudah menampilkan sifat politiknya yang agresif, yakni dengan menggunakan kata-kata yang memberikan kesan atau simbol haus akan peperangan untuk membangkitkan antusiasme bangsa Amerika membangun kekuatan globalnya:

Nah, malam ini Saya berkata kepada Anda: Bergabunglah dengan Saya dalam Perang Salib kita yang baru, untuk memetik hasil kemenangan global kita semua, untuk memenangkan perdamaian, sehingga kita dapat membuat Amerika lebih aman dan kuat bagi semua rakyat kita.²³⁴

Pilihan frase 'Perang Salib' jelas menunjukkan taktik Bush untuk membangkitkan semangat kepahlawanan bangsa Amerika sebagaimana yang dulu pernah dikobarkan oleh

²³² Snidal, Duncan. 1985. The Limits of Hegemonic Stability Theory. *International Organization*, 39: 579-614

²³³ Hardt, M. dan Negri, A. 2000. *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.

²³⁴ Peters, Gerhard dan Woolley, John T. *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu>

para Ksatria Suci (*knight templars*) ketika menghadapi kekuatan Islam di Eropa dan seluruh dunia. Kata 'baru' mengisyaratkan bahwa ada dinamika baru yang berbeda dengan situasi pada perang salib sebelumnya.

Manajemen Kecemasan Global

Bagi sebagian pengamat internasional, berakhirnya Perang Dingin dipandang sebagai kemenangan Ronald Reagan, bukan George HW Bush. Saat menjadi Presiden AS, Reagan berulang kali menyatakan keyakinannya bahwa Uni Sovyet tidaklah sekuat apa yang dibayangkan banyak orang. Dalam pidato yang terkenal sebagai "Doktrin Reagan" tanggal 8 Juni 1989 di London, presiden yang berasal dari kalangan perfilman ini mengatakan:

(Saat ini) kita semua belum bisa menikmati suasana dunia yang nyaman. Jika pembangunan berbagai bidang seperti Revolusi Industri, yang dimulai dari sini di Inggris, dan hadiah dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat hidup lebih mudah bagi kita, namun hal tersebut juga dapat membuat hidup manusia menjadi lebih berbahaya. Ada ancaman yang membayangkan kebebasan kita, bahkan secara lebih mendasar lagi adalah bagi eksistensi (hak hidup) kita, ancaman yang takkan terbayangkan oleh generasi lain...

Sejarah mengajarkan betapa bahayanya pemerintah yang lebih mendahulukan kendali politik secara tak terbatas atas pertumbuhan ekonomi bebas, polisi rahasia, birokrasi yang ceroboh, kesemuanya ini untuk menekan tumbuhnya keunggulan individu dan kebebasan pribadi...

(Saya tegaskan bahwa) Uni Sovietlah yang berjalan melawan arus sejarah dengan menyangkal kebebasan manusia dan martabat kemanusiaan bagi warganya.

Apa yang sedang saya jelaskan sekarang adalah rencana dan harapan untuk jangka panjang dari kebebasan dan demokrasi yang akan meninggalkan Marxisme-Leninisme pada abu-tumpukan sejarah, karena telah meninggalkan tirani lainnya yang menghambat kebebasan dan corong kebasan untuk berekspresi bagi rakyat ...

Kekuatan militer kita merupakan prasyarat untuk perdamaian, tapi biarlah semua orang tau bahwa kita mempertahankan kekuatan militer tersebut dengan harapan tidak akan pernah digunakan, karena penentu utama dalam perjuangan yang sekarang terjadi di dunia sebenarnya bukanlah bom dan roket, tetapi ujian atas kehendak dan ide-ide, percobaan tekad spiritual, nilai-nilai yang kita pegang, keyakinan yang kita hargai, cita-cita yang kita dedikasikan.²³⁵

Dalam pidatonya tersebut, Reagan secara terbuka menyatakan penentangannya atas penyebaran ideologi Marxis-Leninis yang dianut Uni Sovyet dan berjanji untuk menghentikannya bahkan jika perlu dengan kekuatan militer. Secara terprogram, Amerika membangkitkan perlawanan rakyat-rakyat yang berada di wilayah kekuasaan Uni Sovyet seperti di Polandia. Dua tahun setelah masa pemerintahan Reagan berakhir, di bulan Desember 1991, tembok Berlin sebagai simbol Perang Dingin akhirnya benar-benar runtuh menandakan kemenangan Amerika Serikat atas pesaing utamanya tersebut. Sekalipun Reagan dapat disebut sebagai presiden AS yang telah memenangkan negaranya dalam

²³⁵ Selengkapnya dapat dilihat pada: *The History Place: Great Speeches Collection*.
<http://www.historyplace.com/speeches/reagan-parliament.htm>

Perang Dingin dengan Uni Sovyet, akan tetapi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa George HW Bush lah yang sebenarnya secara aktif berperan dalam membantu semangat reformasi Gorbachev yang mendorong lahirnya “revolusi beludru” (*velvet revolutions*) di Praha, Ceko Slowakia tahun 1989²³⁶. Bush dapat disebut sebagai penerus paling berhasil atas kebijakan anti ideologi Sovyet yang telah diterapkan oleh presiden-presiden AS sebelumnya. Beberapa pekan setelah runtuhnya tembok Berlin, Bush mengajak Gorbachev duduk satu meja di Perundingan Malta tanggal 2-3 Desember 1989. Dengan melihat kesuksesan Bush, menjadi menarik untuk mempelajari bagaimana strateginya untuk membangun kekuatan hegemonik Amerika Serikat secara global ke seluruh wilayah yang tadinya dikuasai oleh negara super power lainnya. Salah satu kawasan yang menjadi perebutan kekuasaan negara-negara adi daya (AS, Uni Sovyet dan Cina) pada saat itu adalah Asia Tenggara. Kawasan ini sangat kental dengan pertarungan ideologis hingga ke tingkat akar rumput (*grass root*).

Keseluruhan strategi ini dapat disimpulkan dalam sebuah frase: *Manajemen Kecemasan*. Di tangan Bush Senior, kecemasan global yang semula diarahkan pada kekuatan komunis Uni Sovyet di masa Perang Dingin, kini diarahkan pada bentuk-bentuk baru. Kecemasan tersebut dipelihara sebagai energi yang dimanfaatkan untuk membangun ketergantungan pada kekuatan Amerika Serikat; suatu strategi yang berujung pada upaya pelestarian hegemoni AS pasca Perang Dingin. Dalam strategi ini, kecemasan justru dikelola sebagai dalih untuk membenarkan tindakan-tindakan represif Amerika terhadap negara-negara pesaingnya. Dalam kehidupan Amerika yang sekarang pun, kecemasan juga seakan terus dihidupkan dalam benak masyarakat. John W. Whitehead, Presiden The Institut Rutherford dan pengarang 'Battlefield America', menyindir dengan pedas: “Nyalakan TV atau bukalah flip koran pada hari tertentu, dan Anda akan menemukan diri Anda disapa oleh laporan korupsi pemerintah, penyimpangan perusahaan, polisi militer dan penyerbuan tim SWAT.”²³⁷

²³⁶ Untuk mengetahui revolusi Beludru lebih lanjut, silahkan lihat: Lutherová, Sona G. 2010. Before and After: the Phenomenon of Czechoslovakia's “Velvet” Revolution in Narratives by its “Youngest Witnesses”. *Sociológia* 42: 671-690; Shephard, Robin H. E. *Czechoslovakia: The Velvet Revolution and Beyond*. New York: St. Martins, 2000.

²³⁷ Whitehead, John W. 2012. The Politics of Fear in America: A Nation at War With Itself. *Huffington Post*, 10 Januari 2012.

VI

Kredo Amerika Serikat

Secara khusus, istilah “Kredo Amerika” diciptakan oleh William Tyler Page, seorang juru ketik, yang ditulis tahun 1917 dan diterima oleh DPR Amerika Serikat tanggal 3 April 1918. Bunyi Kredo tersebut adalah sebagai berikut:

Saya percaya pada negara Amerika Serikat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; yang mempunyai kekuasaan berasal dari persetujuan rakyat, sebuah demokrasi dalam sebuah republik, sebuah Bangsa berdaulat dari banyak negara yang berdaulat; negara serikat yang sempurna, satu dan tak terpisahkan; didirikan pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan yang untuk kesemua hal tersebut para patriot Amerika rela mengorbankan hidup dan kekayaan mereka.

Karena itu saya percaya bahwa adalah tugas saya untuk mencintai negara saya, untuk mendukung Konstitusi, untuk mematuhi hukum, untuk menghormati bendera, dan mempertahankannya terhadap semua musuh.

William Tyler Page merupakan keturunan John Page, yang datang ke Amerika tahun 1650 dan telah menetap di Williamsburg, Virginia. Leluhurnya yang lain, Carter Braxton telah menandatangani Deklarasi Kemerdekaan AS. Masih leluhur Tyler yang lain, yaitu John Tyler, adalah presiden ke sepuluh dari Amerika Serikat.



Kredo Amerika

"Be The One" - www.aclassofone.blogspot.com

Dalam tulisannya berjudul *Democracy in America*, Alexis de Tocqueville mengidentifikasi lima nilai-nilai krusial bagi keberhasilan Amerika sebagai sebuah negara republik yang demokratis, yaitu; (a) kebebasan atau kemerdekaan (*liberty*), (b) persamaan derajat (*egalitarianism*), (c) penghormatan hak individu (*individualism*), (d) pembelaan hak-hak rakyat (*populism*) dan (e) *laissez-faire*²³⁸. Konsepsi inilah yang dikemudian hari juga dikenal sebagai “kredo bangsa Amerika (*the American Creed*)”, yang mendeskripsikan bagaimana pandangan dunia (*world views*) dan konsepsi-konsepsi pengetahuan dan kebenaran (*knowledge and truth concepts*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh bangsa Amerika.

Brand America: Semangat Kebebasan

Ketika memberi kata pengantar pada bukunya yang berjudul “*Brand America: The Making, Unmaking and Remaking of the Greatest National Image of All Time*” Simon Anholt dan Jeremy Hildreth menegaskan bahwa, “*America is not just a country, it is also a brand* (Amerika bukan sekedar sebuah negara, ia juga adalah sebuah merek dagang). “*Made in America*” seakan menegaskan bahwa produk yang diciptakan Amerika pasti mempunyai keunggulan dibandingkan produk buatan negara lainnya. Menurut Anholt dan Hildreth, produk-produk tersebut seakan menjawab kebutuhan dasar manusia bagi hadirnya “*a shining city on a hill*”, sebuah ungkapan yang jelas menggambarkan semangat *American dream*²³⁹.

❑ Amerika bukan sekedar sebuah negara, ia juga adalah sebuah merek dagang

Produk-produk yang bermerek dagang Amerika (*brand America*) tersebut tidak hanya sebatas pada produk barang dan jasa, akan tetapi secara lebih luas juga meliputi setiap ide atau nilai yang dianggap sebagai khas atau ciptaan bangsa Amerika yang menjadi perwujudan bagi kredo Amerika. Ada tiga hal pokok atau kata kunci dari kredo Amerika, yang ingin disebarluaskan ke seluruh dunia ini, yaitu “*hr-gg-dd*”: hak asasi manusia, pengaturan sistem pemerintahan yang baik dan pengembangan demokrasi (*human rights – good governance – democratic development*).

Kredo yang pertama dapat pula disebut sebagai ‘*Brand America*’, yaitu kredo tentang kebebasan dan kemerdekaan (*Liberty*) yang dianggap sebagai ‘merk dagang’ (*brand*) yang diujakan ke semua negara di dunia— antara lain nilai-nilai kebebasan atau kemerdekaan yang bersifat mendasar (*fundamental freedoms*), seperti kebebasan menganut atau

²³⁸ Isi buku Alexis de Tocqueville berjudul *Democracy in America* yang ditulis pada tahun 1840 tersebut dapat dibaca secara utuh melalui: <https://www.marxists.org/reference/archive/de-tocqueville/democracy-america/> yang diterbitkan oleh Proyek Gutenberg.

²³⁹ Anholt, Simon dan Hildreth, Jeremy. 2010. *Brand America: The Making, Unmaking and Remaking of the Greatest National Image of All Time*. London: Marshall Cavendish International Asia

menjalankan keyakinan agama (*freedom to practice one's own religion*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) kebebasan berserikat (*freedom of association*), kebebasan untuk mempublikasikan gagasan (*freedom to publish*) dan kesamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Terkait dengan pentingnya kebebasan ini ada penggalan pidato George HW Bush pada tanggal 31 Januari 1990 yang menyatakan bahwa: *The anchor in our world today is freedom, holding us steady in times of change, a symbol of hope to all the world.* Pidato ini merupakan penegasan kembali atas apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang kepercayaan dan penasihat pentingnya, yaitu Sekretaris Negara James Baker, yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang '*liberal democratic internationalist*', yang di awal tahun 1989, dalam sebuah acara dengar pendapat menyatakan bahwa: "*The only sure guide*" for American foreign policy was "*the compass of American ideals and values—freedom, democracy, equal rights, respect for human dignity, fair play—the principles to which I adhere.*"

Kemudian pada tanggal 11 September 1990, ketika berbicara di depan kongres AS, Presiden George HW Bush juga mendeklarasikan semangatnya untuk mendirikan sebuah tatanan baru bagi dunia internasional yang : "*..freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace.*" Pidato-pidato tersebut dapat ditafsirkan sebagai penegasan tentang 'kredo Amerika' yang ingin disebarkan ke dunia internasional secara global. Bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh UNDP (*the United Nations Development Programme*) (2000:2) yang berbunyi "*Human freedom is the common purpose and common motivation of human rights and human development.*" Pernyataan ini dapat dipahami sebagai penegasan dukungannya terhadap 'Kredo Amerika' tentang kebebasan atau '*human freedom*' yang bisa dibaca sebagai nilai-nilai kebenaran yang berasal dari tradisi yang berkembang di wilayah peradaban Barat (*Western hemisphere*). Pengakuan UNDP akan kredo ini dapat disimpulkan sebagai sebuah keberhasilan globalisasi nilai-nilai budaya Amerika ke seluruh dunia pada dataran konseptual.

Neo Konservatisme

Kebijakan dan praktek *American experience* di masa Bush dapat disebut sebagai penjabaran ideologi Amerika yang bernama *Neoconservatism*, sebuah ideologi yang memusatkan perhatian lebih banyak kepada kebijakan keluar negeri yang lebih reaktif dan agresif, yang berimplikasi pada terbentuknya *pensamiento único* (*the single dominant thought*) secara epistemologis dan politis. Kebijakan ideologis ini membuka ruang bagi Amerika untuk mencampuri berbagai persoalan domestik negara-negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kredo Amerika atau untuk memastikan agar kebijakan di tingkat elit di negara-negara tersebut tidak mengancam kepentingan nasional AS. Ideologi ini memang lebih diperkuat di masa Presiden Bush Junior, terutama pada saat ia mengeluarkan doktrin yang terkenal dengan *Bush Doctrine*. Doktrin ini mengacu pada posisi yang ditetapkan dalam Strategi Keamanan Nasional untuk tahun 2002:

Kita harus siap untuk menghentikan negara-negara nakal dan mereka klien teroris sebelum mereka dapat mengancam atau menggunakan senjata pemusnah massal melawan Amerika Serikat dan sekutu dan teman-teman kita. Mengingat tujuan dari negara-negara nakal dan teroris, Amerika tidak bisa lagi hanya mengandalkan postur reaktif seperti yang kita di masa lalu. Ketidakmampuan untuk mencegah penyerang potensial, kedekatan ancaman saat ini, dan besarnya potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh pilihan senjata musuh kita, tidak mengizinkan pilihan itu. Kita tidak bisa membiarkan musuh kita menyerang terlebih dahulu²⁴⁰.

Untuk memahami hubungan doktrin ini dengan kebijakan ideologi neo konservatisme kita dapat melihat kasus invasi Iraq ke Kuwait yang berlangsung dari tanggal 19 Maret hingga 1 Mei 2003. Lebih jelasnya lagi, mari kita bandingkan bagaimana pandangan mazhab realis dengan mazhab neo konservatif tersebut.

Realis memang pesimis tentang prospek peningkatan drastis dalam kondisi politik internasional, tetapi mereka tetap berhati-hati tentang penggunaan kekuatan militer. Dalam kasus Irak, kaum realis tidak percaya bahwa situasi krisis tersebut dapat diselesaikan dengan penggunaan kekuatan militer. Neokonservatif, pada sisi lain, sangat tidak senang dengan hasil dari kekuatan gabungan AS dan sekutu dalam Perang Teluk Persia dan memulai kampanye lobi bagi Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan bersenjata untuk menjungkal Hussein dari kursi kepresidenannya²⁴¹.

Hak Asasi Manusia

Sejak tahun 1989, George HW Bush telah mengumumkan perang terbuka kepada mafia-mafia obat-obatan terlarang, dengan istilah '*the War on the Drugs*'. Perang ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai payung bagi intervensi militer AS ke negara-negara yang dituduh sebagai pengeksport obata-obatan terlarang, seperti Panama. Pada tanggal 20 Desember 1989, George HW Bush menginvasi negara ini dengan mengirimkan pasukan sebanyak 25.000 tentara dan melucuti kekuasaan Manuel Noriega. Tanggal 25 Januari 1990, Bush meminta tambahan anggaran belanja sebesar 1,2 milyar dollar untuk memperkuat kekuatan militer dalam *the War on the Drugs* tersebut. Namun demikian, sejauh ini tidak ada catatan yang menunjukkan bagaimana respon George HW Bush atas penerapan hukuman mati bagi para pengedar obat-obatan terlarang di Malaysia, begitu pula dengan isu-isu hak asasi manusia lainnya. Penyebaran gagasan mengenai hak-hak asasi manusia lebih banyak dilakukan oleh Amnesti Internasional. Tidak adanya sikap resmi dari pemerintahan Bush terhadap penerapan hukuman mati bagi pengedar obat-obatan terlarang di Malaysia tersebut dapat diduga sebagai bentuk pragmatisme Amerika Serikat yang selalu mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*) negara dalam penentuan kebijakan luar negerinya. Penerapan ISA sebagai dasar penangkapan dan

²⁴⁰ The National Security Strategy of The United States Of America. 2002: 14-15.

²⁴¹ Schmidt, Brian C. dan Williams, Michael C. 2008. The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives versus Realists. *Security Studies* 17, no. 2: 191-220.

penjatuhan hukuman mati, sekalipun sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang digembar-gemborkan oleh AS sendiri, mempunyai keterkaitan historis dengan strategi membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara. Sikap diam ini dapat dibaca sebagai suatu bentuk 'reward' AS atas keberhasilan penerapan ISA di Malaysia. Lagipula, situasi dimana penjatuhan hukuman mati ini bersamaan waktunya dengan pencanangan "*the War on the Drugs*" oleh George HW Bush. Di sini terjadi suatu bentuk 'hegemoni secara tidak langsung' (*indirect hegemony*) yang terjadi antara kedua negara. Besarnya anggaran dan kekuatan yang dikerahkan oleh AS untuk mencanangkan perang terhadap kejahatan obat bius ini mempunyai korelasi secara tidak langsung terhadap keputusan-keputusan penjatuhan hukuman mati bagi para pengedar obat bius di Malaysia.

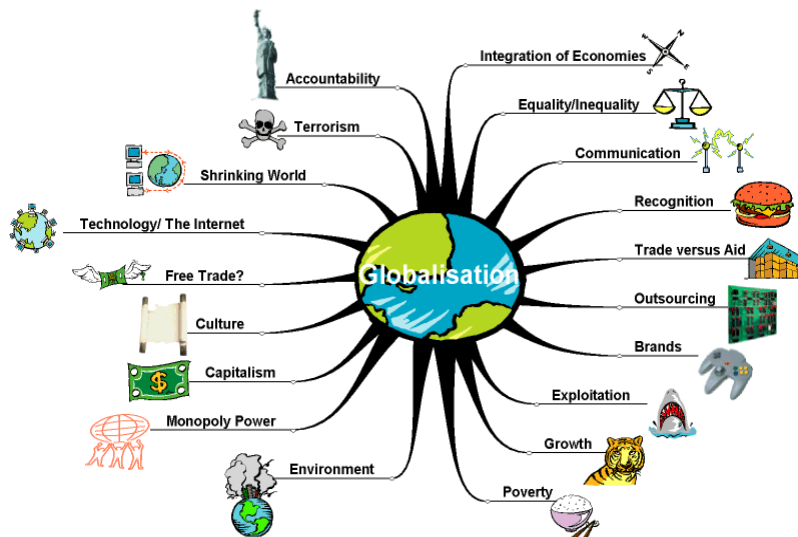
Bagi Amnستي Internasional, penjatuhan hukuman mati dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan keadilan di muka hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (*Universal Declaration of human rights*) dan pasal 35 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Dengan demikian, sikap diam AS terhadap putusan mati di Malaysia ini dapat pula dibaca sebagai suatu bentuk inkonsistensi terhadap kredo Amerika itu sendiri.

VII

Globalisasi dan Budaya Hegemonik Amerika Serikat

Dalam alur baru penyelidikan pada kajian budaya Amerika, terutama pada konteks kapitalisme dan budaya AS, 'globalisasi' merupakan masalah yang menempati urutan pertama yang cukup menantang para ahli budaya AS (Ruccio, 2007 :35)²⁴². Globalisasi pasca Perang Dingin, terutama sejak runtuhnya tembok Berlin dan bergaungnya *glasnost* dan *perestroika* di Uni Soviet, telah menjadi realitas dunia internasional yang dikaji melalui berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Perubahan yang terjadi di Uni Soviet ini sebagian besar dilihat sebagai sebuah 'proses yang evolusioner', sebuah 'transformasi bernilai sejarah' atau sebuah 'kenyataan yang multi dimensional'. Yang terang peristiwa bersejarah tersebut menunjukkan keadaan yang cenderung semakin memerlukan saling ketergantungan di satu sisi, dan meningkatnya derajat keterbukaan dan transparansi di sisi lain, dan hal ini pada gilirannya mendorong terjadinya globalisasi yang bersifat hegemonik.

Dalam globalisasi yang bersifat hegemonik (*hegemonic globalization*), nilai-nilai, pola konsumsi dan cara hidup Barat disebarkan ke seluruh dunia melalui sejumlah saluran globalisasi yang kuat pengaruhnya (misalnya: perdagangan, pariwisata, pertukaran budaya, media massa cetak dan elektronik, persekutuan atau aliansi), yang membentuk jaringan berbentuk "kaki laba-laba".



Kaki Laba-laba Globalisasi

<http://www.globalisierung-infos.de/>

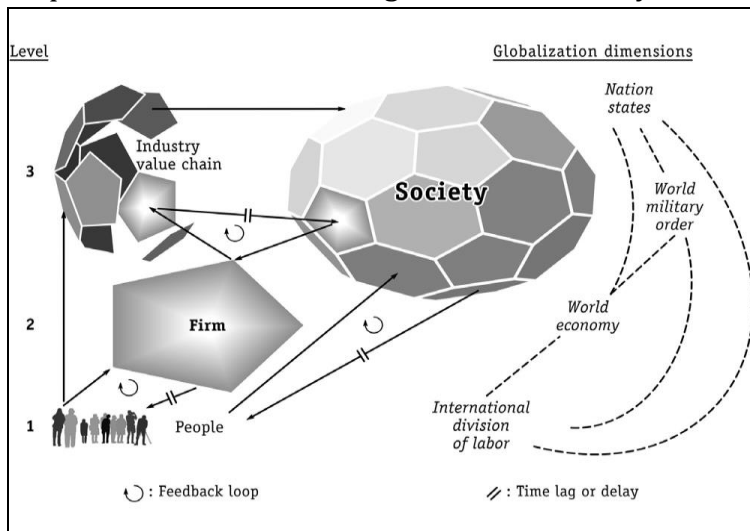
²⁴² Ruccio, D. F. 2007. Capitalism. Dalam: Burgett, B. dan Hendler, G. (eds.) *Keywords for American Cultural Studies*. New York: New York University, 32-36.

Proses ini diyakini akan membawa dampak terjadinya perubahan mindset dan kehidupan social budaya sehingga terjadi penyeragaman dunia, *a flat, globalized world* (Kroenig dan Ratner, 2007) ²⁴³. Dengan demikian globalisasi telah dijadikan senjata yang sangat ampuh untuk memaksa negara-negara miskin dan berkembang masuk ke dalam kisaran budaya, pasar dan kekuasaan Amerika (Mishkin, 2006: 131) ²⁴⁴. Atau dengan kata lain proses globalisasi ini bisa diidentifikasi sebagai proses atau upaya Amerikanisasi.

Dalam buku ini, ada empat wilayah globalisasi yang dibahas dalam hubungannya dengan tema hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, yakni globalisasi di ranah budaya, ekonomi, politik dan pendidikan.

1. Globalisasi Budaya

Ketika menyebut budaya sebagai sesuatu yang bersifat global, maka yang dimaksudkan adalah definisi-definisi, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang secara kognitif dikonstruksi dalam cara yang sama di seluruh dunia. Globalisasi budaya tersebut menghasilkan model-model budaya dunia (*world-cultural models*), dimana aktor-aktor yang berperan di dalamnya mencakup negara (*states*), korporasi transnasional (*trans-national corporations*) dan organisasi-organisasi antar-pemerintah (*intergovernmental organizations*), yang dianggap mempunyai kapabilitas di bidang militer, ekonomi dan politik (Boli dan Thomas, 1997: 173) ²⁴⁵. Sebuah gambaran mengenai bagaimana proses mengglobalnya budaya Amerika ke dalam tatanan internasional antara lain dapat diaplikasikan dalam skema globalisasi Anthony Giddens sebagai berikut:



Skema Globalisasi
Anthony Giddens, 1990

²⁴³ Kroenig, M. dan Ratner, A. 2007. How Globalization Went Bad. *Foreign Policy*. Vol. 158: 48-54.

²⁴⁴ Mishkin, F.S. 2006. *The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich*. Princeton: Princeton University Press.

²⁴⁵ Boli, J. dan Thomas, G. M. 1997. World Culture in the World Polity: A Century of International Non-Governmental Organization. *American Sociological Review*, Vol. 62, No. 2: 171-190.

Menurut Giddens (1990: 64)²⁴⁶, globalisasi merupakan proses intensifikasi dari hubungan-hubungan sosial berskala dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh dengan cara dimana kejadian-kejadian lokal dipengaruhi atau diperkuat oleh berbagai peristiwa yang terjadi dalam jarak ribuan kilometer dan begitu sebaliknya. Dimensi-dimensi globalisasi yang saling terhubung satu sama lain menurut Giddens adalah: (a) sistem negara-bangsa (*nation-states*), (b) tatanan militer dunia, (c) ekonomi dunia, dan (d) pembagian kerja di tingkat internasional (*international division of labor*). Proses interaksi yang sangat luas yang mencakup berbagai bidang dengan para pelaku yang sangat potensial tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir dan pola hidup segenap lapisan masyarakat, perusahaan-perusahaan bahkan kehidupan pribadi baik kehidupan material maupun spiritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya hegemonik adalah hasil dari bekerjanya para aktor (negara, korporasi trans-nasional dan organisasi-organisasi antar-pemerintah) yang mempunyai kapabilitas di bidang militer, ekonomi dan politik di suatu negara hegemon,—dalam hal ini Amerika Serikat, yang mempengaruhi segenap lapisan masyarakat, perusahaan-perusahaan bahkan kehidupan pribadi di negara yang dihegemoni.

- Budaya hegemonik adalah hasil dari bekerjanya para aktor (negara, korporasi trans-nasional dan organisasi-organisasi antar-pemerintah) yang mempunyai kapabilitas di bidang militer, ekonomi dan politik di suatu negara hegemon,—dalam hal ini Amerika Serikat, yang mempengaruhi segenap lapisan masyarakat, perusahaan-perusahaan bahkan kehidupan pribadi di negara yang dihegemoni.

Proses globalisasi di ranah budaya yang dilakukan dengan mengerahkan segala keunggulan budaya nasionalnya ini bukan tidak mungkin diproyeksikan untuk membangun budaya dunia, sehingga tercipta tatanan dunia dalam bentuk suatu keluarga dari berbagai kawasan yang disatukan dalam satu bangsa dan suatu keluarga bangsa-bangsa yang dipersatukan dalam satu planet bumi atau internasionalisme. Bentuk tatanan dunia yang demikian itulah yang kemudian disebut sebagai *American ideal* (McDowell, 1948: 93)²⁴⁷. Sekalipun awalnya menolak mengidentikkan proses globalisasi dengan proses Amerikanisasi, Joseph S. Nye, Jr (2007: 170)²⁴⁸ akhirnya mengakui bahwa globalisasi saat ini adalah Amerika- sentris, karena revolusi informasi berasal dari Amerika Serikat, dan sebagian besar dari isi jaringan informasi global saat ini dibuat di Amerika Serikat dan meningkatkan soft power Amerika .

Globalisasi memang telah dimanfaatkan secara intensif oleh Amerika Serikat untuk kepentingan masa depan bangsanya sendiri, yakni meluaskan dan mempertahankan

²⁴⁶ Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford, CT: Stanford University Press.

²⁴⁷ McDowell, T. 1948. *American Studies*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.

²⁴⁸ Nye, JS. 2007. Culture, Soft Power, and 'Americanization'. Dalam: Held , D., Moore, H.L., dan Young, K. (eds.). *Cultural Politics In A Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation*. Oxford: Oneworld Publications.

kekuasaan imperiumnya (Garrison, 2004: 39)²⁴⁹. Fenomena globalisasi ini bahkan dipandang sebagai sebuah aspek dari sifat imperialisme, yakni hegemoni budaya dari pusat tertentu yang semakin meningkatkan penyebaran nilai-nilai, barang-barang konsumsi dan gaya hidup Amerika (Tomlinson, 1997: 174).²⁵⁰ Akibatnya hegemoni budaya ini menjadi sebuah medium yang amat kuat untuk dapat membaca struktur-struktur kekuasaan antar budaya yang berbeda.... (Hanafi, S., 2009: 139)²⁵¹, apalagi diakui bahwa kekuatan budaya itu “lebih besar berkuasanya daripada politik dan ekonomi” (Wattenberg, 1991: 213²⁵²; dikutip dari Nye, Jr., 2004: 47²⁵³), maka tidak salah bila masyarakat luas, mulai dari Austria hingga Australia, meyakini bahwa proses Amerikanisasi budaya populer Amerika adalah hal yang pokok, bahkan dibutuhkan, sebelum munculnya keberhasilan Amerika Serikat di bidang politik, militer dan ekonomi di masa Perang Dingin.

- ❑ Globalisasi memang telah dimanfaatkan secara intensif oleh Amerika Serikat untuk kepentingan masa depan bangsanya sendiri, yakni meluaskan dan mempertahankan kekuasaan imperiumnya (Garrison, 2004: 39)

Baik sebagai proses maupun prasyarat, globalisasi budaya, yang banyak terjadi di akhir abad ke duapuluh, terkait erat dengan terjadinya intensifikasi arus lintas budaya baik dalam segi makna maupun material. Persentuhan globalisasi budaya dengan makna berada dalam tingkat kesadaran kognisi suatu bangsa, sedangkan persentuhannya dengan material berarti perombakan atau pengeksploitasian bentuk-bentuk dan sumber budaya. Pengeksploitasian tersebut dapat dibaca secara jelas melalui industri budaya internasional (seperti film, serial televisi, musik populer), semua bentuk makanan yang mengalami proses industri, garmen, busana, kosmetik, mobil, bangunan dan furnitur, majalah serta gaya iklan atas semua produk-produk tersebut (Regev, 2003: 222)²⁵⁴.

Fitur-fitur budaya seperti musik, perfilman, televisi dan software dari Amerika telah membanjiri seluruh industri hiburan dunia, dan semuanya secara potensial mempengaruhi selera, gaya hidup dan aspirasi virtual setiap bangsa (Rothkopf, 1997: 43)²⁵⁵. Dengan kata lain, kekuatan imperial AS juga merambah pada dunia hiburan.

²⁴⁹ Garrison, *Ibid.*

²⁵⁰ Tomlinson, J. 1991. *Cultural Imperialism: a Critical Introduction*. London: Continuum.

²⁵¹ Hanafi, S. 2009. Cultural Difference or Cultural Hegemony? Contextualizing the Danish Cartoon Controversy within Migration Spaces. *Middle East Journal of Culture and Communication* 2: 136–152. Leiden: Koninklijke Brill NV.

²⁵² Wattenberg, B. J. 1991. *The First Universal Nation: Leading Indicators and ideas about the Surge of America in the 1990s*. New York: The Free Press.

²⁵³ 2004. *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

²⁵⁴ Regev, M. 2003. Rockization': Diversity within Similarity in World Popular Music. Dalam: Beck, U., Sznajder, N., dan Winter, R. (eds.) *University Global America? The Cultural Consequences of Globalization*, Liverpool Press: 222-234.

²⁵⁵ Rothkopf, D. 1997. In Praise of Cultural Imperialism? *Foreign Policy*. Hal. 38-53.

Hollywood: *The Hamburger Western*

Dari segi material, pengeksplotasian budaya dapat dibaca secara jelas melalui industri budaya internasional (film, serial televisi, musik populer), semua bentuk makanan yang mengalami proses industri, garmen busana, kosmetik, mobil, bangunan dan furnitur, majalah serta gaya iklan atas semua produk-produk tersebut. Salah satu yang menarik untuk dibahas di sini adalah industri perfilman. Film-film Amerika tidak sekedar menyajikan cerita, tetapi juga menawarkan '*the American dream*': gaya hidup, warna musik, gaya busana, model restoran, hotel-hotel, makanan cepat saji dan bahkan kebebasan hubungan seksual baik berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Sedemikian besarnya pengaruh globalisasi industri perfilman ini sehingga banyak budaya Amerika tersebut yang tidak lagi asing bagi negara-negara di seluruh dunia.

Pada tahun 1990, tercatat ada sepuluh film Amerika (diistilahkan dengan '*the Hamburger Western*') yang berhasil menembus pasar global dunia, yaitu:

1. *Home Alone* (1990), dibintangi oleh [Macaulay Culkin](#), [Joe Pesci](#), [Daniel Stern](#), [John Heard](#), [Catherine O'Hara](#) dengan disutradarai oleh Chris Columbus. Di tingkat global, *Home Alone* menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 5,021.8 juta (*box office*), sementara di Malaysia meraup US\$ 336,017 (hingga tanggal 16 Mei 1991).
2. *Ghost* (1990), dibintangi oleh [Patrick Swayze](#), [Demi Moore](#), [Whoopi Goldberg](#), [Tony Goldwyn](#), [Rick Aviles](#) dengan disutradarai oleh Jerry Zucker dan diputar pertama kali tanggal 13 Juli 1990. Mendapat nominasi lima Piala Oskar dan memenangkan dua diantaranya, *Ghost* di tingkat global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 505,702, 588, sementara di Malaysia meraup US\$ 509, 466 (hingga tanggal 29 Nopember 1990).
3. *Dances with Wolves* (1990), dibintangi oleh [Kevin Costner](#), [Mary McDonnell](#), [Graham Greene](#) dengan disutradarai oleh [Kevin Costner](#) dan diputar pertama kali tanggal 9 Nopember 1990. Mendapat nominasi duabelas Piala Oskar dan memenangkan tujuh diantaranya, *Dances with Wolves* secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 424, 208, 848.
4. *Pretty Woman* (1990), dibintangi oleh [Julia Roberts](#), [Richard Gere](#) dengan disutradarai oleh [Garry Marshall](#) dan diputar pertama kali tanggal 23 Maret 1990. Mendapat nominasi satu Piala Oskar, *Pretty Woman* secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 463, 406, 268.
5. *Teenage Mutant Ninja Turtles* (1990), dibintangi oleh Sam Rockwell dengan disutradarai oleh [Simon Fields](#) dan diputar pertama kali tanggal 30 Maret 1990. *Teenage Mutant Ninja Turtles* secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 201, 965, 915.
6. *The Hunt for Red October* (1990), dibintangi oleh [Sean Connery](#), [Alec Baldwin](#) dengan disutradarai oleh John McTiernan dan diputar pertama kali tanggal 2 Maret 1990. Film ini secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 200, 512, 643.

7. *Total Recall* (1990), dibintangi oleh [Arnold Schwarzenegger](#) dan Sharon Stone dengan disutradarai oleh John McTiernan dan diputar pertama kali tanggal 1 Juni 1990. Film ini secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 261, 299, 840.
8. *Die Hard 2* (1990), dibintangi oleh [Bruce Willis](#) dengan disutradarai oleh [Renny Harlin](#) dan diputar pertama kali tanggal 6 Juli 1990. Film ini secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 240, 031, 094 sementara di Malaysia meraup US\$ 240, 031, 094.
9. *Dick Tracy* (1990), dibintangi oleh [Warren Beatty](#), [Madonna](#), [Glenn Headly](#), [Al Pacino](#) dan diputar pertama kali tanggal 15 Juni 1990. Mendapat nominasi tujuh Piala Oskar dan memenangkan tiga diantaranya, film ini secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 162,738, 726.
10. *Kindergarten Cop* (1990), dibintangi oleh [Arnold Schwarzenegger](#), [Penelope Ann Miller](#) dengan sutradara [Ivan Reitman](#) dan diputar pertama kali tanggal 22 Desember 1990. Film ini secara global menghasilkan pendapatan kotor sejumlah US\$ 291, 957, 688 (Sumber: www.boxofficemojo.com).

Keberhasilan industri perfilman Hollywood di tingkat global ini merupakan hasil pencapaian kualitas yang tinggi sejak dari proses pra produksi (gagasan awal, persiapan skenario, pencarian sumber pembiayaan, rancangan setting, kasting dsb), masa produksi (penyutradaraan, akting, kerja kamera, pencahayaan dan make up artis) (DeFillippi dan Arthur, 1998)²⁵⁶ dan pasca produksi (proses fotografi, film editing, sound editing, dsb) (Scott, 2002: 10-11)²⁵⁷. Adapun strategi Hollywood untuk menghegemoni industri perfilman di Asia adalah dengan melalui dua jalan, yaitu (a) mencari dan merekrut para pemain berbakat dari Asia, dan (b) menjadi pemain 'lokal' (glokalisasi) di setiap negara Asia (Jungsuk Joo, 2009: 87)²⁵⁸.

Penyebaran ide-ide Amerika ke seluruh penjuru dunia yang dilakukan melalui jaringan televisi dengan program-program informasi dan hiburannya sangat efektif untuk memperkenalkan cita rasa budaya populer Amerika. Viacom MTV telah berhasil mengadaptasi strategi ini dengan mengintegrasikan banyak budaya yang berbau atau dipengaruhi oleh Amerika ke dalam satu jaringan Amerika yang luar biasa berpengaruh (dengan lebih dari 280 juta pelanggan di seluruh dunia). Menurut hasil penelitian "New World Teen Study" 1996 yang dilakukan oleh divisi *DMB & B's Brain Waves*, dari 26.700 remaja kelas menengah di empat puluh lima negara yang disurvei, 85 persen menonton MTV setiap hari. Remaja ini menyerap apa saja yang ingin ditampilkan MTV yang seakan dimaksudkan untuk menunjukkan beragam campuran pengaruh budaya tetapi benar-

²⁵⁶ DeFillippi, R. J. Arthur, M. B. 1998. Paradox in Project-Based Enterprise: The Case of Film Making. *California Management Review*, 40: 125-139

²⁵⁷ Scott, Allen J. 2002. *A New Map of Hollywood and the World*. ERSA conference papers, European Regional Science Association.

²⁵⁸ Joo, J. 2009. *Foreign Is No Longer Foreign: Globalization, Hollywood and Asian Film Industries*. Hankuk University of Foreign Studies.

benar tidak lebih dari bintang yang diproduksi untuk bernyanyi dalam bahasa Inggris untuk menarik selera populer Amerika (Galeota, 2004: 23)²⁵⁹.

Sejumlah pengamat menyebut bahwa film-film Amerika sarat dengan kandungan politis meskipun tidak mencerminkan realitas yang berkembang dalam masyarakatnya. Beberapa film antara lain *I Am a Fugitive From a Chain Gang*, *The Grapes of Wrath*, *Casablanca*, *The Best Years of Our Lives*, *A Place in the Sun*, *High Noon*, *12 Angry Men*, *The Apartment*, *Elmer Gantry*, *Hud*, *Bonnie and Clyde*, *Midnight Cowboy*, *The Godfather*, *The Day of the Locust* dan *Forrest Gump* dapat dikategorikan ke dalam jenis film seperti ini. Beberapa paradoks yang muncul sejak berakhirnya pemerintahan Reagan yang tergambar dalam film-film Hollywood antara lain adalah: *Experiment versus Ideology*, *Equality versus Tolerance of Inequality*, *Order versus Violence*, *Conformity versus Diversity*, *Materialism versus Idealism*, dan *America as 'Redeemer Nation' versus America as One Nation Among Many* (Michael Coyne, 2008: 12-13)²⁶⁰.

Dalam kaitannya dengan kekuatan yang bersifat imperial, sebagaimana yang diekspresikan oleh dominasi sinema Amerika, hal pertama yang harus dicatat adalah pencapaian dan dominasi kuat dari produksi, distribusi dan permintaan film Amerika. Dalam kaitannya dengan hal ini, Franco Moretti (2001: 90-103)²⁶¹ mengkalkulasikan bahwa “antara 1986 hingga 1995 hanya empat film non Amerika yang berhasil menembus pasar internasional dengan sukses”. Moretti juga mencatat bahwa dominasi dunia sinema Amerika di ujung abad kedua puluh mempunyai kesamaan dengan dominasi novel pada era kolonialisme Eropa di abad kesembilan belas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dunia perfilman Amerika telah menjadi salah satu agen penting penyebaran budaya AS dalam kerangka sistem kapitalisme.

Hegemoni Bahasa

Selain musik dan film, bahasa juga mempunyai kekuatan penting dalam penguatan budaya sebuah bangsa. Dalam tulisannya berjudul *Human Perception and Knowledge Organization: Visual Imagery*, Agnes Hajdu Barat (2007: 340) menyatakan bahwa:

Manusia (dan kemungkinan beberapa primata lain) merupakan hewan yang mempunyai ciri hidup secara berkelanjutan dalam dua dimensi pengalaman: pertama, dalam dimensi langsung melalui reaksi terhadap kenyataan di luar dirinya yang terjadi pada diri kita, dan kedua, (khususnya bagi manusia dan beberapa primata lain) dalam dimensi eksplanasi, yang memanfaatkan bahasa. Hanya melalui bahasa, misalnya, maka apa yang disebut dengan ‘baik’ dan ‘buruk’ atau ‘adil’ dan ‘tidak adil’ menjadi tersedia untuk membantu kita dalam memahami dan menjelaskan kenyataan di luar diri manusia.²⁶²

²⁵⁹ Galeota, J. 2004. Cultural Imperialism: An American Tradition. *Humanist Essay Contest Winners*: 22-46.

²⁶⁰ Coyne, M. 2008. *Hollywood Goes to Washington: American Politics on Screen*. London: Reaktion Books Ltd.

²⁶¹ Moretti, Franco. 2001. Planet Hollywood. *New Left Review* 9: 90-101

²⁶² Barat, Agnes Hajdu. 2007. Human Perception And Knowledge Organization: Visual Imagery. *Library Hi. Tec*, Vol. 25, No. 3: 338-351

Bahasa menjadi alat utama bagi manusia untuk saling berbagi pengetahuan yang dimilikinya, bahkan dapat mempunyai kemampuan mengubah keadaan dirinya maupun di luar dirinya. Masyarakat yang berkembang secara dinamis ditandai antara lain oleh perkembangan bahasa yang dinamis pula. Sebuah masyarakat yang diperkuat oleh sumber-sumber daya untuk berkembang secara ekonomis, sosial dan budaya juga menunjukkan kemampuan meluaskan bahasanya sebagaimana yang dicontohkan oleh penyebaran bahasa Inggris dan dominasi Amerika Serikat dalam ekonomi global dan percaturan dunia (Shigemoto, 1997: 2)²⁶³.

Peranan Bahasa Inggris sebagai *'the vulgate of American power and Anglo-American technology and finance'* (Steiner, 1975: 469)²⁶⁴ benar-benar telah menempatkan diri sebagai bahasa global sejak pertengahan abad kedua puluh, bahkan turut berpartisipasi dalam melancarkan globalisasi. Dominasi ekonomi, politik dan budaya Amerika Serikat, sebagai negara super power saat ini, berkembang sejalan dengan bahasa yang mengkode praktek-praktek budaya Amerika untuk meneguhkan dominasi tersebut. Oleh karena itu, dominasi bahasa Inggris bukan saja terletak pada kemampuannya untuk meminggirkan bahasa lainnya, namun terutama terletak pada meminimalisir nilai penting negara dan bangsa dan memaksimalkan peranan globalisasi (Dendrinis, 2005)²⁶⁵. Dalam konteks Asia, globalisasi budaya yang disebarkan oleh Amerika tersebut harus berhadapan langsung dengan nilai-nilai budaya yang khas Asia (*Asian values*). Globalisasi ini menghasilkan berbagai bentuk reaksi, sebagaimana umumnya yang terjadi ketika dua budaya berbeda saling bertemu. Sebagian kasus menunjukkan adanya perbenturan (*clash*), ketegangan (*tension*), pertikaian (*conflict*), penyesuaian (*adjustment*), penerimaan (*adoption*) hingga penyatuan (*acculturation*).

2. Globalisasi Ekonomi

Menurut Oxford English Dictionary, pengertian global yang saat ini muncul dalam banyak pembicaraan berasal dari perdagangan global di tahun 1920an dan perang global di tahun 1940an dan 1950an (saat itu pesawat pembawa bom atom disebut dengan istilah *'global bombers'*). Pada tahun 1960an, untuk pertama kalinya istilah *'globalisasi'* digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis. Globalisasi yang terjadi dalam dekade 90an mempunyai nilai karakteristik yang membedakan dengan globalisasi pada masa sebelumnya terutama

²⁶³ Shigemoto, J. 1997. *Language Change and Language Planning and Policy*. PREL Briefing Paper. Hawaii: Pacific Resources for Education and Learning, U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement, Educational Resources Information Center.

²⁶⁴ Steiner, George. 1975. *After Babel. Aspects of Language and Translation*. Oxford: Oxford University Press.

²⁶⁵ Dendrinis, Bessie. 2005. *Conflicting Ideologies in Discourses of Resistance to the Hegemony of English, Parábola Editorial of Rua Clemente Pereira*. BRAZIL: 327 - Ipiranga 04216-060 São Paulo, SP.

dalam berbagai fenomena yang terjadi pada globalisasi ekonomi (Coleman dan Underhill, 1998: 5-6)²⁶⁶.

Apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi (*economic globalization*) adalah meningkatnya saling ketergantungan dalam dunia ekonomi sebagai hasil dari bertambahnya skala perdagangan komoditas dan jasa lintas-batas negara, arus modal internasional dan perkembangan teknologi yang cepat dan meluas (Shangquan, 2000: 1)²⁶⁷. Fenomena saling ketergantungan itu dapat dilihat dari munculnya organisasi-organisasi perdagangan regional seperti *North America Free Trade Area* (NAFTA), *European Economic Society* (MEE) yang kemudian menjadi *European Union* (EU), *Asean Free Trade Area* (AFTA), dan *Asia-Pacific Economic Corporation* (APEC) dimana masing-masing negara yang terlibat di dalamnya saling mengadakan perjanjian di bidang ekonomi untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara anggota.

Di Amerika Serikat, globalisasi dalam konteks ekonomi diawali dengan perubahan dari model ekonomi Fordisme ke pasca-Fordisme dimana globalisasi merupakan “sebuah proses transisi dari bentuk Fordisme menuju ke pasca-Fordisme dalam organisasi di tempat kerja; sebuah kenaikan pesat dalam pola-pola konsumsi dan pengiklanan secara internasional; sebuah pengurangan berbagai hambatan atas arus barang, tenaga kerja dan investasi secara bebas lintas negara; dan tekanan-tekanan baru dari tenaga kerja dan konsumen dalam masyarakat” (Burbules dan Torres, 2000: 14)²⁶⁸. Fordisme adalah istilah yang diambil dari nama belakang Henry Ford, yang menjadi sebuah model dalam ekonomi selama kurun waktu 1940-1960an yang menerapkan metode meningkatkan produktifitas melalui pemberian upah yang lebih besar kepada para pekerja (Jessop, 1992)²⁶⁹.

Dalam konteks hegemoni, globalisasi ekonomi dipahami sebagai pemadatan ekonomi dunia melalui pemaksaan terhadap segala aktifitas ekonomi suatu negara atau bangsa untuk bersedia menerima ideologi pasar pasca-industri yang bersifat global ke dalam praktek bisnis dunia usaha²⁷⁰. Jadi globalisasi ekonomi dalam konteks ini merupakan penyatuan ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global, sehingga berbagai aspek kegiatan perekonomian dari permintaan atau penawaran, penyediaan bahan, masalah tenaga kerja, sistem keuangan, transportasi, hingga masalah distribusi dan pemasarannya menyatu dan terikat dalam hubungan saling ketergantungan yang berskala dunia..

²⁶⁶ Coleman, William D. dan Underhill, Geoffrey R.D. 1998. *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia and the Americas*, London: Routledge

²⁶⁷ Shangquan, G. 2000. *Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention*. CDP Background Paper No. 1.

²⁶⁸ Burbules, N. C. dan Torres, C.A. (eds.). 2000. *Globalization and Education: Critical Perspectives*. New York: Routledge.

²⁶⁹ Jessop, B. 2003. Putting Hegemony in Its Place. *Journal of Critical Realism*. Vol. 2, No. 1: 138-148. London: The International Association for Critical Realism

²⁷⁰ Currie, J. 1998. Introduction. Dalam Currie, J. dan Newson, J. *Universities and Globalization: Critical Perspectives*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1-13.

- ❑ Globalisasi ekonomi dipahami sebagai pemadatan ekonomi dunia melalui pemaksaan terhadap segala aktifitas ekonomi suatu negara atau bangsa untuk bersedia menerima ideologi pasar pasca-industri yang bersifat global ke dalam praktek bisnis dunia usaha (Curie, J. 1998)

Sebuah kajian yang dilakukan oleh *International Forum on Globalization* (IFG) pada bulan Januari 1999 mengidentifikasi sejumlah fitur penting dalam globalisasi ekonomi, yaitu: (a) kebijakan deregulasi dan pergerakan modal bebas hambatan, (b) privatisasi dan komodifikasi jasa-jasa publik, dengan menyisakan hak-hak kepemilikan umum, seperti sumber daya air dan genetika, (c) integrasi dan konversi ekonomi nasional ke dalam produksi yang berorientasi ekspor yang tidak mengindahkan aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup, (d) eksploitasi bahan bakar minyak yang tak terbatas, (e) konsentrasi korporasi yang meningkat secara dramatis, (f) penggerusan kekuatan-kekuatan dan kebijakan tradisional dari praktek demokrasi bangsa-negara dan komunitas lokal oleh birokrasi korporasi global, (g) homogenisasi budaya dan promosi konsumerisme yang berlebihan.

Sekalipun globalisasi ekonomi digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena di bidang liberalisasi perdagangan dan keuangan, arus imigrasi, dan revolusi di bidang teknologi informasi, pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada dua aspek globalisasi yang menjadi focus perhatian, yaitu (a) adopsi terhadap kebijakan perdagangan, yaitu liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) dan (b) pergerakan menuju keterbukaan di bidang finansial, yaitu liberalisasi kapital (Milner dan Mukherjee, 2009 :164)²⁷¹.

Proses liberalisasi perdagangan di negara-negara berkembang yang telah dimulai sejak awal dekade 80an semakin mengalami peningkatan pada dekade 90an (Shafaeddin, 2005: 2)²⁷². Yang perlu diperhatikan bagi negara-negara berkembang adalah sikap waspada terhadap praktek liberalisasi perdagangan negara-negara maju terutama Amerika Serikat, karena negara ini cenderung menggunakan sistem liberalisasi perdagangan sebagai kedok imperialismenya. Amerika Serikat mengadopsi rezim kebijakan ekonomi internasional pada 1980-an yang mirip dengan Inggris lebih dari satu abad sebelumnya, rezim yang telah dituduh melakukan tindak 'imperialisme' perdagangan bebas.

Salah satu peran yang dijalankan oleh globalisasi dalam liberalisasi perdagangan ini adalah membangun suatu 'mata rantai nilai yang bersifat global' (*global value chains*), yang menghubungkan semua perusahaan ke dalam bangunan nilai bersama dengan alasan untuk peningkatan efisiensi. Sebagai contoh, dalam perdagangan komoditas dunia, guna

²⁷¹ Milner, H.V. dan Mukherjee, B. 2009. Democratization and Economic Globalization. *Annual Review of Political Science*. 12: 163–81.

²⁷² Shafaeddin, S. M. 2005. Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural Change or De-Industrialization? *UNCTAD Discussion Papers* No. 179.

mensuplai para pengimpor besar buah-buahan, sayur mayur, kopi, kakao, teh dan komoditas lainnya di negara-negara maju, dikembangkan pola operasional bersama untuk meningkatkan efisiensi (Velde, 2005: 23-24)²⁷³. Sedangkan globalisasi keuangan dipahami sebagai sebuah proses integrasi sistem keuangan lokal sebuah negara dengan lembaga-lembaga dan pasar keuangan internasional (Schmukler, 2004:39)²⁷⁴. Globalisasi tersebut dapat terjadi dalam tiga bentuk pengintegrasian, yaitu: (a) differensiasi tingkat suku bunga, (b) differensiasi harga surat-surat berharga, dan (c) arus sumber daya riil dan mobilitas kapital (Hirst dan Thompson, 1999: 341)²⁷⁵.

Differensiasi tingkat suku bunga dalam sistem moneter internasional ditentukan melalui tiga bentuk rezim nilai tukar dan suku bunga saham: mengambang (*floating*), tetap atau baku (*fixed*) dan patokan atau standar (*pegged*). Setiap bentuk rezim ini mempunyai karakteristik dan hasil yang berbeda-beda. Kedua bentuk yang pertama menjadi lazim dalam mekanisme pasar-bebas sebagai metode pembayaran internasional, sedangkan yang terakhir tidak mau mengikuti fluktuasi pasar bebas, melainkan melalui penetapan patokan nilai tukar oleh otoritas negaranya sendiri. Sebelum krisis Asia, Rusia dan Brazil, negara-negara di kawasan ini menggunakan otoritas moneter negaranya untuk menentukan rezim nilai tukar dan suku bunga mata uangnya. Di bawah rezim yang terakhir (*pegged exchange rate*), hubungan saling terkait antara pasar mata uang asing dengan basis moneter menjadi lemah (*looser*). Peristiwa merosotnya nilai tukar mata uang di kawasan tersebut pada krisis moneter dalam dekade 90an (Asia, 1997-98), Rusia (1998) dan Brazilia (1999) mendorong lahirnya kebijakan untuk memperoleh uang dolar secara besar-besaran melalui kebijakan kontrol nilai tukar (*exchange controls*) atau “hot money” dan ‘dolarisasi’²⁷⁶.

Pertumbuhan dan ekspansi perdagangan, penanaman modal dan jasa keuangan menjadi fitur-fitur penting dalam globalisasi. Demikian pula halnya dengan promosi sistem ekonomi neo-liberal dan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas menjadi bawaan dalam proses globalisasi. Globalisasi telah menjadi “kemenangan bagi ekonomi pasar dan kapitalisme” (Kochtcheeva, 2010: 3)²⁷⁷. Sebagai mesin paling aktif dari globalisasi, kapitalisme telah menggerakkan banyak orang untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya dan memperluas mata rantai komoditas berbagai belahan bumi dengan semangat mencari tenaga kerja yang dibayar rendah, bahan-bahan baku yang berlimpah namun dibeli murah, orang-orang pintar dari negara-negara miskin dan berkembang serta penciptaan pasar yang paling besar.

²⁷³ Velde, Dirk Willem te. 2005. Globalisation and Education: What do the Trade, Investment and Migration Literatures tell us? *ODI Working Paper* No. 254. London: Overseas Development Institute

²⁷⁴ Schmukler, S.L. 2004. Financial Globalization: Gain and Pain for Developing Countries. *Economic Review*. Second Quarter: 39-66. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta.

²⁷⁵ Hirst, P. dan Thompson, G. 1999. The Limits to Economic Globalization. Dalam: Held, D dan McGrew, A. (ed.). *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*. Stanford: Stanford University Press.

²⁷⁶ Hankem, S. 1999. Reflections on Exchange Rates and Dollarization. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*. Volume 4, Issue 1: 63-76.

²⁷⁷ Kochtcheeva, L.V. 2010. Russia's Response to Globalization: Europeanization, Americanization and Self-Determination. *New Global Studies*, Vol. 4. Iss. 2, Art. 2.

- ❑ Sebagai mesin paling aktif dari globalisasi, kapitalisme telah menggerakkan banyak orang untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya dan memperluas mata rantai komoditas berbagai belahan bumi dengan semangat mencari tenaga kerja yang dibayar rendah, bahan-bahan baku yang berlimpah namun dibeli murah, orang-orang pintar dari negara-negara miskin dan berkembang serta penciptaan pasar yang paling besar.

Analisis ekonomi di dalam wilayah kajian ini cenderung didorong oleh gagasan yang dikembangkan melalui 'teori pasar keuangan internasional yang efisien' (*efficient international financial market theory*), yang menyatakan bahwa: pasar modal bekerja secara kompetitif dalam mengalokasikan tabungan dan modal internasional ke dalam bursa saham, sehingga semakin pasar keuangan nasional dekat dengan sesamanya pada tingkat yang setara, semakin mudah terjadinya penyatuan (integrasi) di dalam dunia ekonomi internasional. Dengan pasar modal yang terintegrasi tersebut, maka tingkat suku bunga internasional pada kredit jangka pendek maupun jangka panjang akan menjadi tunggal; begitu pula dengan harga saham dan kredit akan menuju ke pencapaian angka yang sama²⁷⁸. Salah satu fitur terpenting dari pengalaman moneter selama ratusan tahun dalam sistem ekonomi internasional ini adalah adanya pengaturan dimana satu rejim (*suku bunga tetap dan mengambang*) telah menguasai rejim lainnya²⁷⁹.

Hegemoni Amerika Serikat pasca Perang Dingin diperkokoh dengan *Bretton Woods Agreement* yang sudah berjalan dan memperkuat posisi AS sebagai penguasa tunggal dunia secara ekonomi (*a single dynamic structure*) selama Perang Dingin. Dengan perjanjian ini, dunia pasar dan modal Amerika Serikat tidak dapat dikendalikan oleh negara-negara lain. Namun, pada pertengahan dekade 1960an, Eropa dan Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi tandingan. Oleh karena itu, William Borden (1989)²⁸⁰ mengkritisi penerapan kebijakan Bretton Woods semasa pemerintahan Kennedy dengan ungkapan "sebuah upaya yang agresif namun sia-sia untuk mempertahankan hegemoni Amerika (*an aggressive but ultimately futile defense of American economic hegemony*).

Meski mengundang sejumlah kritik dan kecaman, Perjanjian *Bretton Woods* telah memunculkan Amerika Serikat sebagai penguasa dunia melalui pengendaliannya dalam sistem ekonomi internasional. Dua institusi keuangan global yang amat berpengaruh, yakni *the International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia), dilahirkan melalui perjanjian ini. Bretton Woods menyusun dasar-dasar bagi IMF dan Bank Dunia, yang menetapkan system berbagai aktivitas surveillance global, menurut keinginan IMF

²⁷⁸ Hirst, P. dan Thompson, G. 1999. *Ibid*.

²⁷⁹ Eichengreen, Barry. 1995. Central Bank Co-Operation and Exchange Rate Commitments: The Classical and Interwar Gold Standards Compared. *Financial History Review*, 2: 99-117

²⁸⁰ Borden, William S. 1989. Defending Hegemony.. Dalam: Paterson, Thomas G. *Kennedy's Quest for Victory: American Foreign Economic Policy 1961-1963*. New York: Oxford University Press

sendiri (Conversi, 2010: 38)²⁸¹. Kedua lembaga keuangan internasional tersebut telah menjadi rejim keuangan yang menjadi kepanjangan tangan AS.

- ❑ Perjanjian *Bretton Woods* telah memunculkan Amerika Serikat sebagai penguasa dunia melalui pengendaliannya dalam sistem ekonomi internasional. Dua institusi keuangan global yang amat berpengaruh, yakni *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia), dilahirkan melalui perjanjian ini.

John Agnew (2005: 127)²⁸² mencatat ada lima poin hegemoni Amerika Serikat yang diperoleh melalui Bretton Woods ini, yaitu: (a) mendorong pertumbuhan ekonomi AS secara tidak langsung melalui kebijakan moneter dan fiskal, (b) menciptakan pasar global tunggal (*a unitary global market*) berdasarkan pada kemampuan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar; (c) menerima Amerika Serikat sebagai tuan rumah bagi cadangan devisa dan moneter bagi ekonomi dunia melalui kebijakan sistem pertukaran suku bunga mengambang berbasis dolar (*dollar-based floating exchange rate system*), (d) melestarikan permusuhan abadi dengan komunisme atau ideologi ekonomi-politik yang dihubungkan dengan Uni Sovyet, dan (e) asumsi beban atas intervensi militer untuk perubahan pemerintahan yang mengancam status quo politik yang telah diteguhkan pada tahun 1945 (Doktrin Truman).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya peneguhan hegemoninya melalui Bretton Wood, Amerika Serikat juga menyediakan berbagai bantuan luar negeri dan penanaman modal kepada negara yang memerlukan, terutama negara miskin dan berkembang. Bantuan luar negeri dan penanaman modal merupakan elemen penting dalam pelestarian hegemoni Amerika, karena kedua hal tersebut dapat diibaratkan seperti logika simpan pinjam dalam transaksi keuangan. Bantuan luar negeri merupakan bentuk pinjaman yang diberikan pada negara-negara yang membutuhkan, sedangkan penanaman modal merupakan bentuk simpan atau investasi Amerika di negara-negara tersebut. Inilah dasar pembangunan yang berlandaskan sistem kapitalisme yang memungkinkan Amerika secara leluasa berperan sebagai arsitek pembangunan di negara-negara yang dihegemoninya.²⁸³ Tidak mengherankan jika bantuan luar negeri menjadi alat diplomasi yang penting bagi AS di era globalisasi (Lancaster, 2000)²⁸⁴.

Apa yang dilakukan AS terkait dengan globalisasi ekonomi adalah untuk menjaga status dominasinya dalam tata ekonomi dunia, karena pelestarian peran dominan negara ini

²⁸¹ Conversi, D. 2010. The Limits of Cultural Globalisation? *Journal of Critical Globalisation Studies*, Issue 3. London: Journal of Critical Globalisation Studies

²⁸² Agnew, J. 2005. *Hegemony: The New Shape of Global Power*. Philadelphia: Temple University Press,

²⁸³ Lihat: Beeson, Mark. 2004. U.S. Hegemony. Dalam: O'Hara, Phillip (Ed.), *Encyclopaedia of Public Policy: Governance in a Global Age*. Routledge.

²⁸⁴ Lancaster, Carol. 2000. *Transforming Foreign Aid: United States Assistance in the 21st Century*. Washington: Institute for International Economics

dalam sistem ekonomi internasional (khususnya di bidang finansial) dengan jalan menyediakan barang-barang kolektif dan mencegah katalisme ekonomis yang pernah terjadi pada dua perang dunia sebelumnya merupakan kekuatan hegemonik Amerika²⁸⁵. Sistem internasional tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, IMF, GATT (*the General Agreement on Tariffs and Trade*) yang kemudian menjadi WTO (*the World Trade Association*); kesemuanya telah dimanfaatkan sebagai alat untuk memantapkan hegemoni AS baik di bidang ekonomi maupun politik.²⁸⁶

Globalisasi sebagai sebuah proses dalam ranah ekonomi bertujuan untuk meluaskan ekspansi bisnis suatu negara atau beberapa negara ke seluruh dunia dengan jalan membangun pengintegrasian pasar-pasar global. Bagi Amerika Serikat, esensi dari gloglobalisasi ekonomi ini adalah *economic freedom* yang membawa konsekuensi liberasi pada perdagangan dan dunia keuangan. Peranan sebagai agen-agen globalisasi ekonomi melibatkan tidak hanya pejabat-pejabat negara, melainkan juga badan-badan ekonomi global seperti WTO, IMF, Bank Dunia hingga perusahaan-perusahaan multi nasional. Ketiga badan-badan ekonomi global ini 'secara kebetulan' bermarkas di ibu kota negara Amerika Serikat, yakni Washington, sehingga pada awal tahun 90an, muncullah istilah '*the Washington Consensus*'.

- Bagi Amerika Serikat, esensi dari gloglobalisasi ekonomi ini adalah *economic freedom* yang membawa konsekuensi liberasi pada perdagangan dan dunia keuangan.

Konsensus Washington

Seorang pakar ekonomi dari Inggris, John Williamson, memberi julukan pada kebijakan neoliberalisme dengan istilah '*the Washington Consensus*'. Makna dari istilah ini tidak hanya menunjukkan kedekatan IMF dan Bank Dunia (yang bermarkas di ibu kota AS—Washington D.C) dengan para pengambil kebijakan di negara Amerika Serikat, tetapi juga benar-benar menekankan pentingnya kata 'konsensus' di dalamnya. Konsensus tersebut secara garis besar mengandung sepuluh instrumen kebijakan bagi pembangunan negara Dunia Ketiga, yaitu: (a) kebijakan disiplin anggaran, (b) pengaturan ulang pengeluaran publik, (c) reformasi perpajakan, (d) liberalisasi keuangan (tingkat suku bunga bank), (e) bunga saham yang kompetitif, (f) liberalisasi perdagangan, (g) liberalisasi perdagangan, (h) liberalisasi arus penanaman modal langsung luar negeri, (i) kebijakan privatisasi, (j) kebijakan deregulasi (penghapusan berbagai tarif masuk dan keluar barang), dan (k) perlindungan hak properti, khususnya dalam sektor informal.

²⁸⁵ Kindleberger, 1973

²⁸⁶ Lihat: Chandler, 2000; Hudson 2003, Odom dan Dujarric, 2004.

The Washington Consensus berimplikasi pada berkurangnya kontrol pergerakan modal di tangan negara-negara berkembang serta terbukanya pintu pasar di negara-negara tersebut bagi para investor dan pengusaha asing. Peranan besar AS dalam '*the Washington Consensus*' jelas terlihat dari besarnya *veto power* baik di dalam IMF maupun di Bank Dunia. Di sini tampak adanya pertautan timbal balik antara agenda globalisasi AS di ranah ekonomi dengan agenda Amerikanisasi melalui isu-isu neo liberalisme.

- *The Washington Consensus* berimplikasi pada berkurangnya kontrol pergerakan modal di tangan negara-negara berkembang serta terbukanya pintu pasar di negara-negara tersebut bagi para investor dan pengusaha asing.

Pertautan tersebut terletak pada besarnya peranan *the Washington Consensus* baik sebagai agen globalisasi maupun agen Amerikanisasi sekaligus. Kedua peran tersebut jelas memiliki perbedaan dalam prakteknya: sebagai agen globalisasi, lembaga-lembaga keuangan global ini harus memiliki legitimasi dari banyak negara agar dapat diterima sebagai lembaga keuangan internasional; sedangkan sebagai agen Amerikanisasi, lembaga-lembaga keuangan internasional ini tunduk pada hak atau kekuatan veto (*veto power*) yang dimiliki Amerika Serikat. Dalam konteks yang terakhir (Amerikanisasi) ini, sejumlah temuan empirik menunjukkan bahwa negara-negara yang mengikuti kebijakan-kebijakan Konsensus Washington ini mengalami 'keterpasungan ekonomi' (Narcís Serra, Shari Spiegel, dan Joseph E. Stiglitz, 2008:4).

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di awal tahun 90an menunjukkan adanya 'dorongan' dari berbagai kebijakan '*the Washington Consensus*' ini. Perdagangan luar negeri dapat disebut sebagai sebuah jalan bagi Dunia Berkembang untuk memetik manfaat dari globalisasi ekonomi. Laporan Bank Dunia (1999) menunjukkan bahwa grafik perdagangan dari Negara-negara Berkembang meningkat cukup tajam terutama dalam dekade 90an.

Di tingkat global, Amerika harus bersaing dengan Jepang, terutama dalam kategori ekspor produk-produk Teknologi Komunikasi dan Informasi (*Information and Communication Technology*). Pada tahun 1990, Jepang menempati urutan teratas dunia, disusul oleh AS pada urutan kedua. Posisi ini baru berhasil diubah pada tahun 2000, dimana AS berhasil mengungguli Jepang. Pesatnya ekonomi Jepang yang mampu menantang supremasi ekonomi Amerika Serikat ini beranjak dari kemampuan teknis mengelola perekonomian negara, dukungan karakteristik budaya seperti etika kerja dan preferensi pada nilai-nilai konsensus, serta meluasnya kerjasama antar badan usaha milik negara (Bunker dan Ciccantell, 2007: 9)²⁸⁷.

²⁸⁷ Bunker, S. G. dan Ciccantell, P. S. 2007. *East Asia and the Global Economy : Japan's Ascent, with Implications for China's Future*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.

Oleh karena itulah, kunjungan kenegaraan Bush ke luar negeri dimanfaatkan untuk kepentingan menyebarluaskan ekspansi produk dagang Amerika ke pasar global. Dalam kunjungan pertama Bush ke luar negeri, dalam rangka menghadiri prosesi pemakaman Kaisar Jepang Hirohito, di depan para pengusaha Jepang, Bush mendesak agar negeri Sakura tersebut membuka pasar bagi barang-barang buatan Amerika, mengizinkan produk-produk pertanian Amerika tanpa hambatan dan menghentikan subsidi atas barang-barang buatan Jepang yang dijual ke Amerika (Ambrose dan Brinkley, 1997: 353)²⁸⁸. Semangat untuk mengeksport produk AS ini amat terasa terutama di bidang barang manufaktur. Ekspor barang manufaktur Amerika Serikat ke 64 negara berkembang (dari 103 negara berkembang yang tercatat di tahun 1990 oleh Bank Dunia) selama kurun 1990-2000 tercatat selalu mengalami kenaikan, baik dalam volume maupun jenis barang (kategori produk). Di tahun 1991, US \$ 2,5 triliun dari US \$ 3,4 trilyun nilai perdagangan dunia merupakan ekspor dari Amerika Serikat beserta partner dagangnya. Angka ini menunjukkan betapa sistem ekonomi internasional yang melahirkan globalisasi ekonomi telah banyak menguntungkan negara AS itu sendiri.

***Greenback*: Dolarisasi sebagai Alat Hegemoni**

Greenback merupakan istilah lain bagi bentuk mata uang kertas Dolar Amerika Serikat. Disebut *greenback* karena bagian belakang (*back*) kertas tersebut berwarna hijau (*green*). Istilah ini muncul pada sekitar tahun 1800an sebagai akibat penarikan seluruh uang koin oleh Kongres Kontinental. Investopedia mencatat proses penarikan uang koin tersebut memakan waktu hampir setengah abad, sampai akhirnya mata uang kertas memperoleh kepercayaan publik perbankan di dalam negeri. Bahkan, selang setengah abad berikutnya, dinasti Rothchild melalui Bank Sentral Amerika berhasil mengendalikan hampir separuh kekuatan ekonomi global hingga saat ini.

Peneguhan mata uang kertas Dolar sebagai mata uang global di era modern dimantapkan melalui Bretton Wood System di akhir 1960 yang melahirkan empat badan ekonomi dunia, yakni GATT, WTO, Bank Dunia dan IMF. Keempat badan ini kemudian dikenal sebagai Konsensus Washington. Salah satu agenda utama Konsensus Washington ini adalah memberi jaminan bagi dolar sebagai barometer kekuatan moneter dunia. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “dolarisasi”. Salama (1998: 8)²⁸⁹ mendefinisikan dolarisasi sebagai sebagai sebuah evolusi dimana dolar menjadi nilai tabungan, satuan rekening dan alat tukar utama bagi barang. Bourguinat dan Dohni (2002: 59)²⁹⁰ juga mempunyai

²⁸⁸ Ambrose, S. E. dan Brinkley, D. G., 1997. *Rise to Globalism: American Foreign Policy since 1938*. London: Penguin Books

²⁸⁹ Salama P. 1988. *La Dollarisation: Essai sur La Monnaie, L'industrialisation et L'endettement des Pays Sous-Développés*. Agalma, La Découverte, Paris. Lihat juga: Salama P. 2000. Dollarisation: la dimension économique. *L'Economie Politique*, 1 er trimestre, No. 5: 76-87

²⁹⁰ Bourguinat H. dan Dohni L. 2002, La Dollarisation Comme Solution en Dernier Ressort , *Revue Française d'Economie*, n° 1, vol. XVII: 57-96

konsepsi sama ketika melihat dolarisasi sebagai proses dimana mata uang nasional digantikan peranannya oleh dolar sebagai satuan harga bagi barang, alat pembayaran dan tabungan.

- ❑ Dalam konteks budaya hegemoni Amerika Serikat, dolarisasi mendorong pengintegrasian yang kuat antara negeri Paman Sam tersebut dengan ekonomi global, sehingga kekuatan ekonomi AS selalu merajai dunia.

Dalam pengertian yang lebih luas, Alexandre Minda (2005: 291)²⁹¹ menyebutkan bahwa dolarisasi adalah sebuah istilah umum untuk menggambarkan karakteristik negara-negara yang menggunakan mata uang asing dalam transaksi keuangannya, dimana mata uang asing tersebut tidak harus dolar, dan penggunaan mata uang asing tersebut dilakukan mulai dari kegunaan sebagai mata uang asing yang ilegal bersama mata uang dalam negeri hingga untuk mata uang resmi untuk alat tukar mata uang asing sebagai satu-satunya alat pembayaran dan unit hitung (Schuler, 2005 :120).²⁹²

Dalam konteks budaya hegemoni Amerika Serikat, dolarisasi mendorong pengintegrasian yang kuat antara negeri Paman Sam tersebut dengan ekonomi global, sehingga kekuatan ekonomi AS selalu merajai dunia. Dengan demikian, kebijakan dolarisasi jelas amat berhubungan secara positif pada keberhasilan globalisasi ekonomi AS dalam dekade 90an. Dolarisasi juga dapat membawa manfaat lain bagi hegemoni Amerika, yakni berupa integrasi yang lebih dekat antara Amerika Serikat dan ekonomi global yang dipromosikan oleh biaya transaksi yang lebih rendah dan stabilitas harga yang terjamin dalam dolar (Andrew Berg dan Eduardo Borensztein, 2000)²⁹³.

Prestasi gemilang *greenback* jelas terlihat saat terjadinya peristiwa merosotnya nilai tukar mata uang di kawasan Asia pada krisis moneter dalam dekade 90an, Rusia (1998) dan Brazilia (1999) yang telah mendorong lahirnya kebijakan untuk memperoleh uang dolar secara besar-besaran melalui kebijakan kontrol nilai tukar atau "*hot money*" dan 'dolarisasi'. Khusus terkait dengan kebijakan sistem pertukaran suku bunga mengambang berbasis dolar dapat dikatakan sebagai upaya pelestarian "diplomasi dolar" (*dollar diplomacy*), yaitu kebijakan Amerika untuk mengerahkan para bankirnya ketimbang tentara guna menguasai sumberdaya dari suatu wilayah asing. Buzzanco (2002: 55)²⁹⁴ menyebut ini sebagai suatu bentuk lain dari imperialisme. Diplomasi dolar telah menjadi sumber kekuatan utama imperialisme Amerika karena lebih halus dalam penampilan agresinya namun lebih besar dalam efek pencapaiannya.

²⁹¹ Minda, A. 2005. Official Dollarization : A Last Resort Solution To Financial Instability In Latin America. *The European Journal of Development Research*. Vol.17, No.2:289-316

²⁹² Schuler, K. 2005. Some Theory and History of Dollarization. *Cato Journal*, Vol. 25, No. 1: 115-125

²⁹³ Berg, A. dan Borensztein, E. 2000. The Dollarization Debate. *Finance and Development*, vol. 37, no. 1.

²⁹⁴ Buzzanco, R. 2002. Anti-Imperialism. Dalam: DeConde, A., Burns, R. D. dan Logevall, F. (eds.) 2002. *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movements and Ideas*. New York: Charles Scribner's Sons, 49-60.



Diplomasi Dolar
Armstrong, Kelly (2011)

McDonaldization

Salah satu fenomena globalisasi yang membawa resonansi budaya dan mendapatkan perhatian dari banyak publik, aktivis, pemerhati dan ahli kebudayaan adalah apa yang dinamakan dengan *McDonaldization*, sebuah gagasan yang dianggap berguna untuk menggambarkan banyak hal mulai dari agama (Drane, 2000)²⁹⁵ ke universitas (Parker dan Jary, 1995)²⁹⁶ hingga museum (Kirchberg, 2000)²⁹⁷. Istilah *McDonaldization* berasal dari George Ritzer (1993 : 1) ²⁹⁸ yang didefinisikan sebagai “proses dimana prinsip-prinsip restoran cepat-saji semakin menyerbu ke hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat Amerika serta seluruh penduduk dunia (*the process by which the principles of the fast-food restaurant are coming to dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of the world*)”. Ritzer juga secara eksplisit mengakui McDonald sebagai “dasar bagi salah satu perkembangan yang paling berpengaruh dalam masyarakat kontemporer.” Tesis inti ini menjadi alasan yang paling inspiratif untuk mengeksplorasi lebih luas dalam melihat *McDonaldization* sebagai salah satu produk yang paling berpengaruh dari hegemoni Amerika.

Ide utama *McDonaldization* adalah terutama sebagai upaya untuk mewujudkan kembali konsep rasionalisasi yang digagas Marx Weber. Dalam pandangan Weber, masyarakat kontemporer ditandai dengan rasionalitas praktis dalam seluruh sistem

²⁹⁵ Drane, John William. 2000. *The McDonaldization of the Church: Spirituality, Creativity and the Future of the Church*. London: Darton, Longman & Todd

²⁹⁶ Parker, M. dan Jary, D. 1995. The McUniversity: Organization, Management and Academic Subjectivity. *Organization*. Vol. 2, No.2: 319-338

²⁹⁷ Kirchberg, V. 2000. The McDonaldization of German Museums. A Discussion of a Postmodern Cultural and Leisure World. *Tourismus-Journal*, 4: 117-144

²⁹⁸ Ritzer, George. 1993. *The McDonaldization of Society*. Thousand Oaks: Pine Forge Press

kehidupan mereka. Melalui rasionalitas praktis, orang menjadi yakin pada "*pencapaian metodis dari tujuan praktis dan yang sangat terukur melalui gagasan yang abstrak namun semakin tepat*" (Weber, 1958: 293)²⁹⁹. Hal ini dinyatakan dalam banyak aspek, termasuk kegiatan ekonomi. Inilah yang sebenarnya dianggap sebagai fitur spesifik budaya dan dasar modernitas Barat. Yang paling khas dari modernitas adalah bahwa semua perubahan sosial yang dibangun di dasar komersialisasi masyarakat ketika produksi dan konsumsi komoditas di pasar semakin dan semakin menjadi kegiatan ekonomi yang dominan (Luke, T. 2006: 136)³⁰⁰.

McDonald telah memenuhi prinsip inti ini dan bahkan mempengaruhi banyak sektor lain dalam masyarakat kontemporer. McDonald adalah restoran cepat saji yang saat ini paling mewakili dan memimpin proses rasionalisasi formal dan dasar komponen-efisiensi, prediktabilitas, kuantifikasi, kontrol melalui substitusi bukan manusia untuk teknologi manusia, dan irasionalitas utama bagi rasionalitas formal (Ritzer, 2010: 45-6)³⁰¹. Penerapan efisiensi, prediktabilitas, kuantifikasi, dan kontrol di McDonald seperti yang dilakukan oleh Ray Kroc (1902-1984), yang jenius di balik waralaba restoran McDonald, telah menyebar ke seluruh dunia. Hal yang sulit untuk dibantah bahwa konsep "sistem manajemen mutu berdasarkan proses" telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip rasionalisasi tersebut.

Pada tahun 1990, McDonald mempunyai 3000 cabang, yang kemudian berkembang menjadi 30.000 cabang pada tahun 2003 di 130 negara. Fenomena ini belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan McDonald dari segi bisnis bila dibandingkan dengan pesaingnya yang lain (seperti KFC, Pizza Hut), namun pertumbuhan McDonald yang semakin mengglobal di banyak negara tak pelak lagi memberikan pengaruh terhadap cara-cara hidup tradisional masyarakat di negara-negara berkembang (Ritzer dan Stillman, 2003:34)³⁰².

McDonaldization jelas membawa nilai-nilai budaya baru bagi bangsa Asia, khususnya pada model organisasi bisnis, gaya konsumsi dan konsumerisme. Hal ini terjadi karena McDonaldization merupakan proses dimana prinsip-prinsip restoran cepat saji hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor masyarakat Amerika dan masyarakat dunia lainnya, dan karena makanan cepat saji, gaya berbusana, dunia hiburan dan bahasa dari Barat membawa komunikasi budaya tersembunyi tentang nilai-nilai mana yang dianggap lebih

²⁹⁹ Weber, M. 1958. *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*. New York: Scribner.

³⁰⁰ Luke, T. 2006. *Alterity or Antimodernism: A Response to Versluis*. *Teleos*. No. 137: 131- 142

³⁰¹ Ritzer, G. 2010. *The Weberian Theory of Rationalization and the McDonaldization of Contemporary Society.*" Dalam: Kivisto, Peter J. (ed.) *Illuminating Social Life: Classical and Contemporary Theory Revisited*. Sage Publications: 41-59

³⁰² Ritzer, G. dan Stillman, T. 2003. *Assessing McDonaldization, Americanization and Globalization*. Dalam: Beck, U., Sznaider, N. dan Winter, R. (eds.) *Global America? The Cultural Consequences of Globalization*. Liverpool University Press, Liverpool: 30-48.

penting dalam aspek moralitas, identitas dan kehidupan (Marsella, 2005: 3)³⁰³. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa McDonaldisation sebagai bagian dari kekuatan industri global Amerika cenderung membahayakan pasar lokal dan mengancam industri-industri asing yang tidak kompetitif. Dominasi Amerika tersebut mau tidak mau menyakiti pasar lokal, karena mayoritas asing industri tidak dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi industri AS. Karena melayani kepentingan ekonomi Amerika, perusahaan mudah mengabaikan dampak merugikan kontrol Amerika dari pasar luar negeri (Galeota, 2004: 22)³⁰⁴.

Skenario Penyelamatan Krisis Asia tahun 1997

Dalam hal ini Bert melihat bahwa tidak Bergeraknya AS untuk menyelamatkan krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 dapat dianggap sebagai satu bentuk kesengajaan yang dilakukan untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan militer negara-negara di kawasan Asia Timur, termasuk Malaysia, agar nantinya dapat dengan mudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Bagi Amerika, krisis Asia disajikan Washington dengan peluang besar untuk memajukan pengaruhnya di kawasan itu dan menumbangkan kepentingan ekonomi Jepang, yang telah dibangun selama masa booming. Krisis Asia yang terjadi sejak tanggal 2 Juli 1997 justru menjadi hal yang menguntungkan bagi kepentingan menanamkan kekuasaan hegemonik AS di Asia, khususnya di Asia Tenggara, karena ada kesempatan bagi AS untuk menjajakan nilai-nilai Amerika, seperti *'good governance'*, *'restructuring'* dan penguatan *'free markets'* atau tepatnya untuk menunjukkan bahwa solusi bagi seluruh krisis dunia berada di tangan Amerika (Ian Taylor, 2003: 7)³⁰⁵.

Pada tanggal 24 Nopember 1997, Clinton mendiskusikan cara untuk meredakan krisis Asia dengan para pemimpin APEC di Vancouver dan menjanjikan akan meminta IMF memberikan dana talangan sebesar 68 miliar dolar AS. Dalam catur wulan terakhir di tahun 1998, yakni ketika US Federal Reserve Bank mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga bank yang berakibat pada masuknya arus modal Asia secara besar-besaran ke Amerika Serikat sehingga nilai tukar mata uang Asia kembali menjadi kuat dan stabil.³⁰⁶

Pada bulan Mei 1998, Clinton mengajukan sebuah proposal kepada WTO untuk mendukung tujuan perdagangan internasional yang dipromosikan Amerika Serikat, dengan butir-butir usulan sebagai berikut³⁰⁷:

³⁰³ Marsella, A.J. 2005. "Hegemonic" Globalization and Cultural Diversity. *Australian Mosaic* Fall, 2005, Issue 11, No. 13: 15-19.

³⁰⁴ Galeota, J. 2004. Cultural Imperialism: An American Tradition. *Humanist Essay Contest Winners*: 22-46.

³⁰⁵ Taylor, I. 2003. *Neo-Liberal Globalism And Multilateralism: The Asia Pacific Economic Co-Operation Forum (APEC) as a Terrain of Struggle*. Asia Research Centre. Murdoch University. Working paper No. 99.

³⁰⁶ US: Job Fears. *BBC News*. Rabu, 26 Nopember 1997. Dapat diakses pada: http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1997/asian_economic_woes/34499.stm. Lihat juga: WGBH Educational Foundation. The Crash: Timeline of the Panic. *Frontline*. Dapat diakses pada: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/crash/etc/cron.html>

³⁰⁷ WTO. 2015. *Geneva WTO Ministerial 1998: Statement by H.E. Mr. William J. Clinton*. Dapat diakses pada:

1. Meminta WTO lebih sungguh-sungguh mengeliminasi berbagai hambatan dalam perdagangan dan mendorong sistem perdagangan global yang dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan income, dan arus bebas informasi, gagasan dan personal.
2. Meminta WTO untuk menyediakan sebuah forum bersama antar kelompok-kelompok pengusaha, tenaga kerja, lingkungan dan konsumen untuk saling berbagi input bagi kemajuan WTO di masa depan. Forum ini harus dapat memberikan jaminan bahwa persaingan ekonomi di abad 21 tidak mengancam perikehidupan, kesehatan dan keselamatan seluruh keluarga di dunia melalui jaminan keselamatan dan perlindungan kerja dan lingkungan
3. Meminta WTO agar mengadakan konvensi perdagangan dan lingkungan pada tingkat pejabat tinggi dan bersama-sama Organisasi Buruh Sedunia (ILO) berkomitmen untuk bekerjasama membangun perdagangan terbuka yang dapat meningkatkan standar kehidupan para tenaga kerja.
4. Meminta WTO untuk membuka pintu bagi tim inspeksi dan partisipasi publik atas pertanggungjawaban nilai akuntabilitas dalam segala gerak organisasi WTO, antara lain dengan mengadakan forum dengar pendapat umum (*public hearing*).
5. Mengajak seluruh negara di dunia bersama Amerika Serikat mencegah kenaikan berbagai tarif saluran transmisi elektronik komersial yang melewati batas suatu negara, antara lain dengan membuka akses bagi penggunaan internet bagi seluruh penduduk dunia.
6. Meminta kepada seluruh negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan anti-sogokan berdasarkan konvensi OECD dan tender lelang terbuka yang jujur, serta menjauhkan praktek pemerintahan dengan birokrasi yang kaku, penuh kroni dan korupsi.
7. Meminta WTO mengeksplorasi proses negosiasi dalam perdagangan yang lebih cepat dan mengembangkan sebuah sistem perdagangan yang dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan pasar global.

Kesemua butir usulan Clinton ini sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam dokumen *A National Security Strategy for a New Century* yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada bulan Oktober 1998. Dalam kata pengantar pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa: “Tantangan nasional kita—dan yang menjadi tanggungjawab kami—adalah memastikan peran yang dijalankan oleh kekuatan bersama dalam integrasi global demi kemanfaatan bagi rakyat kita sendiri serta seluruh ummat manusia di muka bumi”.³⁰⁸ Ungkapan ini sangat sejalan dengan gagasan yang dikandung oleh ‘Jiwa Bangsa Amerika’ (*the American Mind*) yaitu bahwa “Tuhan telah menetapkan bangsa Amerika sebagai bangsa pilihan-Nya (*the Chosen People*) untuk mewarisi kepemimpinan yang menyelamatkan dunia. Setelah membiarkan Krisis Asia terjadi, sebagai satu bentuk penghukuman atas diterimanya Burma ke dalam keanggotaan penuh ASEAN, Amerika akhirnya tampil sebagai ‘juru selamat’ yang semakin meneguhkan citra (*American image*)

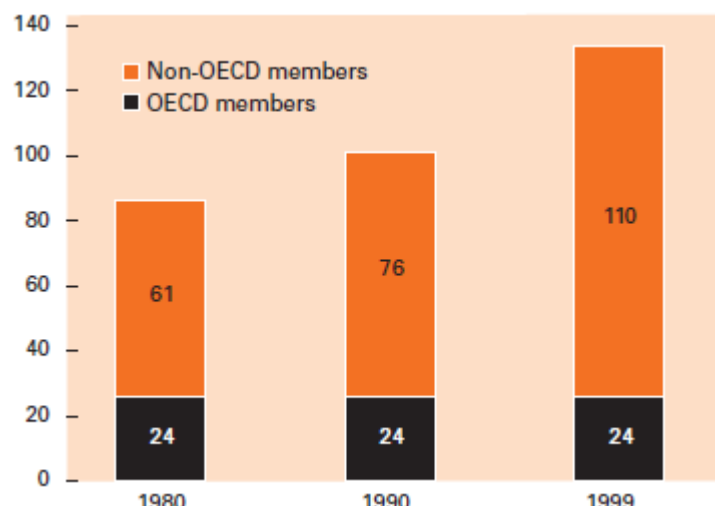
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/anniv_e/clinton_e.htm

³⁰⁸ The White House: A National Security Strategy for a New Century, Washington DC, Oktober 1998.

sebagai bangsa yang terpilih untuk menyelamatkan dunia. Dengan demikian, peranan AS di kawasan Asia Timur khususnya pasca Perang Dingin tak terlepas dari 'Mimpi Amerika' untuk memperluas cengkraman kekuasaan hegemoniknya sebagai pemenang perang dalam skala global.

Penambahan Jumlah Anggota WTO

Salah satu fakta kemenangan Amerika adalah semakin bertambahnya negara anggota WTO yang berkomitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreements*). Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh WTO menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari semula 76 negara anggota non OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) di tahun 1990 menjadi 110 negara anggota non OECD yang bergabung ke dalam WTO. Saat ini jumlah anggota WTO sejak 26 April 2015 sudah menjadi 161 negara.³⁰⁹



Laporan Tahunan WTO
World Development Report 1999/2000, 1999: 34

Bertambahnya negara anggota WTO ini, termasuk Malaysia, tentu saja semakin meneguhkan hegemoni ekonomi yang dibangun oleh *the Washington Consensus*. Peristiwa ini dengan segera dimanfaatkan Clinton untuk menjalankan peran sebagai *solution maker*, yakni dengan jalan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis Asia melalui badan-badan ekonomi dunia yang berada di bawah kendali Amerika.

³⁰⁹ Laporan Tahunan WTO. World Development Report 1999 /2000, 1999: 34. Lihat: Website resmi WTO pada: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

Kebijakan Ekonomi Clinton

Dasar seluruh kebijakan luar negeri di masa Clinton telah diletakkan dalam kebijakan ekonomi internasional (*international economic policy*) yang lebih agresif. Pada tanggal 27 September 1993, di depan Sidang Majelis Umum PBB, Clinton memberikan penegasannya akan hal ini:

Saya tahu banyak orang bertanya apakah Amerika Serikat berencana untuk mundur atau tetap aktif di dunia dan, jika aktif, untuk apa. Banyak orang yang bertanya serupa juga di negara kita sendiri. Biarkan saya menjawab pertanyaan itu sekarang dengan jelas dan seimbang mungkin. Amerika Serikat bermaksud untuk tetap terlibat dan memimpin... Dalam suatu era baru yang mempunyai sisi bahaya sekaligus kesempatan, tujuan utama kami harus memperluas dan memperkuat masyarakat dunia demokrasi berbasis pasar. Selama Perang Dingin, kami berusaha untuk membendung ancaman bagi kelangsungan hidup lembaga-lembaga yang merdeka. Sekarang kita berusaha untuk memperbesar lingkaran bangsa-bangsa yang hidup di bawah lembaga-lembaga merdeka itu. Untuk mimpi kita adalah hari ketika pendapat dan energi dari setiap orang di dunia akan diberikan ekspresi penuh, dalam dunia demokrasi yang berkembang yang saling bekerja sama dan hidup dalam damai.³¹⁰

Kepada publik dalam negerinya, Clinton memberikan argumen sebagai berikut: "Karena setiap \$ 1 miliar dari peningkatan ekspor Amerika akan menciptakan 20.000 sampai 30.000 pekerjaan baru, kita akan bergerak secara agresif untuk membuka pasar luar negeri bagi barang dan jasa Amerika berkualitas."³¹¹ Perubahan prioritas ini dideklarasikan melalui pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (*The National Economic Policy*) tanggal 25 Januari 1993 yang dikepalai oleh Robert Rubin (1993-1995). Dewan ini mempunyai empat fungsi utama: mengkoordinir seluruh kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri, mengkoordinir seluruh advis kebijakan ekonomi untuk Presiden, menjamin konsistensi antara program dan keputusan dengan tujuan ekonomi yang telah digariskan Presiden dan untuk memonitor pelaksanaan agenda kebijakan ekonomi Presiden. Dalam struktur organisasinya, NEC dilengkapi dengan enam departemen: *Treasury, the Council of Economic Advisers, the Office of Management and Budget, Commerce, Labor and The Trade Representative*, pada bulan November 1997, Clinton dengan bangga menyatakan bahwa lembaga ini adalah satu-satunya inovasi organisasi paling signifikan yang pernah ada selama masa pemerintahannya (*the single most significant organizational innovation that our administration made in the White House*).

Peristiwa penting yang menandai keterlibatan AS dalam globalisasi ekonomi pada masa Clinton adalah pada saat Senat AS mengambil voting atas berdirinya North American Free Trade Agreement (NAFTA) tanggal 19 November 1993 dan pada saat Kongres AS menyetujui perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tanggal 1 Desember

³¹⁰ Pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB 27 September 1993. Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=47119>

³¹¹ Lihat: <http://www.skepticfiles.org/conspire/economic.htm>

1994. Dalam perkembangannya ekonomi AS khususnya dalam globalisasi keuangan dapat dibaca data-data yang menunjukkan bahwa aset reksa dana internasional dan global yang berbasis di AS naik dari \$ 16 miliar pada tahun 1986 menjadi \$ 321 miliar akhir tahun 1996. Empat puluh empat juta rumah tangga di Amerika diadakan reksa dana , dibandingkan dengan 4,6 juta pada tahun 1980. Selain itu , kecepatan transaksi valuta asing berputar. Pada tahun 1973 rata-rata omset harian di pasar valuta asing adalah \$ 15 miliar dibandingkan \$ 60 miliar pada tahun 1983, \$ 880.000.000.000 pada tahun 1993; dan sekitar \$ 1,5 triliun tahun 1998. Selain itu, dalam dunia pasar keuangan terintegrasi secara elektronik, uang mengalir masuk dan keluar dari negara-negara dalam menanggapi perubahan kondisi pasar. Pada tahun 1996 investor asing menyeteror \$ 100 miliar ke Asia; tahun berikutnya mereka menarik \$ 100 miliar.³¹² Catatan ini diperkuat pula oleh yang menyatakan bahwa hingga akhir dekade 90an, perusahaan-perusahaan komunikasi global seperti *Disney/ ABC, Microsoft, IBM, Apple, AOL-Time Warner, Bell Atlantic* dan *AT&T* menguasai lebih dari 5 trilyun dolar AS dalam bentuk aset (Boggs, 2000: 269).³¹³ Dari catatan ini, dapat diketahui bahwa globalisasi keuangan di kawasan Asia mengalami peningkatan pesat di era 90an.

Pada awal tahun 2000, Clinton menyebut abad ke 21 sebagai salah satu ‘mimpi-mimpi besar’ (*one of big dreams*), yang digerakkan oleh sebuah ‘revolusi Amerika’ pada wilayah kesempatan, tanggungjawab dan komunitas. ‘Mimpi-mimpi besar’ Amerika ini selalu dipelihara dari generasi ke generasi, yang terus mendorong AS bersemangat untuk melakukan inovasi dan ekspansi di berbagai bidang kehidupan ke seluruh dunia. Inilah yang melahirkan berbagai gelombang globalisasi AS, dimana abad ke 21 dipandang oleh Clinton sebagai salah satu puncak mimpi-mimpi besar Amerika tersebut. Pada saat menerima nominasi sebagai kandidat Presiden dari Partai Demokrat di Chicago tanggal 29 Agustus 1996, Clinton mengingatkan seluruh pendukungnya bahwa Amerika masih menjadi kekuatan pembela perdamaian dan kebebasan yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Pernyataan ini secara khusus ditujukan Clinton kepada masyarakat pendukungnya dan bangsa Amerika sekaligus seluruh masyarakat dunia pada umumnya bahwa “Mimpi Amerika” itu adalah sesuatu yang amat mungkin terwujud, karena hingga saat itu Amerika “...is still the strongest for peace and freedom on Earth.”

Dalam hal penyebaran nilai-nilai (*values*), pemerintahan Clinton memandang globalisasi mempunyai kemampuan untuk menyelaraskan perilaku, kebiasaan, dan politik untuk penciptaan demokrasi, pembangunan dan kemakmuran; sebuah ungkapan tentang bagaimana mimpi-mimpi besar AS tersebut mempunyai nilai-nilai yang diperlukan oleh seluruh bangsa di dunia. Kebijakan Clinton untuk mengartikulasikan strategi perluasan

³¹² Encyclopaedia of the New American Nation. 2015. *Globalization - American-led Globalization: 1990-2001*. Dapat diunduh pada: <http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-American-led-globalization-1990-2001.html>

³¹³ Boggs, Carl. 2000. *The End of Politics; Corporate Power and the Decline of the Public Sphere*. New York: The Guilford Press.

nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia menunjukkan bahwa AS memandang promosi liberalisme ekonomi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan keamanan nasionalnya pada era pasca Perang Dingin.

Pilihan pemerintahan Clinton untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan demokrasi (*democratic enlargement*) telah mengisyaratkan bahwa AS menganggap promosi ekonomi dan politik liberal sebagai bagian tak terpisahkan dengan pencapaian tujuan keamanan nasionalnya pasca Perang Dingin. Clinton mengintegrasikan liberalisme di bidang ekonomi ke dalam kebijakan politiknya, dan liberalisme politik di dalam kebijakan ekonominya; keduanya diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat keamanan pasca Perang Dingin. Kebijakan ini seringkali dianggap sebagai alternatif bagi 'Jalan Ketiga', sebagaimana yang juga diakui sendiri oleh Clinton pada saat memberikan presentasi *State of the Union Address* tanggal 27 Januari 1998. Dalam kesempatan tersebut, ia merumuskan kebijakan ekonomi Jalan Ketiga ini sebagai ekonomi yang menawarkan kesempatan, masyarakat berakar pada tanggung jawab dan bangsa yang hidup sebagai masyarakat.

Anthony Giddens (2001: 2)³¹⁴ menyebutkan bahwa proyek *The Third Way* tersebut harus dimulai dengan memodernisasi kehidupan demokrasi sosial (*modernising social democracy*) agar dapat mengadaptasi sosial demokrasi kepada dunia yang telah berubah secara mendasar selama dua hingga tiga dekade berkat globalisasi dan kemunculan kekuatan ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*). Sebagai sebuah filsafat sosial, Jalan Ketiga merupakan sebuah cabang jalan yang berada di antara ideologi-ideologi yang saling bersaing, yaitu antara ekonomi pasar bebas yang ekstrim dengan ekonomi negara kesejahteraan yang terpusat (Hombach, 2000:1)³¹⁵. Ideologi ini memandang bahwa program ekonomi nasional dikembangkan berdasarkan kebutuhan globalisasi (Romano, 2006: 8)³¹⁶.

Pengambilalihan APEC

Dalam konteks hegemoni AS di Asia dalam era pemerintahan Clinton, kiranya jelas bahwa salah satu tonggak peristiwa yang amat penting yang menandai pengaruh besar AS terhadap Malaysia pasca Perang Dingin adalah dalam aspek ekonomi, terutama pada peristiwa berdirinya APEC (*The Asia Pacific Economic Cooperation*) pada tahun 1989 yang lahir dari usulan PM Australia saat itu, Bob Hawke. Hawke, yang juga menjadi President of the Australian Council of Trade Unions (ACTU), pertama kali mempublikasikan gagasan tersebut pada tanggal 31 Januari 1989 di Seoul, dengan menjelaskan bahwa: *Saatnya sudah tiba bagi kita untuk secara substantif meningkatkan segala usaha membangun kerjasama*

³¹⁴ Giddens, A. 2001. Introduction. Dalam: Giddens, A. (ed). *The Global Third Way Debate*. Cambridge: Polity.

³¹⁵ Hombach, B. 2000. *The Politics of the New Centre*. Cambridge: Polity Press.

³¹⁶ Romano, F. 2006. *Clinton and Blair: The Political Economy of the Third Way*. New York: Routledge.

*regional dan secara serius mencari bidang garapan khusus yang tepat bagi kerjasama tersebut.*³¹⁷ Usulan Hawke ini segera mendapat dukungan Jepang. Kedua negara ini aktif melakukan berbagai upaya diplomasi di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik yang saat itu telah membangun kerjasama regional melalui tiga lembaga regional, yaitu *The Pacific Basin Economic Council (PBEC)*, *The Pacific Trade and Development (PAFTAD)* dan *The Pacific Economic Cooperation Council (PECC)*.

Peristiwa ini justru menjadi jalan untuk meneguhkan kekuatan hegemoni AS di wilayah Asia Pasifik, sekalipun semangat awal para pendirinya adalah untuk menjembatani berbagai pertarungan ekonomi negara-negara *great power* di kawasan ini. Australia pada mulanya mencoba membebaskan diri dari AS dan negara-negara masyarakat Eropa dan membangun kekuatan ekonomi bersama di Asia karena pada saat itu AS dan negara-negara Eropa memberlakukan kebijakan agrikultura yang dianggap tidak menguntungkan Australia. Akhirnya, atas usulan dan diplomasi pejabat-pejabat Jepang, Amerika Serikat dilibatkan ke dalam lembaga kerjasama regional ini. Pemerintahan Clinton dengan segera memanfaatkan tawaran ini untuk membangun kekuatan ekonomi globalnya melalui strategi pencitraan diri yang positif, terutama untuk mengambil hati para pemimpin negara-negara ASEAN.

Melalui kepiawaian retorika politiknya, pada saat membuka sesi pertama Konferensi APEC tanggal 19 Nopember 1993 di Seattle, Washington, Clinton menggambarkan nilai penting pertemuan tersebut dengan ungkapan sebagai berikut: “*Saya percaya bahwa diskusi dapat membantu untuk mendorong di antara kita rasa kebersamaan dalam satu masyarakat, bukan dalam bentuk masyarakat dari hasil integrasi ekonomi, hukum, formal, tapi masyarakat seperti tetangga buat ketika mereka duduk bersama sambil minum kopi atau teh untuk berbicara tentang perbaikan rumah atau sekolah anak-anak mereka, jenis masyarakat bahwa keluarga dan teman-teman membuat ketika mereka berkumpul pada hari libur untuk bersukacita dalam berkat bersama mereka.*”³¹⁸

Karena AS mempunyai kepentingan besar untuk terlibat dalam pembangunan kawasan Asia Pasifik, maka APEC dapat dijadikan sebagai salah satu pintu gerbang yang cukup efektif bagi AS untuk meneguhkan kekuasaan hegemoninya di bidang ekonomi. Clinton menawarkan satu bentuk hubungan yang lebih intim dengan negara-negara terutama di kawasan Asia, – suatu hubungan yang tidak didasari oleh kekuatan hegemoni militer yang hanya menghabiskan anggaran belanja negara semata. Ia bahkan menyebut semua negara Asia sebagai sahabatnya.³¹⁹ Penyebutan kata “*Asian friends*” jelas

³¹⁷ *Address to a joint meeting of Korean Business Associations* di Seoul, Korea 31 Januari 1989. Lihat: Das, Dilip K. 1996. *The Asia-Pacific Economy*, The Macmillan Press Ltd, London, UK and St. Martin's Press, Inc. New York

³¹⁸ Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=46137>

³¹⁹ Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=46137>

dimaksudkan untuk merangkul semua negara Asia yang masuk ke dalam APEC secara halus ke dalam hegemoni AS (*soft hegemony*), terutama karena Malaysia pada saat itu memboikot pertemuan ini. Kesediaan AS untuk menjadi tuan rumah pada pertemuan APEC di Seattle ini jelas berangkat dari kecurigaan terhadap motivasi awal pendiri organisasi ekonomi internasional tersebut yang mengosongkan bangku AS dalam keanggotaan awal APEC, terutama setelah PM Malaysia pada tahun 1990 mengajukan proposal untuk mendirikan *East Asian Economic Group* (EAEC) yang juga tidak mengikutsertakan AS pada daftar negara-negara anggotanya.

3. Globalisasi Politik

Globalisasi di ranah politik kerap kali dipandang sebagai sebuah bentuk ketegangan antara tiga proses yang saling berinteraksi, —yaitu geopolitik global, budaya normatif global dan jejaring yang bersifat polisentris— untuk menghasilkan berbagai hal penting bagi politik global (Delanty, G. dan Rumford, C. 2007)³²⁰. Dalam aspek geopolitik global, salah satu hal penting yang terjadi pasca perang Dingin adalah runtuhnya Tembok Berlin yang menandai berakhirnya konsep pemisahan “Barat” dan “Timur” di kawasan Eropa. Dalam aspek budaya, peradaban Barat tidak lagi sekedar menjadi milik Barat, melainkan sudah berkembang sebagai sebuah budaya global (Delanty, G. 2006: 1)³²¹; sedangkan pada aspek jejaring yang bersifat polisentris, globalisasi mempunyai kemampuan untuk melakukan liberalisasi pada kelokalan dari kewenangan pusat serta mendorong dinamika baru dari pertumbuhan dan kesaling-terhubungan yang sejalan antara wilayah inti dengan periferi (Rumford, C. 2006: 182)³²².

Ketiga proses tersebut menempatkan Amerika Serikat sebagai “*the Avatar of Globalization*” (Hodson, J. 2002: 124), pemimpin puncak dalam seluruh proses globalisasi, yang pada akhirnya berujung pada sebuah ambisi untuk membuat sebuah “pemerintahan global” (*global governance*). Setelah berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, Amerika menikmati periode selanjutnya yang singkat berkat kekuatan yang tak tertandingi atau politik 'hegemoni'. Lebih dari negara lain, Amerika telah menapak pada pemerintahan global. Pemerintahan global mungkin saja menjadi jalan bagi AS untuk memanfaatkan kekuatannya untuk mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan nasionalnya, sebuah contoh dari proses yang lebih umum yang dinikmati oleh negara yang kuat dalam sistem dunia (Lechner, 2009: 143).³²³

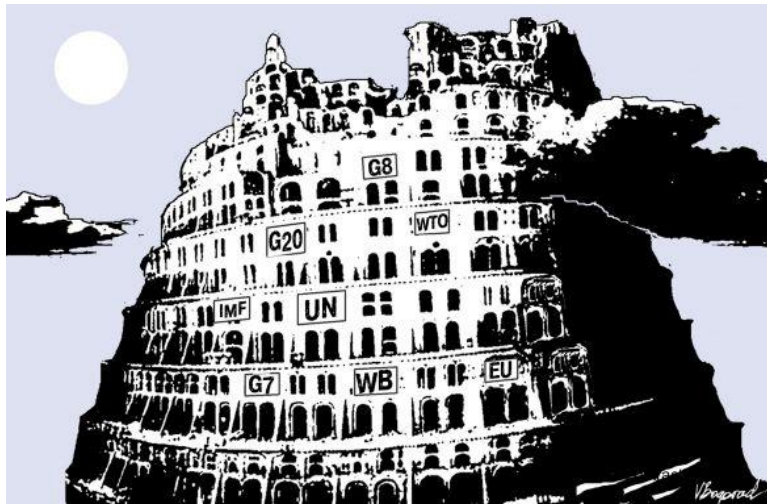
³²⁰ Delanty, G. dan Rumford, C. 2007. Political Globalization. Dalam: Ritzer, G. (ed.) *The Blackwell Companion to Globalization*. Oxford: Wiley-Blackwell

³²¹ Delanty, G. 2006. Introduction: The Idea of a Post-Western Europe. Dalam: Delanty, G. (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West*. New York: Routledge

³²² Rumford, C. 2006. Borders and Rebordering. Dalam: Delanty, G. (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West*. New York: Routledge

³²³ Lechner, F. J. 2009. *Globalization: The Making of World Society*. West Sussex: John Wiley and Son.

Gagasan mengenai ‘pemerintahan global’ membuka ruang besar bagi Amerika Serikat untuk meluaskan ekspansi nilai-nilai (*values*) dan kepentingan nasional (*national interest*) ke dalam tatanan internasional (*international order*). Gagasan ini segera muncul dalam frase ‘New World Order’ (*novus ordo seclorum*) segera setelah pemerintahan George HW Bush terbentuk. Dari musim panas tahun 1990 hingga Maret 1991, Bush mengucapkan frase “*new world order*” sebanyak 43 kali (Longin Pastusiak, 2004)³²⁴.



Pemerintahan Global

The Moscow Times.(13 Oktober 2010)

Pada akhir 1992 dan awal 1993, Pentagon menyiapkan sebuah draft “*National Council Report 68 (NSC-68) baru*”, yang merupakan cetak biru bagi strategi besar Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Salah satu isu penting yang dipaparkan di dalam naskah tersebut adalah betapa berbahayanya tatanan multipolar bagi kepentingan dan keamanan nasional Amerika Serikat (Layne, 1993: 6-7)³²⁵. Penegasan untuk memegang kepemimpinan dunia sebagaimana yang disampaikan dalam naskah tersebut menjadi latar belakang bagi gagasan New World Order. Dalam laporan resmi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih tanggal 1 Januari 1993 berjudul “*National Security Strategy of the United States*” ditegaskan sebagai berikut:

Kita memang bergerak ke era baru. Ini adalah era yang memberikan peluang yang besar sekaligus bahaya besar. Amerika memiliki pilihan yang menentukan untuk bertindak. Kita bisa memilih untuk memimpin dunia ke dalam transformasi paling bersejarah ini, atau kita bisa memilih, sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan di awal abad ini, untuk mengubah ke dalam, meninggalkan peran kepemimpinan kita, dan menerima apa pun hasil yang akan terjadi. Jika kita memilih kepemimpinan, Amerika dapat merebut peluang yang akan ditawarkan, dan mengurangi bahaya yang pasti akan kita hadapi. Meskipun kita akan bekerja dengan negara-negara lain, status kita sebagai kekuatan dunia terkemuka dengan

³²⁴ Pastusiak, L. 2004. After the Cold War: We Need to Build A New World Order. *New York Times*, 3 Januari.

³²⁵ Layne, C. 1993. The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Arise,” *International Security*, Vol. 17, No. 4: 5–5. Cambridge: The MIT Press.

kemampuan unik menempatkan tanggung jawab yang besar kepada kita. Dan , jika kita ingin belajar sesuatu dari sejarah tragis abad ini , pertama-tama bahwa masa depan tidak pasti, dan kedua, bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan yang hanya Amerika dapat memberikannya.³²⁶

Pemerintahan global (*global governance*) telah menjadi instrumen penting bagi Amerika Serikat untuk memanfaatkan globalisasi di bidang politik bagi peneguhan budaya hegemoniknya pasca Perang Dingin. Jangkauan kekuasaan politik Amerika Serikat dalam tatanan baru pasca Perang Dingin sedemikian besar sehingga memerlukan strategi kebijakan yang mendalam dan serius. Konsepsi pemerintahan global merujuk pada “semua upaya kolektif untuk mengidentifikasi, memahami atau mencari jalan keluar bagi masalah-masalah dalam skala mendunia yang berda di luar kemampuan satu negara tertentu secara sendirian untuk melakukannya” (Weiss, 2009 :257)³²⁷. Dengan menjalankan konsepsi ini, Amerika Serikat lebih mempunyai legitimasi besar secara politik untuk meneguhkan hegemoni kekuasaannya di tingkat global. Dalam pemerintahan global, Tata Dunia Baru diciptakan untuk mengatasi problem dan krisis kemanusiaan di seluruh dunia (Ullrich Brand 2005: 160)³²⁸.

Tata Dunia Baru

Di permulaan tahun 1990 (tepatnya tanggal 31 January 1990), Presiden Bush membuat sebuah pernyataan yang dapat menggambarkan bagaimana budaya hegemonik AS tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia secara keseluruhan: “Amerika , bukan hanya bangsa, tetapi ide, hidup dalam pikiran orang di mana-mana. Sebagai dunia baru ini mengambil bentuk, Amerika berdiri di tengah lingkaran pelebaran kebebasan - hari ini, besok , dan ke abad berikutnya . Bangsa ini , ide ini disebut Amerika , adalah dan akan selalu menjadi dunia - dunia baru kami baru.” Pernyataan ini dapat dipandang sebagai peneguhan untuk mewujudkan *American Dreams*, yakni mimpi Amerika sebagai bangsa pilihan Tuhan (the chosen people) untuk menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia. Secara tersurat, Bush menyebutkan bahwa Amerika bukan hanya sekedar suatu bangsa yang ada di benua Amerika, akan tetapi merupakan sebuah gagasan yang ‘hidup di benak seluruh orang di manapun berada’. Bangsa dan gagasan yang disebut ‘Amerika’ itulah, yang menurut Bush, telah dan akan terus mewarnai peradaban dunia baru.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 1990, Bush menyampaikan pidato di hadapan *Joint Session of Congress* yang isinya memproklamasikan berdirinya sebuah

³²⁶ The White House: A National Security Strategy for a New Century, Washington DC, Januari 1993.

³²⁷ Weiss, Thomas G. 2009. What Happened to the Idea of World Government. *International Studies Quarterly* 53: 253–271

³²⁸ Brand, U. 2005. Order and Regulation: Global Governance as a Hegemonic Discourse of International Politics? *Review of International Political Economy*. Vol. 12, No. 1: 155–176

'Tatanan Dunia Baru, yaitu sebuah tatanan dunia yang didasarkan pada nilai-nilai Amerika (*American values*) dan dijalankan melalui kepemimpinan Amerika (*American leadership*):

Kita berdiri hari ini di saat yang unik dan luar biasa. Krisis di Teluk Persia, seperti kuburan seperti itu, juga menawarkan kesempatan langka untuk bergerak ke arah periode kerjasama yang bersejarah. Keluar dari masa sulit . . . tatanan dunia baru dapat muncul: baru era bebas dari ancaman teror, kuat dalam mengejar keadilan, dan lebih aman dalam upaya perdamaian. Era di mana bangsa-bangsa di dunia, Timur dan Barat, Utara dan Selatan, bisa makmur dan hidup dalam harmoni. Seratus generasi telah mencari perdamaian sulit dipahami, sementara seribu perang berkecamuk di seluruh rentang usaha manusia. Hari ini dunia baru sedang berjuang untuk dilahirkan, dunia yang cukup berbeda dari yang kita sudah tahu. Sebuah dunia di mana aturan hukum mengganti aturan hutan. Sebuah dunia di mana negara-negara mengakui tanggung jawab bersama untuk kebebasan dan keadilan.

Dalam pidatonya ini, tampak bahwa Bush memanfaatkan krisis Teluk sebagai momentum untuk memproklamasikan apa yang dinamakannya sendiri sebagai 'periode kerjasama yang bersejarah (*an historic period of cooperation*)'. Kalimat ini juga sebenarnya dimaksudkan untuk merayu negara-negara lain di dunia untuk menyokong operasi yang sedang dipersiapkan Amerika, yaitu melumpuhkan kekuatan militer Irak yang berujung pada jatuhnya kekuasaan Saddam Hussein dari tampuk pimpinan tertinggi Baghdad.

Dengan demikian, kesalahan Saddam untuk menganeksasi Kuwait justru menjadi kesempatan emas bagi Bush untuk mencanangkan watak hegemoni bangsa Amerika untuk menguasai dunia dengan mewujudkan impiannya '*a new world order*'. Mimpi yang indah selalu mengandung harapan dan iming-iming. Bush menjanjikan, '*a new world order*' atau menjanjikan lahirnya sebuah tatanan dimana setiap bangsa dan negara di dunia, baik di Timur dan Barat, Utara maupun Selatan 'bisa makmur dan hidup dalam harmoni (*can prosper and live in harmony*)'. Melalui mimpi inilah, Bush menjajakan ideologi neoliberalisme ke seluruh dunia.

Tatanan dunia baru yang ingin diciptakan oleh Bush tentu saja tidak akan dapat berjalan mulus tanpa dukungan dari negara-negara sekutunya dan tanpa kesediaan seluruh negara dan bangsa di dunia, terutama secara militer, ekonomi, politik dan budaya. Untuk meneguhkan dukungan tersebut, Bush dengan jeli membidik lembaga-lembaga resmi internasional sebagai alat kepanjangan tangan hegemoni AS. Salah satu lembaga yang diterima secara luas oleh masyarakat dunia adalah Perserikatan Bangsa Bangsa. Di depan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 1 Oktober 1990, Bush menyatakan: "Perubahan-perubahan di Uni Sovyet telah menjadi alasan paling mendesak bagi kebutuhan akan penguatan (kelembagaan) PBB". Frase '*a stronger United Nations*' dalam pidato Bush tersebut kiranya dapat pula diterjemahkan sebagai 'penguatan bagi kekuatan legal Amerika atas seluruh bangsa di dunia melalui PBB (*a stronger legitimate power of United States to all nations in the world through United Nations*). Ini merupakan sebuah bentuk ungkapan tidak langsung atas semakin kuatnya kekuasaan AS secara global melalui PBB pasca Perang Dingin.

Dalam perspektif Gramscian, gagasan tatanan dunia baru tersebut dapat pula diterjemahkan secara teknis ke dalam upaya peneguhan hegemoni AS melalui berbagai bentuk konsensus, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bush di depan Sidang PBB 1 Oktober 1990: 'Hubungan AS-Soviet akhirnya melampaui urusan penahanan dan konfrontasi, dan sekarang kami berusaha untuk memenuhi janji pemahaman untuk saling berbagi'. Melalui pernyataan tersebut, Bush ingin mengajak seluruh dunia untuk segera mengikuti Uni Sovyet yang telah mengakhiri permusuhan dan konfrontasinya selama Perang Dingin terhadap Amerika Serikat, dan memilih sikap untuk '*mutually shared understanding*', yang dapat ditafsirkan sebagai kesediaan secara sukarela untuk menerima segala gagasan dan kebijakan neo liberalisme Amerika Serikat. Sebuah pertanyaan reflektif diajukan oleh Bush: *And the question is this: Can we work together in a new partnership of nations?*

Penolakan terhadap Myanmar ke dalam ASEAN

Peristiwa masuknya Myanmar ke dalam ASEAN sebagai konsekuensi dari Visi 10 yang dicanangkan ASEAN telah menimbulkan perselisihan dan memicu ketegangan antara ASEAN dengan negara-negara Barat. Peristiwa ini pula yang menjadi salah satu pemicu ketegangan antara Amerika Serikat dengan ASEAN³²⁹. Ketika ASEAN memutuskan untuk merangkul Kamboja dan Burma (Myanmar) sebagai anggota penuh, Madeleine Albright, Sekretaris Negara AS ke-64 dan menlu AS wanita pertama, tidak ragu-ragu mengutuk keputusan tersebut secara terbuka. Dia keberatan khususnya untuk masuknya Burma dengan jenderal anti - demokrasi (Lucian W. Pye,1998: 105). Pada tanggal 28 Juli 1997, Robin Wright dari *Los Angeles Times* melaporkan pernyataan Albright tersebut: "Burma adalah satu-satunya anggota ASEAN yang mendapat sorotan khusus Majelis Umum PBB karena menolak untuk menghormati hasil pemilu, satu-satunya anggota di mana negara dan masyarakat secara mendasar bertentangan."

4. Globalisasi Pendidikan

Dalam ranah pendidikan, konsepsi globalisasi telah dimanfaatkan untuk mengkaitkan berbagai proses transformasi kependidikan di Amerika Serikat dengan segala aktifitas ekonomi dunia secara global melalui kebijakan pendidikan, kurikulum dan praktek penyelenggaraan sistem pendidikan untuk meneguhkan kebutuhan melakukan reformasi, keluaran yang diharapkan dari reformasi dan rencana-rencana kebijakan yang diprasyaratkan oleh keluaran-keluaran tersebut. Reformasi pendidikan baik pada periode masa lalu dan saat ini, terlepas dari niat baik dan cita-cita agen pendidikan yang menginisiasi mereka, telah menjadi perangkat yang efisien yang memberikan kontribusi

³²⁹ Baker, M. 1997. Rush to Embrace Burma's Dictators Will Be Swept Aside In March of History. *The Age*, Melbourne. (7 Juni 1997). Lihat pula: Baker, Mark. 1997. *Sydney Morning Herald* (7 Juni 1997).

untuk "melestarikan tatanan sosial" dan "mempertahankan struktur kelas yang adil". Ia menemukan kesamaan filosofis antara peran yang dimainkan oleh gereja-gereja di sekolah umum bagi masyarakat miskin di Amerika Serikat dan dari misionaris di Afrika dan Asia (Carnoy, 1976: 151-120)³³⁰.

Strategi reformasi kependidikan secara global tersebut dijalankan oleh suatu kelompok pemikir yang dikenal dengan istilah '*the political think tank*' (Ellison, 2009: 9-12)³³¹. Di tingkat perguruan tinggi (universitas), sebagai akibat globalisasi di dunia kependidikan terutama di bidang sains, teknologi dan riset, arus mahasiswa asing semakin meningkat tajam selama tiga dekade terakhir ini, sementara jumlah dosen masih dianggap mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, standar perguruan tinggi yang melakukan globalisasi pendidikan juga ditentukan. Madeleine F. Green (2005)³³² menetapkan 'indeks internasionalisasi' untuk mengukur sejauh mana suatu universitas atau perguruan tinggi masuk ke dalam globalisasi pendidikan. Indeks tersebut terdiri atas enam dimensi internasionalisasi pendidikan, yaitu: Komitmen yang dilaksanakan (*articulated commitment*), Penawaran akademik (*academic offerings*), Infra-struktur organisasi (*organizational infrastructure*), Pendanaan dari luar (*external funding*), Penanaman modal kelembagaan untuk fakultas, dan Program belajar untuk mahasiswa asing.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauhmana dominasi perguruan tinggi (universitas) AS di tingkat global, William E. Odom dan Robert Dujarric (2004: 162-166)³³³ menyebutkan beberapa indikator pengukuran, antara lain: (a) bibliometriks, (b) penghargaan ilmiah, dan (c) publikasi akademik di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tingginya minat mahasiswa asing untuk belajar di Amerika juga mengindikasikan luasnya pengaruh globalisasi pendidikan yang dijalankan oleh negara superpower tersebut. Salah satu program yang cukup efektif untuk menarik minat mahasiswa asing, terutama yang mempunyai kecakapan akademis yang dianggap brilliant, adalah pemberian beasiswa Fulbright. Program ini telah menjadi "*alat promosi yang berguna untuk supremasi model ekonomi Amerika dan integrasi global*" (Graham, 2007: 13)³³⁴. Kehadiran mahasiswa-mahasiswa asing "*tidak hanya di pusat pertukaran akademis di seluruh dunia tetapi juga secara aktif terlibat dalam jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks dari hubungan politik dan ekonomi*

³³⁰ Carnoy, M. 1976. Educational Reform and Social Control in the United States, 1830-1970. Dalam: Carnoy, Martin dan Levin, Henry (eds.). *The Limits of Educational Reform*, New York: Longman: 115-155

³³¹ Ellison, B. S. 2009. *In Contradiction: The Concept of Globalization in the Popular Discourse of Education Reform*. PhD diss., University of Tennessee

³³² Green, M. F. 2005. *Measuring Internationalization at Research Universities*. Washington: American Council on Education.

³³³ Odom, W. E dan Dujarric, R. 2004. *America's Inadvertent Empire*. New Haven & London: Yale University Press.

³³⁴ Graham, Sarah Ellen. 2007. *US Public Diplomacy in The Asia-Pacific: Opportunities and Challenges In a Time of Transition*. Canberra : Department of International Relations, RSPAS, College of Asia and the Pacific, Australian National University

global “ (Barnett dan Wu, 1995: 353)³³⁵. Sebagai akademisi, mereka diharapkan mempunyai tradisi berpikir akademis —tentu saja pemikiran tersebut lebih banyak menyerap paradigma Barat—, yang sekembalinya ke tanah air masing-masing dapat berperan sebagai agen pemikiran ideologi liberal Amerika.

Dalam konteks hegemoni AS, para agen ini diharapkan bekerja dalam kerangka hubungan “negara hegemon dengan negara periferal” dimana AS adalah negara hegemon sedangkan Dunia Ketiga menjadi negara periferalnya (Barnett dan Wu, 1995: 356)³³⁶. Tidak mengherankan bila Branislav Gosovic (2000: 447- 448)³³⁷ menyebut situasi ini dengan istilah ‘hegemoni intelektual dalam skala global’ (*a global intellectual hegemony*). Istilah ini jelas menunjukkan betapa luasnya dan strategisnya hegemoni yang dibangun oleh AS, karena media pendidikan tentu saja salah satu media paling efektif untuk menyebarkan nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang dikandung sebuah bangsa.

³³⁵ Barnett, GA Dan Wu, RY. 1995. The International Student Exchange Network: 1970 & 1989 . *Higher Education*. Vol. 30, No. 4: 353-368

³³⁶ Barnett, GA Dan Wu, RY. *Ibid.*

³³⁷ Gosovic, Branislav. 2000. Global Intellectual Hegemony and the International Development Agenda. *International Social Science Journal*. Volume 52, Issue 166: 447–456

VIII

Imperialisme Budaya Amerika Serikat

Gagasan 'globalisasi budaya' merefleksikan sebuah pandangan bahwa 'Amerikanisasi' atau 'Westernisasi' sangat signifikan dalam mempengaruhi banyak budaya di negara-negara dunia ketiga dan bekas wilayah Uni Soviet (Haynes, 2003: 1041)³³⁸. Oleh karena itulah, dalam berbagai tulisan dan analisis mengenai hegemoni dalam American Studies, hegemoni budaya (*cultural hegemony*) acapkali dipandang memiliki kaitan erat dengan imperialisme budaya (*cultural imperialism*). Hal yang paling perlu diperhatikan secara serius adalah pemaksaan secara 'hegemonik' atas nilai-nilai yang paling sering dihubungkan dengan budaya populer bangsa Amerika Utara (yaitu Amerika Serikat), yang meliputi individualisme, materialisme, budaya persaingan, hedonisme, perubahan secara cepat ("kemajuan"), keuntungan, keserakahan, budaya kemasan, konsumerisme, reduksionisme, budaya selebritis, privatisasi dan pilihan bahasa Inggris sebagai bahasa yang lebih disukai (Anthony J. Marsella, 2005: 2).³³⁹

Imperialisme Budaya

Secara umum, ada lima karakteristik yang terdapat dalam imperialisme: 1) Konsentrasi produksi dan modal dikembangkan untuk tahap seperti yang menciptakan monopoli yang memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, 2) Penggabungan modal bank dengan modal industri, dan penciptaan, pada dasar 'modal keuangan', dari oligarki keuangan, 3) Ekspor modal, yang telah menjadi sangat penting, karena dibedakan dari ekspor komoditas, 4) Pembentukan monopoli kapitalis internasional yang berbagi dunia di antara mereka sendiri, dan 5) Pembagian wilayah seluruh dunia antara kapitalis terbesar kekuatan selesai (Lenin, 1917 : 237)³⁴⁰.

Paradigma imperialisme budaya sudah mendominasi berbagai penelitian di bidang komunikasi internasional terutama pada dekade 70an dan 80an (Chalaby, 2006: 33)³⁴¹. Imperialisme budaya juga telah menjadi isu utama di negara-negara sedang berkembang pada era Perang Dingin, terutama dalam konteks intervensi AS dan penyebaran kepercayaan bahwa arus budaya mengandung efek propaganda, pembenaran intervensi

³³⁸ Haynes, J. 2003. Tracing Connections between Comparative Politics and Globalisation. *Third World Quarterly*, Vol. 24, No. 6: 1029-1047. Taylor & Francis, Ltd.

³³⁹ Marsella, A.J. 2005. "Hegemonic" Globalization and Cultural Diversity. *Australian Mosaic*. Issue 11, No. 13: 15-19.

³⁴⁰ Lenin, Vladimir Ilyich. 1917. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Dalam: Henry M. Christman (ed.) *Essential Works of Lenin*, New York: Dover: 177-270.

³⁴¹ Chalaby. J. K. 2006. American Cultural Primacy in A New Media Order: A European Perspective. *The International Communication Gazette*, Vol. 68, No.1: 33-51. London: SAGE Publications Ltd

yang lebih luas melalui promosi 'American dream'. Istilah 'imperialisme budaya' ini dapat disebut sebagai berawal dari Herbert Schiller (1976)³⁴² dalam bukunya "*Communication and Cultural Domination*" yang mendefinisikannya sebagai: hasil keseluruhan dari proses di mana sebuah masyarakat digiring masuk ke dalam sistem dunia modern, dan bagaimana aspek dominasi tersebut ditampilkan secara menarik, secara paksa dan bahkan terkadang secara dirampas untuk membentuk lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan, atau diangkat kepada, nilai-nilai-nilai dan struktur dari pusat sistem yang dominan.'

Beltran (1978: 184)³⁴³ mendefinisikannya sebagai sebuah "proses dari pengaruh sosial di mana suatu bangsa memaksa negara lain untuk menerima keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan dan norma-norma perilaku dalam seluruh kehidupan mereka (*process of social influence by which a nation imposes on other countries its set beliefs, values, knowledge and behavioral norms as well as its overall style of life*)". Jika dilihat definisi ini dalam hubungannya dengan Dunia Ketiga, imperialisme budaya dapat dimaknai sebagai: "penetrasi dan dominasi secara sistematis terhadap kehidupan budaya kelas populer oleh kelas penguasa dari Barat untuk menyusun ulang nilai-nilai, perilaku, lembaga dan identitas bangsa tertindas agar cocok dengan kepentingan kelas yang berkuasa (*the systematic penetration and domination of the cultural life of the popular classes by the ruling class of the west in order to reorder the values, behaviour, institutions and identity of the oppressed peoples to conform with the interests of the imperial classes* (Petras, 1994: 270)".³⁴⁴

Tomlinson (1991)³⁴⁵ membagi tipe imperialisme budaya ini ke dalam empat kategori: (a) sebagai imperialisme media (*media imperialism*), (b) sebagai sebuah wacana kebangsaan (*a discourse of nationality*), (c) sebagai kritik kapitalisme global (*the critique of global capitalism*), dan (d) sebagai kritik modernisasi (*the critique of modernity*). Apa yang dimaksud dengan imperialisme media adalah proses dimana hak kepemilikan, struktur, distribusi dan isi media di sebuah negara secara sendiri atau secara bersama diarahkan oleh tekanan luar demi kepentingan media dari negara lain tanpa campur tangan dari negara yang dipengaruhi (Boyd-Barrett, 1998: 117)³⁴⁶.

Dalam konteks hegemoni Amerika, imperialisme budaya dapat dipandang sebagai "penyebaran di seluruh dunia dan dominasi budaya konsumerisme dan produk-produk Amerika, dimana banyak negara mengklaim bahwa hal tersebut telah mengikis nilai-nilai

³⁴² Schiller, H. 1976. *Communication and Cultural Domination*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

³⁴³ Beltran, L.R. 1978. "Communication and Cultural Domination: USA-Latin American Case. *Media Asia*, 5, (4), 183-192.

³⁴⁴ Petras, James. 1994. Cultural Imperialism in Late 20th Century. *Economic and Political Weekly*, Vol. 29, No.: 2070-2073.

³⁴⁵ Tomlinson, J. 1991. *Cultural Imperialism: A Critical Introduction*. London: Pinter.

³⁴⁶ Boyd-Barrett, Oliver. 1998. Media imperialism reformulated. In D.K.Thussu (Ed.). *Electronic Empires*. London: Edward Arnold.

dan tradisi budaya lokal mereka dan merupakan bentuk peraturan budaya global³⁴⁷. Tujuan utama dari imperialisme budaya AS secara garis besar ada dua, yaitu: (a) untuk merebut pasar bagi komoditas budayanya, dan (b) untuk mempertahankan hegemoni AS dengan mempertajam kesadaran akan budaya populer AS ke seluruh dunia (Petras, 1994: 270)³⁴⁸. Dalam hal penyebaran kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi dan seperangkat hubungan kelas, imperialisme budaya dipandang sebagai hasil dari dominasi global dari budaya kapitalis, karena kapitalisme tidak hanya merujuk pada bentuk atau cara-cara produksi, tetapi juga mengandung pengertian sebuah totalitas kebudayaan yang bersifat teknis-ekonomis, politis, hubungan sosial, momen simbolis dan pengalaman, sebuah pelajaran yang diambil dari Marx (Tomlinson, 1991: 26)³⁴⁹. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kebudayaan Amerika Serikat adalah kebudayaan yang paling banyak ditiru di seluruh dunia, sedangkan apa yang mendorong imperialisme budaya bangsa Amerika adalah perluasan pasar dan pengakuan asing terhadap kebesaran Amerika (Mark T. McKenzie, 2005: 6)³⁵⁰.

Motivasi dibalik imperialisme budaya bangsa Amerika berjalan sejajar dengan pembenaran terhadap imperialisme negara Amerika Serikat di sepanjang sejarah, yaitu keinginan untuk mendapatkan pintu masuk pasar asing dan keyakinan akan nilai-nilai superior terhadap budaya Amerika (Galeota 2004: 22)³⁵¹. Imperialisme budaya Amerika tersebut telah berlangsung lama dan semakin berkembang secara lebih canggih. Sejak dari awal sejarahnya, kolonialisme, perdagangan, migrasi, kegiatan misionaris, perubahan teknologi (khususnya, kemajuan produksi dan sistem komunikasi) penggabungan suku-suku dalam negara dan sistem skala besar pertukaran adalah faktor utama di balik difusi budaya yang mengakibatkan imperialisme budaya atau globalisasi budaya.

Sebagai hasilnya, kebudayaan Amerika saat ini menjadi fenomena global karena menjadi kebudayaan yang paling banyak ditiru di seluruh dunia (McKenzie, 2005: 6)³⁵². Penyebaran budaya Amerika terjadi dalam bentuk konsumsi atas 'komoditas budaya' (*cultural commodities*) yang merupakan kendaraan bagi transmisi nilai, gaya hidup bahkan ideologi Amerika yang kerap menggerogoti budaya masyarakat penerima (*the recipient culture*). Penyebaran budaya Amerika ke dalam kehidupan keseharian masyarakat global ini telah mengarahkan negara ini ke dalam bentuk kolonialisme baru, yaitu 'imperialisme budaya', sehingga globalisasi sebagai 'sebuah sistem internasional telah menggantikan Perang Dingin', dimana ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet berakhir dan

³⁴⁷ Rauschenberger, E. 2003. It's Only a Movie – Right? Deconstructing Cultural Imperialism: Examining the Mechanisms behind U.S. Domination of the Global Cultural Trade: 1-2

³⁴⁸ Petras, James. 1994. *Ibid.*

³⁴⁹ Tomlinson, J. 1991 *Ibid.*

³⁵⁰ McKenzie, M. T. 2005. *Defeating Anti-Americanism*. Report. Pennsylvania: USAWC Strategy Research Project, U.S. Army War College, Carlisle Barracks.

³⁵¹ Galeota, J. 2004. Cultural Imperialism: An American Tradition. *Humanist Essay Contest Winners*: 22-46.

³⁵² McKenzie, M. T. *Ibid.*

digantikan dengan ketegangan Amerika Serikat dengan banyak negara lain melalui kebijakan-kebijakan dan praktek budaya imperialistik-nya (Prestowitz, 2003³⁵³: 42, lihat pula Daalder dan Kagan, 2007: 3)³⁵⁴.

Amerikanisasi sebagai Strategi dan Tujuan Hegemoni Amerika Serikat

Sejumlah pakar, seperti Garcia Gancini, (1996); Mike Featherstone (2006: 390) dan Xia, G. (2003: 709) memandang globalisasi budaya saat ini sebagai 'proses menjadikan dunia sebagai Amerika' atau Amerikanisasi³⁵⁵. Amerikanisasi bahkan dianggap sebagai saudara sepupu dari konsepsi neo Marxian tentang imperialisme ekonomi dan hegemoni budaya (Ritzer dan Stillman, 2003: 31)³⁵⁶. Istilah 'Amerikanisasi' tersebut pertama kali muncul di awal abad ke-19 yang merujuk pada pengertian '...pengaruh nyata dan tendensius dari satu atau beberapa bentuk Amerikanisme pada sejumlah entitas sosial, obyek material atau praktek budaya (Elteren, 2006: 3)³⁵⁷.



Amerikanisasi

(<http://factfile.org/10-facts-about-american-imperialism>)

³⁵³ Prestowitz, C. 2003. *Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions*. New York: Basic Books.

³⁵⁴ Daalder dan Kagan, 2007. The Next Generation. *The Washington Post*. 6 Agustus. Lihat pula: Daalder dan Kagan, 2007. *America and the Use of Force: Sources of Legitimacy. Bridging the Foreign Policy Divide*. The Stanley Foundation.

³⁵⁵ Lihat: Achugar, H. 2007. Tensions between North and South. Dalam: H. Anheier, & Y. Isar (Eds.), *The Cultures and Globalization Series 1: Conflicts and Tensions*. London: SAGE Publications Ltd.: 202-210

³⁵⁶ Ritzer, G. dan Stillman, T. 2003. Assessing McDonalidization, Americanization and Globalization. Dalam: Beck, U., Sznaider, N. dan Winter, R. (eds.) *Global America? The Cultural Consequences of Globalization*. Liverpool University Press, Liverpool: 30-48.

³⁵⁷ Elteren, van M. 2003. U.S. Cultural Imperialism Today: Only a Chimera? *SAIS Review* vol. XXIII no. 2: 169-188.

Istilah Amerikanisasi juga dapat dimaksudkan untuk menggambarkan atau menunjukkan kebesaran kekuatan dan ketinggian budaya Amerika serta pengakuan asing terhadap kebesaran bangsa ini. Istilah ini bahkan dipertegas lagi arahnya oleh W. T. Stead, seorang editor pada majalah Inggris *Review of Reviews* terbitan tahun 1902 dengan istilah 'Amerikanisasi terhadap Dunia' (*the Americanization of the World*) yang dipandang sebagai sebuah ungkapan untuk menggambarkan kekuatan bangsa Amerika yang mampu mewarnai peradaban dunia (Stead, 1902: 7).³⁵⁸

Amerikanisasi adalah proses yang mengutamakan transformasi identitas budaya, yang mungkin dihasilkan dari kekaguman atas peradaban dan subjektivitas Amerika atau dari dorongan yang mau tidak mau menuntut penyesuaian diri dengan gaya hidup Amerika untuk memperoleh keuntungan lebih dari apa yang ditawarkan oleh Amerika. Kasus pertama terutama berlaku untuk individu di luar AS, yang mungkin ingin menemukan kembali identitas mereka dengan asumsi bahwa Amerika adalah baru, sebagai warga diinginkan dunia. Yang kedua, di sisi lain, tampaknya berlaku terutama untuk individu yang telah menemukan diri mereka di bawah pengaruh AS dan tidak punya pilihan selain menerima norma-norma perilaku Amerika (Obododimma Oha, 2008: 70).³⁵⁹

Ada juga yang memaknai Amerikanisasi sebagai diimpornya barang-barang dari Amerika oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan Van Elteren (2006: 3) melihat Amerikanisasi sebagai pengaruh nyata atau diklaim dari satu atau lebih bentuk Amerikanisme pada beberapa entitas sosial, objek material atau praktek budaya (*the real or purported influence of one or more forms of Americanism on some social entity, material object or cultural practice*)³⁶⁰. Dari pengertian-pengertian tersebut, yang lebih penting untuk dapat memahami Amerikanisasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat adalah dengan mengetahui hubungan antara kekuatan-kekuatan transnasional, khususnya neoliberalisme dan internasionalisasi dalam pengaturan ekonomi dan sosial" (Bonnett, 2006: 1084)³⁶¹.

Kesediaan untuk menerima globalisasi dari gaya hidup orang Amerika mencerminkan keberhasilan bisnis AS, kebutuhan untuk bermain dengan aturan pasar terbuka terbesar di dunia, kepemimpinan AS dalam inovasi teknologi dan revolusi informasi, dan daya tarik nilai-nilai universal Amerika. Hal ini juga mencerminkan kemenangan atas fasisme, militerisme, dan komunisme selama abad kedua puluh yang memungkinkan kekuatan Anglo-Amerika untuk membangun sistem PBB, merancang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi dan keuangan internasional, dan pers untuk penerimaan standar umum dan

³⁵⁸ Stead, W. T. 1902. *The Americanisation of the World or the Trend of the Twentieth Century*. London: The "Review of Reviews" Office, Mowbray House, Norfolk Street.

³⁵⁹ Oha, O. 2008. *Glocalizing Americanness: Language and American Identity in Nigerian Video Films*. Dalam: Glass, W.R. dan Graff, A. (eds.). *The Americanist: American Popular Culture as Import and Export*. Vol. 24. Warsaw University: The American Studies Center.

³⁶⁰ Van Elteren, Mel. 2006. *Americanism and Americanization*. Jefferson: McFarland and Co.

³⁶¹ Bonnett, A. 2006. The Americanisation of Anti-Racism? Global Power and Hegemony in Ethnic Equity. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 32, No. 7: 1083 -1103.

aturan hukum yang sangat penting untuk globalisasi (Ritzer, 2010: 86)³⁶². Dalam gambaran ini terlihat jelas bagaimana globalisasi telah menempatkan Amerika sebagai negara paling diuntungkan baik secara ekonomis, politis, bahkan ideologis yang mendesakkan nilai-nilai dan kepentingan nasional Amerika Serikat ke dalam semua lini di tingkat global.

Cara lain yang juga diproyeksikan untuk melakukan Amerikanisasi terhadap dunia adalah penyebarluasan demokrasi. Sudah tidak diragukan lagi kalau Amerika menjadikan demokrasi sebagai salah satu jalan untuk 'membuat negara-negara lain menjadi Amerika'. Dalam Perang Dingin, demokrasi adalah senjata ideologi Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman ideologi komunisme. Karin von Hippel (2004: 9) menggarisbawahi bahwa promosi atau dukungan terhadap demokrasi, yang juga dikenal sebagai 'demokratisasi', telah dikembangkan dalam beberapa tahap sejak Perang Dunia II, ketika muncul gerakan untuk demiliterisasi, de-nazifikasi, dan pendidikan ulang penduduk seluruh negara, ke Vietnam dan kemudian di Amerika Tengah, ketika itu disamakan dengan melawan komunisme. Kemudian, perhatian lebih ditempatkan pada tantangan atas kemajuan komunis daripada benar-benar menerapkan reformasi demokratis. Dari pernyataan von Hoppel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa agenda demokratisasi yang disebarluaskan AS sejak Perang Dunia II sesungguhnya lebih pada upaya untuk memastikan keluarnya AS sebagai pemenang dalam persaingannya menghadapi Uni Sovyet pada Perang Dingin.

³⁶² Ritzer, G. 2010. *Globalization: A Basic Text*. West Sussex: Blackwell Publishing, John Wiley & Sons Ltd.

IX

Pengendalian Informasi Global

Selama Perang Dingin, program-program informasi luar negeri Amerika tumbuh secara lebih substansial, yaitu lebih banyak bersifat ideologis sebagai satu bentuk perang urat syaraf dengan Soviet komunis. *The Voice of America* (VOA) memperluas siaran bahasanya, sementara penggantinya, Radio Free Europe/ Radio Liberty berusaha untuk menembus terobosan Tirai Besi di Blok Timur. Washington mempunyai kebijakan untuk melakukan penyebaran ideologi sekaligus pengendalian informasi global demi menjaga kekuasaan hegemoniknya. Salah satu instrumen terpenting Washington untuk menjalankan operasi penyebaran ideologi AS ini ke luar negeri adalah *The US Information Agency* (USIA) yang didirikan pada tahun 1953. Hingga akhir masa kerjanya di tahun 1999, USIA memegang peranan penting dalam mempengaruhi opini publik dunia agar memihak kepentingan AS bahkan menyuntikkan berbagai 'virus ideologi AS' ke dalam ranah kehidupan sosial, budaya bahkan ekonomi dan politik masyarakat di dunia berkembang. Di tahun 1999, segala fungsi USIA, kecuali Biro Penyiaran Internasional (*IBB-International Broadcasting Bureau*), dialihkan ke dalam *Department of State*.

Strategi Penyebaran Informasi pasca Perang Dingin

Prinsip-prinsip umum dalam pengendalian informasi AS pasca Perang Dingin ada tiga hal: *pertama*, kemampuan untuk mengidentifikasi secara cepat segala bentuk ancaman baik dalam jangka menengah maupun panjang; *kedua*, kemampuan untuk mengidentifikasi secara personal siapapun yang terlibat dalam kegiatan dan aksi terorisme; dan *ketiga*, kemampuan untuk menerapkan segala upaya manajemen darurat, perlindungan, tanggapan, penangkalan, pencegahan, dan pendeteksian berbasis resiko dan informasi.

Ketiga prinsip umum ini dijadikan melalui strategi-strategi sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi yang efektif datang melalui kemitraan yang kuat antara Pemerintah Federal, Negara bagian, pemerintah lokal, dan otoritas setempat, organisasi sektor swasta, dan mitra luar negeri dan sekutu kita;
2. Informasi yang diperoleh untuk satu tujuan, atau di bawah satu perangkat otoritas, dapat memberikan wawasan yang unik bila dikombinasikan, sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan informasi yang tampaknya terkait dari sumber lain, dan oleh karena itu harus dikembangkan budaya kesadaran di mana orang-orang di semua tingkat pemerintahan tetap menyadari fungsi dan kebutuhan orang lain dan menggunakan pengetahuan dan informasi dari semua sumber untuk mendukung upaya kontraterorisme;

3. Penyebaran informasi harus ditunen menjadi semua aspek kegiatan kontraterorisme, yang mencakup tindakan pencegahan dan perlindungan, tanggapan ditindaklanjuti, kegiatan investigasi kriminal dan kontraterorisme, kesiapan acara, dan menanggapi dan pemulihan dari peristiwa bencana;
4. Prosedur, proses, dan sistem yang mendukung penyebaran informasi harus menarik pada dan mengintegrasikan berdasarkan kemampuan teknis dan harus menghormati otoritas dan tanggung jawab informasi yang sudah ada; dan
5. Negara Bagian dan pusat daerah perkotaan yang mewakili penyebaran informasi yang berharga berbagi sumber daya dan harus dimasukkan ke dalam kerangka penyebaran informasi nasional, yang mensyaratkan pusat-pusat penyebaran untuk mencapai tingkat dasar kemampuan untuk mengumpulkan, proses, berbagi, dan memanfaatkan informasi dan beroperasi dengan cara yang menghormati hak-hak privasi individu dan hak hukum lain yang dilindungi oleh undang-undang AS.³⁶³

Penyebaran Ide *Good Governance*

Pada tahun 1991, *U.S. Agency for International Development* (USAID) merilis sebuah kebijakan terperinci di bidang kebijakan demokrasi dan pemerintahan, yaitu memperjuangkan sistem politik terbuka, menghormati hak asasi manusia, dan sistem hukum dan peraturan yang tepat dan efisien dikelola berdasarkan proses hukum, mendorong resolusi damai dari konflik sosial, merangsang inisiatif individual dan dengan demikian dukungan pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam penyebaran gagasan-gagasan mengenai *good governance*, ideologi pembangunan yang dikembangkan oleh Barat (*the Western ideology of development*) mengasumsikan bahwa berbagai problem dunia yang dihadapi oleh Dunia Ketiga seperti kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan sosial dan tidak produktifnya dalam bidang industri, dapat diperbaiki melalui penerimaan atas keunggulan teknologi, kelembagaan, cara-cara produksi dan nilai-nilai Barat (Mark Turner and David Hulme 1997: 5-6)³⁶⁴. Salah satu nilai *good governance* tersebut adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. USAID sejak dekade 90an telah memelopori atau mendukung berdirinya lembaga-lembaga pengawasan jalannya pemerintahan yang mengkhususkan diri pada korupsi (*Anticorruption Agencies—ACAs*) di lebih dari 30 negara yang merupakan perwujudan pasal 6 Konvensi PBB Memerangi Praktek Korupsi (*UN Convention against Corruption*).

IMF, Bank Dunia dan PBB merupakan badan-badan internasional yang gencar mengkampanyekan *good governance* sebagai gerakan reformasi di Dunia Ketiga

³⁶³ National Strategy for Information Sharing. 2014. *Successes and Challenges in Improving Terrorism-Related Information Sharing, October 7*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

³⁶⁴ Turner, M. dan Hulme, D. 1997. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*, London: MacMillan

(Mohammad Jasim Uddin dan Laila Ashrafun Joya, 2007: 7)³⁶⁵, sebagaimana yang dipertegas oleh Harold James (2004: 59)³⁶⁶ bahwa hasil yang paling mencolok dari lingkungan politik baru tahun 1990-an adalah perhatian serius dari lembaga-lembaga Bretton Woods terhadap persoalan tata kelola pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan Dewan Eksekutif IMF pada bulan Agustus 1997, yang menyatakan bahwa 'IMF telah membantu negara-negara anggotanya dalam menciptakan sistem yang membatasi ruang lingkup untuk ad hoc pengambilan keputusan, untuk pencarian sewa, untuk perlakuan istimewa yang tidak diinginkan dari individu atau organisasi.' Ini pula yang menjadi dasar legitimasi bagi IMF untuk mencari informasi mengenai situasi politik dalam negara-negara anggotanya sebagai elemen esensial bagi penentuan implementasi kebijakan.

Kebijakan ini disusul oleh Bank Dunia yang menyusun kriteria *good governance* di tahun 1992. Menurut Bank Dunia³⁶⁷, ada empat (4) kriteria dari *good governance*, yakni:

1. *Manajemen Sektor Publik*: pemerintah harus mengelola sumber-sumber daya keuangan dan personalnya secara efektif melalui kebijakan anggaran, tata-pembukuan dan sistem pelaporan yang layak.
2. *Akuntabilitas*: para pejabat publik harus memikul tanggungjawab atas segala tindakan mereka. Aspek ini meliputi proses auditing dan akunting, desentralisasi, akuntabilitas dalam level mikro pada konsumen dan peranan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
3. *Kerangka hukum pembangunan*: harus terdapat seperangkat aturan yang ditegakkan secara tegas, berbagai konflik harus diselesaikan oleh lembaga hukum yang mandiri dan harus ada mekanisme perubahan atau perbaikan aturan tersebut bilamana sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dasarnya,
4. *Informasi dan Keterbukaan (transparansi)*: ada tiga area utama yang harus dikembangkan: (a) informasi atas efisiensi ekonomi, (b) keterbukaan sebagai metode pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dan (c) ketersediaan informasi kepada publik atas berbagai kajian dan perdebatan kebijakan (World Bank 1992).

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengidentifikasi lima atribut kunci dari pemerintahan yang baik sebagai berikut : 1) transparansi ; 2) tanggung jawab; 3) akuntabilitas; 4) partisipasi dan; 5) ketanggapan (dengan kebutuhan masyarakat).³⁶⁸ Menurut OHCHR, tata pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia

³⁶⁵ Uddin, M.J. dan Laila Ashrafun Joya, L.A. 2007. *Asian Affairs*, Vol. 29, No. 3:1-28.

³⁶⁶ James, Harold. 2004. A Historical Perspective on the International Monetary System. Dalam: Nauschnigg, F. dan Just, C. (eds.). *60 Years of Bretton Woods – The Governance of the International Financial System – Looking Ahead*. Proceedings of OeNB Workshops No. 3: 51-63.

³⁶⁷ World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington: World Bank.

³⁶⁸ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Development - Good Governance*, online: OHCHR

saling memperkuat satu sama lainnya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menyediakan satu set nilai untuk memandu karya Pemerintah dan politik lainnya dan aktor sosial. Mereka juga menyediakan seperangkat standar kinerja terhadap yang pelaku ini dapat bertanggung jawab. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia menginformasikan isi upaya pemerintahan yang baik: mereka dapat menginformasikan pengembangan dari legislatif kerangka, kebijakan, program, alokasi anggaran dan lainnya langkah-langkah. Namun, tanpa pemerintahan yang baik, hak asasi manusia tidak dapat dihormati dan dilindungi secara berkelanjutan.³⁶⁹

Bantuan Demokrasi

Berbagai kebijakan dan praktek globalisasi yang dilakukan AS jelas lebih mengedepankan keamanan nasionalnya sendiri serta bertujuan untuk mengajarkan pola-pola pelaksanaan demokrasi menurut nilai-nilai yang dianutnya kepada negara lain. Sekalipun proses demokratisasi merupakan urusan dalam negeri (*internal affairs*) di suatu negara, akan tetapi globalisasi telah menjadi salah satu faktor kekuatan pendorong dari luar (*external affairs*) yang cukup signifikan dalam memberi ruang bagi intervensi Amerika. Dalam konsepsi *American dreams*, intervensi tersebut dianggap sebagai kebutuhan bahkan kebaikan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh karena itu, intervensi tersebut dikemas dalam bentuk bantuan demokrasi (*democracy aid*).

Dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara kuantitatif maupun kualitatif dari 415 pidato dari tiga Presiden dan para Menteri Pertahanan mereka pasca-Perang Dingin, Castro Santos (2010: 157-191)³⁷⁰ mengidentifikasi pilar-pilar penting dalam doktrin kebijakan luar negeri Amerika yang membenarkan mengeksplor demokrasi bahkan jika perlu dengan menggunakan kekuatan militer –sebuah cara yang tentu saja merupakan cara yang paling sulit untuk dilakukan atas nama demokrasi. Pilar-pilar tersebut dapat dirumuskan dalam tiga prinsip dan satu misi Amerika pasca-Perang Dingin, yakni:

1. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi liberal Barat yang universal, yaitu, semua orang di dunia ingin menjadi demokratis. Demokrasi tidak terikat secara budaya. Oleh karena itu, promosi demokrasi adalah untuk kebaikan umat manusia.

<http://www.ohchr.org/english/issues/development/governance/>

³⁶⁹ Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights. 2007. *Good Governance Practices for the Protection of Human Rights*. New-York dan Jenewa: United Nations

³⁷⁰ Santos, Castro. MH, 2010. Exportação de Democracia na Política Externa Norte-Americana no Pós-Guerra Fria: Doutrinas E O Uso da Força. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 53(1): 157-191. Dikutip dari: ³⁷⁰ Santos, Castro. MH dan Teixeira, Ulysses Tavares. 2012. *The Essential Role Of Democracy In The Bush Doctrine*. Makalah untuk Diskusi Panel bertema “Studies about the United States–International Politics and Security,” Anpocs, Águas de Lindóia-SP, October 21-25, 2012. Dapat diakses pada: http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7980&Itemid=76

2. Demokrasi tidak saling menyerang. Oleh karena itu, mengeksport demokrasi berarti untuk mempromosikan perdamaian regional dan bahkan global. Di sini demokrasi terkait dengan keamanan regional dan global.
3. Promosi demokrasi membuat dunia lebih aman dan lebih makmur untuk Amerika Serikat. Dalam hal ini demokrasi terkait dengan keamanan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Misi: Amerika menganggap diri mereka sebagai memiliki misi untuk membawa kebebasan dan demokrasi bagi umat manusia.³⁷¹

Pemerintahan Bush tidak sekedar melanjutkan akan tetapi juga meluaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengintegrasikan *good governance* dengan demokrasi ke dalam pendekatan pembangunan. Pada tahun 2002, Badan Keamanan Nasional AS menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan pembangunan yang lebih besar melalui *New Millennium Challenge Account* ke negara-negara yang memerintah dengan adil, berinvestasi pada rakyatnya, dan mendorong kebebasan ekonomi (The National Security Strategy of the United States of America, 2002: 5). Bantuan demokrasi tersebut dapat berupa kontribusi dalam proses demokratisasi dalam bentuk asistensi di bidang teknis pada proses pemilihan umum, pengaturan hukum, penguatan lembaga legislatif dan yudikatif sebagai pengimbangan kekuasaan eksekutif, serta promosi pengorganisasian masyarakat sipil termasuk kebebasan pers (Sarantis Kalyvitis and Irene Vlachaki, 2008)³⁷².

Penyebaran Ide “Rogue States”

Istilah *Rogue States* (negara-negara nakal) pertama kali muncul sebagai akibat dari dinamika Perang Dingin. Dalam dunia bipolar, sebagian besar negara terkotak dalam dua blok besar yaitu Amerika Serikat atau Uni Soviet. Kedua negara superpower tersebut memandang negara-negara yang masuk dalam lingkaran sekutunya sebagai “sahabat terbaik kami” sedangkan negara-negara yang berada di lingkaran lainnya dipandang sebagai “cakar kucing dari musuh kita.” *Rogue States*, juga disebut dengan *Outlaw States*, *Backlash States*, atau *States of Concern*, sebenarnya tidak memiliki “definisi kamus” yang khusus. Istilah *rogue* secara umum didefinisikan sebagai “orang nakal tapi menyenangkan” atau “binatang liar besar dengan kecenderungan destruktif yang diusir atau hidup di luar kawanan atau gerombolannya” atau “seseorang atau hal yang rusak atau tak terduga” (Totman, 2009: 34).³⁷³

³⁷¹ Castro Santos, M.H. 2010. Exportação de Democracia na Política Externa Norte-Americana no Pós-Guerra Fria: Doutrinas e o Uso da Força. *Revista Brasileira de Política Internacional*. Vol. 53 No 1: 157- 191. Lihat: ³⁷¹ Castro Santos, M.H. dan Teixeira, UT. 2013. The Essential Role of Democracy in The Bush Doctrine: The Invasions of Iraq and Afghanistan. *Revista Brasileira de Política Internacional*. Vol. 56, No. 2

³⁷² Kalyvitis, S. dan Vlachaki, I. 2008. *Democratic Aid and the Democratization of Recipients*. Social Science Research Network.

³⁷³ Totman, Sally-Ann. 2009. *How Hollywood Projects Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan

Suatu negara (yang dianggap) *rogue* cenderung menjadi negara yang bertindak bertentangan dengan keinginan negara-negara besar lain, terutama negara adidaya, Amerika - dan terlibat dalam tindakan tidak dapat diterima oleh negara-negara besar (Amerika) tersebut. Penggolongan mana yang masuk ke dalam Rogue State sepenuhnya tergantung keputusan negara-negara Barat tersebut. Iran, Kuba, Libya, Iraq, Korea Utara, Sudan dan Suriah adalah negara-negara yang selama ini digolongkan ke dalam Rogue States atau Rogue Nations tersebut. Presiden George H.W. Bush memandang negara-negara Rogue States sebagai ancaman utama terhadap tatanan global, dan kebijakan luar negerinya bertujuan untuk mengubah perilaku negara-negara nakal, untuk menghilangkan rezim mereka yang menolak untuk bermain sesuai aturan dan kebijakan Gedung Putih. Beberapa negara nakal ini telah merespon ancaman perang dengan Washington dan sekutunya tersebut dengan mengembangkan satu instrumen yang memungkinkan negara yang terkecil dan paling miskin untuk melawan yang terkuat dan terkaya, yaitu senjata nuklir.

Ketika George W. Bush menjadi presiden pada tahun 2001, ia menunjuk Rumsfeld sebagai Menteri Pertahanan dan Wolfowitz sebagai salah satu wakil Menteri Pertahanan. Wakil Presiden Dick Cheney menunjuk Libby sebagai Kepala Stafnya. Keempat bawahan Bush ini, Rumsfeld, Wolfowitz, Libby, dan Cheney penyusun inti kebijakan neo-konservatif mengenai masalah keamanan nasional dalam pemerintahan Bush. Mereka bermaksud merevisi kebijakan pertahanan dan keamanan sebelumnya dan mendorong pemerintah AS menghadapi kaum militan Islam dan rezim-rezim musuh AS secara frontal. Dengan lantang mereka juga menyerukan agar demokrasi dan kapitalisme disebarkan di seluruh dunia. Di tahun 2001, Wolfowitz dan elit lainnya yang menganut neo konservatisme mendesak AS untuk segera menyerang Irak. Menteri Pertahanan Colin Powell justru menginginkan Bush menyerang Al Qaeda dan rezim Taliban di Afganistan terlebih dahulu. Di bulan Januari 2002, Bush mengidentifikasi Irak, Iran dan Korea Utara sebagai "sumbu atau kutub kejahatan (*the axis of evil*).



Presiden George H.W. Bush memandang negara-negara *Rogue States* sebagai ancaman utama terhadap tatanan global, dan kebijakan luar negerinya bertujuan untuk mengubah perilaku negara-negara nakal, untuk menghilangkan rezim mereka yang menolak untuk bermain sesuai aturan dan kebijakan Gedung Putih.
(Ilustrasi diambil dari www.pinterest.com)

Kebijakan memandang negara-negara yang tidak tunduk pada kehendak elit Washington sebagai *Rogue States* dilanjutkan oleh pemerintahan sesudah Bush. Meskipun berupaya untuk memberikan kesan yang lebih bersahabat kepada masyarakat internasional, tak urung juga Clinton masih membuat gerah beberapa negara yang selama ini dikenal kritis atau antipati terhadap Amerika. Pada tahun 1994, Clinton memperluas istilah 'daftar negara teroris' menjadi 'daftar negara brutal' (*rogue state*), yaitu negara yang dianggap Amerika dipimpin oleh rezim otoriter yang melanggar hak-hak asasi manusia, mendukung terorisme dan mengembangkan senjata pembunuh massal, seperti Irak, Iran, Korea Utara, Pakistan dan Syria. Clinton memandang negara-negara tersebut sebagai bahaya serius bagi stabilitas regional di seluruh sudut muka bumi (Garrison, 2004: 56).³⁷⁴ Anthony Lake, seorang Penasehat Keamanan Clinton, menyebut negara-negara yang masuk dalam *Backlash States* adalah negara-negara yang dipimpin oleh para diktator, dengan perilaku menyimpang dan agresif, ketidakcakapan berhubungan dengan dunia secara

³⁷⁴ Garrison, *Ibid.*

konstruktif dan senang menggunakan senjata perusak massal (WMD- *weapon massive destruction*) (Litwak, Robert S. 2000: 2).³⁷⁵

Baik Bush maupun Clinton jelas menggunakan kategori Rogue States ini sebagai alasan untuk memperkuat hegemoni AS di pentas dunia (Miles, 2013: 5)³⁷⁶. Kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan kedua pemerintahan tersebut semata-mata dilakukan demi menjaga kepentingan dan keamanan nasional Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin. Negara-negara lain seakan dipaksa untuk menghindari dari klasifikasi sebagai Rogue States jika tidak ingin bernasib buruk seperti Irak, Libya dan negara-negara 'bandel' lainnya.

Penyebaran Ide Negara Gagal: “Kartu Pos dari Neraka”

Indeks Negara Gagal, sebagaimana yang diumumkan oleh *The Fund for Peace* tahun ini, tidak biasanya mendapatkan sorotan tajam para ahli dan praktisi politik di tanah air. Sekalipun sesungguhnya penyusunan indeks tersebut telah biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, namun hasil survei lembaga riset di Washington tersebut kali ini memang cukup menyentak banyak pihak, terutama karena menempatkan Indonesia pada rangking yang cukup kritis. Bila di tahun kemarin RI menduduki peringkat ke 64, pada tahun ini merosot ke rangking 63 di antara 177 negara lain di dunia dengan score 80, 6.

Sejauhmana kesahihan metode dan hasil riset tersebut sesungguhnya tidak terlalu penting dipersoalkan, karena sebenarnya yang harus diperhatikan secara cermat adalah apa motivasi dan implikasi yang diharapkan oleh lembaga penelitian tersebut. Keberadaan lembaga penelitian yang terletak di jantung negara Amerika Serikat ini menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Demikian pula, berbagai kejadian yang mewarnai hubungan unilateral antara negara-negara di dunia berkembang dengan negara-negara Barat menjadi faktor kunci dalam membaca hasil riset lembaga ini.

John W. Warnock (2008: 21)³⁷⁷ mengingatkan bahwa Indeks Negara Gagal tidak lain merupakan cara Barat untuk melakukan pembenaran mencampuri kedaulatan sebuah negara. “Ketika sebuah negara dinyatakan sebagai Negara Gagal, pada saat itu terbukalah keran lebar bagi kekuatan-kekuatan Barat untuk masuk mengintervensi negara tersebut secara militer melalui kekuatan NATO atau PBB berdasarkan resolusi Dewan Keamanan,” tulisnya. Richard Devetak (2008)³⁷⁸ juga menegaskan bahwa konsepsi ini berangkat dari kepentingan negara-negara di kawasan Utara untuk tetap mempertahankan perbedaannya

³⁷⁵ Litwak, Robert S. 2000. *Rogue States and U.S. Foreign Policy: Containment After the Cold War*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

³⁷⁶ Miles, Alex. 2013. *US Foreign Policy and the Rogue State Doctrine*. New York: Routledge

³⁷⁷ Warnock, John W. 2008. *Creating a Failed State, the US and Canada in Afghanistan*, Black Point: Fernwood Pub. Co

³⁷⁸ Devetak, Richard. 2008. *Failures, Rogues and Terrorists: States of Exception and The North/South Divide*. Dalam: Bellamy, Alex J. Bleiker, Roland., Davies, Sara E. dan Devetak, Richard (Ed.), *Security and the War on Terror*. London, England: Routledge: 125-141

dengan negara-negara di belahan dunia selatan. Bila negara-negara di kawasan selatan tersebut berada dalam situasi yang semakin mencemaskan, mereka akan digolongkan sebagai negara gagal. Namun bila semakin membahayakan, akan dicap sebagai negara liar (*rogue state*) yang patut diberi hukuman dan pelajaran.

Konsep 'Negara Gagal' telah menjadi isu menghangat dalam kajian hubungan internasional kontemporer yang dilukiskan sebagai '*a remarkable odyssey from the periphery to the very center of global politics*'³⁷⁹. Elizabeth Dickinson (*Foreign Policy*, Juni 2011) melukiskan berita negara yang diumumkan sebagai negara gagal seakan-akan "kartu pos dari neraka". Gambaran ini menunjuk kepada negara-negara yang dianggap gagal menyejahterakan warga negaranya. Artinya, negara-negara tersebut ibarat "neraka", sebuah tempat yang tidak sekedar tidak layak huni, tetapi juga sangat menyiksa siapapun yang berada di dalamnya.

Dalam Indeks 2012, ada 13 negara yang digolongkan sebagai "*neraka*" tersebut: Somalia, Chad, Sudan, Kongo, Haiti, Zimbabwe, Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Iraq, *Cote d'Ivoire*, Guinea, Pakistan dan Yaman. Sebagian besar wilayah negara tersebut berada di kawasan Afrika dan Asia. Sebanyak 11 negara digolongkan sebagai "sangat stabil": Republik Ceko, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Portugal, Slovenia, Perancis, Belgia dan Jerman. Yang menarik, kesemua negara sangat stabil ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan NATO. Dengan kata lain, "neraka" itu bila anda berjauhan atau bermusuhan dengan Amerika, sedangkan "syurga" adalah bila anda sangat bersahabat bahkan menjadi pendukung utama hegemoni AS.

Melalui konsep ini, negara-negara Barat yang notabene menjadi poros kekuatan neo liberalisme bermaksud mengembangkan mekanisme dan instrumen internasional untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya. Masyarakat internasional tentu masih ingat bagaimana para Presiden AS telah menggunakan strategi ini pada saat akan memulai peperangan terbuka dengan negara-negara yang digolongkannya sebagai 'negara gagal'. Dengan menyebut negara-negara tersebut sebagai 'negara gagal', Bush Senior menekan lembaga-lembaga dan dunia internasional untuk mendukung tindakannya melakukan intervensi secara militer ke Irak tahun 1991; Clinton membombardir Somalia, Haiti, Yugoslavia, Kosovo dan Sudan; Bush Yuniior dan Obama melanjutkan strategi yang tidak jauh berbeda.

Dalam Ilmu Pengkajian Amerika, kategorisasi semacam ini tidak lain merupakan strategi meluaskan dominasi negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat ke seluruh dunia. Terlepas dari memang masih banyak terdapat problematika kemanusiaan di berbagai negara di Asia dan Afrika, kategorisasi ini telah melupakan sumbangan kolonialisasi dan imperialisme dunia Barat dalam melemahkan kekuatan negara-negara di dunia ketiga. "Kartu pos dari neraka" yang memotret berbagai ketimpangan sosial dan

³⁷⁹ Foreign Policy, 2005. Dapat diunduh pada: <http://foreignpolicy.com/2009/10/22/the-failed-states-index-2005/>

ketidakstabilan politik Asia dan Afrika tersebut juga telah menutup sebuah fakta: hal yang sama dalam berbagai skala terjadi pula di negara-negara Barat.

X

Karakter Budaya Hegemoni Amerika Serikat

Dalam hal sifat dan karakter hegemoni AS, penulis berbeda pendapat dengan G. John Ikenberry dan Andrew Moravcsik. Kedua ahli hubungan internasional ini mencatat bahwa secara keseluruhan hegemoni dapat ditandai dengan ciri-ciri penuh keenganan (*reluctant*), keterbukaan (*open*), dan terlembaga (*highly institutionalized*); dimana dijelaskan bahwa keenganan terlihat dalam tidak adanya dorongan yang kuat untuk langsung mendominasi atau mengelola negara-negara lemah dan menengah dalam tatanan Amerika. Sedangkan pengertian hegemoni AS yang bersifat terbuka adalah dikarenakan Amerika Serikat adalah negara demokrasi besar dan terdesentralisasi, yang menyediakan transparansi dan kesempatan hak suara untuk negara-negara lain dalam tatanannya. Hal ini menciptakan kemungkinan untuk akses politik, insentif untuk timbal balik, dan potensi berarti bagi negara-negara mitra untuk mempengaruhi cara kekuatan hegemonik dilaksanakan. Adapun hegemoni AS yang bersifat sangat kuat dalam melakukan pelebagaan, karena Amerika Serikat juga telah berupaya untuk membangun tatanan hegemoniknya terhadap lembaga-lembaga internasional dan antar pemerintah secara ketat (Ikenberry dan Moravcsik. 2004: 7).

Penilaian Ikenberry dan Moravcsik bahwa hegemoni AS bersifat *reluctant* tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa luasnya pengaruh AS terutama di Kawasan Eropa dan Asia sebenarnya merupakan kehendak dari para elit politik di kawasan tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa hegemoni AS di kawasan ini berbentuk “*empire by invitation*”. Tesis inilah yang menjelaskan mengapa AS, oleh beberapa ahli seperti John Ikenberry, Daniel Deudney, Andrew Hurrell dan John Agnew, lebih tepat dilihat sebagai negara yang menjalankan kekuasaan global dalam bentuk hegemoni dan bukan dalam bentuk imperium. Namun, benarkah hegemoni AS yang bersifat *reluctant* diasumsikan sebagai kebutuhan negara yang dihegemoni, dan bukan karena ambisi AS yang mau menghegemoni?

Douglas Robinson (1997: 31-32)³⁸⁰ dalam bukunya *Translation and Empire* menyimpulkan empat garis besar karakter budaya hegemonik sesuai pendapat Jacquemond (1992: 139)³⁸¹, yaitu: (1) sebuah budaya yang dominan akan selalu menerjemahkan budaya hegemonik sebagai budaya yang lebih luas dan lebih tinggi

³⁸⁰ Robinson, D. 1997. *Translation and Empire: Postcolonial Approaches Explained*. Manchester: St. Jerome Publishing.

³⁸¹ Jacquemond, R. 1992. *Translation and Cultural Hegemony: The Case of French/Arabic Translation*. Dalam: Lawrence Venuti (ed.), *Rethinking Translation*, Routledge, London: 139-158.

daripada budaya yang didominasi; (2) bila budaya hegemonik tersebut diterjemahkan oleh budaya yang didominasi maka terjemahan tersebut cenderung menggambarkan budaya hegemonik sebagai sesuatu yang sulit, misterius, esoterik dan memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi untuk menafsirkannya; sedangkan budaya yang mendominasi membaca budaya hegemonik sebagai sesuatu yang bisa diakses oleh semua orang; (3) budaya hegemonik akan menganggap hanya karya-karya penulis dari budaya yang mendominasi yang punya makna; dan (4) pengarang dalam budaya yang mendominasi cenderung menulis terjemahan dalam bahasa menghegemoni yang tak jarang mengandung nilai-nilai yang *stereotype*.

Politik Amerika Serikat sejak dekade 60an telah ditandai dengan munculnya watak 'konservatisme' yang mewarnai begitu kuat proses pemilihan Kongres ke 104 pada tahun 1994. Pasca Perang Dingin, nilai-nilai konservatisme tersebut berkembang menjadi '*new conservatism*' dimana unilateralisme telah meminggirkan peranan PBB sebagai lembaga sah untuk mengatur dan menjaga perdamaian dunia (Leonie G. Murray, 2008: 22-23)³⁸². Unilateralisme ini diluncurkan secara terbuka oleh George HW Bush sejak masa awal pemerintahannya, yang menjadikan globalisasi dan Amerikanisasi sebagai mesin sekaligus senjata andalannya. Di depan Sidang majelis Umum PBB 1 Oktober 1990, Bush menggambarkan pemandangan dunia pasca Perang Dingin dalam ilustrasi sebagai berikut:

Saya melihat dunia yang batas-batasnya luas terbuka, perdagangan terbuka dan, yang paling penting, pikiran terbuka; dunia yang merayakan warisan bersama milik semua orang di dunia, rasa bangga tidak hanya di kampung halaman atau tanah air tetapi dalam kemanusiaan itu sendiri. Saya melihat dunia tersentuh oleh semangat seperti yang ada pada Olimpiade, tidak didasarkan pada kompetisi yang didorong oleh rasa takut tapi mencari sukacita dan kegembiraan dan pencarian yang benar untuk keunggulan. Dan saya melihat dunia di mana demokrasi terus mendapatkan teman baru dan mengkonversi musuh lama dan di mana Amerika - Utara, Tengah, dan Selatan - dapat memberikan model untuk masa depan seluruh umat manusia: belahan benar-benar demokratis pertama di dunia. Dan saya melihat membangun dunia pada model baru yang muncul dari persatuan Eropa, bukan hanya Eropa tetapi seluruh dunia yang satu utuh dan bebas merdeka.

Pidato ini dapat dijadikan sebagai bahan penting untuk menggambarkan bagaimana sifat dan karakter budaya hegemonik AS yang dikembangkan oleh Bush Senior. *Pertama*, budaya mengklaim segala nilai-nilai yang baik (*good values*) sebagai milik bangsa Amerika (*claim of the truth*). Budaya inilah yang menjadi dasar kebijakan untuk melakukan Amerikanisasi ke seluruh bangsa dan negara lain di dunia (Simak kalimat "...*Dan saya melihat dunia di mana demokrasi terus mendapatkan teman baru dan mengkonversi musuh lama dan di mana Amerika - Utara, Tengah, dan Selatan - dapat memberikan model untuk masa depan seluruh umat manusia..*). *Kedua*, budaya yang memaksa seluruh negara dan bangsa di dunia untuk membuka diri pada masuknya segala produk ekonomi dan budaya dari Amerika Serikat (*obstrusive hegemonic culture*) (perhatikan kalimat "...*Saya melihat*

³⁸² Murray, L. G. 2008. *Clinton, Peacekeeping, and Humanitarian Intervention: Rise and Fall of a Policy*. New York: Routledge.

dunia yang batas-batasnya luas terbuka, perdagangan terbuka dan, yang paling penting, pikiran terbuka). Budaya inilah yang dapat disebut sebagai dasar untuk menjalankan imperialisme budaya Amerika Serikat ke seluruh dunia melalui mesin-mesin globalisasi.

Ketiga, budaya yang menghinoptis atau mendramatisir kenyataan ke dalam bentuk mimpi-mimpi sehingga negara dan bangsa lain di dunia merasa seakan-akan mereka sedang berada di dalam situasi yang menyenangkan (*hypnotizing hegemonic culture*). Budaya inilah yang digunakan untuk membius kesadaran bangsa dan negara di dunia untuk menerima hegemoni AS tanpa melakukan perlawanan bahkan merasa bangga atas keadaan tersebut (perhatikan kalimat “...*Saya melihat dunia tersentuh oleh semangat seperti yang ada pada Olimpiade, tidak didasarkan pada kompetisi yang didorong oleh rasa takut tapi mencari sukacita dan kegembiraan dan pencarian yang benar untuk keunggulan...*”).

Selain ketiga budaya yang dapat dilihat melalui Metode *Political Speech Analysis* di atas, Bush juga mengembangkan satu karakter budaya hegemonik lainnya, yaitu budaya untuk mengasingkan negara-negara atau pemimpin politik yang tidak disukainya atau dianggap sebagai negara-negara yang masih terbelakang dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (*culture of isolation*), seperti yang dilakukannya kepada Iran dan Irak di pertengahan tahun 1990an. Budaya isolasi ini kemudian akan diteruskan pula oleh pemerintahan sesudahnya khususnya pada era Clinton dan George W. Bush.

Dalam konteks pembahasan hegemoni AS di Malaysia, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Bush Senior belum cukup banyak dapat digunakan sebagai bukti adanya hegemoni AS secara langsung. Akan tetapi, melalui Analisis Struktural Peristiwa (*Event Structural Analysis*) dapat diketahui bahwa dari keempat budaya hegemonik di atas, terdapat dua budaya hegemonik yang diterapkan oleh hegemoni Amerika, yaitu *claim of the truth* dan *hypnotizing hegemonic culture*; sedangkan temuan-temuan penelitian pada masa pemerintahan Clinton mengindikasikan secara kuat betapa AS tidak tinggal diam ketika Malaysia, dalam hal ini khususnya Mahathir, mencoba membangun kawasan Asia Pasifik sebagai sebuah kawasan ekonomi yang kosong dari pengaruh dan kekuasaan Amerika Serikat. Dengan kata lain, langkah-langkah hegemonik akan selalu diambil bila penolakan terhadap hegemoni AS.

Budaya hegemonik Amerika yang tercermin dalam berbagai kebijakan presiden Clinton dilukiskan dengan sangat jelas oleh Jack Godwin (2009: 26) bahwa “Clinton ingin mengembalikan 'mimpi' Amerika tentang kesempatan dan 'nilai' Amerika tentang tanggung jawab; dia ingin membawa orang-orang Amerika bersama-sama sehingga semua bisa pergi ke abad baru bersama-sama.” Clinton memberikan harapan bagi banyak orang Amerika, sebagaimana yang sering tercermin dalam pidato-pidato politiknya, untuk memberikan warna Amerika baru dengan istilah ‘abad yang baru (*the new century*)’, sebuah istilah yang tidak hanya merujuk kepada dimensi waktu tetapi juga tatanan nilai.

Budaya memberi harapan (*culture of hope*) dalam diri Clinton ini semakin jelas pada saat Clinton menyusun sebuah buku berjudul “*Between Hope and History: Meeting*

America's Challenges for the 21st Century" (terbit pertama kali tahun 1996) yang menguraikan tiga hal pokok (*triumvirate*) filsafat Demokrat Baru Clinton, yaitu: peluang (*opportunity*), tanggungjawab (*responsibility*) dan kesatuan masyarakat (*community*). Tidak mengherankan bila Clinton juga mendapat julukan sebagai "*a Baby Boomer Democratic president Bill Clinton, the man from Hope, Arkansas*" (Nancy Snow, 2009³⁸³: 5). Kata *Hope* di situ tidak sekedar dimaksudkan untuk merujuk pada pengertian fisik saja, —ia lahir di kota Hope di negara bagian Arkansas tanggal 19 Agustus 1946—; melainkan juga dalam makna simbolis yang dimaksudkan sebagai penggambaran kharismatik pribadinya.

Berbeda dengan Bush Senior, Bill Clinton lebih mengembangkan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai '*multilateralism, cooperative security, humanitarian intervention and peacekeeping*'. Kebijakan tersebut antara lain dirumuskan ke dalam sebuah dokumen berjudul "*A National Security Strategy of Engagement and Enlargement*" (Februari 1996). Salah satu butir pernyataan dalam dokumen tersebut berbunyi:

Jika kepentingan keamanan nasional kita terancam kita akan, seperti yang selalu Amerika lakukan, menggunakan diplomasi ketika kita bisa, tapi kekuatan jika kita harus. Kita akan bekerjasama dengan di luar kita jika kita bisa, tapi jika terpaksa kita siap sendirian ketika kita harus. Kami menyadari, bagaimanapun, bahwa sementara kekuatan bisa saja mengalahkan agresor, namun hal itu tidak akan dapat memecahkan masalah yang lebih mendasar.

Pernyataan dalam dokumen yang dikutip di atas jelas menunjukkan prinsip kebijakan luar negeri Clinton yang cenderung menghindari penggunaan *hard power* (...sementara kekuatan bisa saja mengalahkan agresor, namun hal itu tidak akan dapat memecahkan masalah yang lebih mendasar ...). Pada bagian lain dari dokumen tersebut ditegaskan pula bahwa: *Bangsa kita tidak pernah lagi bisa mengisolasi diri dari perkembangan global. Pembaharuan dalam negeri tidak akan berhasil jika kita gagal untuk terlibat di luar negeri untuk membuka pasar luar negeri, mempromosikan demokrasi di negara-negara kunci dan kontra dan membendung ancaman yang muncul*. Melalui statement ini, Clinton menunjukkan pilihannya untuk menjalankan strategi budaya kerjasama multi lateral (*a culture of multi lateral cooperation*). Dalam prakteknya, budaya ini cenderung mempertahankan hubungan koordinasi antar negara yang dihegemoni berdasarkan prinsip-prinsip perilaku umum (*generalized principle conduct*), yakni prinsip-prinsip yang menentukan perilaku yang tepat untuk sekelompok tindakan, tanpa memperhatikan kepentingan partikularistik dari sekelompok golongan atau urgensi strategis yang mungkin ada dalam setiap kejadian tertentu (John Gerrard Ruggie, 1993: 11).³⁸⁴

Melalui prinsip-prinsip umum ini, Clinton membangun berbagai komitmen secara kelembagaan dengan badan-badan dan rezim internasional, khususnya PBB. Bila Bush kerap mengedepankan peranan AS dan mengenyampingkan PBB, pemerintahan Clinton

³⁸³ Snow, Nancy. 2009. Rethinking Public Diplomacy. Dalam: Snow, N. dan Taylor, P.M. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York: Routledge

³⁸⁴ Ruggie, J. G. (ed.). 1993. *Multilateralism Matters: the Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York: Columbia University Press.

cenderung menjadikan PBB sebagai alat yang penting dan mitra simultan dalam perjuangan untuk meracik dunia pasca-Perang Dingin yang damai dan demokratis (Leonie G. Murray, 2008: 29)³⁸⁵. Dengan dibantu oleh tim kebijakan luar negerinya, —antara lain Anthony Lake, Madeleine Albright dan Warren Christopher—, Clinton berupaya keras menarik simpati masyarakat internasional yang sempat mengalami ketegangan selama masa pemerintahan Bush sebelumnya.

Untuk melihat perbedaan visi kedua pemimpin ini kiranya menarik untuk menganalisis perbedaan pandangan keduanya sebagaimana yang terjadi pada Debat Kandidat Presiden AS tanggal 11 Oktober 1992 di St. Louis. Dalam sesi isu-isu luar negeri (*foreign affairs*), sang moderator, Jim Lehrer, meneruskan pertanyaan yang semula ditujukan oleh Sander Vanocur untuk kandidat presiden independen Ross Perot, namun kemudian diteruskan oleh moderator kepada Clinton dan Bush. Isi pertanyaan tersebut adalah: “... dalam situasi pasca-perang dingin, apa yang dapat mengesampingkan kepentingan nasional AS? Dan apa yang dapat AS lakukan, dan apa yang bisa negara ini tawarkan untuk dilakukan demi membela kepentingan nasional tersebut?” Pertanyaan dari Sander Vanocur —salah seorang dari tiga jurnalis yang diundang sebagai penanya— ini kiranya cukup strategis untuk menggali bagaimana pandangan kedua pemimpin AS ini dalam hubungan antara peranan AS pada percaturan global pasca Perang Dingin dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional Amerika. Dalam hal ini Clinton memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam rangka menjaga Amerika sebagai bangsa terkuat di dunia, kita perlu beberapa program keberlanjutan (kontinuitas) dan beberapa perubahan. Ada tiga tantangan mendasar. Pertama-tama, dunia masih menjadi tempat yang berbahaya dan ketidakpastian. Kami membutuhkan militer baru dan kebijakan keamanan nasional yang baru sama dengan tantangan era pasca-perang dingin; kekuatan permanen militer yang lebih kecil, tapi satu yang lebih gesit (*mobile*), terlatih, dengan peralatan teknologi tinggi. Kita perlu melanjutkan negosiasi untuk mengurangi persenjataan nuklir di Uni Soviet, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Kita perlu berhenti proliferasi ini senjata pemusnah massal. Kedua, kita harus menghadapi bahwa di dunia ini keamanan ekonomi adalah seluruh banyak keamanan nasional. Dolar kita di semua waktu rendah terhadap beberapa mata uang asing. Kita menjadi lemah di dunia. Kita harus membangun kembali kekuatan Amerika di dalam negeri sendiri. Akhirnya, kita seharusnya dapat mempromosikan impuls demokrasi di seluruh dunia. Negara-negara demokrasi adalah mitra kami. Mereka tidak pergi berperang satu sama lain. Mereka teman-teman terpercaya di masa depan. Keamanan nasional, kekuatan ekonomi, demokrasi.

Adapun jawaban yang disampaikan oleh Bush terhadap pertanyaan dari moderator tersebut adalah sebagai berikut:

Kita masih menjadi bahan kecemburuan dunia dalam hal militer; tidak ada keraguan tentang itu. Kita masih menjadi bahan kecemburuan dalam hal ekonomi kita, terlepas dari kesulitan yang sedang kita alami; tidak ada keraguan juga tentang itu. Ekspor kita secara dramatis

³⁸⁵ Murray, L. G. 2008. *Clinton, Peacekeeping, and Humanitarian Intervention: Rise and Fall of a Policy*. New York: Routledge.

meningkat. Saya harus katakan kepada Tuan Perot, Saya bisa mengerti mengapa Anda mungkin telah kehilangan itu karena ada begitu banyak daya tarik oleh hal-hal sepele, tapi saya telah membuat kesepakatan dengan Boris Yeltsin untuk menghilangkan, menyingkirkan sepenuhnya, senjata yang paling menghancurkan (*the most destabilizing weapons*) dari semua, SS - 18, rudal balistik antarbenua yang besar. Maksud Saya, hal itu sudah kita kerjakan. Dan berkat Tuhan hal itu terlaksana, karena orang tua dari anak-anak muda di sekitar sini pergi tidur di malam hari tanpa takut ada perang nuklir. Kami telah membuat kemajuan dramatis. Jadi kita punya militer yang baik-pertanyaan yang mengatakan mendapatkan militer baru, mendapatkan yang terbaik di dunia- kita punya itu, dan mereka menjaga perdamaian. Mereka dihormati di seluruh dunia, dan kami lebih dihormati karena cara kita memperlakukan diri kita sendiri.

Secara sekilas tampak seakan-akan tidak ada perbedaan prinsipil dalam pandangan kedua aktor politik ini, akan tetapi bila kita analisis bangunan logika yang mendasari pandangan-pandangan tersebut akan jelas kelihatan bahwa keduanya mempunyai paradigma kebijakan luar negeri yang berbeda:

1. Pernyataan Clinton menyiratkan suatu kritik mendasar atas gaya kepemimpinan global Bush yang cenderung dianggap arogan dan agresif secara militer oleh banyak negara di dunia, sehingga ia menggunakan tekanan pada pilihan frase "*a smaller permanent military force*"; sedangkan Bush cenderung memilih kewibawaan dan kedigdayaan ekonomi dan militer di atas seluruh bangsa di dunia melalui pilihan ungkapan "*the envy of the world*".
2. Clinton cenderung mengedepankan strategi dan diplomasi budaya sebagai kebijakan luar negerinya melalui ungkapan "*they're reliable friends in the future*"; sementara Bush tetap tak beranjak dari semangatnya untuk memimpin dunia dengan menyebut kekuatan militer sebagai "*respected around the world, and we are more respected of the way we have conducted ourselves.*"
3. Clinton dengan tegas menyebutkan bahwa dasar utama keamanan nasional AS adalah ketahanan ekonomi, sementara Bush sama sekali tidak menyinggung pilihan utamanya atas apa yang paling penting bagi kepentingan nasional AS.

Sekalipun keduanya mempunyai perbedaan paradigma kebijakan luar negeri, akan tetapi pada prinsipnya kedua paradigma tersebut tetap sama-sama ditujukan bagi upaya peneguhan hegemoni AS pada perbatasan global pasca Perang Dingin, terutama dalam kebijakan ekonomi neoliberal. Dukungan Bush dan Clinton pada tatanan ekonomi dunia yang berpusat pada kekuasaan hegemonik AS yang dijalankan melalui strategi globalisasi merupakan implementasi dari karakter budaya neoliberalisme yang bekerja melalui lembaga-lembaga moneter internasional. Neokonservatisme dan Neoliberalisme yang masing-masing menjadi ideologi Bush dan Clinton mewujud dalam bentuk hegemoni pengaruh AS dalam lembaga-lembaga keuangan dunia bahkan kepada kelompok negara 8 serta para elit bisnis dan politik secara global. Lembaga-lembaga internasional, para elit politik maupun perusahaan transnasional, para intelektual, dan kelompok negara-negara maju merupakan sumber kekuasaan baru yang disebut sebagai '*soft power*' yang memiliki

kapasitas dan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat dunia melalui ide-idenya maupun berbagai regulasi yang diterbitkannya. Dengan demikian strategi AS dalam menanamkan pengaruh hegemoniknya ke seluruh dunia mendapatkan justifikasi dan legitimasi secara luas.

XI

Perlawanan terhadap Budaya Hegemonik Amerika

Penolakan terhadap ‘Amerika’ di seantero dunia berkembang semakin meluas dan mendalam, tidak saja bagi kebijakan politik luar negerinya, tetapi juga dalam gaya hidup, — meskipun produk-produk Amerika semakin luas diterima (Kohut dan Stokes, 2006: 25)³⁸⁶. Dalam Laporan Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (2004: 119)³⁸⁷ terungkap bahwa AS semakin berat menghadapi opini publik dunia yang secara dramatis berubah sejak berakhirnya Perang Dingin sehingga Amerika Serikat dapat semakin dihadapkan dengan tantangan untuk mengelola hubungan dengan Eropa, Asia, Timur Tengah dan lain-lain, meniadakan ancaman tunggal dan menyeluruh untuk membangun konsensus. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan diri bahwa sesudah berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat justru harus berhadapan dengan tuntutan sekaligus berbagai tuduhan yang datang dari seluruh penjuru dunia.

Kedigdayaan AS sebagai satu-satunya kekuatan superpower jelas mengundang rasa tidak nyaman bagi banyak orang bahkan ahli sekalipun. Beberapa pengamat menyebut bahwa kehebatan AS tersebut tidak akan dapat bertahan lama. Cepat atau lambat, sang penantang pasti akan muncul (Niall Ferguson, 2004b: 32).³⁸⁸ American Studies, tidak dapat tidak, harus menelaah topik ini seiring dengan telaah mengenai identitas, idealisme dan produk-produk budaya bangsa Amerika.

Sentimen Anti-Amerika

Budaya hegemonik yang dikembangkan melalui ‘*Americanism*’ kerap kali disandingkan dengan lawannya, yaitu ‘*Anti-Americanism Sentiment*’, bahkan sentimen tersebut dianggap lahir bersamaan dengan munculnya negara Amerika Serikat itu sendiri (McKenzie, 2005: 1)³⁸⁹. Sentimen Anti Amerika berkembang pada masa sebelum tahun 1965, selama Perang Dingin hingga pasca Perang Dingin (Gienow-Hecht, 2006: 1068)³⁹⁰, yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk kritik, resistensi atau perlawanan terhadap hegemoni (*counter-hegemony*) AS. Seperti diutarakan oleh Sardar dan Davies (2004:

³⁸⁶ Kohut, A. dan Stokes, B. 2006. *America against the World*. New York: Henry Holt and Company

³⁸⁷ National Intelligence Council. 2004. *Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project*. Washington, DC: NIC

³⁸⁸ Ferguson, Niall. 2004b. A World Without Power. *Foreign Policy*. Washington: The Foreign Policy Group: 32-39

³⁸⁹ McKenzie, M. T. 2005. *Defeating Anti-Americanism*. Report. Pennsylvania: USAWC Strategy Research Project, U.S. Army War College, Carlisle Barracks.

³⁹⁰ Gienow-Hecht, J. C. E. 2006. Always Blame the Americans: Anti-Americanism in Europe in the Twentieth Century. *The American Historical Review*. Vol. 3, No. 4: 1067- 1091.

194)³⁹¹ bahwa sebenarnya tidak seorangpun membenci bangsa Amerika, tetapi yang mereka benci adalah 'Amerika', entitas politik yang didasarkan pada kekerasan otoriter, standar ganda, obsesi dan kepentingan diri sendiri, dan kenafian sejarah yang menyamakan Amerika dengan Dunia.

Sentimen Anti Amerika merupakan sebuah kecenderungan yang tidak bersahabat atau menyebarkan kebencian kepada Amerika Serikat, yang mengarahkan individu-individu untuk menafsirkan berbagai tindakan Amerika melalui pandangan dan prasangka negatif yang telah melekat didalam benak individu sebelumnya, tanpa mempelajari apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sentimen tersebut muncul dari keyakinan bahwa ada kesalahan yang bersifat sangat mendasar dari Amerika. Anggapan yang cenderung bermusuhan ini mengejawantahkan dirinya sendiri ke dalam segi keyakinan, sikap dan retorika, yang bisa saja mempengaruhi atau bisa juga tidak berpengaruh pada perilaku politiknya (Meunier, 2005: 3)³⁹².

Definisi lain disampaikan oleh Tai, Peterson, dan Gurr (1973: 470)³⁹³ sebagai berikut: Sentimen anti Amerika adalah segala bentuk tindakan, pernyataan atau peristiwa secara kolektif atau individual dalam suatu negara, sebagai suatu bentuk gerakan atau hasil aksi untuk memprotes, mengkritik atau memberikan sanksi secara negatif terhadap pemerintah AS atau warga negaranya. Sementara itu Smith dan Wertman (1992:189)³⁹⁴ memberikan perspektif unik dengan mengatakan bahwa Sentimen Anti Amerika (*Anti-Americanism*) sebagai kebencian atau sikap permusuhan yang lebih mendalam, lebih luas dan lebih mendasar terhadap negara AS, bukan sekedar penolakan terhadap beberapa kebijakannya. Demikian juga secara umum, Katzenstein dan Keohane (2005: 6)³⁹⁵ melihat Sentimen Anti-Amerika sebagai sebuah kecenderungan kejiwaan untuk berpegang teguh pada pandangan yang negatif terhadap bangsa dan negara Amerika Serikat.

Anti Amerikanisme dapat dipandang sebagai suatu kecenderungan untuk membuat permusuhan terhadap Amerika Serikat dan masyarakat Amerika, dorongan kritis tanpa henti terhadap tradisi, nilai-nilai dan lembaga sosial, ekonomi, dan politik Amerika; yang diikuti oleh keengganan untuk menerima budaya Amerika khususnya dan pengaruhnya luar negeri, sering juga merendahkan atau menginjak karakter nasional Amerika (atau apa yang diduga sebagai karakter Amerika) dan ketidaksukaan terhadap orang Amerika, etiket bergaul, perilaku, gaun, dan sebagainya; penolakan kebijakan luar negeri Amerika dan keyakinan dalam keganasan dari pengaruh dan kehadiran Amerika di mana saja di dunia

³⁹¹ Sardar, Z. dan Davies, M. W., 2004. *Why Do People Hate America?* Cambridge: Icon Books Ltd.

³⁹² Meunier, S. 2005. *Anti-Americanisms in France*. Paper. Princeton: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.

³⁹³ Tai, C., Peterson, E. J. dan Gurr, T.R. 1973. Internal Versus External Sources of Anti-Americanism. *Journal of Conflict Resolution* 17.3: 455-84.

³⁹⁴ Smith, Steven K. dan Wertman, Douglas A. 1992. Redefining U.S.-West European Relations in the 1990s: West European Public Opinion in the Post-Cold War Era. *Political Science and Politics*, vol. 25, no. 2: 188-195.

³⁹⁵ Katzenstein, Peter J. dan Robert O. Keohane. 2005. Varieties of anti-Americanism: A Framework for Analysis. Dalam: Katzenstein, Peter J. dan Robert O. Keohane (eds.). *Anti-Americanisms in world politics*. Ithaca: Cornell University Press

(Hollander, 1992: 339)³⁹⁶. Selain alergi terhadap hegemoni, Sentimen tersebut juga berbentuk 'rasa takut atau khawatir atas proses Amerikanisasi' (*fear about Americanisation*) (Strinati, 2004: 7)³⁹⁷.

Dengan menggunakan argumen yang hampir sama dengan Hollander, Spiro (1988: 122)³⁹⁸ memandang Sentimen Anti Amerika sebagai ketidakmengertian atau penolakan atas prosedur konstitusi dan demokrasi substantif dari Amerika Serikat.

Selanjutnya secara umum, Nairn (2002: 103-104)³⁹⁹ mengelompokkan Sentimen Anti Amerika ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: a) Kebencian dan permusuhan secara psikologis dan keagamaan, yang bangkit dari dan dikembangkan oleh kesan dan prasangka buruk terhadap Amerika Serikat; b) Ketidaksukaan terhadap perilaku Amerika Serikat di masa lalu; c) Anti terhadap kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat; dan d) Permusuhan terhadap dominasi budaya Amerika Serikat. Dalam aspek budaya ini, Nairn (2002: 104)⁴⁰⁰ menegaskan bahwa, Sentimen Anti Amerika ini "bertumpu pada upaya untuk memberikan efek keseragaman dari budaya, selera, nilai, barang-barang konsumsi dan dan sistem AS ke seluruh dunia". Yang menarik adalah keterangan dari Denis Lacorne dan Tony Judt (2005: 1)⁴⁰¹ yang menjelaskan bahwa "*sentimen anti-Amerika setua umur Amerika itu sendiri*". Ini menunjukkan bahwa kajian mengenai sentimen anti-Amerika menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sejarah mengenai Amerika itu sendiri.

Griffiths (2003: th)⁴⁰² menjelaskan bahwa ada empat hal pokok dari Amerika Serikat yang kerap kali menimbulkan kritik pedas dari mereka yang bersikap anti Amerika, yakni: (1) bangsa Amerika berwawasan sempit dan picik (*parochial*), karena hanya mengerti sedikit sekali mengenai dunia di luarnya, (2) AS sendiri tidak konsisten dalam penerapan ide-ide kemerdekaan (*freedom*), hak-hak asasi manusia (*human rights*) dan demokrasi sebagaimana yang sering mereka promosikan ke negara-negara lain di dunia, (3) kebijakan luar negeri AS yang bersifat unilateral cenderung arogan dan kerap mengabaikan peranan legal lembaga-lembaga internasional termasuk PBB (4) AS terbukti telah menggunakan kekuatan militernya ke luar negeri untuk mendikte negara-negara lain yang sering dicap sebagai 'poros kejahatan' (*the axis of evil*).

Tidak sulit untuk mengidentifikasi karakteristik target yang menimbulkan sikap antipati; sebagian besar orang Amerika memang 'berpandangan picik' (*parochial*). Sebagai warga negara dari sebuah kekuatan paling disegani di dunia, mereka kerap tidak peduli

³⁹⁶ Hollander, P. 1992. *Anti-Americanism: Critiques at Home and Abroad, 1965-1990*. Oxford: Oxford University Press.

³⁹⁷ Strinati, D. 2004. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London dan New York: Routledge

³⁹⁸ Spiro, H. J. 1988. "Anti-Americanism in Western Europe." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 497 (May): 120-32.

³⁹⁹ Nairn, M. 2002. Missing Links: Anti-Americanisms. *Foreign Policy* 128.

⁴⁰⁰ Nairn, M. *Ibid.*

⁴⁰¹ Lacorne, D. dan Judt, T. 2005. Introduction: The Banality of Anti-Americanism. Dalam: Judt, Tony dan Lacorne, Denis.(eds). *With Us or Against Us*. New York: Palgrave Macmillan™, 1-9.

⁴⁰² Griffiths, M. 2003. Anti-Anti-Americanism. *The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs*. The University of Sidney. Dapat diakses pada: <http://www.australianreview.net/digest/2003/05/griffiths.html>

dan hanya mengetahui sedikit sekali apa yang terjadi dengan dunia di luar mereka. Berbagai temuan dalam polling-polling menunjukkan bagaimana para anak muda Amerika mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi berbagai negara di dalam peta, sedikit sekali mengetahui bahasa asing, dan miskin pengetahuan sejarah dunia. Kebijakan luar negeri AS dipenuhi dengan retorika tentang kemerdekaan, hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang acapkali bertentangan dengan praktek-praktek di dalam maupun keluar negeri (O'Connor dan Griffiths, 2006: 2)⁴⁰³. Rasa peka (tidak nyaman) terhadap hegemoni tersebut adalah wajah paling menyolok dari sentimen terhadap Amerika (anti-Amerikanisme) (Vedrine, H., 2004: 118)⁴⁰⁴.

Aspek ketiga dari Sentimen terhadap Amerika yang biasanya selalu membayangkan rasa tidak suka atau takut pada Amerikanisasi adalah kebiasaan untuk selalu menyalahkan kaum Yahudi Amerika (*blaming for Jewish Americans*). Ketakutan pada hegemoni Amerika Serikat hampir tak bisa dibedakan dengan bayangan ketakutan pada 'kendali, pengaruh, kekuatan dan kekayaan yang dimiliki oleh kaum Yahudi' atau dengan kata lain, Sentimen anti Amerika dan Sentimen anti Semit sesungguhnya saling terkait satu sama lainnya dan secara empirik hampir-hampir sama persis sekalipun tidak identik. Keduanya dianggap sebagai paragon modernitas: apapun semata-mata urusan uang (*money-driven*), apapun harus berujung pada keuntungan (*profit-hungry*), berwatak perkotaan (*urban*), bersifat universal, individualistik, gesit, tak punya akar budaya karena memusuhi tradisi dan nilai-nilai budaya (Markovits, 2004: 5, 12)⁴⁰⁵. Selain hal tersebut, Mearsheimer dan Walt (2007: 53)⁴⁰⁶ mencatat bahwa menguatnya hubungan AS dengan Israel telah mendorong meluasnya sentimen anti Amerika di dunia Arab dan Islam. Berbagai hal yang dilakukan oleh AS sebagaimana diakui oleh Penasehat Keamanan AS, W.W. Rostow, yang menunjukkan kedekatan AS dengan Israel antara lain adalah: (a) penyediaan cadangan militer, (b) pemberian lebih banyak komitmen publik kepada Israel, (c) persetujuan atas berbagai agresi militer Israel, dan (d) pemberian tekanan kepada Nasser.

Sebuah survey berskala internasional di tahun 2002 bertajuk '*the 2002 Gallup Poll of the Islamic World*' menunjukkan sebagian besar responden di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim mempunyai pandang buruk tentang Amerika: 70% di Iran, 62% di Yordania, 51% di Maroko, 68% di Pakistan dan 64% di Saudi Arabia (Chiozza, 2004: 1). Selain masalah kedekatan dengan Israel, banyak kaum Muslim yang memandang Barat (Amerika Serikat khususnya) sebagai sebuah ancaman dan sumber masalah seluruh kaum muslimin di dunia. Para aktivis Muslim memandang realitas kontemporer Barat sebagai

⁴⁰³ O'Connor, B. dan Griffiths, M. (ed.). 2006. *The Rise of Anti-Americanism*. New York: Routledge.

⁴⁰⁴ Vedrine, H. 2004. On Anti-Americanism. *Brown Journal of World Affairs*. Vol. X, Issue 2: 117-121.

⁴⁰⁵ Markovits, Andrei S. 2004. *European Anti-Americanism (and Anti-Semitism): Ever Present Though Always Denied*. Center for European Studies. Working Paper Series No. 108

⁴⁰⁶ Mearsheimer, J. J, dan Walt, S. M. 2007. *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

budaya imperialis, rendah moralnya dan tidak bertuhan (sekuler), dimana kekuatan dan nilai-nilai Barat lah yang menjadi penyebab segala persoalan di dunia Muslim (M. A. Muqtedar Khan, 2003: 417)⁴⁰⁷.

Akan tetapi, sentimen anti-Amerika tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di kalangan kaum muslimin dan bangsa Arab saja. Di Korea Selatan, ideologi anti-Amerika telah muncul sejak dekade 80-an dan 90-an yang menghinggapi para akademisi, kalangan pers, serikat pekerja dan gereja garis keras dan kiri. Sentimen anti-Amerika tersebut kini telah menyentuh hingga segala lapisan masyarakat, dari tingkat para elit pengambil kebijakan di pemerintahan, kaum intelektual di kelas menengah dan lapisan generasi muda. Di Rusia, sentimen tersebut menghinggapi kaum muda yang disebut dengan istilah 'generasi Putin', yakni mereka yang lahir antara tahun 1976 dan 1991 (Mendelson, S. E., dan Gerber, T.P., 2008: 131)⁴⁰⁸. Sentimen tersebut dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa di Kremlin untuk kepentingan strategi dalam dan luar negeri (Cohen dan Dale, 2010: 1)⁴⁰⁹.

Di Amerika Latin, ideologi anti-Amerika tersebut dinamakan dengan istilah '*Antiyanquismo*', yakni pandangan negatif terutama dari kalangan jurnalis, novelis dan seniman terhadap berbagai kebijakan AS baik di bidang militer, politik, ekonomi maupun budaya yang dianggap serakah dan rasis (McPherson, 2004: 141)⁴¹⁰. O'Connor dan Griffiths (2002: 2) mengatakan bahwa ideologi Anti-Amerika harus dipahami sebagai hasil dari hubungan antara suatu target (yaitu Amerika) dan para pengkritiknya (para penganut ideologi anti-Amerika).

Resistensi terhadap Modernisasi

Dengan berakhirnya Perang Dingin dan kemajuan ekspansi kapitalisme dalam tahap neo-liberal, tatanan budaya dunia mulai memasuki babak baru, yakni modernisasi (Goh Beng Lan 2008: 4)⁴¹¹. Dalam bukunya berjudul *The Australian Dilemma: A New Kind of Western Society*, Bruce Grant (1983: 20)⁴¹² mengklaim, "Apapun yang modern selalu berasal dari Amerika dan selalu diganti oleh Amerika: hanya Amerika yang mampu membuat sekaligus menghancurkan (*What is modern always comes from America and is always replaced by America: only America can both create and destroy*)". Hal ini dipertegas dengan

⁴⁰⁷ Khan, M. A. M. 2003. *Liberal Islam, Radical Islam and American Foreign Policy*. *Current History*, Vol. 102, No. 668: 417-421

⁴⁰⁸ Mendelson, S. E., dan Gerber, T.P., 2008. Us and Them: Anti-American Views of the Putin Generation. *The Washington Quarterly*. Vol. 31, No. 2: 131-150.

⁴⁰⁹ Cohen, A., dan Dale, H. C. 2010. *Russian Anti-Americanism: A Priority Target for U.S. Public Diplomacy*. Washington DC: The Heritage Foundation

⁴¹⁰ McPherson, A. 2004. Myths of Anti-Americanism: The Case of Latin America. *Brown Journal of World Affairs*. Vol. X, Issue 2: 141-152.

⁴¹¹ Lan, GB. 2008. Globalization and Postcolonial Nationin Malaysia: Theoretical Challenges and Historical Possibilities. *Philippine Journal of Third World Studies* 23 (2): 4-19

⁴¹² Grant, B. 1983. *The Australian Dilemma: A New Kind of Western Society*. New South Wales: Macdonald Futura Australia.

pernyataan bahwa Amerika Serikat akhirnya telah muncul di panggung dunia sebagai aktor utama, rumah bagi sistem modernisasi gaya Barat tandingan yang lebih maju (Wertz dan Fried, 2007: 264)⁴¹³.

Modernisasi, dengan demikian, setali tiga uang dengan Amerikanisasi, yaitu sebuah label yang diterapkan pada proses reproduksi massa, urbanisasi, industrialisasi dan konsumerisme, yang kesemuanya sejalan dengan sebuah dunia “dimana pengalaman modern sejalan dengan pengalaman Amerika” (Bigsby, 1975: 6)⁴¹⁴. Wakil Menteri Pertahanan AS di masa Bush, Lawrence S. Eagleburger, menyebutkan di depan *Subcommittee on European Affairs of the Senate Foreign Relations Committee*, Washington tanggal 22 Juni 1989, bahwa Amerika Serikat telah menjadi ‘model pembangunan bagi negara-negara di Eropa Barat dan selanjutnya juga di Eropa Timur’. Kemajuan yang dicapai oleh bangsa dan negara Amerika melalui modernisasi ini telah menjadi kekuatan Amerika untuk menaklukkan bangsa dan negara lain di dunia yang, dimulai bukan dengan pesatnya perkembangan teknologi melainkan dengan impian (tentang dunia dan bangsa lain) sebagai bangsa petualang yang senang meluaskan daerahnya ke seluruh dunia (John Carlos Rowe, 2010: 290)⁴¹⁵.

Amerikanisasi yang dikemas dalam proyek modernisasi tersebut telah melahirkan sikap anti-Amerikanisme dan bahkan tidak ada modernisasi yang berjalan tanpa ada resistensi terhadapnya. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk kritik. Kritik terhadap modernisme ini dibangun berdasarkan hipotesis bahwa ideologi kaum modernis telah memecah belah kondisi sosial dan kejiwaan, mengasingkan manusia dari keinginannya untuk bebas dari bentuk-bentuk topeng dan kemasan modernisasi (Noorani, 2007: 76)⁴¹⁶.

Resistensi terhadap Neo Liberal

Analisis terhadap neoliberalisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek globalisasi dan imperialisme sebagai bagian dari proyek hegemoni yang mengkonsentrasikan kekuatan dan kesejahteraan pada sekelompok elit lokal dan trans-nasional di seluruh dunia melalui pemindahan hak milik aset-aset negara kepada perseorangan (privatisasi) dan korporasi-korporasi trans-nasional (Niels S. C. Hahn, 2008: 142)⁴¹⁷. Berakhirnya Perang Dingin dapat

⁴¹³ Wertz, M. dan Fried, B. 2007. *Modernity, Resentment and Anti-Americanism*. Dalam: O'Connor, B. (ed.). *Anti-Americanism: History, Causes and Themes. Volume I: Causes and Sources*: 263-331. Oxford: Greenwood World Publishing.

⁴¹⁴ Bigsby, C.(ed). 2006. *The Cambridge Companion to Modern American Culture*. , New York: Cambridge University Press Cambridge.

⁴¹⁵ Rowe, J.C.2010. *Culture, US Imperialism, and Globalization*. Dalam: Rowe, J. C. (ed.). 2010. *A Concise Companion to American Studies*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 284-302.

⁴¹⁶ Noorani, Y. 2007. *Redefining Resistance: Counterhegemony, the Repressive Hypothesis and the Case of Arabic Modernism*. Dalam: Chalcraft, J. dan Noorani, Y. (eds.) *Counterhegemony in the Colony and Postcolony*. New York: Palgrave Macmillan: 75-99.

⁴¹⁷ Hahn, N. S. C. 2008. *Neoliberal Imperialism and Pan-African Resistance*. *Journal of World-Systems Research*, Vol. 13, No. 2: 142-178.

dibaca sebagai kekalahan ideologi komunisme Uni Sovyet atas Neo Liberalisme Amerika Serikat. Sejak itu, ideologi kapitalisme neoliberal menjadi semakin mengglobal dan berpengaruh secara kultural pada banyak negara. Seiring dengan proses tersebut, kesadaran identitas keagamaan, kebangsaan dan kesukuan negara-negara lainnya juga semakin meningkat dan tumbuh dalam bentuk resistensi atas neoliberalisme dan kekuasaan global AS (Knauff, 2007 :783, 787)⁴¹⁸. Situasi chaos yang diakibatkan oleh ideologi ini telah membangkitkan berbagai gerakan perlawanan, mulai dari jaringan konservatis di dalam masyarakat muslim hingga ke gerakan kiri revolusioner.

Resistensi terhadap Globalisasi

Resistensi terhadap globalisasi adalah sebuah proses yang cukup kompleks yang meliputi berbagai bidang, sesuai dengan luasnya cakupan globalisasi itu sendiri. Salah satu karakter yang terdapat di dalam resistensi tersebut yang sesuai dengan penelitian ini adalah terdapatnya sikap anti hegemoni (Anheier dan Isar, 2007: 29)⁴¹⁹. Resistensi terhadap globalisasi tersebut dapat dipahami sebagai wujud nyata atau langkah-langkah konkrit untuk membuat penghalang atau hambatan bagi masuknya pengaruh-pengaruh dominan dari luar, atau untuk memberi dukungan kepada praktek-praktek budaya 'autentik' atau pribumi (Adams, Centeno dan Varner, 2007: 81)⁴²⁰. Dalam pengertian ini, resistensi tersebut tidak harus selalu berarti penolakan terhadap proses globalisasi dunia atau integrasi, namun lebih pada upaya untuk menjaga keutuhan nilai-nilai lokal dalam arus globalisasi tersebut.

Dalam ulasan Stiglitz, J. E. (2006:9)⁴²¹, ada lima hal yang melatarbelakangi munculnya resistensi terhadap globalisasi, yakni:

1. Aturan main yang digunakan dalam mengembangkan proses globalisasi acapkali tidak jujur, curang dan tidak adil, karena dirancang untuk kepentingan negara-negara industri maju, sehingga perubahan-perubahan yang dihasilkan justru semakin memperburuk nasib negara-negara miskin.
2. Globalisasi lebih mengunggulkan capaian pada nilai-nilai yang bersifat kebendaan dan mengenyampingkan nilai-nilai lain seperti nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup bahkan terhadap kehidupan itu sendiri.
3. Bagaimana cara globalisasi dijalankan seringkali mengabaikan kedaulatan negara-negara berkembang, serta merendahkan kemampuan negara-negara

⁴¹⁸ Knauff, B. M. 2007. Provincializing America Imperialism, Capitalism, and Counterhegemony in the Twenty-first Century. *Current Anthropology* Vol. 48, No. 6: 781-805.

⁴¹⁹ Anheier, H. K. dan Isar, Y. R. (eds). 2007. *The Cultures And Globalization Series 1: Conflicts And Tensions*. London: SAGE Publications Ltd

⁴²⁰ Adams, L., Centeno, M. dan Varner, C. 2007. Resistance to Cultural Globalization – A Comparative Analysis. Dalam: Anheier, H. K. dan Isar, Y. R. (eds).. *The Cultures And Globalization Series 1: Conflicts And Tensions*. London: SAGE Publications Ltd, 80-89.

⁴²¹ Stiglitz, J. E. 2006. *Making Globalization Work*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.

tersebut untuk mengambil keputusan sendiri dalam wilayah-wilayah penting dan strategis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, globalisasi justru telah mengebiri demokrasi.

4. Sekalipun para pembela globalisasi sering mengklaim bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, namun pada kenyataannya, banyak terdapat para pecundang baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.
5. Barangkali yang paling penting untuk dicatat adalah sistem ekonomi yang ditekankan pada negara-negara berkembang— dalam banyak kasus malah sebenarnya dipaksakan kepada mereka— berlangsung secara tidak wajar dan bahkan sering memberikan kerugian bagi negara-negara berkembang itu sendiri. Globalisasi seharusnya bukan Amerikanisasi, baik dalam kebijakan ekonomi maupun budaya, namun yang terjadi justru demikian— dan hal itulah yang menimbulkan kebencian kepada Amerika.

Globalisasi telah menciptakan 'budaya kebencian' (*a culture of hate*) terhadap negara dan bangsa Amerika, khususnya negara-negara muslim (Hamilton, 2005: 2)⁴²². Budaya kebencian yang merupakan bentuk resistensi terhadap globalisasi ini dapat berupa gelombang protes, yakni: (a) protes yang bersifat irasional, (b) protes yang bersifat imoral, (c) protes yang mengada-ada, (d) protes yang bersifat non-eksistensial (Natrajan, 2003: 218-220)⁴²³.

Resistensi terhadap Imperialisme Budaya

Robert Buzzanco (2002: 49)⁴²⁴ menyarankan agar gagasan dan aksi-aksi yang bersifat anti imperialisme sebaiknya dilihat dalam konstruksi yang lebih luas di mana individu-individu dan kelompok memberikan sikap menantang perluasan ekspansi hegemoni negara. Strategi dan kebijakan yang digunakan oleh negara-negara yang 'berkekuatan kecil' (*minor or smaller powers*) untuk menghadapi negara-negara yang 'berkekuatan besar' (*great or big powers*), karena keadaan kekuatannya dalam posisi yang tidak seimbang (*power asymmetry*), dapat ditempuh dalam tujuh pilihan: (1) *Bandwagoning*, (2) *Limited-*

⁴²² Hamilton, M. D. 2005. *Globalization and Anti-Americanism: A Study of Singaporean College Students*. Disertasi yang dipublikasikan. Oklahoma State University.

⁴²³ Natrajan, B. 2003. Masking And Veiling Protests: Culture And Ideology In Representing Globalization. *Cultural Dynamics*. Vol. 15, No. 2: 213-235.

⁴²⁴ Buzzanco, R. 2002. Anti-Imperialism. Dalam: DeConde, A., Burns, R. D. dan Logevall, F. (eds.) 2002. *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movements and Ideas*. New York: Charles Scribner's Sons, 49-60.

Bandwagoning, (3) *Binding-Engagement*, (4) *Economic-Pragmatism*, (5) *Dominance Denial*, (6) *Indirect Balancing* dan (7) *Balancing* (Cheng-Chwee, dan Chian, 2008: 7)⁴²⁵.

Deskripsi Cheng-Chwee dan Chian tersebut dapat menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri setiap negara di kawasan Asia Timur terhadap hegemoni AS maupun terhadap negara besar lainnya seringkali berbeda-beda. Ada negara yang lebih memilih untuk membuat latihan-latihan militer dengan negara *big power* dan mengkordinasikan kebijakan pokok luar negeri dan pertahanan keamanannya dengan negara *big power*; adapula yang mengkordinasikan kebijakan eksternalnya dalam wilayah terbatas dan menjaga jarak dengan semua negara dominan; ada yang menciptakan dan memelihara tautan kelembagaan reguler dengan sebuah negara '*big power*' melalui kerangka diplomatik bilateral dan multilateral.

Namun secara umum, negara-negara kecil tersebut lebih cenderung memantapkan dan melestarikan perdagangan langsung dan penanaman modal dengan big power dan ikut bergabung dalam kerjasama ekonomi regional dan bilateral dengan jalinan yang dimiliki *big power*, dan sangat jarang yang sampai bergabung ke dalam sebuah aliansi militer dengan negara ketiga dan meningkatkan persenjataan militernya sendiri untuk menghadapi ancaman tertentu. Dengan kata lain, sikap negara-negara kecil terhadap imperialisme pun tidak seragam, tergantung apakah imperialisme tersebut bersifat lunak (*soft imperialism*) atau keras (*hard imperialism*). Pemaksaan ini menurut Iris Young (2004: 48-63)⁴²⁶ setidaknya mempunyai lima wajah: (a) pemaksaan dalam bentuk eksploitasi, (b) pemaksaan dalam bentuk marjinalisasi, (c) pemaksaan dalam bentuk perlucutan kekuatan (*powerlessness*), (d) pemaksaan dalam bentuk imperialisme budaya, dan (e) pemaksaan dalam bentuk kekerasan (*violence*).

Pemaksaan dalam bentuk imperialisme budaya dilakukan oleh suatu komunitas budaya yang lebih dominan atas komunitas budaya lainnya dengan jalan 'universalisasi budaya', yakni membuat nilai-nilai budayanya menjadi universal atau diterima dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas budaya lainnya (Young, 2004: 59)⁴²⁷. Negara-negara *big power* biasanya mempunyai kecenderungan untuk melakukan pemaksaan dalam bentuk imperialisme budaya atas negara-negara *small power*, terutama sebagai salah satu jalan paling efektif untuk melstarikan dan meluaskan pengaruh dan kekuatannya di negara-negara *small power* tersebut.

Sebagai salah satu wajah imperialisme, imperialisme budaya juga dapat bersifat lunak (*soft cultural imperialism*)—seperti gaya hidup, seni, gaya busana, atau keras (*hard cultural imperialism*)—seperti pemaksaan untuk pindah agama, pemaksaan untuk membuka pasar

⁴²⁵ Cheng-Chwee, K. dan Chian, L. K. 2008. *Rising Dragon, Crouching Tigers? Comparing the Foreign Policy Responses of Malaysia and Singapore Toward a Re-emerging China, 1990-2005*. *Biblioasia*. Vol 3, Issue 4: 4-13.

⁴²⁶ Young, I. 2004. *Five Faces of Oppression*. Dalam: Heldke, Lisa dan O'Connor, Peg. (eds.) *Oppression, Privilege, & Resistance*. Boston: McGraw Hill

⁴²⁷ Young, I. *Ibid.*

dan membeli produk, pemaksaan untuk mengganti rejim yang berkuasa, hingga ke pemaksaan secara militer. Oleh karena itu, resistensi atas imperialisme budaya juga mempunyai skala atau gradasi, mulai dari perlawanan secara lunak hingga keras, serta mulai dari tingkat elit suatu negara hingga keseluruhan lapisan masyarakatnya.

Dalam konteks imperialisme budaya yang dijalankan oleh Amerika Serikat, resistensi terjadi di sejumlah negara di Eropa Barat. Perancis adalah salah satu negara yang telah lama berada di barisan depan melawan imperialisme budaya AS tersebut. Oposisi terhadap imperialisme budaya AS ini sempat berada dalam skala cukup besar pada saat berlangsungnya negosiasi GATT di tahun 1993. Perlawanan budaya juga dijalankan oleh berbagai media-media hiburan di negara-negara seperti Brazil (dengan serial telenovela-nya), Hongkong (film-film dan serial kungfu), India (Bollywood), Jepang (kartun animasi), serta negara-negara Amerika Latin dan Arab melalui musik dan tarian (Elteren, 2003: 169, 175)⁴²⁸.

⁴²⁸ Elteren, van M. 2003. U.S. Cultural Imperialism Today: Only a Chimera? *SAIS Review* vol. XXIII no. 2: 169-188.

XII

EPILOG:

Kontinuitas Sifat dan Karakter Budaya Hegemonik AS Pasca Perang Dingin

American exceptionalism dan *American dream* dapat dikatakan sebagai benang merah yang mempertautkan seluruh pandangan ideologi dan praktek kebijakan pemerintahan semua presiden Amerika Serikat sejak awal pendirian negara hingga pasca Perang Dingin (David Grondin, 2006: 10)⁴²⁹. Kedua fitur penting dalam budaya hegemonik Amerika ini telah menjadi pedoman haluan kebijakan luar negeri yang ditandai dengan tiga gejala saling berhubungan, yakni Globalisasi Budaya Amerika, Amerikanisasi dan Imperialisme Budaya. Oleh karena itu, adalah hal yang sangat wajar bila banyak terdapat kesamaan mendasar antara kebijakan pemerintahan di era George HW Bush dan Bill Clinton dengan yang sesudahnya.

Dalam hal *American exceptionalism*, terdapat kesamaan ambisi dalam diri setiap presiden untuk membebaskan dan mencerahkan seluruh dunia berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagaimana yang diyakini Amerika (*America's self-perception of democracy*). Ambisi ini tentu saja dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat idealis (seperti ideologi, paradigma, keyakinan bahwa Amerika adalah bangsa yang secara kualitas berada di atas seluruh bangsa lain di dunia) dan realis (yaitu hal-hal yang lebih bersifat praktis seperti kepentingan nasional, keamanan nasional, keuntungan ekonomi dan sebagainya). Perbenturan antara gagasan ideal dengan tuntutan praktis realistik ini kerap kali menjadi sumber timbulnya apa yang disebut sebagai kebijakan standar ganda (*double standard policy*).

Beberapa kasus yang terjadi setelah pemerintahan Bush Senior dan Clinton yang dapat disebut sebagai implementasi kebijakan standar ganda tersebut antara lain adalah: (1) pembatalan penandatanganan Statuta Roma mengenai Mahkamah Internasional (*The Rome Statute of the International Criminal Court*) oleh George W. Bush bulan Mei 2002 setelah sebelumnya Clinton menandatangani perjanjian tersebut tanggal 31 Desember 2000; (2) penolakan penandatanganan Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim (*the Kyoto Protocol Climate Change*); (3) penolakan perintah Mahkamah Internasional terkait dengan putusan hukuman mati; (4) pengabaian Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler; (5) pengabaian Konvensi Jenewa dalam kasus penahanan Taliban di Penjara Guantanamo; (6) kebijakan penyelesaian konflik Irak-Kuwait.

⁴²⁹ Grondin, D. *Ibid.*

Kebijakan standar ganda Amerika khususnya dalam operasi-operasi atas nama hak-hak asasi manusia dikomentari oleh Michael Ignatieff (2005a: 24)⁴³⁰ sebagai berikut, “Ketika kebijakan AS secara konsisten menggunakan ukuran hak asasi manusia sebagai prediktor bagi stabilitas dari dalam dan ancaman bahaya dari luar, maka hal itu lebih baik diarahkan untuk membuat penilaian keamanan nasional tentang siapa yang harus dipercaya dan siapa dapat diandalkan. Ketika menggunakan hubungan keamanan untuk menekan rezim agar mempunyai kinerja hak asasi manusia yang lebih baik, maka akan lebih bermanfaat jika melakukan program stabilisasi dalam wilayah di mana kepentingan keamanan AS dipertaruhkan.” Kesemua kebijakan standar ganda tersebut beranjak dari dalih bahwa “apa yang seharusnya berlaku bagi bangsa lain tidak selalu dapat dikenakan pada Amerika karena Amerika mempunyai hak-hak keistimewaan yang disebut dengan istilah “*distinctive rights culture*” (Harold Hongju Koh, 2003: 1483-1486)⁴³¹; sebuah hak yang dijadikan legitimasi bagi pandangan dan gagasan *American exceptionalism*.

Dalam hal *American dream*, setiap presiden Amerika Serikat dalam pidato pelantikannya selalu mengangkat semangat bangsa Amerika untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semangat tersebut ditumbuhkan melalui pembangunan kesadaran bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Disebut *mimpi*, karena kesadaran tersebut sebenarnya lebih bersifat harapan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada pada saat itu. Mimpi tersebut bahkan semakin berkembang dalam skala yang lebih luas, yakni harapan dan keyakinan untuk menguasai seluruh dunia. Barrack Obama bahkan secara khusus membuat sebuah buku berjudul “*The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream*” (terbit pertama kali tahun 2007) yang isinya antara lain menjabarkan berbagai tema penting dalam pidato politiknya di depan Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2004, berbagai pandangan yang melukiskan keyakinan dan nilai-nilai pribadinya (*personal views on faith and values*) serta gagasannya mengenai visi masa depan Amerika.

Pasca pemerintahan Bush Senior (Republik) dan Clinton (Demokrat), Amerika dipimpin oleh dua orang figur yang cukup kontroversial dan menarik perhatian dunia, yakni George W. Bush (Republik) dan Obama (Demokrat). Masa pemerintahan Bush dianggap sebagai kelanjutan dari ideologi neo konservatisme Partai Republik yang lebih mengedepankan penyelesaian global secara militer, berpandangan unilateral dan bergairah membangun kehidupan demokrasi di negara-negara lain di dunia. Kekuatan pemikiran neo konservatisme ini semakin menguat atas dukungan orang-orang dekat Bush, seperti Richard Cheney (Wakil Presiden), Donald Rumsfeld (mantan Menteri Pertahanan), Paul Wolfowitz (mantan Deputy Menteri Pertahanan) dan John Bolton (mantan Wakil menteri Pertahanan); sedangkan masa pemerintahan Obama lebih memosisikan AS sebagai

⁴³⁰ Ignatieff, M. 2005a. Introduction: American Exceptionalism and Human Rights. Dalam: Ignatieff, M. 2005. *American Exceptionalism and Human Rights*. Princeton: Princeton University Press: 1-26.

⁴³¹ Koh, H.H. 2003. On American Exceptionalism. *Faculty Scholarship Series*. Paper 1778.

negara sahabat bagi semua bangsa di dunia dengan menggunakan pendekatan multilateralisme yang bersifat 'smart power'.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden AS tanggal 20 Januari 2001, George W. Bush menyatakan, "*musuh-musuh kebebasan dan negara kita tidak boleh membuat kesalahan: Amerika akan tetap terlibat di dunia karena tuntutan sejarah dan atas pilihannya sendiri, mengasah keseimbangan kekuasaan yang dapat menghasilkan kebebasan.*" Dalam pidato ini, Bush Junior menyamakan musuh negara Amerika sebagai musuh nilai-nilai kebebasan atau kemerdekaan, menegaskan komitmen dirinya untuk menyelamatkan dunia, menganggap bahwa peranan penyelamat tersebut merupakan panggilan sejarah dan kesadaran bangsa Amerika; serta berjanji akan mengatur keseimbangan kekuatan di seluruh dunia untuk menjamin tegaknya nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan tersebut.

Guna memperjelas kebijakan unilateral ini, pemerintahan Bush mempublikasikan dua dokumen yang berkaitan dengan strategi keamanan nasional, yaitu: *pertama*, dokumen berjudul "*The National Security Strategy of the United States*" tanggal 20 September tahun 2002 yang dilatarbelakangi pernyataan politik Bush di depan Akademi Militer AS di West Point tanggal 1 Juni 2002, dimana pada saat itu Bush mengatakan:

Pengabdian bangsa kita selalu lebih luas daripada pertahanan bangsa kita. Kita berjuang, karena kita selalu berjuang, untuk perdamaian yang adil - perdamaian yang memberi kenikmatan kebebasan. Kita akan mempertahankan perdamaian terhadap ancaman dari teroris dan tiran. Kita akan melestarikan perdamaian dengan membangun hubungan yang baik di antara kekuatan-kekuatan besar. Dan kita akan memperpanjang perdamaian dengan mendorong masyarakat yang bebas dan terbuka di setiap benua.

Dalam statement di atas, Bush meletakkan pengaruh kekuatan Amerika sebagai sesuatu yang lebih besar dan disegani oleh semua lawannya di dunia, sehingga sepanjang sejarahnya, bangsa Amerika lebih banyak berperan ke luar. Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih sibuk membangun pertahanan nasionalnya, Amerika justru sibuk menyelesaikan masalah-masalah dunia melalui kekuatan yang sudah dimilikinya.

Sebagai kalimat penutup dalam kata pengantar untuk dokumen pertama ini, Bush menulis, "*Sepanjang sejarah, kemerdekaan dan kebebasan selalu dibayang-bayangi ancaman perang dan teror; telah ditantang oleh kehendak bentrok negara yang kuat dan desain jahat negara tiran; dan telah diuji oleh menyebarnya kemiskinan dan penyakit. Hari ini, umat manusia memegang di tangannya kesempatan untuk melanjutkan kemenangan kebebasan atas semua musuh-musuh ini. Amerika Serikat menyambut dengan tangan terbuka tanggung jawab kita untuk memimpin dalam misi besar ini.*" Dalam pernyataan ini, jelas sekali Bush meletakkan tanggungjawab bangsa Amerika untuk menyelesaikan berbagai krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum teroris dan tiran. Perjuangan bangsa Amerika untuk menyelamatkan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan tersebut oleh Bush disebut sebagai sebuah '*great mission*'.

Kedua, dokumen berjudul “*National Security Strategy (NSS) 2006*” Maret 2006 yang didasari oleh pernyataan di dalam surat pengantar Bush tanggal 16 Maret 2006 untuk dokumen tersebut yang berbunyi:

Cita-cita yang telah menginspirasi sejarah kita- kebebasan, demokrasi, dan martabat manusia- semakin menginspirasi individu dan negara-negara di seluruh dunia Kita memilih kepemimpinan atas isolasionisme , dan mengejar perdagangan bebas dan pasar terbuka lebih dari proteksionisme. Kita memilih untuk menghadapi tantangan sekarang daripada meninggalkan mereka untuk generasi mendatang. Kita melawan musuh-musuh kita di luar negeri bukannya menunggu mereka tiba di negara kita. Kita berusaha untuk membentuk dunia, tidak hanya dibentuk oleh itu ; untuk mempengaruhi aktivitas untuk lebih baik bukannya pada belas kasihan mereka. ”

Semangat yang dibangun oleh kedua dokumen tersebut memang diarahkan untuk memerangi terorisme; akan tetapi semangat tersebut dijadikan dalih untuk milih pendekatan unilateralisme yang bersifat *hardpower* sehingga dinilai oleh banyak kalangan sebagai satu bentuk sikap yang arogan. Dalam penyelesaian krisis Perang Teluk tahun 1990, penggunaan *hard power* tersebut dijalankan melalui strategi membangun koalisi internasional, namun tetap didasari oleh pendekatan unilateralisme, bahkan dapat disebut sebagai “*a triumph of unilateralism*”. Koalisi internasional tersebut tidak dibangun atas dasar kerjasama antar negara yang bersifat persahabatan, namun semata-mata demi memenuhi ambisi pemerintahan Bush yang ingin menegakkan Tatanan Dunia Baru sebagai manifestasi dari Pax Americana (Michael T. Klare, 1992: 141)⁴³².

Kesan bahwa Amerika adalah bangsa yang arogan ini kemudian dicoba untuk dikoreksi oleh pemerintahan berikutnya. Untuk melihat gambaran sejauhmana pendekatan tersebut dilakukan oleh presiden berikutnya, kita dapat melakukan Metode Analisis Pidato Politik terhadap dua pidato politik Presiden Obama; yaitu: (a) Pidato Obama di acara bertajuk *Address to the Nation on Libya* tanggal 28 Maret 2011, dan (b) Pidato Obama di acara bertajuk *Speech on US Policy in Middle East and North Africa* tanggal 19 Mei 2011.

Pada pidato yang pertama, *Address to the Nation on Libya*, Obama menyatakan:

Hanya dalam satu bulan, Amerika Serikat telah bekerja dengan mitra internasional kami untuk memobilisasi koalisi yang luas, mengamankan mandat internasional untuk melindungi warga sipil , menghentikan laju ketentaraan, mencegah pembantaian, dan membentuk zona larangan terbang dengan sekutu dan mitra kami. Meminjamkan beberapa perspektif tentang bagaimana cepat respon militer dan diplomatik ini menyatu, ketika orang-orang sedang brutal di Bosnia pada 1990-an, masyarakat internasional butuh lebih dari satu tahun untuk campur tangan dengan kekuatan udara untuk melindungi warga sipil. Kami butuh 31 hari.

Dalam pernyataan tersebut, Obama menekankan pentingnya kerjasama dengan dunia internasional untuk menyelesaikan masalah Libya, sementara peranan AS sendiri dibatasi pada posisi sebagai pihak pendukung (a supporting role) sebagaimana yang disampaikan

⁴³² Klare, M.T. 1992. *US Military Policy in the Post-Cold War Era*. Dalam: Miliband, R. dan Panitch, L. (ed.) *Socialist Register 1992*. The Merlin Press, London.

Obama, “*Amerika Serikat akan memainkan peran pendukung- termasuk intelijen, dukungan logistik, pencarian dan bantuan penyelamatan, dan kemampuan untuk mengendalikan rezim komunikasi.*”

Dua tahun sebelum memberi pernyataan di atas, pada saat menerima Anugerah Nobel Perdamaian di Oslo City Hall, Norwegia tanggal 10 Desember 2009, Obama sudah menegaskan, “*... di dunia di mana ancaman merajalela, dan misi menjadi lebih sulit, Amerika tidak bisa bertindak sendiri. Amerika saja tidak bisa mengamankan perdamaian.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Obama memilih pendekatan multilateralisme yang bersifat *soft power*, yang berbeda dengan pemerintahan Bush Junior yang cenderung menegakkan unilateralisme yang bersifat *hard power* dalam kebijakan luar negerinya, sesuatu yang memang sudah dinyatakan Obama pada saat maju sebagai kandidat Presiden AS di tahun 2007,” *Untuk memperbaharui kepemimpinan AS, saya berniat untuk membangun kembali kebutuhan akan aliansi, kemitraan, dan kelembagaan untuk menghadapi ancaman bersama dan meningkatkan keamanan bersama.*” Dengan memilih frase “*memperbaharui*”, Obama dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dengan pemerintahan AS, terutama dalam hal memilih pendekatan multilateralisme yang bersifat *soft power*.

Salah satu pernyataan lainnya yang membuat banyak pakar dan masyarakat pers menilai sebagai sebuah ketegasan pilihan Obama untuk lebih memilih pendekatan *soft power*—sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu Bush Junior— adalah ketika Obama menyebutkan,” *Amerika Serikat tidak akan mampu mendikte kecepatan dan ruang lingkup perubahan ini. Hanya orang-orang dari daerah tersebut bisa melakukan itu.*” Penegasan Obama ini menjadi satu tonggak baru bagi peranan global Amerika di seluruh dunia, karena menarik diri dari campurtangan dalam urusan negara lain. Akan tetapi, pada pidato yang kedua, *Speech on US Policy in Middle East and North Africa*, Obama justru menunjukkan pengesahannya atas kebijakan intervensi atas nama penegakan hak asasi manusia dan demokrasi sebagaimana yang telah dijalankan oleh pemerintahan Bush Junior. Dalam pidato kedua ini, Obama menyatakan:

Amerika Serikat menentang penggunaan kekerasan dan represi terhadap rakyat di daerah tersebut. Kami mendukung seperangkat hak-hak universal. Hak-hak tersebut termasuk kebebasan berbicara; kebebasan berkumpul secara damai; kebebasan beragama; kesetaraan bagi pria dan wanita di bawah aturan hukum; dan hak untuk memilih pemimpin Anda sendiri- apakah Anda tinggal di Baghdad atau Damaskus; Sanaa atau Teheran. Dan akhirnya, kami mendukung reformasi politik dan ekonomi di Timur dan Utara Tengah Afrika yang dapat memenuhi aspirasi yang sah dari warga kebanyakan di seluruh wilayah tersebut.

Dalam pidato ini, kita melihat dua hal penting untuk disimak: pertama, pernyataan bahwa Amerika menolak penggunaan kekerasan dan represi atas sebuah bangsa yang dilakukan oleh rezim pemerintahan di kawasan tersebut sekaligus mendukung tegaknya hak-hak asasi manusia dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat; dan kedua,

pernyataan bahwa Amerika mendukung reformasi ekonomi dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kedua hal tersebut menunjukkan posisi Obama untuk mengesahkan berbagai kebijakan intervensi atas nama demokrasi dan hak-hak asasi manusia; sesuatu yang juga dilakukan oleh presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya, termasuk George W. Bush.

Kebijakan untuk tidak berdiam diri atas pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di seluruh dunia ini bahkan ditegaskan Obama sebagai sebuah prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negerinya, “dukungan kami untuk prinsip-prinsip ini bukanlah basa-basi. Hari ini saya akan menyatakan dengan jelas bahwa dukungan tersebut merupakan prioritas utama yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, dan didukung oleh semua alat diplomatik, ekonomi dan strategis yang kita miliki.” Dua pidato politik Obama ini memang tidak menunjukkan adanya ketegasan, untuk tidak menyebutkan adanya standar ganda, dalam pilihan kebijakan luar negeri Obama: apakah *hard power* ataukah *soft power* yang sebenarnya menjadi dasar kebijakan luar negeri Amerika. Para pakar politik yang bekerja untuk menyusun strategi keamanan dan pertahanan nasional AS menamakan kebijakan ini sebagai pendekatan yang menggunakan ‘*smart power*’, yang dapat dianggap sebagai kombinasi pendekatan *hard power* dan *soft power*. Penggunaan *smart power* ini digambarkan oleh Joseph S. Nye, Jr. (2008: 62)⁴³³ sebagai berikut:

Dewasa ini Amerika Serikat tidak mungkin menghadapi negara-negara yang menantang keunggulannya kecuali negara tersebut bertindak arogan sehingga Amerika harus membantu negara lain untuk mengatasi situasi tersebut dan bekerja sama. Tantangan yang lebih besar untuk Amerika Serikat di masa depan adalah belajar bagaimana bekerja dengan negara-negara lain untuk lebih mengontrol aktor non-negara yang akan semakin berbagi tanggung jawab dengan negara-bangsa. Bagaimana mengontrol papan catur bawah dalam permainan tiga dimensi dan bagaimana membuat *hard* dan *soft power* saling memperkuat adalah tantangan kebijakan luar negeri utama untuk kepemimpinan Amerika.

Dalam pendekatan *smart power*, tantangan kebijakan luar negeri AS tidak lagi untuk bagaimana menguasai negara lain, akan tetapi justru bagaimana *bekerjasama* dengan negara lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Richard L. Armitage dan Dr. Joseph S. Nye, Jr. di depan *the Senate Foreign Relations Committee* tanggal 24 April 2008, pendekatan *smart power* didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut; Pertama, Amerika berada dalam persoalan-persoalan dunia yang amat berkaitan dengan keamanan dan kemakmuran warga negara. Kedua, tantangan saat ini hanya dapat diatasi dengan sekutu dan mitra yang mampu dan bersedia. Ketiga, alat-alat sipil dapat meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan Pemerintah AS.

⁴³³ Nye, Jr. J. S. 2008. *The Powers to Lead*. New York: Oxford University Press.

Dalam praktek *smart power* ini, secara khusus, Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye, Jr. (2007: 5)⁴³⁴ menyarankan agar Amerika memusatkan perhatian pada lima program utama, yaitu: (1) membangun aliansi, partnership dan kelembagaan (*alliances, partnerships, and institutions*), (2) pengembangan global (*global development*), (3) diplomasi publik (*public diplomacy*), (4) integrasi ekonomi (*economic integration*), dan (5) teknologi dan inovasi, khususnya ketahanan energi dan perubahan iklim.

Dalam konteks hegemoni, Obama dapat dinilai sebagai pemimpin AS yang lebih mengedepankan 'konsensus' sebagai dasar kekuasaan hegemoniknya ketimbang 'paksaan' (*coercion*). Berbeda dengan pendahulunya yang lebih dikenal sebagai pemimpin yang arogan, Obama lebih senang bila dirinya dan negaranya dipandang sebagai negara yang lebih bersahabat ketimbang sebagai musuh oleh negara lain di dunia. Pendekatan ini sejalan dengan konsepsi *smart power*, terutama pada prinsip kedua yang dirumuskan oleh Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye, Jr. (2007: 11), yakni "*American leaders ought to eliminate the symbols that have come to represent the image of an intolerant, abusive, unjust America.*" Dalam dua poin di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sekalipun pemerintahan AS saat ini yang dipimpin oleh Obama lebih mengedepankan pendekatan *smart power*, akan tetapi secara mendasar kebijakan luar negerinya masih menerapkan budaya hegemonik dan kebijakan standar ganda kepada negara-negara lain di seluruh dunia.

⁴³⁴ Nye, Jr. J. S. 2007. Culture, Soft Power, and 'Americanization'. Dalam: Held, D., Moore, H.L., dan Young, K. (eds.). *Cultural Politics In A Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation*. Oxford: Oneworld Publications.

TENTANG PENULIS



Dr. Kasiyarno, MHum adalah pengamat budaya hegemoni Amerika Serikat sekaligus praktisi di dunia pendidikan. Karirnya di dunia pendidikan dimulai sejak menjadi guru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta hingga dosen senior di Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Kecintaannya pada dunia ini mengantarkannya pada posisi sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan selama dua periode (sejak 2007 hingga sekarang).

Dalam bidang akademik, dia menyelesaikan program sarjananya di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta (1982), program magister dan doktornya di Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM pada Program Studi Pengkajian Amerika, masing-masing tahun 1995 dan 2013, serta sempat menempuh program *Sandwich* di Northern Illinois University tahun 2010. Sebagai dosen, penulis mengajar matakuliah *Cross Culture Understanding* dan Pranata Masyarakat Amerika di Program Studi Sastra Inggris (S1) Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, juga matakuliah *Theories of Culture* serta *Culture and English Language Teaching* di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Pascasarjana (S2) FKIP UAD.

Selain sebagai ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APT ISI) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (2011-2016) yang beranggotakan rektor-rector seluruh perguruan tinggi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua American Studies Society of Indonesia (ASSINDO) (2013-2016) dan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020), serta pernah menjadi anggota Tim Pengembang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah (2011-2015).

BIBLIOGRAFI

- Achugar, H. 2007. Tensions between North and South. Dalam: H. Anheier, & Y. Isar (Eds.), *The Cultures and Globalization Series 1: Conflicts and Tensions*. London: SAGE Publications Ltd.: 202-210
- Adams, J. T. 1931. *The Epic of America*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Adams, L., Centeno, M. dan Varner, C. 2007. Resistance to Cultural Globalization – A Comparative Analysis. Dalam: Anheier, H. K. dan Isar, Y. R. (eds).. *The Cultures And Globalization Series 1: Conflicts And Tensions*. London: SAGE Publications Ltd, 80-89.
- Agnew, J. 2005. *Hegemony: The New Shape of Global Power*. Philadelphia: Temple University Press,
- Aldred, K. dan Smith, M. A. 1999. *Superpowers in the Post-Cold War Era*. London: Macmillan Press Ltd.
- Ambrose, S. E. dan Brinkley, D. G., 1997. *Rise to Globalism: American Foreign Policy since 1938*. London: Penguin Books.
- Anheier, H. K. dan Isar, Y. R. (eds). 2007. *The Cultures And Globalization Series 1: Conflicts And Tensions*. London: SAGE Publications Ltd.
- Anholt, S. dan Hildreth, J. 2010. *Brand America: The Making, Unmaking and Remaking of the Greatest National Image of All Time*. London: Marshall Cavendish International Asia.
- Arrighi, G. 1994. *The Long Twentieth Century; Money, Power, and the Origins of Our Times*. London: Verso
- Arrighi, G dan Silver, B.J. 1999 *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Armitage, D. T. Jr. 2005. Enduring Dilemmas: Sources of American Ambivalence toward European Defense Autonomy, the EDC and ESDP in Comparative Perspective. University of Maryland.
- Bacevich, A. J. 2002. *American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy*. Cambridge: Harvard University Press
- Bacevich, A.J. 2010. Let Europe be Europe: Why the United States must withdraw from NATO. *Foreign Policy*. Washington, D.C.
- Bachrach, Peter dan Baratz, Morton S. 1962. Two Faces of Power. *The American Political Science Review*, Volume 56, Issue 4: 947-952.
- Bailey ,Thomas A. 1950. *America Faces Russia*. Ithaca: Cornell University Press
- Baker, M. 1997. Rush to Embrace Burma's Dictators Will Be Swept Aside In March of History. *The Age*, Melbourne. (7 Juni 1997).
- Baker, M. 1997. *Sydney Morning Herald* (7 Juni 1997).
- Bailey ,T. A. 1950. *America Faces Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Barat, A. H. 2007. Human Perception And Knowledge Organization: Visual Imagery. *Library Hi. Tec*, Vol. 25, No. 3: 338-351.
- Barnett, G.A. dan Wu, R.Y. 1995. The International Student Exchange Network: 1970 & 1989 . *Higher Education*. Vol. 30, No. 4: 353-368.
- Beeson, M. 2004. U.S. Hegemony. Dalam: O'Hara, P (Ed.), *Encyclopaedia of Public Policy: Governance in a Global Age*. Routledge.
- Beltran, L.R. 1978. Communication and Cultural Domination: USA-Latin American Case. *Media Asia*, 5, (4): 183-192.
- Benjian, X. 2001. Security Dilemma, Balance of Power vs. US Policy Towards China in the Post-Cold War Era (terj.). *Xiandai Guoji Guanxi (Contemporary International Relations)*.
- Bennett, A. dan George, A. 2001. Case Studies and Process Tracing in History and Political Science: Similar Strokes for Different Foci. Dalam: Elman, C. dan Elman, M. F. (eds). *Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations*. Cambridge: MIT Press, MA: 137-166.
- Bennett, A. dan George, A. 2005. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge: MIT Press.
- Berg, A. dan Borensztein, E. 2000. The Dollarization Debate. *Finance and Development*, vol. 37, no. 1.
- Bert, W. 2003. *The United States, China and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard?* New York: Palgrave Macmillan.
- Bigsby, C.(ed). 2006. *The Cambridge Companion to Modern American Culture*. , New York: Cambridge University Press Cambridge.
- Boggs, C. 2000. *The End of Politics; Corporate Power and the Decline of the Public Sphere*.New York: The Guilford Press.

- Boli, J. dan Thomas, G. M. 1997. World Culture in the World Polity: A Century of International Non-Governmental Organization. *American Sociological Review*, Vol. 62, No. 2: 171-190.
- Borden, W.S. 1989. Defending Hegemony.. Dalam: Paterson, Thomas G. *Kennedy's Quest for Victory: American Foreign Economic Policy 1961-1963*. New York: Oxford University Press
- Bossy, D. 2011. A City upon a Hill. *The Daily Caller*.
- Bourguinat H. dan Dohni L. 2002, La Dollarisation Comme Solution en Dernier Ressort , *Revue Française d'Economie*, n° 1, vol. XVII: 57-96.
- Boothman, D. 2008. Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci's Concept of Hegemony. Dalam: Howson, R. dan Smith, K. (eds.). *Hegemony Studies in Consensus and Coercion*. New York: Routledge, 33-50.
- Boyd-Barrett O. 1998. Media imperialism reformulated. In D.K.Thussu (Ed.). *Electronic Empires*. London: Edward Arnold.
- Brand, U. 2005. Order and Regulation: Global Governance as a Hegemonic Discourse of International Politics? *Review of International Political Economy*. Vol. 12, No. 1: 155-176.
- Brimmer, E. 2007. Seeing Blue: American Visions of the European Union. *Chaillot Paper*. No. 105, The European Union Institute for Security Studies, Paris.
- Bronner, S. dan Kellner, D.1983. *Passion and Rebellion: The Expressionist Heritage*. London: Universe Books and Bergin Publishers (USA), New York dan Croom Helm (Inggris).
- Budiman, A. 1997. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bunker, S. G. dan Ciccantell, P. S. 2007. *East Asia and the Global Economy : Japan's Ascent, with Implications for China's Future*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Burbules, N. C. dan Torres, C.A. (eds.). 2000. *Globalization and Education: Critical Perspectives*. New York: Routledge.
- Buzan, B., dan Waever, O. 2003. *Regions and Powers. The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzzanco, R. 2002. Anti-Imperialism. Dalam: DeConde, A., Burns, R. D. dan Logevall, F. (eds.) 2002. *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movements and Ideas*. New York: Charles Scribner's Sons, 49-60.
- Calleo, D.P., 1987. *Beyond American Hegemony: The Future of the Western Alliance*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Cameron, F. 2006. *US Foreign Policy after the Cold War*. New York: Routledge.
- Carmody, Pádraig R. dan Owusu, Francis Y. 2007. Competing hegemons? Chinese versus American Geo-Economic Strategies in Africa. *Political Geography* 26, no. 5.
- Carnoy, M. 1976. Educational Reform and Social Control in the United States, 1830-1970. Dalam: Carnoy, Martin dan Levin, Henry (eds.). *The Limits of Educational Reform*, New York: Longman: 115-155
- Ceaser, J.W.2012. The Origins and Character of American Exceptionalism. *American Political Thought: A Journal of Ideas, Institutions, and Culture*, vol. 1: 1-25.
- Chalaby. J. K. 2006. American Cultural Primacy in A New Media Order: A European Perspective. *The International Communication Gazette*, Vol. 68, No.1: 33-51. London: SAGE Publications Ltd.
- Chalcraft, J. dan Noorani, Y. (eds.). 2007. *Counterhegemony in the Colony and Postcolony*. Palgrave Macmillan™, New York.
- Cheng-Chwee, K. dan Chian, L. K. 2008. Rising Dragon,Crouching Tigers? Comparing the Foreign Policy Responses of Malaysia and Singapore Toward a Re-emerging China, 1990-2005. *Biblioasia*. Vol 3, Issue 4: 4-13.
- Cherniavsky, E. 1996. Subaltern Studies in a U. S. Frame. *Boundary 2*, Vol. 23, No. 2: 85-110. North Carolina: Duke University Press.
- Clegg, S.R. 1989. *Frameworks of Power*. London: Sage
- Coleman, W.D. dan Underhill, G.R.D. 1998. *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia and the Americas*, London: Routledge
- Comaroff, J. L. dan Comaroff, J. 1991. *Of Revelation and Revolution. Volume 1: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa*. Chicago: University of Chicago Press.
- Conversi, D. 2010. The Limits of Cultural Globalisation? *Journal of Critical Globalisation Studies*, Issue 3. London: Journal of Critical Globalisation Studies
- Cox, R. W. 1993. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*, Stephen Gill (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Coyne, M. 2008. *Hollywood Goes to Washington: American Politics on Screen*. London: Reaktion Books Ltd.
- Crockatt, R. 2007. *After 9/11: Cultural Dimensions of American Global Power*. New York: Routledge.
- Currie, J. 1998. Introduction. Dalam Currie, J. dan Newson, J. *Universities and Globalization: Critical Perspectives*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1-13.
- Curtis, W. dan Pettigrew, A (2009). *Learning in Contemporary Culture*. Exeter: Learning Matters.
- Daalder dan Kagan, 2007. The Next Generation. *The Washington Post*. 6 Agustus. Lihat pula: Daalder dan Kagan, 2007. America and the Use of Force: Sources of Legitimacy. *Bridging the Foreign Policy Divide*. The Stanley Foundation.
- Dahl, R. A. 1957. The Concept of Power, *Behavioral Science*, Vol. 2. No. 3: 201-215
- Das, D.K. 1996. *The Asia-Pacific Economy*, The Macmillan Press Ltd, London, UK and St. Martin's Press, Inc. New York.
- DeFillippi, R. J. Arthur, M. B. 1998. Paradox in Project-Based Enterprise: The Case of Film Making. *California Management Review*, 40: 125-139
- Delanty, G. dan Rumford, C. 2007. Political Globalization. Dalam: Ritzer, G. (ed.) *The Blackwell Companion to Globalization*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Delanty, G. 2006. Introduction: The Idea of a Post-Western Europe. Dalam: Delanty, G. (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West*. New York: Routledge.
- Delbanco, A. 1999. *The Real American Dream: A Meditation on Hope*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dendrinis, B. 2005. Conflicting Ideologies in Discourses of Resistance to the Hegemony of English, *Parábola Editorial of Rua Clemente Pereira*. BRAZIL: 327 - Ipiranga 04216-060 São Paulo, SP.
- Destradi, S. 2008. Empire, Hegemony, and Leadership: Developing a Research Framework for the Study of Regional Powers. *Giga Working Papers*. No. 79.
- Devetak, R. 2008. Failures, Rogues and Terrorists: States of Exception and The North/South Divide. Dalam: Bellamy, Alex J. Bleiker, Roland., Davies, Sara E. dan Devetak, Richard (Ed.), *Security and the War on Terror*. London, England: Routledge: 125-141.
- Drane, J.W. 2000. *The McDonalidization of the Church: Spirituality, Creativity and the Future of the Church*. London: Darton, Longman & Todd.
- Dominguez-Rivera, R. 2003. "Dealing with the U.S. hegemony: Soft and hard power in the external relations of the European Union". Dalam: UNSPECIFIED, Nashville, TN.
- Doran, C. F., 1971. *The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dowding, K. 2011. *Encyclopedia of Power*. London : SAGE Publications
- Edwards, J. A. dan Valenzano III, J. M. 2007. Bill Clinton's "New Partnership" Anecdote toward a Post-Cold War Foreign Policy Rhetoric. *Journal of Language and Politics*. Vol. 6. No. 3 : 303-325.
- Eichengreen, B. 1995. Central Bank Co-Operation and Exchange Rate Commitments: The Classical and Interwar Gold Standards Compared. *Financial History Review*, 2: 99-117
- Ellison, B. S. 2009. *In Contradiction: The Concept of Globalization in the Popular Discourse of Education Reform*. PhD diss., University of Tennessee
- Elteren, van M. 2003. U.S. Cultural Imperialism Today: Only a Chimera? *SAIS Review* vol. XXIII no. 2: 169-188.
- Encyclopaedia of the New American Nation. 2015. *Globalization - American-led Globalization: 1990-2001*.
- Eshbaugh-Soha, M. 2010. The Politics of Presidential Speeches, *Congress & the Presidency*, Vol. 37, No.1: 1-21.
- Fallon, J. 1995. The Roots of American Order. *The Social Contract*, Winter: 150-151.
- Feis, H. 1957. *Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought*. 2 ed. New Jersey: Princeton University Press
- Feis, H. 1970. *From Trust to Terror: The Onset of the Cold War, 1945-1950*. New York: W.W. Norton
- Ferguson, N. 2004. A World Without Power. *Foreign Policy*. Washington: The Foreign Policy Group: 32-39
- Fischer, J. 2009. Europe and America after Bush. *Democratija*. Vol. 16: 84-90.
- Fisher, P. 1991. *The New American Studies: Essays from Representation*. California: University of California Press.
- Fleming, Ian, 2002, *Goldfinger*. London: Penguin.
- Fluck, W. 2007. Theories of American Culture (and the Transnational Turn in American Studies). *REAL - Yearbook of Research in English and American Literature* 23. Tübingen: Narr Verlag.
- Freese, P. 1990. 'America'. Dream or Nightmare? Reflections on a Composite Image. Die Blaue Eule, Essen (dikutip dari: Müller, P. 2003. *Star Trek: The American Dream Continued? The Crisis of the American Dream in the 1960s and its Reflection in a Contemporary TV Series*).

- Friedman, A.T. 2010. The Luxury of Lapidus: Glamour, Class, and Architecture in Miami Beach. *Design Magazine*, no. 11: 39-47.
- Galeota, J. 2004. Cultural Imperialism: An American Tradition. *Humanist Essay Contest Winners*: 22-46.
- Garrison, J. 2004. *America as Empire: Global Leader or Rogue Power?*. First Edition. San Francisco: Berrett Koehler Publishers, Inc.
- Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project.
<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=47119>
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford, CT: Stanford University Press.
- Giddens, A. 2001. Introduction. Dalam: Giddens, A. (ed). *The Global Third Way Debate*. Cambridge: Polity.
- Gienow-Hecht, Jessica C. E. 2006. Always Blame the Americans: Anti-Americanism in Europe in the Twentieth Century. *The American Historical Review*, Vol. 111, No. 4: 1067-1091.
- Gikandi, S. 2001. Globalization and the Claims of Postcoloniality. *South Atlantic Quarterly*. 100(3): 627-58.
- Gilderhus, M. T. 2006. The Monroe Doctrine: Meanings and Implications. *Presidential Studies Quarterly* 36 (1).
- Gill, S. 2003. *Power and Resistance in the New World Order*. London and New York. Macmillan-Palgrave.
- Goldin, C. D. dan Lewis, F.D. 1975. The Economic Cost of the American Civil War: Estimates and Implications. *The Journal of Economic History*, Vol. 35, No. 2: 299-326.
- Goodin, R.E., Güth, W. dan Snidal, D. 2005. *Strategic Aspects of Hegemony*. Jena: Max-Planck-Institut für Ökonomik.
- Goodman, D. dan Goodman, E. 2009. *Creating The New American Dream*. California: Goodman Experiences, LLC.
- Gosovic, Branislav. 2000. Global Intellectual Hegemony and the International Development Agenda. *International Social Science Journal*. Volume 52, Issue 166: 447-456.
- Goverde, H. 2004. US Hegemony and the New European Divide: The Power Of Complex Territorial Governance. *Working Paper Series 2004/ 11*. Wageningen University and Research Centre.
- Goverde, H, Philip G. Cerny, Mark Haugaard and Howard Lentner (eds). 2000. *Power in Contemporary Politics. Theories, Practices, Globalizations*, Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Graham, S. E. 2007. US Public Diplomacy in The Asia-Pacific: Opportunities and Challenges In a Time of Transition. Canberra : Department of International Relations, RSPAS, College of Asia and the Pacific, Australian National University.
- Gramsci, A. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. Dalam Q. Hoare and G. Nowell Smith (ed. dan penj.). London: Lawrence & Wishart.
- Grant, B. 1983. *The Australian Dilemma: A New Kind of Western Society*. New South Wales: Macdonald Futura Australia.
- Greater Miami Convention & Visitors Bureau. 2013. *Greater Miami and the Beaches Achieve Records on Records for Travel and Tourism in 2012*. Press release.
- Green, M. F. 2005. *Measuring Internationalization at Research Universities*. Washington: American Council on Education.
- Griffiths, M. 2003. Anti-Anti-Americanism. *The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs*. The University of Sidney. Dapat diakses pada: <http://www.australianreview.net/digest/2003/05/griffiths.html>.
- Grondin, D. 2006. Introduction Coming to Terms with America's Liberal Hegemony/Empire. Dalam: David, CP. dan Grondin, D. (eds.). *Hegemony or Empire: The Redefinition of US Power under George W. Bush*. Hampshire: Ashgate.
- Hahn, N. S. C. 2008. Neoliberal Imperialism and Pan-African Resistance. *Journal of World-Systems Research*, Vol. 13, No. 2: 142-178.
- Hamilton, M. D. 2005. *Globalization and Anti-Americanism: A Study of Singaporean College Students*. Disertasi yang dipublikasikan. Oklahoma State University.
- Hanafi, S. 2009. Cultural Difference or Cultural Hegemony? Contextualizing the Danish Cartoon Controversy within Migration Spaces. *Middle East Journal of Culture and Communication* 2: 136-152. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Hankem, S. 1999. Reflections on Exchange Rates and Dollarization. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*. Volume 4, Issue 1: 63-76.
- Hardt, M. dan Negri, A. 2000. *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hart, Michael H. 1986. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. New York: Carol Publishing Group
- Harvard University's American Studies Program. 2013. *Program*. <http://americanstudies.fas.harvard.edu>.

- Haugaard, Mark and Lentner, Howard H. (eds.). 2006. *Hegemony and Power: Consensus and Coercion in Contemporary Politics*. The Rowman & Littlefield Publishing Group Inc., Maryland
- Hawkins, Houston T. 2013. *History of the Russian Nuclear Weapon Program*. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos National Laboratory.
- Haynes, J. 2003. Tracing Connections between Comparative Politics and Globalisation. *Third World Quarterly*, Vol. 24, No. 6: 1029-1047. Taylor & Francis, Ltd.
- Heise, David R. 1989. Modeling Event Structures. *The Journal of Mathematical Sociology*. Vol.14, Issue 2-3: 139-169.
- Hertle, Hans-Hermann. 2001. The Fall of the Wall: The Unintended Self-Dissolution of East Germany's Ruling Regime. *Cold War International History Project Bulletin*, Issue 12 /13: 131-140.
- Hirst, P. dan Thompson, G. 1999. The Limits to Economic Globalization. Dalam: Held, D dan McGrew, A. (ed.). *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*. Stanford: Stanford University Press.
- Huber, M.T. and Morreale, S.P., eds. (2002). *Disciplinary Styles in the Scholarship of Teaching and Learning: Exploring Common Ground*. Washington, DC: AAHE and the Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning.
- Hochschild, Jennifer L 1995. *Facing up to the American Dream: Race, Class, and the Soul of the Nation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hodgson, G. 2009. *The Myth of American Exceptionalism*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Hoff, J. 2008. *Dreams of Perfectibility: A Faustian Foreign Policy from Woodrow Wilson to George W. Bush*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollander, P. 1992. *Anti-Americanism: Critiques at Home and Abroad, 1965-1990*. Oxford: Oxford University Press.
- Holub, R. 1992. *Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism*. London dan New York: Routledge.
- Hombach, B. 2000. *The Politics of the New Centre*. Cambridge: Polity Press.
- Hughes, G dan Dockrill, SK 2006, 'Introduction: The Cold War as History'. Dalam: Dockrill, SK & Hughes, G. (eds). *Palgrave Advances in Cold War History*. Palgrave Macmillan.
- Huntington, 1999. The Lonely Superpower. *Foreign Affairs*. New York: The Council on Foreign Relations.
- Ignatieff, M. 2005. *American Exceptionalism and Human Rights*. Princeton: Princeton University Press.
- Ignatieff, M. 2005a. Introduction: American Exceptionalism and Human Rights. Dalam: Ignatieff, M. 2005. *American Exceptionalism and Human Rights*. Princeton: Princeton University Press: 1-26.
- Ikenberry, John G. dan Kupchan, Charles A. 1990. The Legitimation of Hegemonic Power, in: Rapkin, David P. (ed.): *World Leadership and Hegemony*. Boulder, Col./London: Lynne Rienner: 49-69.
- Jacquemond, R. 1992. Translation and Cultural Hegemony: The Case of French/Arabic Translation. Dalam: Lawrence Venuti (ed.), *Rethinking Translation*, Routledge, London: 139-158.
- James, H. 2004. A Historical Perspective on the International Monetary System. Dalam: Nauschnigg, F. dan Just, C. (eds.). *60 Years of Bretton Woods – The Governance of the International Financial System – Looking Ahead*. Proceedings of OeNB Workshops No. 3: 51-63.
- Jessop, B. 2003. Putting Hegemony in Its Place. *Journal of Critical Realism*. Vol. 2, No. 1: 138-148. London: The International Association for Critical Realism
- Joseph, Jonathan. 2002. *Hegemony: A Realist Analysis*. Routledge
- Joffe, J. 2004. *Nations We Love to Hate: Israel, America and the New Antisemitism*. Artikel perkuliahan untuk Pusat Studi Jerman (*the Center for German Studies*) di Ben Gurion University. Dayton: Sicsa.
- Jones, S. 2006. *Antonio Gramsci*. New York: Routledge.
- Jiemin, G. 2005, *Cultural Power and Cultural Conflict*, <http://www.crvp.org/book/Series03/III-20>, download 4 Juli 2005.
- Jiantao, H. 2007. Hurricanes from the South: On the Situations and Reasons of Canadian Americanization since World War 2, *Korean Review of Canadian Studies*, South Korea, Volume 13: 39-67.
- Joo, J. 2009. *Foreign Is No Longer Foreign: Globalization, Hollywood and Asian Film Industries*. Hankuk University of Foreign Studies.
- Kagan, R. 2002. Power and Weakness. *Policy Review*. No. 113.
- Kalyvitis, S. dan Vlachaki, I. 2008. *Democratic Aid and the Democratization of Recipients*. Social Science Research Network.
- Kaplan, R. D. 2003. America and the Tragic Limits of Imperialism. *The Hedgehog Review*: 56-76. Virginia: [Institute for Advanced Studies in Culture, University of Virginia](http://www.instituteofadvancedstudies.org/).

- Kasiyarano. 2014. American Dream: The American Hegemonic Culture and its Implications to the World. *Humaniora*. Vol. 26: 13-21
- Keohane, R. O., 1984, *After Hegemony*. Princeton: Princeton University Press, N.J.
- Kellar, Ronald Leslie. 2001. *European Union: US Hegemonic Competitor*. (Tesis master). Naval Postgraduate School Monterey California.
- Kirk. R. 1993. *America's British Culture*. New Brunswick, Nj: Transaction Publishers.
- Klare, M.T. 1992. US Military Policy in the Post-Cold War Era. Dalam: Miliband, R. dan Panitch, L. (ed.) *Socialist Register 1992*. The Merlin Press, London.
- Klein, J. T. 2005. Humanities, Culture, and Interdisciplinarity: The Changing American Academy. New York: State University of New York Press, 131-142.
- Klein, J. T., dan Newell, W. H. 1997. Advancing interdisciplinary studies. Dalam: J. Gaff & J. Ratcliff (Eds.), *Handbook of the undergraduate curriculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Knauff, B. M. 2007. Provincializing America Imperialism, Capitalism, and Counterhegemony in the Twenty-first Century. *Current Anthropology* Vol. 48, No. 6: 781-805.
- Koh, H.H. 2003. On American Exceptionalism. *Faculty Scholarship Series*. Paper 1778.
- Kroenig, M. dan Ratner, A. 2007. How Globalization Went Bad. *Foreign Policy*. Vol. 158: 48-54.
- Layne. 1998. Rethinking American Grand Strategy: Hegemony or Balance of Power in the Twenty First Century? *World Policy Journal*. Vol. 15: no.2: 8-28. California: SAGE Publication, Inc.
- Lénárt, L. 2003. Sir Winston Spencer Churchill and the Movement of the Unification of Europe. *European Integration Studies, Miskolc*, Vol. 2, No. 2: 17-28.
- Lendman, S., dan Asongu, J.J. 2007. *The Iraq Quagmire: The Price of Imperial Arrogance*. Lawrenceville, GA: Greenview Publishing Company.
- Levy, J. 1983. *War and the Modern Great Power System, 1495-1975* Lexington: University Press of Kentucky,
- Lijphart, A. 1971. Comparative Politics and the Comparative Method. *The American Political Science Review*, Vol. 65, No. 3: 682-693.
- Lind, Michael. 2007. Beyond American Hegemony. *The National Interest*. Washington and New York: New America Foundation,
- Litwak, Robert S. 2000. *Rogue States and U.S. Foreign Policy: Containment After the Cold War*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Lohof, B. A. 1978.** *Through the Eyes of the World: International Essays in American Studies*. Delhi: The Macmillan Company of India.
- Luck, E. C. 2003. American Exceptionalism and International Organization: Lessons from the 1990s. Dalam: Foot, R. (eds.). *US Hegemony and International Organizations*. New York: Oxford University Press: 25-48.
- Luke, T. 2006. Alterity or Antimodernism: A Response to Versluis. *Teleos*. No. 137: 131- 142
- Lukes, S. 1974. *Power: A Radical View*. London: Palgrave Macmillan.
- Lum, T., Morrison, W. M. dan Vaughn, B. 2008. China's "Soft Power" in Southeast Asia. *CRS Report for Congress*. Congressional Research Service.
- Lundestad, G. 1990. The American "Empire" and Other Studies of US Foreign Policy in a Comparative Perspective. Oxford University Press, Oxford.
- Lutherová, S.G. 2010. Before and After: the Phenomenon of Czechoslovakia's "Velvet" Revolution in Narratives by its "Youngest Witnesses". *Sociológia* 42: 671-690.
- MacQueen, B. 2013. *An Introduction to Middle East Politics*. London: Sage.
- Madsen, D. L. 2010. The West and Manifest Destiny. Dalam: Rowe, J. C. (ed.). *A Concise Companion to American Studies*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
- Mahbubani, K. 2008. *The New Asian Hemisphere*. New York: Public Affairs.
- Makins. C. J. 2003 'Power and Weakness' or Challenge and Response? *Reflections on the Kagan Thesis*. Atlantic Council of the United States.
- Mann, M. 2008. American Empires: Past And Present. *Canadian Review of Sociology and Anthropology*. TheFindArticles.com.
- Markovits, Andrei S. 2004. *European Anti-Americanism (and Anti-Semitism): Ever Present Though Always Denied*. Center for European Studies. Working Paper Series No. 108.
- Matsuda, M. dan Ohara, K. 2008. Hegemony and the Elaboration of the Process of Subalternity. Dalam: Howson, R. dan Smith, K. (eds.). *Hegemony Studies in Consensus and Coercion*. New York: Routledge, 51-62

- Matzner, E. 2002. *Globalisation in a Monopolar World*. http://www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2002/files2002/Matzner_Globalisation.pdf
- McCrisken, T.B. 2002. Exceptionalism. Dalam: DeConde, A., Burns, R. D. dan Logevall, F. (eds.) *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movements and Ideas*. New York: Charles Scribner's Sons.
- McDougall, W. A. 2004. *The Constitutional History of U.S. Foreign Policy: 222 Years of Tension in the Twilight Zone*. Philadelphia: Center for the Study of America and the West at the Foreign Policy Research Institute.
- McDowell, T. 1948. *American Studies*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- McEvoy-Levy, S. 2001. *American Exceptionalism and US Foreign Policy: Public Diplomacy at the end of the Cold War*. New York: Palgrave Macmillan
- Mearsheimer, J. J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.
- Meunier, S. 2005. *Anti-Americanisms in France*. Paper. Princeton: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.
- Miller, G., dan Johnson-Laird, P. N. 1976. *Language and Perception*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Miller, T. 2005. Anti-Americanism and Popular Culture. *Anti-Americanism Working Papers*. Budapest, Hungary: Central European University.
- Mills, A. 2013. *American Theology, Superhero Comics, and Cinema: The Marvel of Stan Lee and the Revolution of a Genre*. London: Routledge.
- Minderop, A. 2006. *Pragmatisme, Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Modolski, G. 1987. The Study of Long Cycles. Dalam : Ders. (Ed.), *Exploring Long Cycles*. Lynne Rienner. Boulder: 1-15.
- Modolski, G. dan Thompson, W.R. 1996. *Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Politics and Economies*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Morgenthau, H. J. 1973. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Fourth Edition. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Murphy, G. 2005. *Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire*. Durham, SC: Duke University Press.
- Murphy, P. D. 2003. Without Ideology? Rethinking Hegemony in the Age of Transnational Media. Dalam: Artz, L. dan Kamalipour, Y. R. (eds.) *The Globalization of Corporate Media Hegemony*. Albany: State University of New York Press.
- Murray, L. G. 2008. *Clinton, Peacekeeping, and Humanitarian Intervention: Rise and Fall of a Policy*. New York: Routledge.
- National Intelligence Council. 2004. *Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project*. Washington, DC: NIC.
- Natrajan, B. 2003. Masking And Veiling Protests: Culture And Ideology In Representing Globalization. *Cultural Dynamics*. Vol. 15, No. 2: 213-235.
- Newell, W.H dan Green, W. J. 1982. Defining and Teaching Interdisciplinary Studies. *Improving College and University Teaching*. Vol. 30:1.
- Noor, F. A. 2005. Uncle Sam to the Rescue? The Political Impact of American Involvement in ASEAN Security and Political Issues in the Wake of 9/11. Dalam: Judt, Tony dan Lacorne, Denis.(eds). *With Us or Against Us*. New York: Palgrave Macmillan
- Noorani, Y. 2007. Redefining Resistance: Counterhegemony, the Repressive Hypothesis and the Case of Arabic Modernism. Dalam: Chalcraft, J. dan Noorani, Y. (eds.) *Counterhegemony in the Colony and Postcolony*. New York: Palgrave Macmillan™, 75-99.
- Nye, Jr. J. S. 2002a. The Paradox of American Power: Why the World's only Superpower can't Go it Alone. New York: Oxford University Press.
- Nye, Jr. J. S. 2002b. Limits of American Power. *Political Science Quarterly*. Vol. 117, No. 4: 545-559.
- Nye, Jr. J.S. 2007. Culture, Soft Power, and 'Americanization'. Dalam: Held, D., Moore, H.L., dan Young, K. (eds.). *Cultural Politics In A Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation*. Oxford: Oneworld Publications.
- Nye, Jr. J. S. 2008. *The Powers to Lead*. New York: Oxford University Press.
- Tomlinson, J. 1991. *Cultural Imperialism: a Critical Introduction*. London: Continuum.
- O'Brien, P. K. 2002 'The Pax Britannica and American Hegemony: Precedent, Antecedent or Just another History?', in O'Brien & Clesse (eds.) *Two hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941- 2001*. Aldershot & Burlington: 3-64.

- O'Connor, B. dan Griffiths, M. (ed.). 2006. *The Rise of Anti-Americanism*. New York: Routledge.
- Odom, W. E dan Dujarric, R. 2004. *America's Inadvertent Empire*. New Haven & London: Yale University Press.
- Oha, O. 2008. Glocalizing Americanness: Language and American Identity in Nigerian Video Films. Dalam: Glass, W.R. dan Graff, A. (eds.). *The Americanist: American Popular Culture as Import and Export*. Vol. 24. Warsaw University: The American Studies Center.
- Oldenziel, R. 2007. Is Globalization a Code Word For Americanization? Contemplating McDonalds, Coca-Cola, and Military Bases. *Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis* 4 Nr. 3: 84-106.
- Olsson, J, and Bolton, K. 2010. Mediated America: Americana as Hollywoodiana. In: Olsson, J, and Bolton, K. *Media, Popular Culture, and the American Century*. Stockholm: National Library of Sweden.
- Pease, D. 2007. Exceptionalism. Dalam: Burgett, B. dan Glenn Hendler, G. (eds.). *Keywords for American Cultural Studies*. New York: New York University Press, 108-112.
- Pedersen, T. 2002. Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. *Review of International Studies* 28: 677-696.
- Peters, G dan Woolley, J.T. *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu>.
- Prestowitz, C. 2003. *Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions*. New York: Basic Books.
- Regev, M. 2003. Rockization': Diversity within Similarity in World Popular Music. Dalam: Beck, U., Sznajder, N., dan Winter, R. (eds.) *University Global America? The Cultural Consequences of Globalization*, Liverpool Press: 222-234.
- Riper, T.V. 2008. America's Cleanest Cities. *Forbes*
- Ruggenthaler, P. 2011. The 1952 Stalin Note on German Unification: The Ongoing Debate. *Journal of Cold War Studies*. Vol. 13, No. 4: 172-212.
- Ruccio, D. F. 2007. Capitalism. Dalam: Burgett, B. dan Hendler, G. (eds.) *Keywords for American Cultural Studies*. New York: New York University, 32-36.
- Robel, S. 2001. *Hegemonie in den Internationalen Beziehungen: Lehren aus dem Scheitern der 'Theorie Hegemonialer Stabilität'*, Dresdner Arbeitspapiere Internationale Beziehungen, DAP- 2, Dresden
- Robinson, D. 1997. *Translation and Empire: Postcolonial Approaches Explained*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Robinson, W. I. 2005. Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. Vol. 8, No. 4, 1-16.
- Rojas, C. A. A. 2005. Hegemonic Cultures and Subaltern Cultures: Between Dialogue and Conflict. *Review*, Vol. 28, No. 2: 187-210.
- Romano, F. 2006. Clinton and Blair: The Political Economy of the Third Way. New York: Routledge.
- Rorex, P. D. 2002. Perspectives on American Studies. *Studies in Languages and Language Teaching*. Faculty of Art, Manhidol University, Thailand.
- Ross, D. 1991. *The Origins of American Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rothkopf, D. 1997. In Praise of Cultural Imperialism? *Foreign Policy*. Hal. 38-53.
- Rowe, J.C.2010. Culture, US Imperialism, and Globalization. Dalam: Rowe, J. C. (ed.). 2010. *A Concise Companion to American Studies*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 284-302.
- Safrin, S. 2008. The Un-Exceptionalism of U.S. Exceptionalism, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vol.41: 1307-1354.
- Samuel, L. R. 2012. *The American Dream: A Cultural History*. Syracuse, NY, Syracuse University Press.
- Sánchez, P. M. 2007. *Panama Lost? US Hegemony, Democracy, and the Canal*. Gainesville, Florida: University Press of Florida.
- Saravanamuttu, J. 2010. *Malaysia's Foreign Policy: the first Fifty Years : Alignment, Neutralism, Islamism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sardar, Z. dan Davies, M. W., 2004. *Why Do People Hate America?* Cambridge: Icon Books Ltd.
- Schaffner, C. 1997a. Strategies of Translating Political Texts. Dalam: Trosborg, Anna (ed). *Text Typology and Translation*. Amsterdam: John Benjamins: 119-144.
- Schäffner, C. (ed.) 1997b. *Analyzing Political Speeches*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Schlesinger. A. Jr. 1967. Origins of the Cold War. *Foreign Affairs*, 46: 22-52
- Schmidt, B.C. dan Williams, M.C. 2008. The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives versus Realists. *Security Studies* 17, no. 2: 191-220
- Schroeder, P. 2003. *Is the US an Empire? History News Network*. George Mason University.

- Scott, A.J. 2002. A New Map of Hollywood and the World. ERSA conference papers, European Regional Science Association.
- Shapiro, J. dan Witney, N. 2009. *Towards a Post-American Europe: A Power Audit of EU-US Relations*. The European Council on Foreign Relations, London.
- Sheetz, M. 2004. *Is America Vital to European Peace?* Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University.
- Shephard, R. H. E. *Czechoslovakia: The Velvet Revolution and Beyond*. New York: St. Martins, 2000.
- Shryock, R. H. dkk. 1950. A Statement by the Committee on American Civilization of the American Council of Learned Societies. *American Quarterly*. Vol. 2.
- Smith, Steven K. dan Wertman, Douglas A. 1992. Redefining U.S.-West European Relations in the 1990s: West European Public Opinion in the Post-Cold War Era. *Political Science and Politics*, vol. 25, no. 2: 188-195.
- Snow, N. 2009. Rethinking Public Diplomacy. Dalam: Snow, N. dan Taylor, P.M. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York: Routledge
- Snidal, D. 1985. The Limits of Hegemonic Stability Theory. *International Organization*, 39: 579-614.
- Soderberg, N. 2005. *The Superpower Myth: the Use and Misuse of American Might*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.
- Spiro, H. J. 1988. "Anti-Americanism in Western Europe." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 497 (May): 120-32.
- Stead, W. T. 1902. *The Americanisation of the World or the Trend of the Twentieth Century*. London: The "Review of Reviews" Office, Mowbray House, Norfolk Street.
- Stiglitz, J. E. 2006. *Making Globalization Work*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Strinati, D. 2004. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London dan New York: Routledge
- Tai, C., Peterson, E. J. dan Gurr, T.R. 1973. Internal Versus External Sources of Anti-Americanism. *Journal of Conflict Resolution* 17.3: 455-84.
- Tema, M. 2011. A Critical Approach to a Possible EU Hegemony: Re-Conceptualizing the 'Power' of the Union in the Light of the Current Crisis. *Journal for European Issues*. Issue 15: 237-247
- The Soviet Nuclear Weapons Program. Dapat diakses pada:
<http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html>
- Totman, Sally-Ann. 2009. *How Hollywood Projects Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Turner, M. dan Hulme, D. 1997. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*, London: MacMillan
- Tversky, B. 1990. Where Partonomies and Taxonomies Meet. Dalam: S. L. Tsohatzidis (Ed.), *Meanings And Prototypes: Studies In Linguistic Categorization*. London: Routledge: 334-344
- Tversky, B., dan Hemenway, K. 1984. Objects, Parts, and Categories. *Journal of Experimental Psychology: General*, No. 113: 169-193.
- Uddin, M.J. dan Laila Ashrafun Joya, L.A. 2007. *Asian Affairs*, Vol. 29, No. 3:1-28.
- Uzgel, I. 2003, Hegemonic Power Box (Hegemon Güç Kutusu), (Ed. Baskın Oran), *Türk Dış Politikası*, Cilt I, İletişim Yayınları, İstanbul., dikutip dari Yilmaz, S. 2010. State, Power, and Hegemony. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 3: 192-205.
- Van Dijk, A.T. 1997. *Discourse as Structure and Process of Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Volume I. London: SAGE Publications
- Van Dijk, T. A. 2006. Discourse and Manipulation. *Discourse & Society*. 17(2): 359-383
- Vayrynen, R. 2003. *International Studies Review*. vol. 5, no. 1: 25-51,
- Veriyawan, W. 2007. *Politik Luar Negeri Amerika di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Vital, D. 1971, *The Survival of Small States: Studies in Small Power/Great Power Conflict*. London/New York: Oxford University Press
- Walker, S. 1994. *Hate Speech: The History of an American Controversy*. Lincoln, dan London: University of Nebraska Press
- Wallerstein, I. 2002. "Three hegemonies", dalam O'Brien, P. K. & Clesse, A. (eds.). *Two hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941-2001*. Aldershot & Burlington: Asgate.
- Waltz, K. N. 1979. *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing.
- Warnock, J. W. 2008. *Creating a Failed State, the US and Canada in Afghanistan*, Black Point: Fernwood Pub. Co
- Watts, D. 2010. *Dictionary of American Government and Politics*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

- Weber, M. 1958. The Three Types of legitimate Rule. Berkeley Publications in Society and Institutions, 4 (1): 1-11
- Weber, M. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. 2 Vols. Berkeley, CA: University of California Press.
- Wenders, W. 1991. *The Logic of Images: Essays and Conversations*, terj. Michael Hofmann. London: Faber and Faber Limited.
- West, C. R. 1982. *Prophecy Deliverance!* Philadelphia: Westminster Press.
- Wettig, G. 1994. Stalin and German Reunification: Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in Spring 1952. *The Historical Journal*. Vol. 37, No.2: 411-419.
- Whitehead, J. W. 2012. The Politics of Fear in America: A Nation at War With Itself. *Huffington Post*, 10 Januari 2012.
- Whitfield, S.J. 2006. The Culture of the Cold War. Dalam: Bigsby, C. (Ed). 2006. *The Cambridge Companion to Modern American Culture*. Cambridge, New York: Cambridge University Press 256-274.
- Wight, M. 1978. *Power Politics*. London: Royal Institute of International Affairs
- William, A. W. 1959. *The Tragedy of American Diplomacy*. Cleveland and New York: The World Publishing Company
- Williams, W. A. 1955. The Frontier Thesis and American Foreign Policy. *Pacific Historical Review*. Vol. 24, No. 4: 379-395.
- William & Mary University. 2015. *Index of American Studies Theses & Dissertations*.
<http://www.wm.edu/as/americanstudies/graduate/research/theses/>
- Winckler, M. 2003. *Super Héros*, Paris: E.P.A.
- Windhu, I.W. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Wood, M. D. 2001. Religions Studies as Critical Organic Intellectual Practice. *Journal of the American Academy of Religion*. Vol 69, No. 1: 129-162. Atlanta: The American Academy of Religion.
- World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington: World Bank.
- Wyne, A. 2006. Questioning the Theory of Hegemonic Continuum. Dalam: Cox, M. (ed.) *Critique: A Worldwide Journal of Politics*. Illinois: Illinois State University.
- Yilmaz, S. 2010. State, Power, and Hegemony. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 3. Vol. 1 No. 3: 192-205.
- Young, I. 2004. Five Faces of Oppression. Dalam: Heldke, Lisa dan O'Connor, Peg. (eds.) *Oppression, Privilege, & Resistance*. Boston: McGraw Hill